M. Arif Rahman

RELASI EKONOMI PESANTREN

imtiyaz

PENGANTAR
PROF. DR. (HC) KH. MA'RUF AMIN

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

M. ARIF RAHMAN

RELASI EKONOMI PESANTREN

Relasi Ekonomi Pesantren

©M. Arif Rahman, 2021
All rights reserved

Penulis: M. Arif Rahman
Lay Out: Ismail Amrulloh
Design Sampul: Ismail Amrulloh

Copyright ©2021
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh:
IMTIYAZ
Jl. Jemurwonosari Gg. IV No. 5 Wonocolo Surabaya
Layanan SMS & Telp.: 085 645 311 110
Email: penerbitimtiyaz@yahoo.co.id

Cetakan I, 2021
x + 262 hal. 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-5779-52-7

KATA PENGANTAR

Prof. Dr (HC) Makruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia

Alhamdulillah, dewasa ini pesantren sudah mulai beranjak menuju kemandirian. Pesantren telah memiliki kesadaran untuk mengembangkan perekonomian. Bahkan terdapat beberapa pesantren telah menjadi pusat perekonomian baru. Pemerintah telah berusaha membantu mewujudkan pemberdayaan pesantren, melalui bank wakaf mikro, Baitul mal wat tamwil (BMT) di berbagai pesantren untuk turut serta menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat, bahkan hal ini dapat juga menjadi *channel* untuk pembiayaan kebutuhan masyarakat. Kedepan kita berharap akan terdapat Lembaga pengelola dana bergulir bagi pesantren; Kreatifitas ekonomi berbasis pesantren juga selayaknya didorong agar nantinya pesantren dapat menjadi pusat-pusat produksi barang dan ekonomi kreatif, sehingga para santri kedepan wajib memiliki ketrampilan, atau

life skill, kemampuan manajemen, serta kemampuan teknis lainnya untuk menuju pesantren dan masyarakat yang Tangguh.

Dalam pandangan saya perekonomian Syariah sudah mulai memiliki pondasi yang kuat seperti koperasi Syariah, asuransi Syariah, reksadana Syariah, perbankan Syariah, Perumahan Syariah, hotel syariah, wisata syariah bahkan Indonesia kedepan harus menjadi pusat keuangan Syariah dunia. Untuk kepentingan hal ini pemerintah telah memiliki fokus terhadap empat hal yaitu penguatan keuangan Syariah, industri halal, pendanaan sosial dan usaha berbasis Syariah serta penguatan kelembagaan dan keuangan Syariah sebagai fokus utama saat ini.

Pesantren memang merupakan sentral utama didalam membangun perekonomian Syariah, terutama untuk proses penguatan dan kelembagaan. Semoga kedepan proses akselerasi dapat ditempuh dan berkembang secara baik hingga pada saatnya perekonomian pesantren dapat berkembang secara baik untuk masyarakat Indonesia; Saya tahu H. Arif Rahman penulis buku "Relasi Ekonomi Pesantren" adalah figur muda yang sangat cinta terhadap keluarga besar pesantren, bahkan tumbuh dan berkembang tidak lepas dari pesantren. Kehadiran buku ini diharapkan akan menjadi bagian dari referensi pengembangan ekonomi pesantren dan menjadi referensi pengembangan ekonomi Syariah, serta menjadi bagian dari kado hari santri tahun 2021.

Jakarta, 10 Oktober 2021

PROLOG

Erick Thohir
Menteri BUMN

Eksistensi pesantren menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem bangsa Indonesia. Dalam bidang pendidikan, pesantren telah menjadi penyangga dimensi religius dan moralias bangsa. Secara sosial, pesantren menjadi sub kultur dari masyarakat yang terus merawat tradisi lokal dalam bingkai keadaban dan keIslaman. Komitmen kebangsaaannya telah teruji dari masa ke masa. Bahkan pesantren memiliki jejak historis dengan upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Telisik historis ini bisa dilihat dari kiprah *Nahdlatu Tujjar* sebagai salah satu serikat dagang yang aksis pada masa penjajahan hingga awal kemerdekaan.

Kiprah pesantren dalam konteks membangun ekonomi keumaatan di masa silam ini, telah menemukan momentum kebangkitannya pada saat ini. Dimana, populasi pesantren yang sangat besar, sumber daya manusia yang melimpah, serta

dominannya gerakan ekonomi syariah di Indonesia, merupakan peluang strategis yang harus dioptimalkan. Sebagai bagian dari pemerintah, saya optimis bahwa sinergi antara pesantren, pemerintah, dunia perbankan dan kalangan profesional dapat mendongkrak kemajuan ekonomi Nasional. Hanya sanya, kita perlu untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi teknis pada sumber daya manusia lokal yang akan mengelola sektor-sektor wirausaha.

Garapan potensi terbesar yang sangat memungkinkan untuk dikelola oleh pesantren adalah sektor-sektor industri halal dan syariah. Mulai industri makanan halal, hotel syariah, media dan perfilman, style syariah, wisata religi dan lainnya. Untuk menggarap keseluruhan potensi ini diperlukan desain bisnis yang inovatif, SDM yang kompleks, jaringan dan kerjasama yang kuat serta kebijakan yang berpihak.

Melalui buku "Relasi Ekonomi Pesantren" yang ada dihadapan pembaca ini, anda digiring pada sebuah pemahaman dan wawasan bagaimana seharusnya mengelola sebuah industri berbasis pesantren. Mulai *Added Value* pesantren yang menjadi ruh bisnis para kiai dan santri, etos kerja masyarakat pesantren, pengembangan kapasitas SDM hingga peluang dan desain bisnis pesantren yang masih kompatible dengan kondisi saat ini. Dengan membaca buku ini, anda seakan berfusi dari dimensi klasik pondok pesantren menuju peradaban modern yang lebih masalahat.

Gagasan Mas Arif Rahman tentang upaya-upaya pengarus utamaan ekonomi pesantren dalam menggarap sektor-sektor industri tersebut sekaligus dapat menjadi penyeimbang atas sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, Ahlak luhur yang dimiliki oleh para santri dan masyarakat pesantren secara umum akan menggerus dominasi kapitalistik. Hingga pada saatnya akan dapat mewujudkan tujuan utama dari ekonomi Islam, yaitu Kadaulatan keberdayaan ekonomi kecil dan menengah. Dengan ini, saya berharap bahwa gagasan faktual yang diuraikan dalam buku dapat kita wujudkan bersama-sama. Dan yang terpenting, semoga ini menjadi kado terindah di hari santri tahun 2021.

Jakarta, 03 Oktober 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
KH. Ma'ruf Amin iii
PROLOG
Menteri BUMN v
PENGANTAR PENULIS .....
DAFTAR ISI vii

BAB I GENEOLOGI EPISTEMOLOGI EKONOMI PESANTREN 1
A. Historisitas ekonomi pesantren 1
B. Komitment pesantren dalam dunia Pendidikan dan ilmu pengetahuan 10
C. Framing Pemikiran Pengasuh Pondok Pesantren 16
D. Geliat NU dalam peningkatan Eknomi Ummat .. 20

BAB II ADDED VALUE EKONOMI PESANTREN 57
A. Peran kyai dalam menjaga akhlak pengusaha 57
B. Nilai nilai agama dalam pandangan penguasaha 63
C. Pengasuh pesantren itu ekonom 66
D. Doa dan Kekuatan Spiritual Ekonomi Pesantren 75

BAB III MEMBACA PELUANG BISNIS PESANTREN **83**
A. Jaringan Pesantren Bisnis 83
B. Life skill di Pesantren 89
C. Pesantren Kelautan 102
D. Pesantren Agribis 106
E. Pesantren Design and Build 111
F. Pesantren Entrepreneouer 113
G. Pesantren Innovative 120

BAB IV PESANTREN SEBAGAI MINIATUR EKONOMI SYARIAH 129
A. Masyarakat ekonomi Syariah dan keterlibatan pesantren .. 129
B. Potensi pengembangan UMKM di Pesantren 145
C. Halal Value Chain dan Ekonomi Pesantren 157

BAB V OPTIMASI KELEMBAGAAN EKONOMI PESANTREN 181
A. Peningkatan tata kelola organisasi dan tata laksana usaha Pesantren 181
B. Peningkatan kapasitas SDM dan Produktivitas 190
C. Penguatan Jaringan kerjasama dan kemitraan usaha pesantren 200
D. Akses Permodalan pada lembaga keuangan Syariah 206

BAB VI PESANTRENPRENUER MENUJU KEMANDIRIAN PESANTREN 213
A. Pendidikan kemandirian pesantren 213

B. Revitalisasi Kelembagaan Koperasi pesantren .....
C. Peningkatan Skill Santriprenuer dan Sosioprenuer 229
D. Inovasi Teknologi Produksi Pesantrenprenuer 234
E. Ekspansi dan digitalisasi pasar 241

EPILOG .....
DAFTAR PUSTAKA 247
BIODATA PENULIS 261

Pesantren adalah tempat menempa diri untuk menjadi manusia yang baik secara akhlaq, serta baik secara keyakinan. Pesantren menjadi kekuatan lahir dan batin bagi bangsa Indonesia

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI-2019-2024

BAB I

GENEOLOGI EPISTEMOLOGI EKONOMI PESANTREN

A. Historisitas Ekonomi Pesantren

Islam datang ke Indonesia melalui jalan yang damai. Ada empat teori yang menjelaskan asal muasal kedatangan Islam di Nusantara yaitu:[1] *Pertama,* teori India. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam di Nusantara dibawa oleh pedagang India pada abad ke-12 Masehi. Pelopor dari teori ini adalah sarjana-sarjana yang berasal dari Belanda seperti Pijnappel, Snouck Hurgronje, J. P. Moquette dan Fatimi. Landasan dari teori ini adalah ditemukannya batu-batu nisan muslim yang mirip dengan batu nisan yang ada di India. Selain itu sedikitnya fakta yang menyebutkan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara juga menjadi dasar dari teori ini.

Kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, Crawfurd, Niemann, dan de Hollander.

1 Husain, S. B. *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia.* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)

Dasar teori ini adalah sumber historiografi tradisional yang ditemukan mengungkapkan bahwa orang-orang Arab yang mengislamkan kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh. Selain itu, gelar-gelar raja Pasai adalah al-Malik yang mendapat pengaruh dari Mesir. Berbeda dengan gelar-gelar dari India dan Persia yakni Shah atau Khan. Mengenai awal mulanya Islam masuk ke Nusantara, sebuah seminar digelar pada tahun 1969 dan 1978, disimpulkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriah.

Ketiga, teori Persia. Pencetus teori ini adalah P.A.Hoesein Djajadiningrat yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Alasan beliau mengemukakan teori ini adalah karena ditemukannya persamaan budaya antara Nusantara dengan Persia. *Keempat,* teori Cina. Pada abad ke-9 Masehi, para muslim Cina mengungsi ke Jawa Kedah dan Sumatra karena adanya penumpasan penduduk di wilayah Kanton dan Cina Selatan pada masa Huan Chou. Hal itu berdampak pada peninggalan arsitektur keislaman di Jawa yang banyak dipengaruhi budaya Cina. Masuknya Islam secara damai ke Nusantara telah membawa banyak perubahan. Wilayah Nusantara yang sebelumnya didominasi kerajaan Hindu dan Budha menjadi didominasi oleh kerajaan Islam. Hal ini karena Islam masuk ke Nusantara pada masa akhir kejayaan kerajaan Hindu dan Budha. Masuknya agama Islam berbeda dengan masuknya agama Kristen yang dibawa oleh para penjajah dengan cara konialisme. Hal ini yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Nusantara sehingga Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia hingga saat ini.

Berbicara mengenai Islam di Indonesia, pasti sangat erat kaitannya dengan pesantren. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren memiliki keunikan yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lain, terutama lembaga pendidikan yang berasal dari Barat.[2] Agama Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini telah membuat banyak sekali pesantren berdiri di Indonesia.

2 Husain, S. B. *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia.* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)

Hadirnya pesantren bukan hanya sebatas sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Tapi lebih dari itu, pesantren memiliki peran lain yang tak kalah pentingnya. Bahkan pada saat masa kolonialisme, peran santri begitu kuat dalam melawan para penjajah. Pada masa pra kemerdekaan, tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, KH. Mas Mansyur, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Kahar Muzakkir memiliki pengaruh yang besar dalam merealisasikan kemerdekaan Indonesia.[3]

Sebenarnya, ada banyak potensi dan manfaat yang dapat kita rasakan dengan berdirinya suatu pesantren. Selama ini, sebagian besar orang hanya melihat potensi pesantren dalam bidang pendidikan agama, pendidikan sosial dan politik. Padahal pesantren memiliki potensi dalam bidang kesehatan, pengembangan teknologi, pemulihan lingkungan hidup dan bidang yang paling utama adalah pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa fungsi pesantren yaitu sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of exellence*), mencetak sumber daya manusia (*human resource*) dan juga melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).[4]

Potensi pemberdayaan ekonomi pesantren bisa lebih dikembangkan untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar dan memberikan manfaat yang bisa mengangkat penghasilan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada pengurangan kemiskinan umat di negara tercinta ini. Apabila model pemberdayaan ekonomi pesantren dikembangkan dan dijalankan secara luas dalam suatu wilayah, misalnya kota atau provinsi, maka hal ini akan mengurangi jumlah kemiskinan di masing-masing wilayah tersebut dan pada akhirnya, kesejahteraan di daerah tersebut akan meningkat.

3 Hidayat, T*Peran Pesantren dalam Mengusir Segala Bentuk Penjajahan*. Diambil 23 Mei 2019, dari Republika Online website: https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/10/17/of6exr396-peran-pesantren-dalam-mengusir-segala-bentuk-penjajahan. 2016, Oktober 17).

4 Nadzir, M. *Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren.* (Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 2015), 37–56.

Dalam tilikan sejarah pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Tertua dalam sejarah nasional yang hingga kini masih merupakan asset bangsa yang cukup mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga dakwah, pesantren mempunyai peran besar dalam pembinaan umat. Pondok pesantren dapat dilihat sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah mencetak kader-kader ulama, mencerdaskan masyarakat, berhasil menanamkan semangat kewiraswastaan, semangat berdikari, dan memiliki potensi untuk menjadi pelopor pembangunan masyarakat kedepan.

Cakupan kegiatan pondok pesantren semakin luas dan mendalam, kegiatan tidak lagi terbatas pada pendidikan agama, dakwah, pembinaan umat dan kegiatan sosial lainnya, tetapi juga telah merambah pada kegiatan ekonomi. Pondok pesantren yang cukup besar jumlahnya dan tersebar di wilayah pedesaan atau pelosok, menjadikan lembaga ini memiliki posisi yang strategis dalam mengemban peran-peran penting pengembangan pendidikan maupun sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Terlebih lagi dewasa ini pondok pesantren telah mengalami berbagai pengembangan internal yang memungkinkan besarnya peluang pondok pesantren untuk berperan sabagai agent pembangunan dalam rangka menjembatani dan memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat pedesaan bahkan hingga perkotaan.

Dalam konteks ini, maka pondok pesantren dipandang memiliki potensi besar dalam pembangunan di disektor ekonomi riil yaitu di dalam mengembangkan agribisnis, ketahanan pangan dan wirausaha lainnya. Pondok pesantren dengan tenaga-tenaga usia muda yang dimiliki semangat yang kuat merupakan sumber daya manusia yang potensial tidak hanya dalam menyebarkan ilmu agama namun juga dalam penyebaran informasi dan inovasi-inovasi khususnya di sektor ekonomi.

Selama ini kegiatan di pondok pesantren lebih banyak diarahkan pada kegiatan keagamaan sedangkan kegiatan keterampilan di bidang usaha dirasakan masih perlu untuk lebih ditingkatkan. Mengingat pondok pesantren terdapat di daerah pedesaan dengan usaha pokok pembinaannya di bidang keduniawian perlu untuk lebih diintensifkan

kearah yang lebih produktif. Pondok pesantren dengan potensi sumber daya manusia yang melimpah seharusnya bisa menjadikan badan usaha yang mampu bersaing di masyarakat umum, dengan memproduksi barang yang berkualitas dengan harga jual yang terjangkau. Karena bukankah pengabdian kepada masyarakat adalah prinsip yang dipegang teguh oleh pesantren. Kita bisa melihat Pondok pesantren Sidogiri misalnya yang mempunyai perbankan (BMT), perusahaan air minum yang besar dan mempunyai Mini market yang tersebar di berbagai wilayah.[5]

Kemandirian pondok pesantren dalam mengelola kelembagaan pendidikannya serta kemandirian dalam membiayai aktifitasnya merupakan potensi kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia. Kehadiran koperasi pondok pesantren (Kopontren) yang selama ini belum memenuhi standar koperasi yang diharapkan dapat membantu ekonomi pondok pesantren dan masyarakat sekitar pesantren, bahkan cenderung menjadi pasar produk impor atau lebih banyak bergeser menjadi koperasi simpan pinjam, semestinya diarahkan menjadi lembaga pasar komoditas hasil produksi pesantren bersangkutan.

Upaya pembuatan jaringan usaha antar pesantren yang diperkuat dengan lembaga kopontren diawali dengan kerjasama antar pesantren untuk saling memenuhi permintaan kebutuhan produksi dan pemasaran hasil produksi pesantren.[6] Pola kerjasama yang terangkum dalam jaringan usaha pesantren dapat dikembangkan pada berbagai industri yang menjadi keahlian masing-masing pesantren.

Kerjasama usaha antar pesantren akan menciptakan kopontren masing-masing pesantren menjadi pasar seluruh barang yang dihasilkan oleh seluruh pesantren yang bekerjasama, dengan

5 Lihat Pondok Pesantren Sidogiri hingga saat ini menjadi *Icon* pesantren yang sukses mengembangkan Usaha disektor ekonomi baik Jasa perbankan dengan BMTnya maupun Barang dengan usaha Mini Market yang berkembang seperti Toko Basmalahnya.

6 Kalau kita contohkan misalnya pesantren A menjadi pemasok atau pengirim bahan baku bagi industri pakan ayam yang dikelola pesantren B, dan hasil produksi pakan ayam disalurkan kepada pesantren C yang mengelola peternakan ayam, demikian pula hasil produksi peternakan ayam yang dihasilkan pesantren C dipasarkan ke seluruh pesantren yang telah bekerjasama dalam jaringan usahanya di pondok pesantren.

demikian kopontren menjadi pasar kebutuhan hidup masyarakat disekitar pesantren, maka disetiap daerah yang memiliki pesantren tidak lagi membutuhkan *Mart-Mart* yang saat ini menjalar dan cenderung memasarkan produk-produk impor.

Keberadaan kopontren disetiap daerah yang memasarkan hasil produksi seluruh pesantren di Indonesia akan memberikan ketenangan kepada masyarakat Muslim Indonesia dalam mengkonsumsi kebutuhan hidupnya, tidak akan ada lagi lebel halal dalam kemasan barang yang diragukan. Keuntungan lain ketika jaringan usaha antar pesantren telah terwujud adalah lahirnya santri-santri yang mumpuni dalam ilmu-ilmu agama dan piawai dalam mengelola usaha untuk mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat, hal ini terjadi karena kegiatan produksi yang berbasis keahlian pesantren dan keberadaan kopontren menjadi pusat pembelajaran kewirausahaan yang langsung dapat diimplementasi oleh santri. Pada akhirnya dakwah yang dilakukan menjadi dakwah lahir bathin.

Kalau kita lihat munculnya gerakan sosial Islam awal abad ke-20 di Nusantara sebagai konsekuensi logis meningkatnya jumlah kaum terpelajar, munculnya Sarekat Dagang Islam (SDI) 1905 sebagai embrio gerakan sosial Islam yang disusul dengan berdirinya Sarekat Islam tahun 1912 (SI dianggap sebagai kelanjutan dari SDI) dan Muhammadiyah 1912 merupakan respons atas kondisi internal umat Islam yang nyaris sempurna kolaps serta penetrasi pihak luar melalui kolonialisme dan imperialisme Barat. Kemunculan Muhammadiyah pada 1912 di Yogyakarta dan Nahdatul Ulama (NU) pada 1926 di Surabaya juga dideklarasikan sebagai Kemunculan gerakan sosial Islam dianggap sebagai kebangkitan kelompok sarungan yang mengadaptasikan konsep-konsep Islam yang bersifat ekslusif dengan pemikiran modern yang bersifat rasional dan fungsional.

Secara historis, perjalanan ekonomi Islam di Indonesia melewati beberapa fase, sebelum membahas aktivitas gerakan ekonomi pada tahun 1905-1945 terlebih dahulu membahas aktivitas gerakan ekonomi Islam pada masa kesultanan diantaranya ialah:

1. Fase Pertama (Masa Kesultanan Islam, 700-1900 M)

Buku Kunci Tarikh Islam karya Fachoeddin Alkhahiri yang terbit di Bandung medio Desember 1938, adalah salah satu literature yang dapat menjadi pegangan dalam penelusuran tersebut. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa Islam telah masuk ke Aceh pada sekitar tahun 1050 masehi.[7] Kembali ke masalah waktu masuknya dan perkembangan Islam di Nusantara, catatan sejarah menyatakan kesultanan Leran di Gresik Jawa Timur didirikan pada 1100 M dan Samudra Pasai di Sumatera didirikan pada 1275 M. Islam diperkenalkan oleh para niagawan muslim pada saat melakukan transaksi niaga di pasar.[8]

Tentu saja, dakwah Islam diyakini menjadi poros utama dalam penetrasi yang dilakukan oleh para niagawan muslim dari jazirah Arab. Pada fase ini aktivitas gerakan ekonomi Islam berlangsung secara estafet yang didukung oleh kehadiran kesultanan-kesultanan Islam secara politis di seluruh Nusantara. Bukti kuat aktivitas ekonomi Islam pada masa kesultanan tersebut adalah mata uang emas yang berlaku saat itu. Bahkan, keberadaan mata uang dinar tidak hanya di samudra pasai, tetapi juga di Aceh, Banten, Cirebon, Banjarmasin, dan Gowa Makassar. Fase ini berlangsung hingga penjajahan Belanda menghapus kesultanan Islam satu per satu dan perjalanan waktu mendekati awal abad ke-19.

2. Fase kedua (Masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia, 1900-1945)

Hari kebangkitan Nasional (harkitnas) boleh saja ditetapkan tanggal 20 Mei, yang diambil dari lahirnya Boedi Oetomo. Tetapi catatan sejarah tidak dapat dibohongi apabila ternyata organisasi yang lebih dahulu lahir tiga tahun sebelum BU adalah Sarekat Dagang Islam.[9] Organisasi yang lahir pada 16 Oktober 1905 ini bukan hanya menjadi pelopor kebangkitan kesadaran nasionalisme, melainkan juga menjadi pelopor aktivitas gerakan

7 Fachroeddin Alkhahiri, *Kunci Tarikh Islam, dalam: Risalah Politik A. Hassan*, *Tiar Anwar Bachtiar (ed)*, (Jakarta: Pembela Islam Media, 2013), 225

8 Fachroeddin Alkhahiri, *Kunci Tarikh Islam,*. 115

9 Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejara*, (Bandung: Salamadani, 2009) 337

ekonomi Islam pada fase ke dua. Pada masa tersebut, setelah SDI berdiri pada 1905, berturut-turut lahirlah persyarikatan (organisasi) Islam yang ikut mewarnai gerakan ekonomi Islam pada masa kedua ini. Sebut saja di antaranya Muhammadiyah, yang berdiri tanggal 18 November 1912, dan NU yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926, seluruh organisasi Islam tersebut terus bertahan hidup dan memberikan konstribusi yang besar dalam memperjuangkan Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

3. Tipologi Gerakan Sosial Ekonomi Islam Indonesia

Dalam pengelompokkan tulisan ini mengikuti pola yang dilakukan oleh Abdullah Saeed yang membagi gerakan ekonomi Islam. Pengelompokan ini bersifat longgar dan terbuka untuk dipersoalkan, diperbaiki (dikurangi atau ditambahkan) sesuai dengan fenomena gerakan sosial Islam di Indonesia.[10]

1). Gerakan Sosial Islam Ideal-Radikal,[11]

Kelompok gerakan sosial Islam kategori ini berada pada absolutisme pemikiran yang mendasarkan diri pada teks klasik Islam, karena penekanan pada teks semacam itu mempunyai implikasi langsung terhadap tindakan sosial politiknya, karena orientasi keberagamaannya sangat mengutamakan skripturalisme absolut, sikap mereka umumnya sangat ekstrem, kelompok ini sangat sedikit tidak terlalu berkembang di Indonesia, karena masyarakat pribumi lebih condong pemahaman yang konservatif.

2). Gerakan Sosial Islam Pragmatism-Moderat.

Kelompok ini lebih menekankan pada misi Islam yang paling utama adalah kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi, oleh karenanya Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi

10 Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejara,....* 337

11 Tadi telah disinggung pula tentang kelompok ini, tapi penjelasan berikut ini melihat kecendrungan orientasi gerakannya dan bukan pada level pemikiran dan tafsir atas doktrin seperti telah dijelaskan sebelumnya.

secara terus-menerus dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya yang bersifat normatif dan etis. Gerakan organisasi sosial keagamaan yang besar yang memiliki aliranpragmatis moderat seperti Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah dan NU. SDI disebut sebagai gerakan ekonomi yang memiliki sikap modernis tetapi sikap keagamannya memiliki ideologi yang moderat.[12]

4. Gerakan sosial Islam liberal

Islam bagi kelompok ini tidak terkait langsung dengan kekuasaan politik dan urusan yang sungguh-sungguh bersifat negara, karena dalam Islam tidak terdapat sistem politik yang berdasarkan agama, tetapi agama berperan mengatur kehidupan umat manusia, Nabi Muhammad juga tidak mendirikan negara Islam, malah justru mendirikan negara kota Madinah yang pluralistik dengan keragaman suku, agama dan keyakinan masyarakat yang berada di wilayahnya masing-masing.

Keberadaan pondok pesantren di lihat dari berdirinya sebuah pesantren di suatu wilayah membuat pesantren tersebut memiliki peran strategis yang dapat membuat wilayah tersebut menjadi lebih berkembang. Sejak tahun 1970-an, pesantren telah memainkan banyak peran strategis. Peran strategis pesantren tercakup peran dalam bidang perekonomian, sosial dan politik.[13]

Ada dua alasan mengapa pesantren bisa menjadi pelopor perekonomian umat. *Pertama,* santri adalah golongan masyarakat yang berkomitmen tinggi dengan agamanya. Komitmen para santri dalam agamanya dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan para santri. *Kedua,* fokus kegiatan pesantren pada kajian-kajian keislaman dapat membuatnya menjadi penggerak ekonomi syariah di masyarakat sekaligus melahirkan entrepreneur muda yang berjiwa islami.[14]

12 Muhammad Yafiz, *Argumen Integrasi Islam & Ekonomi,* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), 47

13 Lugina, U. *Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat*. Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 2017, 4(1), 53–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.1227465

14 Muttaqin, R. *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran*

Optimalisasi semua sumber daya yang dimiliki pesantren dapat tercipta sebuah kekuatan besar dalam perekonomian bila dikelola dengan baik. Dari segi aset misalnya, pesantren bisa memanfaatkan luasnya tanah yang mereka miliki untuk digunakan dalam kegiatan bercocok tanam. Pekerja dari kegiatan bercocok tanam tersebut bisa saja para santri yang dilakukan secara bergantian atau bisa pula dengan memperkerjakan masyarakat di sekitar pesantren sebagai petani yang mengelola tanah tersebut. Hasil panen yang didapat bisa dijual untuk membiayai kegiatan operasional pesantren. Selain itu, pesantren juga dapat memanfaatkan aset lain yang dimilikinya untuk ditujukan pada sektor perekonomian. Pemanfaatan aset ini harus dibarengi dengan manajemen aset yang baik dari pihak pesantren agar pemanfaatan aset dapat berlangsung secara optimal.

B. Komitment pesantren dalam dunia Pendidikan dan ilmu pengetahuan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai sejarah panjang dan unik. Secara historis, pesantren termasuk pendidikan Islam yang paling awal dan masih bertahan sampai sekarang. Berbeda dengan lembaga – lembaga pendidikan yang muncul kemudian, pesantren telah sangat berjasa dalam mencetak kader – kader ulama, dan kemudian berperan aktif dalam penyebaran agama Islam dan transfer ilmu pengetahuan. Namun, dalam perkembangan pesantren telah mengalami transformasi yang memungkinkannya kehilangan identitas jika nilai – nilai tradisonalnya tidak dilestarikan.

Karena keunikannya itu maka pesantren hadir dalam berbagai situasi dan kondisi dan hampir dapat dipastikan bahwa lembaga ini, meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana dan karekteristik yang beragam, tidak pernah mati. Demikian pula semua komponen yang ada didalamnya seperti kyai atau ustad serta para santri senantiasa mengabdikan diri mereka demi kelangsungan pesantren.tentu saja ini

Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2011), 1 (2).

tidak dapat diukur dengan standart system pendidikan modren dimana tenaga pengajarnya dibayar, karena jerih payahnya, dalam bayaran dalam bentuk material.[15]

1. Peranan Pondok Pesantren dalam Memajukan Pendidikan Nasional

Peran pesantren dalam memajukan pendidikan nasional telah membuktikan eksistensinya. Keperipurnaan pondok pesantren harus dipahami dan dilihat dari berbagai aspek. Pada awal tahun70-an, sebagian kalangan menginginkan pesantren memberikan pelajaran umum bagi para santrinya.[16] Hal ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para pengamat dan pemerhati pondok pesantren. Sebagian berpendapat bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas dan unik harus mempertahankan ketradisionalannya di pondok pesantren. Namun pendapat lain menginginkan agar pondok pesantren mulai mengadopsi elemen-elemen budaya dan pendidikan dari luar.[17]

Dari dua pandangan yang berbeda tersebut, terlahir pula keinginan yang berbeda di kalangan para pengelola pesantren. Kelompok pertama menginginkan agar pesantren tetap mempertahankan posisinya seperti semula dengan sistem yang khas. Sedangkan kelompok ke dua menginginkan agar pesantren mulai mengadopsi atau mengakodmodasi sistem pendidikan sekolah atau madrasah ke dalam sistem pendidikan pesantren.

Akhirnya terjadilah persentuhan antara pondok pesantren dengan madrasah dan sekolah. Dalam sejarah perkembangan pesantren, disebutkan bahwa pondok pesantren, masih berbentuk surau, yang pertamakali membuka pendidikan formal adalah Tawalib di Padang Panjang pada tahun 1921, sedangkan di Jawa adalah pesantren Tebu Ireng Jombang pada tahun 1919 menyusul pondok modern Darussalam Gontor pada tahun 1926.[18]

15 Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga – Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia.* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001). 100

16 Mahpuddin Noor, *Potret Dunia Pesantren.* (Bandung: Humaniora, 2006), 58

17 Nurcholish Madjid. *Bilik-Bilik Pesantren.* (Jakarta: P3M, 1985), 126

18 Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992.), 193

Pondok pesantren yang memiliki kreteria tertentu dianggap telah mapan, didukung oleh persyaratan yang cukup mapan, seperti bangunan, tanah, guru yang berkompeten, murid-murid yang banyakserta tersedianya tenaga administrasi. Pondok pesantren yang seperti inilah yang dianggap layak untuk mengakomodasi sistem pendidikan formal atau elemen pendidikan lainnya yang berasal dari luar. Sebaliknya, pondok pesantren yang tidak memiliki dan memenuhi kriteria di atas tentu saja tidak bisa memaksakan kehendak untuk mengadopsi sistem pendidikan dari luar.[19]

Selain itu ada beberapa alternatif yang juga dikembangkan di lingkungan pesantren. Ada yang mengakomodasi sistem pendidikan formal ala sekolah umum atau madrasah dengan tetap mempertahankan sistem pendidikan pesantren, dengan memisahkan area untuk sekolah madrasah atau sekolah umum dengan area khusus untuk pesantren. Murid-murid yang bersekolah di sekolah umum pesantren tersebut mengikuti kurikulum pendidikan nasional, seperti mengikuti uas dan uan. Mereka tidak tinggal di asrama, akan tetapi tinggal di rumah masing-masing. Sementara santri yang mengikuti pendidikan pesantren tinggal di asrama dan mengikuti program pendidikan pesantren yang relatif independen dari kebijakan-kebijakan departemen agama dan pendidikan. Guru-guru yang mengajar di pondok pesantren dengan sistem seperti ini secara umum dikategorikan kepada dua kelompok yakni guru-guru yang berasal dari pesantren dan yang berasal dari luar. Umumnya, guru-guru tersebut mengjar pelajaran umum. Contoh pesantren seperti ini adalah Pondok Pesantren Darunnajah Cipining Bogor.

Bentuk atau opsi ke dua adalah pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan formal ala madrasah atau sekolah umum lainnya dengan sistem pendidikan pesantren tanpa memisahkan kelas-kelas atau area untuk ke dua sistem pendidikan yang berbeda ini. Para santri tetap tinggal di asrama, mengikuti uas dan uan dan juga mengikuti agenda-agenda kepesantrenan yang tidak terdapat di madrasah atau

19 Mahpuddin Noor, *Potret Dunia Pesantren*. (Bandung: Humaniora, 2006), 58

sekolah lainnya. Guru-guru yang mengjar di pesantren ini relatif sama dengan di atas. Bentuk pesantren yang seperti inilah yang sekarang banyak ditemui.

2. Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren

Pada awalnya berdirinya, pesantren merupakan media pembelajaran yang sangat simple. Tidak ada klasifikasi kelas, tidak ada kurikulum, juga tidak ada aturan yang baku di dalamnya. Sebagai media pembelajaran keagamaan, tidak pernah ada kontrak atau permintaan santri kepada kiai untuk mengkajikan sebuah kitab, apalagi mengatur secara terperinci materi-materi yang hendak diajarkan. Semuanya bergantung pada kiai sebagai poros sistem pembelajaran pesantren. Mulai dari jadwal, metode, bahkan kitabyang hendak diajarkan, semua merupakan wewenang seorang kiai secara penuh.[20]

Dua model pembelajaran yang terkenal pada awal mula berdirinya pesantren adalah model sistem pembelajaran wetonan non klasikal dan sistem sorogan. Sistem wetonan/bandongan adalah pengajian yang dilakukan oleh seorang kiai yang diikuti oleh santrinya dengan tidak ada batas umur atau ukuran tingkat kecerdasan. Sistem pembelajaran model ini, kabarnya merupakan metode yang diambil dari pola pembelajaran ulama Arab. Sebuah kebiasaan pengajian yang dilakukan di lingkungan Masjid al-Haram. Dalam sistem ini, seorang kiai membacakan kitab, sementara para santri masing-masing memegang kitab sendiri dengan mendengarkan keterangan guru untuk mengesahi atau memaknai Kitab Kuning.

Lain dengan pengajian wetonan, pengajian sorogan dilakukan satu persatu, dimana seorang santri maju satu persatu membaca kitab dihadapan kiai untuk dikoreksi kebenaannya. Pada pembelajaran sorogan ini, seorang santri memungkinkan untuk berdialo dengan kiai mengenai masalah-masalah yang diajarkan. Sayangnya banyak menguras waktu dan tidak efesien sehingga diajarkan pada santri-santri senior saja.

20 Haedani, H. Amin dkk, *Panorama, Pesantren Dalam Cakrawala Modern*. (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), 80.

Pada dasarnya, dalam pesantren tradisional, tinggi rendahnya ilmu yang diajarkan lebih banyak tergantung pada keilmuan kiai, daya terima santri dan jenis kitab yang digunakan. Kelemahan dari sistem ini adalah tidak adanya perjenjangan yang jelas dan tahapan yang harus diikui oleh santri. Juga tidak ada pemisahan antara santri pemula dan santri lama. Bahkan seorang kiai hanya mengulang satu kitab saja untuk diajarkan pada santrinya.[21]

Pada abad ke tujuh belasan, materi pembelajaran pesantren didominasi oleh materi-materi ketahuidan. Memang pada waktu itu ajaran ketauhidan dan ketasaufan menduduki urutan yang paling dominant. Belakangan, sejalan dengan banyaknya para ulama yang berguru ketanah suci, materi yang diajarkannya pun bervariasi.

3. Sistem pendidikan pesantren

Secara vertikal pesantren selayaknya berusaha untuk semakin mengembangkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memberikan pembinaan secara lebih khusus terhadap moralitas dan spiritual santri. Bidang ini merupakan muatan pragmatis, yaitu perhatian terhadap hubungan dengan masalah-masalah kebutuhan moral dan spiritual masyarakat modern yang dihadapkan kepada masalah-masalah kontemporer. Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, termasuk dunia pesantren. Pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan dikembangkan.

Proses pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah di upayakan pemerintah. Proses pengembangan dunia pesantren yang selain menjadi tanggung jawab internal pesantren, juga harus didukung oleh perhatian yang serius dari proses pembangunan pemerintah. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta pesantren dalam

21 Haedani, H. Amin dkk, *Panorama, Pesantren Dalam Cakrawala...*,82

proses pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Terlebih, dalam kondisi yang tengah mengalami krisis (degradasi) moral. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. Sehingga, pembangunan tidak menjadi hampa melainkan lebih bernilai dan bermakna. Pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional memiliki tiga unsur utama Kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri, Kurikulum pondok pesantren, dan Sarana ibadah dan pendidikan, seperti masjid, rumah kiai, dan pondok, serta sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan.

Kegiatannya terangkum dalam "Tri Dharma Pondok pesantren" yaitu: a). Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, b). Pengembangan keilmuan yang bermanfaat. c). Pengabdian kepada agama, masyarakat, dan negara.[22] Sistem yang digunakan untuk mendalami kitab-kitab kuning di pondok pesantren adalah sistem sorongan, wetonan dan juga sistem gabungan antara wetonan dan diskusi. Hanya saja gabungan tersebut tidak dapat berkembang dan yang paling banyak dipakai adalah sistem wetonan.[23]

Materi (kitab) yang dikaji lewat sistem sorongan adalah sesuai dengan persetujuan kiai dan santri, dan biasanya berupa kitab yang agak besar. Sejak awal berdirinya pondok pesantren senantiasa menyajikan kitab-kitab kuning, terutama menganut paham imam syafi□i yang merupakan satu-satunya pengajaran yang formal dalam pondok pesantren tidak bisa lepas dari kitab-kitab kuning yang menjadi ciri umum pondok pesantren.

Pentingnya sarana dan prasarana dalam sistem pengajian sorongan merupakan hal yang wajar sebab gejala sesuatu kegiatan harus berpijak kepada sarana dan prasarana supaya tujuan yang akan

22 PP Al-Fatah, *Pesantren Dalam Sistem Pendidikan,* blogspot.com/2011/02/pesantren-dalam-sistem pendidikan, (Diakses pada tanggal, 13 Oktober 2020)

23 M. Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi*..., 162

dituju dapat tercapai dengan mudah. Karena pondok pesantren merupakan salah satu sub sistem pendidikan di Indonesia, maka gerak dan usaha serta arah pengembangannya harus berada di dalam ruang lingkup tujuan pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan nasional pada prinsipnya adalah membentuk manusia pembangun yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpancasila, sehat rohani dan jasmani, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.[24]

C. Framing Pemikiran Kiyai/Pengasuh Pondok Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia, pesantren menjadi tumpuan harapan. Menurut Nurcholish Madjid, "Semboyan mewujudkan masyarakat madani akan mudah terwujud bila institusi pesantren tanggap atas perkembangan dunia modern". Pesantren memperoleh kepercayaan setinggi ini dapat dimengerti mengingat di samping sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren juga dikenal mentradisikan belajar melalui kitab kuning, jumlah pesantren yang sangat signifikan, dan yang lebih penting lagi, pesantren berbasis pedesaan. Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang paling menjadi perhatian utama dalam mewujudkan masyarakat madani yang seringkali diidentikkan dengan masyarakat sipil (*civil society*) oleh kalangan tertentu.[25]

Oleh karena itu, sistem pendidikan pesantren harus selalu melakukan upaya rekonstruksi pemahaman terhadap ajaranajarannya

24 Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 246

25 Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2002.) 74.

agar tetap relevan dan survive.[26] Bahkan, lebih lanjut pesantren harus mampu mewujudkan sistem pendidikan sinergik. Yakni sistem yang memadukan akar tradisi dan modernitas. Jika strategi ini mampu dilaksanakan, hubungan pendidikan pesantren dengan dunia kerja industrial bisa bersambung. Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren sebenarnya mempunyai banyak SDM yang siap diolah agar mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin pesat yang ditandai dengan perkembangan teknologi. Mempersoalkan sumber daya manusia pada dasarnya adalah mempersoalkan upaya optimalisasi potensi manusia bagi kehidupan dirinya dan kehidupan masyarakat luas. Sebab, kualifikasi SDM, banyak faktor yang terkait, sehingga membuat manfaat manusia itu menjadi optimal dalam kehidupan bersama. Lebih-lebih lagi apabila kualifikasi SDM itu dikaitkan dengan kualifikasi religiositasnya. Internalisasi nilai-nilai religius seseorang mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, sebagai akibat dari bertambah luasnya wawasan, pengetahuan, dan cara berfikir dalam menggapai nilai-nilai religius itu.

Oleh karena itu kualifikasi SDM modern terkait dengan banyak faktor, diantaranya:

a. Bebas dari kebodohan dan kemiskinan
b. Mencerminkan manusia modern yang berbudaya
c. Memiliki motivasi untuk maju
d. Memiliki paradigma hidup perspektif
e. Memiliki potensi sebagai subjek pembangunan
f. Memiliki keahlian jelas g. Mencerminkan individu belajar
g. Memiliki etos kerja dan disiplin tinggi
h. Memiliki budaya kerja tuntas
i. Memiliki komitmen kebersamaan tinggi.

Paradigma hidup perspektif dirasa semakin fungsional untuk menghadapi kehidupan yang cepat berubah. Oleh karena itu, SDM yang

26 Suwendi, "*Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pesantren: Beberapa Catatan*", dalam Marzuki Wahid, Suwendi dan Saefuddin Zuhri (peny.), Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 216.

mampu melihat masa depan merekalah yang akan unggul menghadapi kehidupan. Antisipasi perubahan keadaan hanya dapat dilakukan oleh SDM dari masyarakat belajar. Masyarakat belajar pada dasarnya dibangun oleh individu belajar, yang selalu mencermati keadaan, perubahanperubahan yang terjadi, kesenjangan yang muncul dan dampak dari perubahan itu, serta alternatif untuk mengisi kesenjangan tersebut.[27] Perubahan terjadi karena ada beberapa hal, yaitu : adanya inovasi yang datang dari dalam maupun dari luar, ada motivasi kuat untuk berubah, ada skenario perubahan (perubahan akseleratif), setiap perubahan membutuhkan ruang dan waktu yang cocok (memahami berbagai sistem pengetahuan dan tindakan masyarakat, atau konteks dan dinamika), setiap perubahan akan menimbulkan sikap pro dan kontra (mengalami hambatan, dan kesulitan), dan perubahan harus selalu mengarah pada kesejahteraan bagi masyarakat.[28]

Optimalisasi kemanfaatan sumber daya manusia (SDM) akan tampak dalam konteks kebersamaan. Kebersamaan mencerminkan keadaan partisipasi-integratif, artinya peran seseorang dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya adalah merupakan bagian dari keseluruhan untuk memnuhi kebutuhan masyarakat itu. Berdasarkan tinjauan di atas, maka profil SDM yang modern memiliki berbagai karakteristik yang kompleks, yang tidak dapat diperoleh secara spontan, tetapi hanya dapat diperoleh melalui proses pembudayaan dalam pendidikan.[29] Lalu bagaimana setiap proses pendidikan mampu menghasilkan kualifikasi yang diharapkan itu adalah tergantung pada proses sosialisasi pendidikan, aktivitas pendidikan yang dilakukan, dan paradigma dasar penyelenggaraan pendidikan tersebut. Artinya perbedaan dasar proses pendidikan itu diselenggarakan akan berakibat menghasilkan profil SDM yang berbeda pula.

Alternatif paradigma proses penyelenggaraan pendidikan yang strategik untuk meraih kualifikasi SDM di atas, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

27 Abdul Munir Mulkan dkk , *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas Iptek.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 31.

28 A.Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 62.

29 Abdul Munir Mulkan dkk , *Rekonstruksi*,... 33.

a. Paradigma proses vs. produk pendidikan
b. Paradigma Inquiry vs. sistem penyampaian
c. Paradigma berpikir sistemik vs. berpikir linier
d. Paradigma fleksibilita vs. rigidita
e. Paradigma kurikulum pendidikan untuk peserta didik vs. peserta didik untuk kurikulum.[30]

Paradigma proses merupakan sebuah paradigma yang akan mewarnai sosialisasi manusia itu sehingga terjadi profil budaya sesuai dengan yang kita harapkan. Paradigma proses ini dalam pendidikan yang ditekankan bukan pada produk, tapi lebih pada proses. Jika kita mementingkan produk dengan cara apapun yang penting menghasilkan. Tapi kalau kita mementingkan proses, berarti justru bagaimana seharusnya produk itu diperoleh. Pendidikan kita sekarang lebih pada produk, sehingga anak tidak mempunyai ketrampilan apa-apa dalam mencari produk, dan akhirnya juga dari pendidikan itu tidak memperoleh kemampuan jati diri. Karenanya, tekanan pendidikan yang hanya mementingkan hasil semakin jelas dampak negatifnya bagi kepentingan pendidikan, khususnya dalam membangun profil kualitas SDM yang terkait dengan upaya mewujudkan manusia yang potensial dan berkepribadian.

Pendidikan yang mementingkan proses akan menghasilkan manusia berbudaya, baik budaya ilmu maupun dimilikinya nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian atau keseimbangan alam. Untuk kepentingan manusia tersebut pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun dipergunakan secara komunal dan universal. Komunal berarti ilmu merupakan pengetahuan yang menjadi milik bersama, setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya. Universal berarti bahwa ilmu tidak mempunyai. konotasi

30 Abdul Munir Mulkan dkk , *Rekonstruksi...,* 34.

ras, ideologi, atau agama.[31] Paradigma lain yang ditawarkan dan hasilnya tidak akan berbeda dalam proses itu adalah inquiry atau discovery.

Paradigma ini diharapkan mampu menghasilkan budaya Iptek yang lebih lanjut dapat diharapkan menjadikan SDM menjadi penghasil Iptek. Sekarang yang dominan adalah sistem penyampaian, yang biasanya dilaksanakan secara verbal. Sehingga yang dihasilkan adalah ketergantungan dan konsumtif manusia suap lebih dominan daripada mencari, anak-anak lebih sering diberi daripada mencari sendiri. Tapi apakah betul paradigma ini yang akan memberikan keberhasilan membangun peradaban manusia modern yang mampu kompetitif dan juga eksis di dalam kehidupan yang semakin global? Paradigma lain yang ditawarkan yaitu yang berfikir sistemik yang dilandasi oleh kreatifitas menjadi dambaan masyarakat modern. Berpikir linier umumnya merupakan produk pendidikan verbal, cenderung hanya mampu mengembangkan kemampuan berpikir logis yang dipandang tidak lagi akomodatif untuk menghadapi kehidupan yang semakin kompleks. Paradigma lainnya lagi adalah fleksibilita atau rigidita. Fleksibilita merupakan salah satu karakteristik pilihan paradigma dalam kehidupan yang semakin kompleks dan yang cepat berubah. Bahkan cepatnya perubahan itu sendiri telah mencerminkan fleksibilita. Rigidita hanya akan menghasilkan kesempitan, keterbatasan, dan kesesatan. Dalam rigidita, segala sesuatu selalu ditangkap secara pasti, bahkan sampai guru-guru, yang namanya kurikulum itu resep, harus begitu. Karenanya rigidita menggambarkan kematian.

D. Geliat Nahdlatul Ulama dalam Peningkatan Eknomi Ummat

Pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H, para Ulama berkumpul di rumah KH. Wahab Hasbullah tepatnya di Kertopaten, Surabaya. Mereka bermusyawarah untuk mempertahankan bentuk Islam Tradisional. Setelah melalui musyawarah tersebut para Ulama memutuskan mendirikan suatu Organisasi Islam yaitu Nahdlatul

31 Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia; Suatu Pengantar,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 152.

Ulama untuk mewakili dan memperkokoh Islam Tradisional di Hindia Belanda. Sebelumnya para Ulama tersebut sudah terlebih dahulu mendirikan organisasi kecil yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan keagamaan tetapi mereka baru melibatkan diri setelah Nahdlatul Ulama didirikan sebagai organisasi Islam yang berhaluan *Ahlusunnah Wal Jamaah*.

Nahdlatul Ulama lahir di Surabaya dan kehadirannya sebagai organisasi masih memiliki pengaruh besar di Indonesia hingga sekarang. Kondisi kota Surabaya saat itu merupakan kota perindustrian. Selain itu merupakan kota kaya akan minyak sehingga menjadi pusat perdagangan dunia yang telah menerapkan teknologi paling canggih produk revolusi industry dimana kota Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua Hindia Belanda yang menjadi pusat masyarakat Kosmopolit dan kawasan perdagangan yang sedang berkembang.[32]

Maka tidak aneh para Kiai pesantren di kota tersebut banyak terlibat dalam berbagai perdagangan baik antar kota, antar pulau bahkan perdagangan antar benua.[33] Nahdlatul Ulama atau yang sering disingkat dengan NU memiliki arti Kebangkitan Para Ulama yang bergerak dalam ruang sosial-keagamaan.[34] Adapun beberapa faktor lahirnya NU diantaranya kekhawatiran terhadap gerakan Islam modernis yang berusaha menghapus budaya serta paham Aswaja dan sebagai respon terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam setelah kekhalifahan Turki Usmani dihapus.[35] Di samping itu memahami latar belakang Nahdlatul Ulama bukanlah perkara yang mudah apabila dipahami dari sudut formalnya saja.

32 Greag Fealy dan Greg barton, *Tradisionalisme radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta,1997), 6

33 Abdul Mun'im DZ, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, (Jakarta: Setjen PBNU NU-Online, 2011), 26

34 Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama (Sejarah NU 1952-1967),* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 21-22

35 Ali Hasan Siswanto, *Dialektika Tradisi NU di tengah arus modernisasi*, (Surabaya: IQ Media Surabaya, 2014), xvii.

Nahdlatul Ulama muncul tidak ubahnya seperti mewadahi barang yang sudah ada. Dengan kata lain, Nahdlatul Ulama berdiri dengan para Ulama yang sepaham dan berpegang teguh atau memiliki empat mazhab yaitu Syafi'I, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Dimana empat mazhab tersebut sudah berkembang jauh sebelum Nahdlatul Ulama lahir.[36] Nahdlatul Ulama termasuk organisasi Islam terbesar dan sudah mengakar kuat di kalangan muslim Indonesia dan memiliki tujuan salah satunya, melestarikan tradisi yang sudah ada jauh sebelum Nahdlatul Ulama lahir serta mempertahankan nilai-nilai kegamaan tradisi pesantren. Sebenarnya tradisi itu berasal dari masyarakat setempat kemudian munculnya Nahdlatul Nahdlatul Ulama termasuk organisasi Islam terbesar dan sudah mengakar kuat di kalangan muslim Indonesia dan memiliki tujuan salah satunya, melestarikan tradisi yang sudah ada jauh sebelum Nahdlatul Ulama lahir serta mempertahankan nilai-nilai kegamaan tradisi pesantren. Sebenarnya tradisi itu berasal dari masyarakat setempat kemudian munculnya Nahdlatul.

Sebelum NU lahir ada beberapa organisasi yang menjadi embrio, pilar, ataupun cikal bakal yang didirikan oleh para tokoh Ulama yang mana alasan didirikannya yaitu untuk melawan para sekutu. Pilar-pilar tersebut juga memiliki fokus yang berbeda-beda. Pilar-pilar tersebut dipelopori dan digerakkan oleh para tokoh Pesantren. Tiga pilar tersebut diantaranya: *Pertama*, *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air). Didirikan pada tahun 1916 yang bergerak dalam memperdalam mutu-mutu madrasah, mengkader seseorang yang memiliki semangat nasionalisme tinggi.[37] *Nahdlatul Wathan* juga didirikan untuk membentuk jiwa semangat nasionalisme para santri yang belajar di sebuah pesantren tapi juga bisa berpartisipasi dalam memajukan bangsa. *Kedua, Taswirul Afkar* atau bisa juga disebut dengan Nahdlatul Afkar. Taswirul Afkar didirikan pada tahun 1918 yang bergerak dalam bidang keilmuwan atau pendidikan. Organisasi ini menjadi pondasi bagi kalangan pesantren

36 Ali Hasan Siswanto, *Dialektika Tradisi NU di Tengah Arus Modernisasi*, (Surabaya : IQ Media Surabaya, 2014), xvii.

37 Ali Hasan Siswanto, *Dialektika Tradisi NU di Tengah Arus Modernisasi*.., 36

untuk menyalurkan kreativitas berpikir dan forum diskusi untuk mencapai sebuah kemajuan.[38] Melalui Taswirul Afkar kiai-kiai pesantren menguatkan gagasannya dalam memahami Aswaja dan tantangan ideologi Wahabi. Selanjutnya yang *Ketiga*, *Nahdlatut Tujjar* (Kebangkitan Para Pedagang). Organisasi ini didirikan pada tahun 1918 yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk mengangkat perekonomian umat Islam yang pada saat itu mengalami penindasan oleh Penjajah, khususnya Kolonial Belanda.[39]

Pada awal abad ke 20 masyarakat Indonesia masih dibawah kekuasan kolonial Belanda. Dimana kolonial Belanda menggunakan sistem Politik Etis pada perekonomian masyarakat sehingga masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap sistem tersebut.[40] Adapun yang dimaksud Politik Etis atau yang biasa disebut dengan politik balas budi yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Menurut Pemerintah Belanda, politik etis memberikan jaminan taraf kehidupan yang lebih baik bagi Pribumi. Namun, semua itu hanyalah tipudaya pemerintah Kolonial agar masyarakat menaruh simpati terhadap Belanda dan memiliki tujuan untuk memperkuat kedudukannya di Hindia Belanda.[41]

Memang perkembangan ekonomi sangat bagus namun kemajuan ekonomi yang didapat pemerintah Belanda ternyata tidak menimbulkan pertumbuhan sosial bagi penduduk sekitar. Begitulah sistem perekonomian kapitalis yang di tancapkan di bumi Nusantara. Dimana Pemerintah Belanda selalu mengambil keuntungan sendiri tanpa memperdulikan rakyat Pribumi. Banyak penduduk yang bergantung

38 Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 33-35

39 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 159.

40 Ade Fajrul Muttaqin, *Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathan, Nahdlatut Tujjar : Tiga lembaga pendahulu lahirnya Nahdltul Ulama 1914-1929*, (Jakarta : UI, 2008), 14

41 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 159.

kepada pemilik modal asing. Dengan kata lain pemerintah Belanda dan penduduk masyarakat memiliki istilah "yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin". Pembangunan ekonomi pada waktu politik etis belum maksimal dilakukan karena pemerintah Belanda hanya memanfaatkan rakyat pribumi agar bisa mengembalikan kesejahteraan hidup mereka dengan mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara.

A. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Masa Tanam Paksa

Indonesia adalah Negara yang banyak dilirik oleh Negara lain karena Indonesia kaya akan rempah-rempahnya. Negara-negara asing pun banyak yang memiliki strategi untuk bisa menguasai Indonesia.sehingga rakyat pribumi pun mengalami penindasan di Negaranya sendiri, bahkan tidak sedikit menjadi buruh dirumahnya sendiri. Ketika kontak pertama dengan dunia Barat dilakukan, pulau-pulau di kepulauan Indonesia merupakan area pertanian. Bertani adalah pekerjaan utama rakyat pribumi pada saat itu, terkadang juga mereka melakukan penangkapan ikan, berburu, dan mengumpulkan makanan. Para petani umumnya berproduksi, guna memenuhi kebutuhan mereka sendiri karena kehidupan mereka tidak melimpah, apalagi harus dikuasai oleh pihak asing.[42] Dilihat dari suburnya tanah Indonesia, jika ditanami rempah-rempahnya menjadi sasaran empuk negara asing untuk memiliki atau menguasai kepulauan Nusantara ini. Diantaranya Portugis (1509-1595 M), Spanyol (1521-1692 M), Belanda (1602-1942 M), Perancis (1806-1811 M), Inggris (1811-1816 M), dan terakhir yang menjajah Indonesia sebelum meraih kemerdekaan yaitu Jepang (1942-1945 M).

Belanda adalah Negara penjajah yang paling lama menguasai Indonesia. Belanda datang ke Indonesia pada akhir abad 16 yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman untuk membeli rempah-rempah, kemudian diperdagangkan kembali ke Negara asalnya. Awalnya bangsa Belanda hanya berniat membeli barang-barang dari Indonesia, namun hal itu berubah seiring keinginan mereka

42 W. F. Wertheim, masyarakat Indonesia dalam Transisi, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 65.

untuk menguasai kepulauan Nusantara ini karena tergiur dengan keuntungan yang lebih besar, bahkan kerakusannya menjadi jalan Belanda berbuat seenaknya asal untung banyak. Sejak Indonesia berada di tangan Belanda, maka berbagai pendatang dari negeri asing datang ke Indonesia. Kehadiran mereka mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Penjajah Belanda mempunyai tindakan politik untuk melindungi kepentingan ekonominya, jadi motif ekonomi di dalam situasi kolonial menjadi faktor dominan bagi penentuan hubungan sosial. Salah satu pekerjaan utama rakyat pribumi berprofesi sebagai petani.Tetapi ada juga yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Rakyat pribumi banyak yang menjadi pekerja di tanah milih mereka sendiri. Kondisi masyarakat tidak bersahabat karena ada paksaan tapi tidak sepenuhnya menikmati.[43]

Negara Indonesia menjadi sasaran empuk Negara asing untuk dikuasai karena kesuburan tanah Indonesia jika ditanami tanaman-tanaman akan menghasilkan panen yang bagus. Kondisi ini yang kemudian menjadi ancaman baru bagi masyarakat Nusantara, dikatakan ancaman sebab dalam pikiran orang asing adalah menguasai basis ekonomi, yang dimanfaatkan untuk Negara. Soal kondisi ekonomi, tidak begitu ambil pusing, sekalipun terkadang menipu dengan cara model pendekatan Politik Etis. Kolonialisme asing adalah Penjajah yang memiliki arti suatu sistem yang digunakan oleh suatu Negara untuk melegitimasikan Negara bahwa Negaranya lebih hebat ketimbang Negara yang dijajahnya. Kolonialisme pada suatu bangsa pada dasarnya membodohi para penguasa pribumi untuk mengambil keuntungan sendiri. Indirect Rule istilah yang digunakan Pemerintah Kolonial untuk memperalat penguasa pribumi dengan memanfaatkan kekayaan alam lokal.

Masyarakat pribumi dijadikan sebagai budak-budak Pemerintah Kolonial hingga mereka merasa tertekan dan kehilangan suatu kebebasan di negaranya sendiri.[44] Para penguasa pribumi menyetujui

43 W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi*,...65

44 Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*,

adanya sistem tanam paksa tersebut karena mereka dijanjikan oleh Pemerintah Kolonial sebuah jabatan yang dimiliki secara turun temurun tetapi semua itu tidak lepas dari pengawasan Pemerintah Kolonial.[45] Pada abad 19 Pemerintah Kolonial mengalami kemerosotan ekonomi setelah terlibat Perang Jawa (Perang Diponergoro 1825-1830). Maka dari itu Gubernur Jenderal J.B. Van den Bosch menciptakan suatu sistem eksploitasi dengan istilah Cultuurstelsel, yang bertujuan untuk memperbaiki kebendaharaan kas Negara Belanda. Ia tiba pada tahun 1830 di tanah Jawa.

Van den Bosch mengetahui kalau Pangeran Diponegoro sedang ditawan, akhirnya dia melancarkan aksinya menyebarkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini lebih kejam dan sadis dibandingkan dengan sistem monopoli VOC terdahulu karena mereka memiliki target untuk mengisi kekosongan pembendaharaan kas Negara akibat sisa perang besar di Jawa bahkan dengan keuntungan yang didapat Pemerintah Kolonial dapat membangun infrastruktur dan industri di Negara induk. Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa hanya berlangsung selama 40 tahun saja yaitu dari 1830- 1870. Sedangkan Cultuurstelsel adalah suatu sistem eksploitasi yang dianggap sebagai kebalikan dari VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). Namun bagi masyarakat pribumi kedua sistem tersebut tidak memiliki perbedaan karena sama-sama membuat mereka sengsara dan kehilangan kebebasan.[46] Bahkan menjadikan masyarakat pribumi tidak menikmati hasil alam secara utuh. Adapun Menurut Van den Bosch sebagai pencetus Sistem Tanam Paksa, ia tidak menghapus sistem Tradisional yang sudah berlaku sebelumnya yang mana hasil alam dan tenaga manusia sebagai modal utama.[47]

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 7.

45 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 186

46 Moedjanto*, Indonesia abad ke 20 dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 18.

47 Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, 12.

Van den Bosch memiliki kekhawatiran Indonesia akan dimonopoli oleh Inggris dan pajak tanah yang akan menyusahkan rakyat. Dengan adanya sistem Tanam Paksa ini, kehidupan di pedesaan di Pulau Jawa mengalami perubahan. Kebijakan baru pun mulai diterapkan. diantaranya tanah yang kosong atau yang tidak ditanami akan menjadi milik Pemerintah Kolonial, penduduk desa mulai dikenalkan tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan nila.[48] Kehidupan Penduduk Jawa sejak adanya sistem Tanam Paksa kondisi hidup mereka tetap tidak berubah menjadi lebih sejahtera. Namun dengan adanya Tanam paksa tersebut menjadikan Pulau Jawa memproduksi suatu komoditas hingga menembus pasar dunia, meskipun hasilnya lebih banyak dinikmati Penjajah.[49] Pemerintah Kolonial membebaskan pajak tanah bagi rakyat yang bekerja mengolah hasil tanaman ekspor. Adapun pembagian tenaga rakyat yaitu sebagian untuk menanam, sebagian untuk menuai, sebagian mengangkut hasil panen ke pabrik dan ada juga yang bekerja di pabrik tersebut. Keuntungan yang didapat dari tanam paksa ini akan semakin meningkat jika produksinya dilakukan secara tradisional. Pemerintah tidak mengeluarkan biaya sedikitpun tetapi mereka menyerahkan semua kepada tenaga kerja rakyat. Para penguasa pribumi pun diberi tugas untuk mengatur semua kebutuhan tanah dan tenaga kerja.Penguasa tetap berada di bawah pengawasan Pemerintah Kolonial meskipun mereka sebenarnya pemiliki tanah dan tenaga kerja.[50] Itulah gaya Pemerintahan Kapitalis yang selalu mencari keuntungan besar dengan modal sedikit bahkan tanpa modal. Keterlibatan penduduk desa dalam pelaksanaan sistem tanam paksa dapat dilihat dari prosentase komoditas-komoditas yang tumbuh pada setiap daerah. Bagi Pulau Jawa hampir semua penduduknya berprofesi sebagai petani dan dilibatkan dalam penanaman kopi. Sesuai dengan kondisi geografis, masyarakat Jawa dengan pokok kehidupannya mayoritas dari hasil bertani.

48 Marwati Djoened *Poesponegoro dan Nugroho Susanto, Sejarah Nasional Jilid* V, 3.

49 Jarkom Fatwa, *Sekilas Nahdlatut Tujjar,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 33.

50 Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, 12.

B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Masa Liberal

Sebelum sistem tanam paksa dihapus, pada tahun 1848 Cultuurstelsel mendapatkan serangan hebat melalui perdebatan di parlemen Belanda dan banyak sekali tulisan-tulisan yang mengutuk akan adanya system tanam paksa. Seperti dalam buku Max havelaar karangan Edward Douwes Dekker, yang isinya tentang Pemerintah Kolonial yang melakukan penindasan dan korupsi di Jawa.[51] Belanda menuntut adanya perubahan, mereka mendesak adanya "pembaharuan Liberal": peranan pemerintah dalam perekonomian Kolonial harus dikurangi, dibebaskannya pengusaha pribumi dari pengawasan Pemerintah Kolonial, dan dihapuskannya sistem tanam paksa tersebut.

Disinilah kaum liberal memperjuangkan prinsipnya untuk menghapus sistem tanam paksa, tapi kepentingan ekonomi tetap menjadi impian. Sebagai akibatnya, pada tahun 1870 sistem tanam paksa mulai dihapuskan. Setelah didiskusikan dengan petinggi-petinggi Belanda akhirnya sistem tanam paksa dihapus dan diganti dengan sistem liberal. Orang-orang liberal berpendapat bahwa perekonomian rakyat pribumi jika sepenuhnya di tentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, maka akan menghasilkan peluang yang besar. Dalam arti luas pengusaha-pengusaha Belanda bebas melakukan kegiatan ekonomi di tanah-tanah rakyat pribumi.[52] Sementara pribumi tidak bisa berbuat banyak daripada mendapat ancaman fisik. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1870 dikeluarkanlah dua undangundang yang penting yaitu undang-undang agraria yang mengatur cara-cara pengusaha pribumi memperoleh tanah dan undang-undang gula yang mengatur pemindahan pabrik-pabrik gula ke tangan rakyat.[53]

Pada periode inilah tanaman berupa tebu, kopi, teh, dan pohon Kina dikembangkan di daerah Jawa dan Deli (Sumatra). Bangsa kolonial dapat menyewa bebas tanpa ada rasa belas kasih demi

51 Marwati Djoened *Poesponegoro dan Nugroho Susanto, Sejarah Nasional Jilid V,* 374.

52 Marwati Djoened *Poesponegoro dan Nugroho Susanto,...* 374.

53 Moedjanto, *Indonesia abad ke 20 dari kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, 19-20

kepentingan mereka sendiri. Proses ini mengakibatkan semakin langkanya tanah yang dapat ditanami karena populasi penduduk yang semakin meningkat sehingga mereka mau tidak mau harus bekerja di perkebunan pemerintah kolonial demi membayar pajak yang membebani mereka.[54] Selain UU Agraria pemerintah kolonial juga mengeluarkan peraturanperaturan tentang upah minimal yang diterima oleh para pekerja. Namun peraturan ini tidak terlaksana hingga membuat para pekerja menderita.[55] Jadinya, peraturan yang dibuat sengaja dalam rangka melanggengkan kepentingan asing daripada kepentingan pribumi. Sistem liberal ini hanya mementingkan prinsip kebebasan terutama membebaskan pengusaha swasta asing untuk memakai tanah rakyat. Dari kalangan kaum liberal muncullah Van Deventer, yang tidak menyutujui adanya prinsip tersebut karena ia lebih mengutamakan kesejahteraan materiil dan moril rakyat pribumi.

Dalam buku karangannya berjudul "Hutang Kehormatan" tahun 1899, ia mengecam politik keuangan Belanda yang tidak memisahkan keuangan negeri induk dari negeri jajahan. Menurut Van Deventer perkembangan penduduk lebih cepat daripada sumber makanan dan ternak.Pendapatan keluarga f.80 dan hanya f.39 berupa uang tunai, sisanya berupa hasil pertanian sedangkan pajak menjadi f.16 dan dari jumlah itu yang hanya berupa uang tunai hanya f.9.[56]

Pada sistem liberal banyak sekali mengalami kemajuan di bidang perkebunan,khususnyaJawa.Tanaman-tanamanberhasildikembangkan dengan baik. Misalnya di tanah Pulau Jawa pada tahun 1870, tanaman tebu hanya bisa ditanam sekitar 54.176 bahu sementara pada tahun 1900 mengalami perkembangan pesat yaitu ada 128.301 bahu. Adapun yang lainnya tanaman-tanaman yang berhasil berkembang pesat diantaranya gula, kopi, teh dan Kina.[57] Pergeseran jumlah menunjukkan

54 W. F. Wertheim, *masyarakat Indonesia dalam Transisi*, 69

55 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto*, Sejarah Nasional .....,* 374

56 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto*, Sejarah Nasional.....,* 23

57 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto*, Sejarah Nasional .....,*378-379

pertumbuhan yang sangat signifikan dari pemberlakuan sistem liberal. Namun, di lain pihak kesejahteraan penduduk Jawa semakin mundur. Dalam hal ini pertumbuhan penduduk Jawa lebih besar dibanding pertumbuhan produksi bahan makanan. Bahkan setelah tahun 1880 perkebunan-perkebunan terserang hama sehingga upah yang akan diterima oleh para buruh juga menurun.

Kemerosotan kemakmuran penduduk Jawa memiliki beberapa sebab sesuai dengan fakta dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Di antara beberapa faktor itu adalah:

1. Tidak seimbangnya antara penduduk Jawa dengan produksi bahan makanan. Dimana lebih tinggi perkembangan penduduk Jawa dibanding dengan produksi bahan makanan. Oleh karena itu, kemiskinan pribumi belum terselesaikan.
2. Para buruh mendapatkan upah yang sangat sedikit karena keuntungankeuntungan yang lebih besar diberikan pada Pemerintah Kolonial. Akibatnya buruh tercekik untuk sekian kalinya.
3. Selama abad 19 Pemerintah Kolonial menganut politik tidak campur tangan yang mengakibatkan penduduk Jawa juga menanggung dana-dana untuk para koloni di luar Jawa. Misalnya penduduk Jawa membiayai perang Padri.
4. Akhir abad 19 sistem perpajakan sangat regresif yang artinya pajak tersebut sangat memberatkan golongan orang yang berpendapatan rendah, seperti para petani.
5. Perkebunan-perkebunan besar pada trahun 1885 mengalami krisis hingga penduduk Jawa harus menghemat dengan menerima upah yang tidak sesuai kesepakatan awal dan harga sewa tanah juga menurun.[58]

Dari beberapa kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda, baik dari tanam paksa maupun sistem liberal, pada hakikatnya hanya membuat rakyat pribumi semakin menderita. Perekonomian masyarakat Jawa sangat dirugikan karena mereka tidak merasakan

58 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto, *Sejarah Nasional*.....,381-383

kemakmuran yang sesungguhnya. Dalam hal ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak Kolonial Belanda, sementara penduduk pribumi tidak menikmati seutuhnya. Oleh karenanya, menjelang abad ke-20, keadaan tersebut membuat para politisi Belanda memiliki inisiatif untuk mensejahterakan rakyat pribumi. Para kolonial ingin membenahi rakyat pribumi dengan menanamkan pendidikan kepada mereka. Artinya ada strategi Politik Etis yang digunakan kolonial, sekalipun pemberlakuan ini tetap tidak sepenuhnya. Mengingat pendidikan yang diberlakukan tidak adil bagi rakyat pribumi.

C. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Masa Politik Etis

Pada masa kolonial, sekitar tahun 1900-1942 di Hindia Belanda (Indonesia) terdapat periode Politik Etis (Ethische Politiek). Kehadiran Politik Etis membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negeri Belanda yang berkuasa atas negeri jajahan. Politik Etis bertujuan meningkatkan masyarakat pribumi dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih sistematis daripada sebelumnya. Politik kolonial liberal yang kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat pribumi membuat salah satu dari golongan liberal yaitu Van Deventere mengkritik lewat karya bukunya berjudul "Hutang Kehormatan" yang isinya mengkritik negeri Belanda hanya membuat rakyat pribumi tidak mendapatkan kesejahteraan sesuai yang dijanjikan. Karena kalau bukan dari rakyat pribumi tidak mungkin negeri Belanda mendapatakan kemakmuran. Artinya di internal Belanda juga terjadi perbedaan pendapat, bagaimana harus bersikap terhadap pribumi, di samping tetap berpikir keuntungan ekonomi.

Beberapa orang mendukung Politik Etis melalui beberapa tulisan yang mereka buat, sebut saja, misalnya:

1. P. Brooshoof, redaktur surat kabar De Lokomotif, yang pada tahun 1901 menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).
2. Van Kol, banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda

3. Leivegoed, seorang jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia.
4. Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.
5. Abendanon, banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi.
6. Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar berisi kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten.

Tulisan-tulisan tersebut, akhirnya membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Akhirnya pemerintahan Ratu Wilhelmina di Belanda, membentuk sebuah kebijakan baru di Hindia Belanda dengan obsesi meningkatkan kesejahteraan rakyat hal ini dilakukan untuk membalas budi apa saja yang sudah diambil oleh Belanda dari tanah Indonesia. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan yaitu Politik Etis (Ethische Politiek) atau politik balas budi; sebuah politik muslihat agar Belanda dianggap baik. Padahal sejatinya kolonial tetap saja tidak menguntungkan kepada pribumi. Politik Etis dilaksanakan oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg yang kemudian kelak menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1916.24 dari berbagai kebijakannya, muncul berbagai kegiatan kaitannya dengan peningkatan bagi pribumi dan ekonomi juga dari pendidikan. Oleh karena itu, bangsa Belanda harus membalas jasajasa rakyat pribumi dengan menyelenggarakan Trias: irigasi, emigrasi (transmigrasi), dan edukasi.[59]

Sejak Politik Etis dengan edukasinya itu mulai menghasilkan lulusannya, maka mereka mulai diserap oleh berbagai sektor kegiatan. Dari lulusan tersebut, mereka dapat membedakan kedudukan rakyat pribumi dalam masyarakat kolonial.[60] Yang artinya tetap saja Politik

59 Moedjanto, *Indonesia abad ke 20 dari kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, 21.

60 Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, 16

Etis hanya dinikmati oleh sebagian penduduk pribumi. Kegiatan perekonomian pedesaan, pada masa akhir abad ke-19, di luar kegiatan pertanian, maka kegiatannya hanya didukung oleh kegiatan pasar-pasar kecil yang disebut "pasar desa". Di pasar-pasar itulah para petani dan pedagang kecil melakukan transaksi, antara lain menyangkut hasil-hasil pertanian, di samping itu juga menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Terkadang juga mereka memperdagangkan hasil industri keluarga (home industri), seperti anyamanyaman, kerajinan gerabah (pecah belah dari tanah liat) dan sebagai Sampai di sini dapat ditegaskan, bahwa kondisi sosial dan pendidikan masyarakat Indonesia yang dihasilkan oleh kegiatan Politik Etis nampaknya belum memadai.

Dilihat dari segi ekonomi juga belum mengalami perubahan yang signifikan, mengingat gaya kolonial tetap saja yaitu semangatnya menjajah dan jangan sampai pribumi tercerdaskan, yang kemudian menjadi ancaman bagi Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada hakekatnya, perbaikan ekonomi hanya menguntungkan Pemerintah Kolonial Belanda. Dari segi pendidikan, juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, apalagi sampai derajat memadai. Pendidikan yang dilaksanakan dalam program Politik Etis itu hanya sampai memberikan hasil tersedianya tenaga birokrat baru, dan itupun pada level rendahan kebanyakan, untuk direkrut dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda. Dalam hal emigrasi penduduk lokal disuruh pindah ke daerah lain, karena dengan begitu yang aslinya penduduk tersebut hidupnya masih merasa sulit bisa mencari nafkah sebagai petani, tukang kebun di daerah lain, guna untuk memperbaiki keuangan mereka. Artinya, strategi emigrasi tidak menguntungkan pribumi.

Politik etis merupakan bentuk politik yang berlawanan dengan politik sebelumnya, dalam hal ni yang menonjol, yaitu tanam paksa. Pemikiranpemikiran Politik Etis sebenarnya memiliki rasa kemanusiaan. *Mission Sacre* (Tugas Suci) yang mendasari Politik Etis yang bertujuan untuk menyejahterakan kaum pribumi yang masih rendah. Orang yang berkulit putih harus membantu memajukan kaum pribumi misalnya membantu mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah dan

menyebarkan agama. Politik Etis sebenarnya kebijakan membalas budi kaum kolinialisme Belanda terhadap pribumi karena banyak sekali membantu memajukan Negara Belanda. Kemakmuran yang diperoleh oleh Belanda karena hasil kerja dan jasa-jasa rakyat pribumi. Namun dalam hal pelaksanaanya, politik etis bukan untuk kepentingan rakyat pribumi namun hanya untuk negaranya sendiri, Belanda.

Menurut Raymond Kennedy seorang ahli Antropologi sosial dari Amerika mengemukakan bahwa ciri-ciri masyarakat Kolonial:

1. Mereka mendiskriminasi orang yang lebih rendah.
2. Ekonomi yang tergantung pada penjajah.
3. Subordinasi (ketaatan) politik dari bangsa pribumi terhadap kekuasaan Negara penjajah.
4. Kurangnya kontak sosial terhadap golongan penguasa dengan rakyat.
5. Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial.[61]

Namun, walaupun tujuan awal politik etis ialah membalas budi terhadap penduduk Jawa, tetapi itu semua hanya tipu daya pemerintah kolonial. Dengan kata lain, politik etis hanyalah upaya pemerintah Kolonial untuk mendapat simpati rakyat dengan tujuan memperkuat kedudukannya di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda yang bertindak sebagai penguasa Hindia Belanda. Selain itu, rakyat pribumi juga tidak mempunyai pilihan selain menjual tanah-tanah mereka kepada pemerintah kolonial agar pemerintah dapat mendirikan pabrik-pabrik dan membuka perkebunan guna menambah pemasukan kas Pemerintah Kolonial. Selebihnya, pribumi akan dirugikan sebab tidak menikmati hasil alamnya secara utuh, di samping secara fisik selalu menerima paksaan untuk menanam.

Kolonialisme Belanda juga memanfaatkan pengusaha pribumi yang bersekolah di gedung bangunan milik Belanda untuk menghasilkan tenaga birokrat yang akan direktur di Pemerintahan Belanda. Sejak awal kolonialisme Belanda membuat sebuah kebijakan-

61 Moedjanto, *Indonesia abad ke 20 dari kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, 20-21.

kebijakan yang alasannya untuk mensejahterakan ataupun membalas budi kepada rakyat pribumi, semua itu hanya bualan belaka.Karena kolonialisme Belanda memiliki ambisi yang besar untuk merampas tanah Nusantara ini. Terkadang politik etis ini juga disebut dengan politik paternalistis, yaitu pemerintah yang ingin mengurus kepentingan anak negeri tanpa mengikut sertakan anak negeri. Di bidang politik, pemerintah kolonial membatasi hak pribumi dan untuk menduduki jabatan-jabatan yang penting. Di bidang ekonomi, pemerintah kolonial tidak sungguh-sungguh memberi pelindungan kepada pengusaha pribumi, dengan penguasaan yang terbatas, tapi tuntutan hasil ekonomi tanpa batas.[62]

Politik Etis pun mengalami kegagalan setelah pelaksanaannya terjadi sekitar 14 tahun (1900-1914). Dan inilah yang menyebabkan politik etis gagal:

1. Munculnya pergerakan-pergerakan Nasional Indonesia yang berhasil mempersatukan bangsa Indonesia sebagai satu kekuatan nasional untuk memperoleh kemerdekaan.
2. Munculnya Perang Dunia I yang membuat Belanda carut marut dan akhirnya mendirikan Dewan Rakyat (Volksraad) dan menghadapi tuntutan kelompok Radicale Concentratie.
3. Usaha-usaha yang dilakukan pada saat politik Etis tidak semua berjalan lancar. Misalnya usaha emigrasi yang mulai bertentangan dari ketentuan asalnya. Penduduk Luar Jawa pindah ke Jawa guna menuntut ilmu setinggi mungkin atau sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Dari proses yang dilakukan Belanda dalam memberikan stimulus atas nama peningkatan kesejahteraan pribumi, lambat tapi pasti tetap saja dipahami sebagaian bentuk penjajahan gaya baru hingga mengalami ancaman dari pribumi Nusantara yang mulai tercerdaskan oleh tindakan picik Belanda atas nama kesejahteraan.

62 Moedjanto, *Indonesia abad ke 20 dari kebangkitan Nasional sampai Linggajati* ..,23

D. Latar Belakang Berdirinya Nahdlatut Tujjar

Nahdhatul Ulama sebelum berkembang pesat hingga sekarang terdapat tiga pilar utama sebagai pondasi bagi Nahdhatul Ulama yaitu Nahdhatul Wathan, Taswirul Afkar, dan terakhir Nahdhatut Tujjar. Dalam hal ini ketiga pilar tersebut memiliki peran masing-masing. Adapun Nahdhatul Wathan didirikan pada tahun 1916 oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah atas keprihatinannya terhadap kondisi bangsa yang mana rakyat kurang sadarnya akan ilmu pengetahuan.

Oleh Karena itu, dibentuklah Nahdhatul Wathan sebagai wadah suatu lembaga pendidikan untuk menciptakan kader-kader bangsa yang memiliki nilai dan martabat bagi kaum Kolonialisme. Organisasi ini adalah semacam upaya organisatori dalam mendidik dan menyadarkan orang-orang Muslim menghadapi kondisi yang dihadapi dalam kehidupan.[63]

Pada tahun 1914 Taswirul Afkar didirikan oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah sebagai ruang diskusi para Ulama dan sekarang di kalangan kaum Nahdhiyyin terkenal dengan sebutan bahtsul masail. Munculnya Taswirul Afkar dilatar belakangi atas fenomena di beberapa pesantren besar pada masa penjajahan yang sedang melakukan perubahan. Misalnya Tebuireng mulai dimasuki bahasa Inggris yang mana bahasa tersebut berasal dari kaum penjajah, dan ilmu pengetahuan lainnya seperti geografi, yang menggambarkan bahwa kalangan santri mulai menerima pelajaran umum di pesantren.[64] Begitu juga dengan Nahdhatut Tujjar juga memiliki peran penting sebagai cikal bakal lahirnya Nahdhatul Ulama. Nahdhatut tujjar didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah pada tahun 1918 untuk membenahi perekonomian umat Islam atas keserakahan dan dimonopoli oleh kaum Kolonialisme.[65]

Semangat gerakan Nahdhatut Tujjar adalah agar umat Islam tidak selalu menggantungkan perekonomiannya di bawah tekanan kekuasaan

63 Wasid Mansyur, *Biografi Kiai Ahmad Dahlan: Aktifis Pergerakan dan Pembela Ajaran Aswaja*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 38.

64 Nur Khalid Ridwan, NU & Bangsa 1914-2010, 33-35.

65 Nur Khalid Ridwan, NU & Bangsa 1914-2010, 38.

kaum Kolonialisme, di samping itu juga umat Islam diajarkan agar bisa menjadi mandiri dalam hal perekonomian. Mengingat kekayaan alam Nusantara yang harus dinikmati dengan sepenuhnya. Sebelum Belanda masuk ke Nusantara pada abad 17, rakyat pribumi sudah mengenal adanya perdagangan, pertanian, dan perkebunan.

Nusantara dulu dikuasai oleh saudagar muslim dan berikut ini adalah jalur perdagangan yang digunakan oleh saudagar muslim:

1. Jalur Malaka digunakan oleh saudagar muslim untuk menuju Aceh, Jambi, Banten, dan Gresik.
2. Pelabuhan Pantura di Jawa.
3. Kota pelabuhan Banten menjadi tempat pertemuan antar pedagang asing dari Arab, Cina, Gujarat, Malabar, dan Bengali yang datang untuk mencari lada.

Dilihat dari luasnya jalur perdagangan saudagar muslim, itulah awal mula ketertarikan bangsa colonial Belanda ingin menjajah Nusantara selain karena terkenal suburnya tanah di Nusantara. Transaksi perdagangan di Indonesia diwarnai dua pelaku ekonomi, yaitu pribumi dan non-pribumi. Adapun yang pribumi yaitu rakyat asli Nusantara sendiri.sedangkan yang nonpribumi yaitu berasal dari luar Nusantara seperti, India, Cina, Arab. Para kolonialisme Belanda datang ke Nusantara bukan hanya menggeser para pedagang saudagar muslim, tetapi mereka juga mengubah orientasi jalur perdagangan dari laut ke pertanian. Tanah Nusantara ini yang asalnya bangsa pelaut menjadi agraris (pertanian). Mereka kaum kolonialisme melakukan perubahan tersebut karena ingin membenahi Negaranya sendiri yang habis dibuat carut marut pada waktu perang Dunia kedua.[66]

Dalam hal ini keadaan Nusantara sangatlah memprihatinkan, rakyat pribumi diperbudak secara halus oleh kaum kolonialis. Para pengusaha yang berasal dari pribumi hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi ambisi kaum kolonialisme. Apalagi dengan program-program kebijakan politik kaum kolonialis Belanda yang menambah

66 Adien Jauharuddin, *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar*, 17-25

kesengsaraan rakyat pribumi. Asalnya kaum kolonialis berjanji akan memberikan kesejahteraan tetapi malah kesengsaraan yang didapat. Melihat persoalan diatas, para pedagang desa di daerah Cukir Jombang yang tinggal di sekitar pabrik gula memprakasai didirikannya Nahdlatut Tujjar. Dorongan dari pedagang kota lah yang ingin agar kesengsaraan rakyat pribumi terselesaikan. Kenapa berdirinya Nahdlatut Tujjar di sekitar para pedagang gula karena pada saat itu di Pulau Jawa sangat didominasi oleh hasil-hasil pertanian yaitu tebu, kopi, nila dan juga perkembangan pabrik-pabrik gula di daerah Pulau Jawa sudah banyak yang bermunculan karena pada saat itu para Kolonialis Belanda menaruh perhatian terhadap sektor pertanian yang berada di Pulau Jawa. Sejak kebijakan tanam paksa yang dilakukan pada tahun 1930-1970 oleh kaum Kolonialis Belanda mengakibatkan sektor pertanian di Pulau Jawa terfokus kepada komoditas gula dan kopi.

Meskipun industri gula sangat bagus jika dikelola dan tidak begitu susah merawatnya. Namun ternyata industri memiliki kelemahan yaitu: 1. Berada di pedesaan sehingga bukan indsutri asli, tetapi akan dibawa ke pusat kota dan minim sekali akan hasil. 2. Tanaman gula cara perawatannya harus tepat karena dia sangat rentan jika pada masa yang lama.

Tujuan didirikannya Nahdlatut Tujjar agar kepedulian boemi putra bangkit kembali setelah semakin berkurangnya orang pribumi yang belajar syariat Islam. Di sisi lain sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda tidak menghargai orang beragama artinya di dalam pelajaran sekolah tidak diajarkan tentang KeIslaman. Dapat dikatakan seperti itu karena umat Islam sering bertajarrud (memisahkan diri) dari para Kiai, Syaikh maupun ulama-ulama sehingga pola pikir mereka hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari tanpa bersusah payah, akhirnya mereka pun hanya menopang hidup dari bantuan orang-orang kaya meskipun mereka akan terlihat bodoh dimata orang-orang kaya tersebut. Akibat dari jarangnya berkumpul dengan orang-orang sholih atau orang berilmu, mereka menghalalkan semua cara untuk

mendapatkan sebuah uang. Mereka juga memiliki sikap yang acuh tak acuh terhadap agamanya sendiri, mereka sudah merasa pintar tanpa harus belajar apalagi tentang syariat Islam.[67]

Menurut hasil pengamatan Jarkom Fatwa bahwa deklarasi Nahdlatut Tujjar berfokus pada masalah pendidikan dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda karena sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda dianggap Nahdlatut Tujjar tidak mengajarkan tentang syariat Islam akan tetapi sekolah Belanda tersebut mempelajari tentang perlawanan terhadap orang Islam. Selain itu para ulama-ulama juga merasa kesulitan dalam hal berdakwah karena tidak adanya dorongan ekonomi sehingga orang-orang tidak mau menuruti nasehat-nasehat yang diberikan oleh para Ulama-ulama tersebut. Sedikitnya pengetahuan mereka tentang syariat Islam itulah yang membuat mereka lemah imannya. Oleh karena itu, adanya Nahdlatut Tujjar agar para ulama juga bisa berdagang sambil berdakwah.[68] Ada kesadaran berdakwah sekaligus kesadaran berekonomi.

Nahdlatut Tujjar didirikan bukan hanya untuk membangun basis perekonomian para ulama, melainkan menjaga tradisi perdagangan yang sudah ada sejak sebelum datangnya kolonial dan turut menciptakan pasar sendiri di daerah Surabaya, Kediri, dan Jombang. Lebih dari itu, Nahdlatut Tujjar juga memiliki cita-cita ideal untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kemaksiatan, dan kebodohan. Tiga wilayah tersebut dinamakan segitiga emas karena ketiga wilayah tersebut memiliki persamaan menjadi pusat kota perdagangan dan memiliki komoditas yang baik. Oleh Karena itu, Kiai Wahab Hasbullah memiliki pemikiran untuk memperbaiki perekonomian masyarakat muslim, khususnya Jawa karena Kolonialisme Belanda saat mulai menjajah di tanah Nusantara, mereka melirik Pulau Jawa untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan politik ekonominya karena jumlah penduduknya yang lebih banyak

67 Jarkom Fatwa, *Sekilas Nahdlatut Tujjar*,.. 15-16.

68 Jarkom Fatwa, *Sekilas Nahdlatut Tujjar*,..18.

daripada di luar Pulau Jawa dan juga memiliki jalur transportasi yang lebih mudah.

Tekad ini yang kemudian pergerakan ekonomi umat dapat berkembang dengan baik secara berorganisasi. Banyak sekali problematika-problematika lahirnya Nahdlatut Tujjar karena ketidak sadaran orang muslim dibodohi oleh kaum kolonialis yang bukan saja bertujuan menjajah, tetapi juga menguasai aset-aset ekonomi. Adapun Nahdlatut Tujjar ada karena ekspresi ustadz dan para ulama melihat adanya kemaksiatan terjadi dimana-mana itu sebagai implikasi dari kebijakankebijakan kaum kolonialis yang selalu menjauhkan rakyat pribumi dari agamanya. Kemiskinan pun terjadi karena pajak-pajak yang semakin mencekik para rakyat pribumi yang tidak sesuai dengan upah yang mereka terima selama bekerja dibawah kekuasaan kaum Kolonialis, pembodohan yang terus menerus terjadi dan mereka pun tidak berdaya untuk membenahi hal tersebut.

Karena pentingnya kebangunan ekonomi masyarakat muslim, kiai Hasyim Asy'ari mengatakan:

> *"Wahai pemuda bangsa yang cerdik pandai dan para ustad yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi, dimana disetiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom."*

Merujuk dari situ koperasi syirkah al-inan dibentuk oleh Kiai Hasyim Asy'ari,[69] dengan tujuan untuk memperkuat jaringan ekonomi dikalangan umat Islam, khususnya Muslim tradisional. Namun sayangnya, umur Nahdlatut Tujjar tidaklah lama hanya bisa bertahan sampai 8 tahun (1918-1926) menghimpun para pedagang muslim untuk memperkuat ekonomi umat.[70] Karena Pemerintah Kolonial Belanda melalui peraturan-peraturannya yang mempersulit

69 Nur Khalid Ridwan, *NU dan Bangsa* 1914-2010,.... 39.

70 Adien Jauharuddin, *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar*,.... 59.

perkembangan koperasi seperti pembebanan biaya mahal melalui notaris, penggunaan bahasa Belanda dan lain sebagainya.

E. Peran Kiai dalam Nahdhatut Tujjar

Di daerah Jawa penghormatan tinggi terletak pada guru agama atau yang bisa juga disebut dengan Kiai. Adapun penyebutan tersebut karena mengikuti dari ajaran sebelum datangnya Islam yaitu Animisme dan Dinamisme. Animisme dan Dinamisme adalah ajaran menyembah roh-roh nenek moyang yang meletakkan penghormatan tinggi pada seorang dukun. Mengapa dinamakan seorang Kiai karena seorang Kiai banyak mengetahui selak beluk tentang ajaran Islam.[71] Pengabdian seorang Kiai untuk mengembangkan lembaga yang dikelolanya tanpa mementingkan kepentingan pribadi, merupakan sifat ikhlas timbal balik antara diri seorang santri dan Kiai. Begitu juga dengan para kiai mendidik anak santri dengan penuh keikhlasan tanpa adanya pamrih karena mereka ikhlas berjuang di jalan Allah.

Oleh karena itulah, Kiai-Kiai di desa sangat disegani oleh orang-orang sekitar. Dalam hal ini seorang kiai ikhlas melakukan suatu hal yang memiliki nilai badah. Konsep lillahi ta'ala inilah yang menghindarkan mereka pada keduniawian *(Zuhud)*. Pada akhirnya pun seorang kiai juga perlu menanamkan kepada orang-orang sekitar atau bahkan santrinya konsep tersebut agar mereka tidak hanya memikirkan duniawi saja melainkan akhirat pun harus dipikirkan. Respon masyarakat terhadap seorang Kiai tidak saja sebagai orang yang lebih dalam ilmu agamanya, tetapi juga sebagai tempat bertanya dan meminta fatwa, maka secara tidak resmi telah tampil sebagai pemimpin yang kharismatik.[72]

Kiai sebagai pemimpin di kalangan umat muslim tidak bisa diragukan lagi juga menjadi penggerak pejuang bangsa. Sejak zaman kolonial Belanda para Kiai banyak yang memimpin rakyat untuk mengusir para penjajah. Salah satu contohnya K.H. Hasyim Asy'ari,

71 Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam: di Indonesia 1900-1942,* (Jakarta: LP3ES, Anggota IKAPI, 1990), 19.

72 Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, 7.

K.H. Wahab Hasbullah dan masih banyak lagi. K.H. Wahab Hasbullah sangat berperan penting dalam mempertahankan kondisi masyarakat muslim yang selalu kebahagiaannya dirampas oleh kaum kolonialis.[73]

Melihat hal itu, Kiai Wahab Hasbullah mempunyai keinginan untuk mewujudkan perekonomian umat Islam bisa mandiri tanpa bantuan kaum penjajah. Untuk mengenal lebih dekat, Kiai Wahab Hasbullah adalah salah satu putra dari pasangan KH.Hasbullah Said dengan Nyai Lathifah. Beliau lahir dari keluarga pesantren pada tahun 1888 di desa Tambakberas Jombang. Kiai Wahab Hasbullah masih memiliki ikatan saudara dengan Kiai Hasyim Asy'ari, apabila disambungkan dengan nasabnya akan bertemu dengan Kiai Abdusaalam. Oleh karena itu, tidak heran jika Kiai Wahab Hasbullah banyak mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren. Diantaranya 1. Pesantren Langitan, Tuban 2. Pesantren Mojosari, Nganjuk 3. Pesantren Cempaka 4. Pesantren Tawangsari, Sepanjang 5. Pesantren Kademangan Bangkalan, Madura (Kiai Kholil Bangkalan) 6. Pesantren Branggahan, Kediri 7. Pesantren Tebuireng, Jombang (Kiai Hasyim Asy'ari).

Setelah lama mengenyam pendidikan di beberapa pesantren Kiai Wahab tersebut pada saat Kiai Wahab Hasbullah berumur 27 tahun, beliau ingin lebih memperdalam keilmuannya. Akhirnya beliau memilih kota Makkah untuk lebih belajar tentang ilmu agama disana. Hingga beliau berhasil menguasai beberapa ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadist, fikih, akidah, tasawuf, nahwu, shorof, ma'ani, manthiq, „arudl, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Kiai Wahab belajar di Kota Makkah selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu pula beliau bertemu guru-guru hebat dan ulama-ulama terkemuka yang berada di kota tersebut untuk memperdalam ilmu agamanya kepada. Diantaranya : 1. Kiai Mahfudz Termas 2. Kiai Muchtarom Banyumas 3. Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau 4. Syaikh Sa'id Al-Yamani 5. Syaikh Ahmad Abu Bakri Satha Selama berada di kota tersebut beliau juga tidak hanya belajar tentang ilmu agama tetapi beliau juga belajar tentang ilmu

73 Umi Masfiah, *Pemikiran Pembaharuan K.H. Abdul Wahab Hasbullah terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama (NU),* (Jurnal Ihya' Ulum Al-din vol. 18 No 12 2016), 220

berorganisasi dan pergerakan. Bersama dengan teman seperjuangannya yang berada dalam satu kota Makkah mereka memolopori berdirinya SI (Syarikat Islam) di Makkah. Teman seperjuangan diantaranya Kiai Abbas dari Jember, Kiai Asnawi dari Kudus, dan Kiai Dahlan dari Kertosono.[74]

Pada akhir tahun 1914-1915, sepulangnya Kiai Wahab Hasbullah dari masa belajarnya di kota Makkah beliau tidak langsung pulang ke kota kelahirannya yaitu Tambakberas Jombang. Namun beliau malah lebih memilih tinggal di kota Surabaya. Kiai Wahab Hasbullah memiliki alasan mengapa harus kota Surabaya tujuannya yang pada saat itu Surabaya pusat pertumbuhan organisasi pergerakan dan bertemunya para aktifis juga sebagai tempat berkembangnya perdagangan dan tidak dapat diragukan lagi jika Kiai wahab Hasbullah memiliki pemikiran untuk mengubah perekonomian umat Muslim melihat silsilah beliau dan juga nasab-nasab beliau. Kiai Wahab Hasbullah sangat menaruh perhatian terhadap perekonomian masyarakat Muslim yang berada di Jawa.

Masyarakat Muslim tidak bisa mengambil sikap tegas dan melawan para kaum kolonialisme karena pengaruh dibawah kekuasaannya. Begitu pula dengan para pengusaha pribumi sendiri yang hanya tergilagila oleh janji semu Kolonialis yang mana apabila mereka membantu Kolonialis maka akan diberikan kedudukan atau jabatan yang terbaik dan harta yang lebih banyak. Dalam hal ini mereka para pengusaha pribumi hakekatnya hanya dimanfaatkan saja. Nahdlatut Tujjar ingin mengangkat kehidupan masyarakat dalam perekonomian, serta memerangi kolonialisme yang telah melahirkan aneka bentuk eksploitasi dan penindasan di sisi lainnya. Kiai Hasyim As'ary juga mendirikan koperasi yang bergerak di dibidang pertanian yaitu Syirkah Alinan sebagai bagian gerakan Nahdlatut Tujjar. Keuntungan yang diperoleh oleh badan usaha tersebut akan digunakan untuk membangun sebuah masjid dan pesantren.[75]

74 Muhammad Rifai, *K.H. Wahab Hasbullah: Biografi singkat 1888-1971*,...21-25.

75 Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan spirit Tashwirul afkar, Nahdlatul wathan, dan Nahdlatut Tujjar*, 214.

Adapun yang menjadi ketuanya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, dan yang bertugas menjadi bendaharanya adalah Kiai Wahab Hasbullah. Sebelum itu Kiai Wahab Hasbullah sowan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan sebuah gerakan ekonomi yang berbasis memperbaiki perekonomian umat Islam. Melihat kesungguhan Kiai Wahab Hasbullah yang ingin memperbaiki perekonomian umat muslim. Akhirnya kyai Hasyim Asy'ari mengijinkan mendirikan Nahdlatut Tujjar.

Nahdlatut Tujjar ini didirikan oleh 45 pedagang yang berada di jalur segitiga emas Jawa Timur, Surabaya, Jombang, Kediri. Diantara 45 pedagang tersebut 2 diantaranya adalah tokoh ulama yang sangat disegani yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Dalam fiqh Islam dalam bermuamalah diajarkannya dengan kerja sama atau biasa yang disebut dengan bersyarikat. Maka dari itu Kiai Wahab Hasbullah yang memiliki ide tentang membangun perekonomian umat muslim mengajak teman-teman sejawatnya untuk turut andil dalam badan usaha tersebut. Modal awal yang diberikan oleh penanam saham dari 45 orang tersebut berbeda-beda diantaranya Kiai Hayim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri menyerahkan masing-masing 25 gulden. Sebanyak 40 orang juga menyerahkan masing-masing 25 gulden. Hanya ada 2 orang yang menyerahkan 50 gulden yaitu Moh. Arif (Kabuan, Kudu, Jombang) dan Kiai Abdussyakur (Ngampel, Ngoro, Jombang). Total keseluruhan dari modal awal tersebut yaitu (43x25)+(2x50) =1175 gulden.

Jalur distribusi perdagangan Nahdlatul Tujjar meliputi berbagai pasar-pasar daerah di Jombang, Surabaya dan Kediri yang berada dalam struktur geografis pasar rakyat. Tidak heran apabila Nahdlatul Tujjar cukup mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adapun jenis komoditi yang diunggulkan dari Nahdlatul Tujjar yaitu hasil pertanian, perkebunan, dan juga barang-barang kebutuhan pokok seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, gula, buah-buahan, kopi, minyak goreng dan sabun.[76] Beragam jenis

76 Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU*.... 26.

barang ini menandakan perekonomian Muslim Jawa cukup beragam. Mengingat Nahdlatut tujjar beroperasi pada tiga wilayah, yaitu Surabaya, Jombang, dan Kediri, maka penulis menjelaskan tentang kondisi tiga wilayah tersebut. Tiga wilayah tersebut juga disebut sebagai segitiga emas. Pertama, Kondisi kota Surabaya saai itu merupakan kota perindustrian. Selain itu merupakan kota minyak yang kaya sehingga merupakan pusat perdagangan dunia yang telah menerapkan teknologi paling canggih produk revolusi industri. Dimana kota Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua Hindia Belanda yang menjadi pusat masyarakat kosmopolit dan kawasan perdagangan yang sedang berkembang.[77] Maka tidak aneh kalau para Kiai pesantren di kota tersebut banyak terlibat dalam berbagai perdagangan baik antar kota, antar pulau bahkan perdagangan antar benua.[78]

Selain itu juga kota Surabaya disebut multietnis kaya akan budaya, beragam etnis banyak terdapat di kota Surabaya. Seperti Etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara juga terdapat pada kota Surabaya diantaranya Madura, Batak, Sunda, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan hal inilah membentuk kota Surabaya sebagai Pluralisme budaya. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan pegawai.[79] Hingga sekarang pun kota Surabaya terkenal dengan multietnis, dalam hal ini terlihat jelas di dalam kawasan Ampel, Surabaya. Kedua, kota Kediri termasuk salah satu kota tua karena menjadi saksi dari runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Kota Kediri terkenal dengan religiusnya karena peran ulama banyak yang menonjol di kalangan masyarakat. Masyarakat Kediri menjadikan seorang Ulama sebagai panutan dalam belajar agama dan kota Kediri masyarakatnya sangat suka bergotong royong, bermusyawarah dan sering melakukan hal-hal positif. Ketiga, kota Jombang Kota Jombang juga disebut dengan kota santri karena banyak para ulama yang lahir

77 Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara,* 6.

78 Abdul Mun'im DZ, *Piagam Perjuangan Kebangsaan,* 26.

79 Adien Jauharuddin, *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar*,50

dari kota ini, seperti KH. Hasyim As'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Sansuri dan masih banyak lagi. Kota Jombang atau kota santri mendapat julukan seperti itu karena juga banyak terdapat pesantren-pesantren yang hampir daerah memilikinya.[80]

Perekonomian Jombang ditopang oleh beberapa sektor yaitu perkebunan, pertanian, dan industri. Perkebunan meliputi tebu, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, gula, dan lain-lain. Pertanian meliputi padi dan palawija, padi, jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian. Industri meliputi sandang, makanan, kerajinan. Pengaruh penyebaran Islam yang lebih bercorak sufistik telah mempengaruhi pola pikir masyarakat pribumi. Kedatangan kelompok sufi atau tareqat mulai menggoyahkan bangunan yang sudah dibangun oleh para penyebar Islam sebelumnya, dan dampak yang paling nyata adalah pergeseran orientasi dari fiddunya hassanah (harapan akan kebaikan dunia) ke fil akhiroti hassanah (harapan akan kebaikan akhirat). Akibat pergeseran tersebut para saudagar mulai kendor semangatnya untuk berdagang, mereka tidak lagi mementingkan kemajuan-kemajuan usahanya. Saudagar muslim beranggapan bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, semisal usahanya berhasil maka akan berhasil begitupun sebaliknya jika usahanya gagal maka akan gagal. Dari situlah para pedagang di wilayah Jombang, Surabaya dan Kediri mengalami kekhawatiran dengan adanya kelompok sufi tersebut. Begitupun Kiai Hasyim merasa sangat khawatir karena keadaan sebelum datangnya kelompok sufi sedang menggebu-nggebunya semangat mereka. Kalau tidak segera diantisipasi, nantinya kelompok yang akan menang adalah kelompokkelompok non muslim dan kelompok Islam kembali terpinggirkan lagi.[81]

Jadi peran Kiai Hasyim bersama dengan Kiai Wahab sangat berpengaruh dalam pembangunan perekonomian masyarakat yang mana pentingnya adanya kerjasama diantara kalangan profesional dan agamawan sebagai pondasi badan usaha dan juga Nahdlatut

80 Arina Wulandari, *KH. Abdul Wahab Chasbullah: Pemikiran dan Peranannya dalam Taswirul Afkar (1914-1926 m)*, (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 15.

81 Adien Jauharuddin, *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar*, 57-58.

Tujjar juga sebagai pendanaan kesejahteraan para pendidik seperti pendanaan pada Taswirul Afkar dan juga bisa mencegah kemaksiatan melalui pengentasan kemiskinan.

Keterlibatan Kiai Wahab dalam dunia usaha terus berlangsung dan berkembang pesat. Beliau mewakili para Ulama di Jeddah dan Makkah untuk mengelola jamaah haji dari Indonesia. Ketika ayah mertuanya meninggal, maka Kiai Wahab menggantikan kedudukannya, mengelola sebuah maskapai pelayaran bernama Kongsi Tiga yang mengangkut jamah haji dari Indonesia menuju ke Jeddah. Keberhasilannya itu juga karena Kiai Wahab banyak memiliki relasi-relasi yang dibangun oleh beliau ketika masih belajar di Makkah.[82] Itulah gambaran sekilas bagaimana peran Kiai sangat penting dalam membangun perekonomian umat, khususnya Muslim di Jawa. Karenanya, sejarah Nahdlatut Tujjar tidak bisa dilepaskan dari peran Kiai dalam menggerakkan kesadaran perekonomian bersama dengan pengusaha Muslim lainnya.

F. Nahdlatut Tujjar sebagai Gerakan Ekonomi

Kedatangan Kolonial Belanda pada abad 17, telah mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat Muslim, khususnya Jawa. Penindasanpenindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda sangatlah tidak manusia hingga masyarakat Nusantara menjadi budak di Negaranya sendiri, termasuk masyarakat Muslim. Bangsa kolonial Belanda datang ke Nusantara kemudian menciptakan program-program ekonomi bagi masyarakat Islam, khususnya Jawa hanya untuk membuat hidup Penduduk Hindia Belanda sengsara, sekalipun dengan politik etis yang pernah diterapkan. Dimana Kolonial Belanda membuat program-program tersebut demi menguntungkan pihak Pemerintah Belanda, sementara pihak penduduk pribumi hanya menerima kesengsaraan hidup sebab tidak sepenuhnya menikmati hasil alam yang melimpah.

82 Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, dkk, *KH. Abdul Wahab Hasbullah: Perintis, Pendiri, dan Penggerak NU*, (Jakarta: Panitia Penulisan Buku sejarah, 1999), 41-42.

Maka dari itu Kiai Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatut Tujjar bersama para kiai pesantren, pengusaha-pengusaha Muslim dan para pedagang. Tidak ada tujuan dari berdirinya, kecuali menguatkan gerakan ekonomi umat untuk melawan model kapitalisme ekonomi yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Kiai Wahab Hasbullah beserta teman-temannya mendirikan sejak awal memastikan bahwa peran Nahdlatut Tujjar adalah dalam memberdayakan ekonomi umat. Karenanya, keinginan mulia ini mendapat dukungan dari para pendiri NU, yang kebanyakan adalah para pedagang atau sekurang-kurangnya mempunyai unit produksi yang membuat mereka bisa mandiri secara ekonomi. Berkaitan dengan pendirian Nahdlatut Tujjar, Kiai Hasyim Asy'ari meminta rasa peduli Ulama terhadap masyarakat Muslim karena banyaknya permasalahan terhadap perekonomian umat. Kiai Hasyim Asy'ari melakukan hal seperti itu kepada para Ulama karena mereka pemimpin dan panutan umat.[83] Semangat Kiai Hasyim bisa dimaknai sebagai pembuktian bahwa tugas Kiai atau agamawan bukan saja menjadi sumber pengetahuan ilmu agama, tapi harus ada dalam dirinya keterlibatan menyelesaikan problem keumatan, khususnya ekonomi mengingat pesan akan mereka yang miskin akan berdampak pada prilaku kufur. Sesungguhnya banyak hal yang menyebabkan perlunya didirikan organisasi ini. Satu hal yang terpenting adalah para ulama merasa khawatir terhadap kondisi masyarakat Muslim yang mana kondisi watak dan mentalitas dulunya sarat dengan etos kerja dagang dan kemandirian.

Sebagai bangsa yang berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu bangsa Indonesia mengalami kondisi yang memperihatinkan. Disinilah Nahdlatut Tujjar dihidupkan untuk memperkuat gerakan ekonomi, dan bersama menguatkan untuk melawan penguasaan sepihak aset ekonomi oleh Belanda. Saudagar ulama-santri konsolidasi dan lahirlah organisasi ini sebagai wahana dakwah, khususnya dari jalur ekonomi, yang kemudian bisa

83 Adien Jauharudin, *Menggerakan Nahdlatut Tujjar*, 43-59.

membesarkan jamiyah untuk melebarkan kekuatan anti-kolonial barat.[84] Maksudnya, organisasi ini bukan saja dalam rangka ekonomi semata, tapi juga dalam rangka dakwah. Dari sini bisa dipahami bahwa dakwah ideologi *Ahl al-Sunnah wa alJama'ah* atau pengorbanan untuk memperjuangkan bangsa tidak akan maksimal, bahkan bisa mengalami kelemahan, jika tidak ditopang oleh kekuatan ekonomi yang memadai. Hanya saja yang harus dipahami bahwa berdirinya Nahdlatut Tujjar dalam rangka menguatkan ekonomi umat dengan bentuk beroorganisasi, bukan bergerak sendiri-sendiri. Dengan berorganisasi pergerakan dan kesadaran berekonomi akan tumbuh dengan mimpi dakwah sebagaimana disebutkan, yakni mempertahankan paham Aswaja dan usaha untuk membebaskan bangsa dari cengkraman kolonial Penjajah. Mayoritas warga Nahdliyin berada dalam lingkungan pedesaan, yakni bertani dengan tanaman yang berbeda-beda.

Melihat kondisi ini perlu adanya pengembangan ekonomi. Hal ini disadari para Kiai sesuai dengan semangat yang ada dalam sabda Nabi Muhammad Saw. yang artinya "kefakiran akan mendekatkan pada kekufuran". Itu artinya, usaha pendirian Nahdlatut Tujjar mencerminkan semangat bahwa dalam ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan dasar akan sangat mempengaruhi keimanan dan keIslaman seseorang. Pergerakannya berbanding lurus dengan konsistensi dan fokus yang menjadi sasaran pasarnya. Dalam perkembangannya, sekalipun Nahdlatut Tujjar telah mati sejak tahun 1926, spirit gerakan ekonomi yang ada didalamnya terus mempengarui perjalanan organisasi Muslim tradisional, khususnya NU. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, di antaranya: Pertama, pesantren sebagai kelompok utama bagi NU. Sasarannya pada studi kebutuhan dan kelayakan usaha, serta akses permodalan, kecakapan SDM, dan ketekunan induknya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pesantren sesungguhnya sudah tak asing dengan gerakan ekonomi, produk-produk pesantren seperti Kopontren pada masa lampau

84 Hamzah Sahal, www.nu.or.id/post/read/76152/nu-ekonomi-dan-politik-kemaslahatan dikutip pada tanggal 16 Juni 2020.

termasuk produk yang kita banggakan bersama. Kedua, warga Pedesaan. Dalam kontek ini, PCNU dan MWCNU bisa mengenali warganya yang telah menekuni pada bidang-bidang tertentu. Mereka yang menjadi petani, nelayan, pengrajin, peternak, pelaku UKM, bisa didata sehingga betul-betul bisa dijadikan acuan untuk menyalurkan bantuan dan bentuk-bentuk dukungan lainnya, seperti akses pelatihan, permodalan, dan lain lain. Ketiga, jenis usaha yang dimiliki oleh seseorang. Adanya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang membuat kesejahteraan warganya sesuai ahli mereka di bidangnya masing-masing.

Semangat ini diharapkan dalam pemetaan ekonomi yang dimiliki warga sehingga proses pendistribusian akan lebih terarah sebagai dengan semangat perekonomian. Pada intinya, semangat organisasi Nahdlatut Tujjar sebagai gerakan ekonomi bagi kaum Muslim Tradisional, yang kemudian menjadi kaum Nahdliyin. Semangat gerakan termuat dalam statuennya NU (AD/ART) Fatsal 3 poin f yang berbunyi:

> *"mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara' Agama Islam".*

Dari sini sangat jelas bahwa NU harus memperhatikan sektor-sektor penggerak ekonomi. Orientasi politik yang sangat kuat dari sebagian besar kaum Nahdliyyin harus dibarengi orientasi pengembangan ekonomi umat yang bermuara pada kesejahteraan warga. Dengan begitu kelahiran Nahdlatut Tujjar adalah titik pijak sejarah yang harus menjadi perhatian besar bagi perjalanan lahir dan perkembangan NU dikemudiaan hari, yang berdiri pada 31 Januari 1926. Pelajaran dari kehadiran Nahdlatut Tujjar adalah kesadaran berekonomi harus dilakukan sesuai tuntuntan Islam, yang hasilnya untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat.

G. Nahdlatul Ulama dan Kemandirian Ekonomi

Istilah kemandirian menunjukan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan

dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya.[85] Kemandirian adalah sikap mengatasi suatu permasalahan dengan mengutamakan kemampuan diri sendiri tanpa menutup diri dari orang lain. Dan juga memiliki suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Pembangunan di bidang ekonomi ini tidak selalu berhasil dalam memperbaiki perekonomian masyarakat secara merata. Faktor penyebab ketidak berhasilan pembangunan ekonomi pada masyarakat yaitu pertama, pembangunan ekonomi itu hanya mengutamakan pertumbuhan. Kedua, adanya birokrasi yang tidak efisien, dalam hal ini hanya yang memiliki suatu kelompok elit yang bisa menikmati pembangunan tersebut. Adapun golongan kecil tidak mampu mengambil manfaat-manfaat dari pembangunan tersebut. Sikap kemandirian haruslah menjadi tolak ukur masyarakat pribumi apakah mereka berhasil lepas dari ketergantungan pada suatu industri. Apakah mereka berhasil memupuk modal sendiri dan tidak meninggalkan hutang pada luar negeri.

Sejarah Nahdlatul Ulama dan peranannya dalam pembangunan pertanian Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat yang didirikan oleh KH.Hasyim Asyari pada tahun 1926 dan salah satu tujuan berdirinya NU yaitu menyejahterakan para petani desa. Hal ini sesuai dengan salah satu Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama pasal 6 ayat ke 4 yang berbunyi : di bidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomim rakyat. Dan juga termaktub pada pasal 6 ayat 5 yang berbunyi : Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak (*Maslahat al-ammah*), guna terwujudnya khaira

85 Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 131

ummah. Kiai Hasyim juga menyerukan beberapa cara mengelola suatu badan usaha dengan baik.5 Pasal ini menegaskan bagaimana keterlibatan kiai sangat penting dalam perjalangan Nahdlatut Tujjar. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama memiliki peran aktif untuk membangun pertanian yang berada di pedesaan dengan para Ulama, santri dan masyarakat desa sekitar. Mereka bergotong royong bukan dari hal fisiknya tapi dari materi juga, menanamkan modal hingga pemasaran produk yang dihasilkan.

Kiai Hasyim memiliki pola pikir perekonomian yang merujuk kepada pusat kota, bukan Kiai Hasyim meragukan perekonomian pedesaan namun itu adalah usaha beliau agar pedagang dari kota bisa merangkul pedagang yang dari desa dan menjadi satu rantai mata bisnis yang sekarang bisa disebut dengan linkage, supply chain dan holdings. Kiai Hasyim mengatakan bahwa pengelolaan badan usaha harus dikelola dengan baik (*good corporate governance*: GCG) yang salah satu prinsipnya mengelola usaha dilakukan dengan modern. Yaitu memisahkan pemilik usaha dengan manajer perusahaan, kenapa hal itu dilakukan karena ingin memaksimalkan nilai perusahaan atau para pemilik perusahaan. Jadi baik pemilik usaha ataupun manajer perusahaan bisa fokus bekerja sesuai bidangnya. Kiai Hasyim menyeru badan usaha yang beroperasi bertujuan menghidupi para pendidik dan pencegah laju kemaksiatan. Seruan yang sangat visioner dimana apa yang disampaikannya tersebut saat ini menjadi salah isu sentral dalam bidang manajemen perusahaan, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR).[86] Adapun arti CSR itu sendiri yaitu suatu komitmen yang dipegang oleh sebuah perusahaan yang memberikan konstribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat sekitar, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarga.

86 Muslimin,"*Menguatkan kembali Semangat Nahdlatut Tujjar*", http://www.nu.or.id/post/read/92301/menguatkan-kembali-semangat-nahdlatut-tujjar, 30 Juni 2020

H. Semangat Nahdlatut Tujjar dalam Konteks Kekinian

Dibentuknya Nahdlatut Tujjar bukan hanya untuk membangun basis perekonomian para ulama saja tetapi juga untuk menjaga tradisi sebagai bangsa agraris serta turut menciptakan pasar sendiri di daerah Jombang, Kediri, dan Surabaya. Semangat Nahdlatut Tujjar di kalangan Nahdhliyin seharusnya lebih ditingkatkan lagi, misalnya melalui industri kreatif inovatif dan mandiri yang mampu bersaing dan bertahan di ekonomi global. Spirit Nahdlatut Tujjar bisa dilihat dari hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 pada tanggal 08-12 Desember 1984 di Sukorejo Situbondo;

"Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan solidaritas sosial perekonomian perlu mengadakan pendekatan dengan kelompokkelompok lain yang bergerak di bidang ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan hendaknya dilaksanakan dengan cara seefektif mungkin untuk menghindari terjadinya dominasi ekonomi oleh golongan tertentu dalam rangka perekonomian Pancasila."

Kutipan ini memastikan bahwa NU masih peduli pada ekonomi, yang mana perlu adanya solidaritas sosial yang tinggi sehingga secara perlahan ekonomi Kapitalisme yang ada di Indonesia bisa disingkirkan. Semangat Nahdlatut Tujjar (perekonomian) di masa sekarang sudah mulai diterapkan melalui gerakan pemberdayaan ekonomi umat maupun menata amal usaha NU berbadan hukum yang dibuat oleh warga NU atau oleh lembaga NU. Industri kreatif maupun perdagangan berbasis NU juga banyak berkembang misalnya pembuatan batik, sarung, kopiah, mukena, dan aneka produk konsumsi lain.[87]

Nahdlatul Ulama menaruh perhatian sangat besar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan itu bisa dibuktikan dari keputusankeputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 24 hingga ke 31, perekonomian masyarakat selalu menjadi pusat perhatian bagi semua kalangan Nahdlatul Ulama. Dari keputusan Muktamar-muktamar NU tersebut semakin memperjelas bahwa spirit Nahdlatut Tujjar masih ada

87 Adien Jauharudin, *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar*, 204

bahwa Nahdlatul Ulama itu harus menjalin perekonomian dengan pihak lain. Gerakan ekonomi yang kongkrit dilakukan oleh NU, contohnya dalam sambutan Khofifah IndarParawangsa dalam menghadiri peringatan hari santri nasional 2018 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Tulungagung bahwa Nahdlatut Tujjar perlu diperkuat kembali lagi di era ekonomi digital, dimana saat ini NU memiliki layanan pendidikan, kesehatan dan layanan lembaga sosial telah merata.

Di era ekonomi digital ini menjadi salah satu tantangan dan peluang bagi warga NU untuk penguatan disektor ekonomi yang ditunjang dengan keberadaan santri milenial di lingkungan Nahdlatul Ulama. Untuk memulai penguatan ekonomi tidak harus menyiapkan sarana dan prasarana hanya saja menyiapkan infrastruktur aplikasi dengan mekanisme ekonomi digital. Karena saat ini elemen-elemen NU sangat banyak menguasai dunia IT.[88]

Contoh aplikasi yang sudah dibentuk oleh milenial NU diantaranya NU online, aplikasi tersebut mengumpulkan tentang quotes-quotes para Kiai saat ini. Di samping itu ada beberapa penjualan online yang diciptakan oleh warga NU , yaitu lapaknu.com, tokoh buku aswaja Surabaya. Sekarang menjual buku-buku berbasis NU, sarung, mukenah, dan lain sebagainya bisa melewati online. Warga Nahdliyin sekarang harus pandai-pandai memanfaatkan kecanggihan teknologi guna untuk mengentaskan ekonomi Kapitalisme yang ada di Indonesia. Terciptanya Nahdlatut Tujjar membuat para Ulama mendirikan koperasi-koperasi yang berasaskan Islam. Dalam hal ini pembangunan ekonomi Nasional lebih menekankan pada pengembangan potensi rakyat dan kekayaan Indonesia, dengan berusaha memakai modal sendiri tanpa meminjam modal asing.[89]

Seharusnya kita bangsa Indonesia, khususnya umat Muslim bisa menciptakan kemandirian yang ekonomi karena zaman sekarang sudah dikelilingi oleh manusia-manusia mesin, maksudnya robot. Pertarungan

88 Anggi Septian Andika Putra, *Khofifah Sampaikan Ekonomi Digital dan NahdlatufTujjar* : Hari Santri Nasional Tulungagung, JawaPos (7 Juli 2019), 9

89 Adien Jauharudin, *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar*, 204

perekonomian sekarang semakin gencar di Indonesia, bisa dilihat dari banyaknya supermarket-supermarket yang didirikan oleh Negara asing yang menawarkan harga-harga diskon namun sebenarnya itu hanyalah permainan Kapitalisme, maka dari itu masyarakat Muslim tergiur dengan harga murah, apalagi kebutuhan pokok sehari-hari. Toko-toko kecil kebutuhan pokok terpinggirkan, padahal sebagai masyarakat Muslim kita harus menyingkirkan Negara asing Kapitalisme yang berusaha menguasai perekonomian Indonesia.

***

Ketika Indonesia memasuki fase krisis, maka pesantren selalu hadir sebagai penyelamat

Puan Maharani
ketua DPR RI 2019-2024

BAB II

ADDED VALUE EKONOMI PESANTREN

A. Peran kyai dalam Menjaga Akhlak Pengusaha

Peran kiyai dalam masyarakat di pandang sebagai sosok yang mengetahui dan mengamalkan agama Islam yang dibuktikan dengan tugas-tugas sebagai guru, muballigh, khatib, dan sebagainya disebut dalam instrumen pengumpulan data sebagai komponen *'alim*. Kiyai adalah Sosok yang berakhlak mulia; sopan, *tawaddlu', ta'addub*, sabar, tawakkal, ikhlash dan sebagainya disebut dalam instrumen pengumpulan data dalam komponen *wiro'i*. kiyai sosok yang tidak terlalu terhadap urusan dunia, tetapi selalu mementingkan kehidupan di akhirat, sikap membiasakan dan mementingkan akhirat seperti ini disebut dalan instumen pengumpulan data sebagai zuhud. Peran kiai yang paling nyata dapat ditemui di seluruh kehidupan pesantren. Baik pesantren itu modern atau tidak, kiai merupakan elemen yang paling esensial

dari suatu pesantren.[1]

Berbicara umat Islam saat ini hampir tidak bisa dipisahkan dengan pondok pesantren. Hal ini karena setiap berbicara tentang pengembangan agama Islam di Indonesia, peran pondok pesantren selalu berada di posisi terdepan. Demikian juga setiap ada kajian-kajian keislaman, tokoh-tokoh yang tampil, yang mengajar, yang memberikan pencerahan dan yang dianggap memiliki otoritas keilmuan pasti juga berasal dari pondok pesantren.

Selama ini pondok pesantren selalu dikaitkan dengan lembaga pendidikan pendalaman agama (*tafaquh fiddin*). Anggapan ini memang tidak salah karena sebagian besar pondok pesantren memiliki fokus dan inti garapannya adalah masalah ini. Namun demikian, ada juga pondok pesantren yang meski inti aktivitasnya seperti itu, tetapi ada branding atau *image* lain yang dipersepsi masyarakat. Saat ini banyak berkembang juga branding tambahan pada pondok-pondok pesantren seperti pondok tahfidz, pondok lansia, pondok teknologi, pondok wirausaha atau entrepreneurship dan lain-lain.

Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai yang diyakininya, hal tersebut sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945. Bahwa salah satu ukuran etika bisnis selain hati nurani, konvensi yaitu ukuran agama yang menjadi tata nilai aturan kehidupan berbisnis di Indonesia yang banyak muncul darai pengusaha di kalangan pesantren. Ada sebagian orang mengatakan bahwa berbisnis tidak diperlukan etika, yang terpenting mengutamakan *profit oriented,* berbisnis dengan tanpa dilandasi nilai-nilai etika dapat dilakukan oleh pengusaha, namun dalam kenyataannya sering terjadi permasalahan dalam aktifitas bisnisnya, mengingat berbisnis tidak lepas dengan kondisi masyarakat terkait budaya, agama dan tatanan hukum yang berlaku.

1. Islam sebagai Sumber tata nilai kehidupan bisnis

Paradigma yang difahami oleh setiap pribadi muslim terkait

1 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pondok Pesantren*, 1982, 55

dengan ajaran Agamanya (Islam) adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ajaran Islam dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan aklak, politik dengan etika atau etika dengan bisnis. Islam sebagai risalah yang di turunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia dimuka bumi ini. "Rasulullah S.A.W. bersabda "*Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia* (Al-Hadits)". Agama Islam mengatur tata nilai kehidupan di dunia ini kepada umatnya sangat lengkap, agar kehidupannya terkait berbisnis mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, hubungan tersebut antara manusia dengan Manusia dalam bahasa Agama Islam disebut Hablum Minan naas" dan hubungan Tuhan dengan manusia dikenal dengan istilah " *hablum minallah*"

Seorang muslim menyakini dengan sepenuh hati bahwa beraktifitas bisnis ataupun aktifitas lainnya selalu merasakan kehadiran Sang Pencipta Allah SWT dalam setiap aspek kehidupannya. Tentu keyakinan yang mendalam dalam hatinya bahwa berbisnis juga termasuk ibadah ghoiru mahdho, memberikan motivasi bahwa pahala disisi Allah SWT bukan hanya sholat, zakat, puasa dan haji, akan tetapi berbisnis merupakan bagian dari ajaran islam yang integral dengan melakukan bisnis akan mendapat pahala dan keberkahan hartanya Allah SWT. Kita mengetahui bahwa tidak diragukan lagi bahwa orang yang berbisnis tanpa batas waktu akan mendapat profit/laba yang besar dan dapat mempercepat lancarnya roda perekonomian, namun ketika adzan berkumandang di saat berbisnis seorang pribadi muslim terpanggil untuk menghentikan aktifitas bisnisnya dengan meninggalkan bisnisnya, apalagi datang adzan Jum'at berkumandang semua muslim laki-laki wajib menghadiri jama'ah Sholat Jum'at di Masjid, meninggalkan segera aktifitas bisnisnya untuk menghadap mengingat Allah. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. Al-Jumu'ah : 9

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَيرٞ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ ٩

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum´at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(Q.S. Al-Jumu'ah : 9)

Makna Kaaffah (keseluruhan) Menurut Tafsir Jalalain adalah menyangkut seluruh aspek syariat dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bisnis dan ekonomi. "Sebuah agama biasanya mempunyai tiga hal " yaitu :

1) Sistem Keyakinan (akidah/credial), yaitu keyakinan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam semesta.
2) Sistem Peribadatan (ritual), yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan suprantural tersebut sebagai konsekwensi atau pengakuan dan ketundukannya.
3) Sistem nilai (moral), yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainya atau alam semesta yang kaitannya dengan moral dan etika.

Setelah seorang pembisnis menampilkan sosok yang ramah, sopan, beretika kepada pelanggan/konsumen, dia harus memiliki pemahaman bahwa Tuhan melihat aktifitas bisnisnya, bahwa bisnis yang dilakukan bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Ketika memulai bisnisnya, seorang muslim merasa bahwa yang dia kerjakan merupakan ibadah karena Allah SWT. Karena kegiatan bisnisnya didasari oleh ibadah kepada Allah, berarti barang atau jasa yang produksi harus sesuatu yang halal baik secara fisik zat maupun operasionalnya juga tidak melanggar tata nilai aturan syari'at agama Islam.

Keta'atan, ketundukan dan keyakinan (keimanan-akidah-tauhid) seorang muslim terhadap syariat Allah dapat kita lihat profil sikap sahabat Rasulullah SAW, yaitu "Umar bin Al Khottob ra di akhir hayat Rasulullah SAW, sesudah turunnya ayat terakhir dari Al-Qur'an, beliau menyusun suatu barisan yang akan dikirim ke utara (Romawi Timur)

demi mengamankan daerah itu dari incaran dan gangguan tentara Romawi Timur. Namun sebelum barisan terkirim, beliau jatuh sakit, sehingga pengiriman ini terpaksa ditunda sampai beliau sembuh. Tapi taqdir Allah SWT telah menentukan bahwa beliau tidak sembuh lagi. Setelah beberapa hari sakit, beliau wafat. Kebetulan ketika itu sahabat terdekat Abu Bakar Shidiq sedang keluar kota Madinah mencari nafkah, sehingga Siti ' Aisyah menyampaikan berita wafatnya Rasul itu hanya kepada orang yang kebetulan ada di dekat Masjid Rasul itu. Ketika usaha orang ini menyiarkan berita duka ini kepada yang lain terdengar oleh "Umar, maka "umar sebagai orang yang berdarah militer, yang senantiasa berfikir dalam rangka keamanan dan ketertiban segera memberikan reaksi yang cukup berlebihan. Umar berkata "barang siapa yang mengatakan Muhammad wafat akan kupenggal lehernya", sambil menghunus pedang dengan mata yang galak, karena 'Umar menyangka, bahwa berita buruk seperti itu di saat Rasul sedang berusaha menyusun barisan untuk menyerang Romawi Timur, mesti datang dari agen-agen subversive. Karena semua orang mengenal "Umar sebagai pahlawan yang tidak kenal mundur berhadapan dengan siapapun, maka tidak ada yang berani meneruskan penyebaran berita wafatnya Rasulullah SAW itu.[2]

2. Bercirikan kemanusiaan, bersifat *Wasathan* dan *Tawazun*

Dalam prinsip-prinsip syariat Islam selain bertujuan terpeliharanya agama yaitu menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahterah. Manusia oleh Tuhan di wajibkan untuk berbuat baik terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia. Melaksanakan etika dalam berbisnis berarti kita telah memenuhi kewajiban agama Islam terkait hubungan manusia dengan manusia (*hablum minan naas*). Manusia melaksanakan pekerjaan yang halal dan ber-etika menjadi *kholifatul fil ard* (wakil Allah di bumi) artinya manusia dapat bekerja melaksanakan amanat Allah SWT di bumi atas berkat

2 Abdurrahim, Muhammad *'imaduddin,* (1999:38)

ijin Allah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh (2): 30, artinya : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan kholifah di muka bumi ini". (Q.S. 2: 30)

Sikap kaum kapitalis terlihat jelas yang bersifat egoisme, bebas menumpuk harta miliknya, lebih mementingkan dirinya apa dan siapa kecuali laba dalam jumlah besar, segala cara dihalalkan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga tidak ada hak milik untuk zakat, infaq apalagi untuk sodakoh. Mereka para pengagum kapitalis tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya ada orang lemah dan tertindas, bagaimana mereka akan ber-etika dalam berbisnis sementara sistem kapitalis individunya bebas melaksanakan aktifitas ekonomi bisnis dan berbuat sesuka hatinya.

Mereka tidak akan peduli apakah tindakan mereka ini menimbulkan dampak positif ataupun negatif bagi masyarakat. Sistem kapitalis memberikan fasilitas kepada individu sehingga menjadi besar dan bertindak sewenang-wenang tanpa mementingkan kemaslahatan masyarakat, baik materi maupun spiritual. Berbeda dengan kaum sosialisme yang bertolak belakang dengan pandangan kaum kapitalisme. Mereka sosok sosialisme adalah berprasangka buruk terhadap individu, sehingga segala hak pribadi dihilangkan (dirampas) demi mencapai kemaslahatan bersama, dalam negara sosialisme visinya kemaslahatan bersama di atas kemaslahatan individu. Mengakui hak milik pribadi bagi kaum sosialis merupakan suatu kezaliman dan penyimpangan, sehingga harus dimusnahkan, prinsipnya yang terpenting yang harus diwujudkan adalah "sama rasa dan sama rata". Seorang sosialis ibarat seperti prajurit yang wajib mengikuti komandannya, tugas dan kewajiban mereka hanya melaksanakan apa yang digariskan oleh pemegang kekuasaan. Mereka tidak punya hak untuk bertanya,"mengapa", dan bagaimana", apalagi mengatakan "tidak". Sementara sistem Islam mempunyai konsep dalam perekonomian Islam adanya pertengahan dan keseimbangan yang adil.

Hal tersebut dapat kita lihat bahwa dalam tata kehidupan Islam, sikap terhadap individu dan masyarakat diletakan dalam neraca keseimbangan (*tawazun*) yang adil (pertengahan-wasathan) tentang

dunia dan akhirat. Antara hak-hak individu dan hak-hak masyarakat, Islam tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis terutama komunis, tetapi ditengah-tengah keduanya. Agama Islam mengakui hak individu dan masyarakat, agar keduanya dapat dijalankan dalam memenuhi kewajibannya masing-masing.

B. Nilai-Nilai Agama dalam Pandangan Pengusaha

Pada pertengahan abad dua puluh, lahir doktrin ekonomi Islam, sebuah doktrin yang mulai diperkenalkan oleh para ulama muslim sebagai alternatif yang memberikan keadilan dan kedamaian bagi masyarakat muslim, selain doktrin-doktrin ekonomi yang berkembang pada saat itu. Pada waktu itu masyarakat dunia kurang mendapatkan nilai-nilai keadilan, dan dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal besar. ''Homo homini lupus'' sebagai *way of life*. Manusia memakan manusia lain sebagai pandangan hidup masyarakat pada umumnya karena modal yang dimilikiya. Masyarakat dikotak-kotakan sebagai kaum borjuis dan proletar. Sebagai juragan dan buruh. Seorang juragan merasa bangga dengan kejuraganannya yang memiliki kewenangan untuk menindas dan memperlakukan buruh semaunya karena merasa memiliki modal. Perbudakan serasa masih menyelimuti dunia walaupun dalam konteks yang berbeda.

Ekonomi yang berkembang pada saat itu adalah ekonomi neoklasik, ekonomi marxian, dan doktrin ekonomi lainnya yang berakar dari pemikiran sosial barat. Ekonomi Islam meletakkan dasar perekonomian mereka dalam konteks ''*homo homini socious*'' manusia sebagai mitra dalam bermuamalah, merasa saling membutuhkan dan merasa saling membantu. Tidak ada manusia sukses dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Dia butuh bantuan orang lain. Kesuksesan diperoleh karena bermitra dengan orang lain. Tidak memperbudak, tidak sebagaimana dalam praktek kehidupan bermuamalah pada umumnya. Bahkan Rasulllah menyampaikan sebuah hadits''*bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering*''. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar bagi perkembangan budaya membangun usaha dan perusahaan.

Ada tiga karakter yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi yang lain; yakni pertama ekonomi Islam diilhami dan bersumber dari Al Quran dan hadits. Kedua, memandang peradaban Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofi sekuler. Ketiga bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai ekonomi, prioritas, dan adat istiadat umat muslim awal di arab pada abad ke tujuh.[3]

Islam adalah agama universal yang mewarnai segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aspek ekonomi dan budaya. Sebagai agama yang universal inilah, perlunya setiap muslim mempelajari dan mengamalkan Islam dalam setiap aspek budayanya sehingga membentuk kebudayaan Islam atau budaya yang islami. Baik dalam budaya kerja yang dilakukan oleh individu-individu hingga budaya perusahaan yang terdiri dari individu-individu yang membutuhkan manajemen yang baik dan profesional. Ketika suatu perusahaan dikelola dengan baik dan profesional walaupun bukan dari seorang muslim (milik seorang muslim) ternyata jika ditilik dari ajaran Islam (Qur'an dan hadits) justru mereka yang melaksanakan nilai-nilai Islam dalam budaya perusahaan bukan orang Islam sendiri.

1. Pentinya Niai Agama Dalam Perusahaan

Ahli etika profesi hukum dari Universitas Indonesia berpendapat, agama adalah bagian atau salah satu sumber etika bisnis. Ia mencontohkan di maskapai penerbangan Royal Brunei, para petugas kabin perempuan di sana mengenakan jilbab yang merupakan kewajiban bagi seorang muslimah; pun doa bersama yang dilakukan sebelum pengarahan mengenai prosedur keselamatan; Maskapai Lion Air, Indonesia, memiliki panduan doa bagi semua agama. Maskapai penerbangan Emirates menyesuaikan seragam petugas kabin mereka dengan gaya Timur Tengah. Cebu Pacific memperingati hari raya agama Katolik di udara bersama para penumpangnya. Sedangkan Malaysia Airlines

3 John L Esposito, *Ensiklopedia Oxford dunia Islam modern jilid 2*, Mizan, Bandung, 2001, 1.

mengumumkan jadwal buka puasa di pesawat bagi penumpangnya yang berpuasa. Semua itu merupakan bagian dari etika bisnis perusahaan penerbangan yang bersumber dari ajaran agama. Oleh karena itu betapa penting nua nilai-nilai agama masuk pada ranah aplikasi di perusahaan.

Nilai agama dapat mengatasi pelanggaran etika apabila nilai agama tersebut dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Pendekatan agama bisa juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran etika yang belum sampai ke dalam tahap pelanggaran hukum. Selain nilai agama, lingkungan sosial budaya harus berperan dalam mengatasi pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan. Misalnya melalui penyelesaian secara adat seperti musyawarah, minta maaf, ganti rugi dan sebagainya untuk kasus-kasus etika yang bukan merupakan pelanggaran hukum (perdata maupun pidana). Tentu saja penyelesaian pelanggaran etis melalui cara-cara seperti harus tetap memperhatikan asas profesionalitas. Korporasi harus tunduk pada aturan hukum dan juga pada aturan budaya dan agama di Indonesia.

Nilai atau prinsip yang diadopsi dari nilai agama yang universal, harus diinternalisasikan oleh perusahaan kepada para karyawannya melalui pembentukan budaya organisasi dan kepemimpinan yang berbasis etika. Salah satu manifestasi kunci dari kepemimpinan yang beretika adalah artikulasi nilai-nilai dalam sebuah organisasi. Artikulasi ini bisa berevolusi setelah proses identifikasi nilai-nilai yang dilakukan secara inklusif dan terbuka pada perubahan untuk menghadapi tantangan bisnis yang baru. Pada akhirnya, menurut Duska, sebuah perusahaan yang menerapkan perilaku beretika akan mendapatkan 4 (empat) hal antara lain keuntungan perusahaan, integritas diri dan kepuasan terhadap manajemen, kejujuran dan kesetiaan dari karyawan, serta perusahaan akan mencapai kepuasan pelanggan.[4]

Peran agama sebagai dasar bagi etika perusahaan bukan saja bertujuan demi citra positif yang berdampak bagi keuntungan perusahaan. Lebih jauh dari itu, agama seharusnya memberikan makna

4 Ronald Duska, *Contemporary Reflections on Business Etchics*, (Springer, Dordrecht, 2007)

yang transendental dalam kegiatan berbisnis. Sehingga kesadaran kemanusiaan setiap pelaku bisnis dapat terus terawat.[5] Tujuan-tujuan perusahaan tidak hanya berpusat pada penumpukan keuntungan materi semata, melainkan juga akan turut serta membangun kesejahteraan batin manusia di dalamnya. Pada akhirnya keseimbangan yang transendental dapat kita raih dari kegiatan berbisnis. Agama tentu saja dapat lahir di ruang-ruang kehidupan kita. Termasuk dalam kehidupan berbisnis. Penempatan agama sebagai sekadar pembangun citra agar konsumen tertarik tentu saja tak tepat. Lebih dari itu, agama seharusnya dapat menghadirkan nilai-nilai transendental dalam kehidupan, termasuk di lingkungan perusahaan.

C. Pengasuh Pondok Pesantren itu ekonom

Akhir akhir ini banyak badan usaha yang dikelola oleh sebuah pondok pesantren. Dan badan usaha itu sekarang tidak hanya melayani kebutuhan santri saja, tetapi lebih luas lagi yaitu melayani kebutuhan umum dan lingkupnya pun semakin luas. Kondisi ini merupakan suatu kemajauan yang dicapai oleh pondok pesantren dimana pesantren tidak hanya mengurusi masalah akhirat saja.

Pondok pesantren mempunyai ribuan santri tentunya memiliki perputaran uang yang banyak di lingkungan pondoknya saja, karena uang kiriman dari berbagai wilayah masuk dan berputar disitu. Apalagi jika terdapat badan usaha seperti industri kecil ataupun mini market tentunya omzetnya tinggal mengalikan dengan jumlah santrinya saja, karena di lingkungan pondok para santri dilarang membeli diluar area pondok. Selain karena alasan keamanan alasan finansialpun juga tidak ketinggalan. Untuk itu setiap pondok pesantren pasti mengatur system ekonominya dengan system tertutup dan cenderung monopoli.

Memang system monopoli sebenarnya dilarang dalam Islam, tetapi jika system seperti ini tidak diterapkan maka pondok itu akn menjadi pasar. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa kebijakan monopoli seharusnya

5 Syed M. Naquib Al-Attas, Islam: *The Concept of Religion and The Foundation of Ethics and Morality*, (IBFIM, Kuala Lumpur, 2013).

tidak membuat harga komoditi menjadi lebih tinggi dari harga pasaran, sehingga tidak terkesan bahwa pondok menjadikan santrinya sebagai ajang bisnis. Karena diakui atau tidak santri merupakan pasar yang sangat mudah dikendalikan, tidak seperti di dunia luar.

Seharusnya system perekonomian di pondok mendukung santrinya untuk hemat dan mempunyai kecerdasan financial, yang nantinya berguna bagi kehidupannya setelah lulus dari pondok. Para santri seharusnya diajarkan bagaimana menghasilkan uang, bukan hanya diberikan sugesti tentang cara menghabiskan uang sakunya. Karena dari perilaku yang saya amati kebanyakan santri mempunyai sifat konsumtif yang tinggi, mungkin karena memang ada anggapan bahwa sudah sewajarnya anak anak setingkat SMP atau SMA menghabiskan beberapa ribu setiap hari untuk jajan. Tetapi apakah wajar jika harga yang diterapkan lebih mahal 10 % sampai 30 % dari harga pasaran. Bukankah kesederhanaan merupakan asas pondok pesantren itu Seharusnya ada upaya dari pondok pesantren untuk menekan biaya konsumsi santrinya.

Wajar jika sebuah pesantren mempunyai fasilitas air minum yang didistribusikan melalui pipa dan dapat diakses di banyak tempat, bukan hanya air satu gallon atau beberapa teko di dapur. Karena kita lihat di tempat wisata di masjid Ampel Surabaya atau di Makam KH. Kholil Bangkalan terdapat air minum gratis yang melimpah. Karena mungkin tidak banyak yang tahu bahwa air dari kran masjid biasa dikonsumsi langsung oleh santri.

Pondok pesantren dengan potensi SDM yang melimpah seharusnya bisa menjadikan badan usaha yang mampu bersaing di masyarakat umum, dengan memproduksi barang yang berkualitas dengan harga jual yang terjangkau. Karena bukankah pengabdian kepada masyarakat adalah prinsip yang dipegang teguh oleh pesantren. Kita bisa melihat Pondok Sidogiri yang mempunyai perusahaan air minum yang besar dan mempunyai Mini market yang tersebar di berbagai wilayah bahkan di Madura sendiri dari sekian pondok pesantren yang bertaraf nasional di Madura apakah tidak ada yang

mampu menciptakan sebuah industri yang bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat dan bisa menghasilkan produk yang murah dan berkualitas.

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang beberapa abad yang lalu. Kata pesantren berasal dari kata "santri", yang diberi awalan *pe* dan akhiran *an* menjadi pesantrian (pesantren) berarti tempat tinggal para santri, sedangkan santri adalah orang yang menuntut ilmu agama Islam. Pesantren di Jawa dan Madura sering disebut dengan Pondok. Sementara itu, di Aceh corak pendidikan seperti itu disebut dengan meunasah, dan di Sumatera Barat disebut dengan surau.[6] Pondok pesantren dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh parasantri. Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri Ponpes sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral. Sistem pendidikan Ponpes sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan Akademi Militer, yakni dicirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda, yang di situ seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral.[7]

Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan sistem pendidikan sekolah umum di Indonesia sekarang ini, Pondok pesantren mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya,Ponpes digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Lima ribu lebih pondok pesantren yang tersebar di Enam Puluh Delapan Ribu Desa, merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur. Keunikan ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola secara profesional.[8]

---

6 Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 771.

7 Marzuki Wahid, et al., *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001), 13.

8 A. Halim, *Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren*, dalam A. Halim et al., Manajemen Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 222

Pondok pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan adanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu: *Pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*). *Ketiga*, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Ponpes juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) di tengah perubahan yang terjadi.[9]

Dalam keterlibatannya dengan peran, fungsi, dan perubahan yang dimaksud, Ponpes memegang peranan kunci sebagi motivator, inovator, dan dinamisator masyarakat. Hubungan interaksioniskultural antara pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Namun demikian, harus diakui belum semua potensi besar yang dimiliki Ponpes tersebut terkait dengan kontribusi pesantren dalam pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat.[10]

Sebagaimana diketahui bahwa kegagalan sistem perekonomian Indonesia ialah adanya kebijakan pemerintah mengenai sistem ekonomi konglomerasi. Sistem ekonomi berbasis konglomerasi ini kenyatannya hanya menguntungkan orang atau kelompok yang telah memiliki kemampuan dan akses ekonomi sehingga hanya merekalah yang untung. Sementara itu, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan akses, tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menguntungkan usahanya yang sudah sekian lama digelutinya.[11]

Setelah kegagalan sistem ekonomi konglomerasi, maka harapan ekonomi itu ditumpahkan ke lembaga-lembaga rakyat yang sudah

9 Rr. Suhartini, *Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren*, dalam A. Halim et al., *Manajeman Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 233.

10 Rr. Suhartini, *Problem Kelembagaan Pengembangan*...234.

11 Nur Syam, *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren* dalam A. Halim, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 248.

teruji dan lulus dalam sejarah kehidupan masyarakat dan berbangsa. Ternyata, yang justru tahan di tengah badai krisis ekonomi adalah lembaga-lembaga ekonomi mikro yang berbasis rakyat. Industri kelas menengah kecil seperti home industri justru memiliki daya ketika berhadapan dengan krisis ekonomi. Ponpes, kenyatannya adalah lembaga potensial untuk bergerak ke arah ekonomi berbasis rakyat, sebagaimana kekuatan yang dimilikinya. Jika Ponpes hanya menjadi penonton di era yang akan datang, maka lembaga-lembaga ekonomi mikro lain boleh jadi bergerak ke arah kemajuan. Oleh karena itu, kiranya diperlukan analisis yang cermat untuk melakukan penguatan kelembagaan ekonomi ini, agar tidak salah melangkah.[12] Sasaran akhir dari pemberdayaan ekonomi Ponpes adalah kemandirian pesantren. Selama ini Ponpes selalu dilabeli dengan nama lembaga pengedar proposal dana bantuan, baik pada institusi formal atau non formal. Labelling itu tentunya tidak mengenakkan. Ponpes akan terbebas dari anggapan itu kalau Ponpes menjadi lembaga yang kuat, terutama dalam sektor ekonomi. Dengan sendirinya, tidak setiap ada kegiatan, apakah membangun gedung atau kegiatan lain, tidak selalu sibuk mengedarkan proposal kesana-kemari.[13]

1. Potensi Kiyai dalam mengambangkan ekonomi pondok pesantren

Peran pengasuh atau Kiyai adalah figur yang merupakan elemen paling esensial dalam pesantren. Kiyai adalah orang yang memimpin pesantren dengan kharisma tinggi, ibadah yang tekun serta pengetahuan keagamaan yang luas dan mendalam. Oleh sebab itu, para Kiai-ulama, di samping memberikan pelajaran agama dan menjadi pemimpin spiritual para santrinya, tidak jarang juga menjadi "dokter-dokter psikosomatis" bagi masyarakat.[14] Sebagaimana telah disinggung, keunikan sekaligus sebagai magnet Ponpes adalah figur Kiaiulama pemimpin Ponpes.

12 Nur Syam, *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren* ...247.

13 Nur Syam, *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren*.. 252-253.

14 Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia*, 771.

Andai dalam lingkungan Ponpes tersebut terdapat beberapa Kiai-ulama, maka keberadaan mereka haruslah tetap mengikuti ritme Kiai-ulama sepuh di lingkungan Ponpes tersebut.

Dalam masalah ini, muncul faktor yang sangat penting sekaligus sebagai syarat dalam tradisi Islam, yaitu seorang Kiai-ulama adalah pemegang ilmu-ilmu agama doktrinal. Tugas ini tidak dapat dilimpahkan kepada masyarakat umum karena berhubungan dengan kepercayaan bahwa ulama merupakan pewaris Nabi, seperti disebutkan dalam sebuah Hadis. Bila demikian, bagaimana keunikan kepemimpinan Kiai-ulama Ponpes ini dapat dipandang sebagai potensi Ponpes yang bernilai ekonomis? Setidaknya ada tiga jawaban yang dapat diberikan:

Pertama, dengan "menjual" figur Kiyai karena kedalaman ilmunya. Artinya, figur seorang Kiyai Ponpes merupakan magnet (daya tarik) yang luar biasa bagi calon santri, wali santri, dan masyarakat untuk berburu ilmu. Kedalaman ilmu sang Kiyai inilah sesungguhnya awal potensi ekonomi itu terbangun. Ini tidak berarti komersialisasi ilmu, tetapi sudah seharusnya orang-orang yang berilmu itu memperoleh penghargaan meski tidak selalu berupa materi. Meski potensi berasal dari figur seorang atau beberapa Kiai Ponpes, tetapi karena institusi Ponpes biasanya melekat dengan figur sang Kiyai maka pemanfaatan potensi tersebut juga untuk kemaslahatan Pondok Pesantren.

Kedua, pada umumnya, seorang Kiyai adalah tokoh panutan masyarakat dan pemerintah. Ketokohan seorang Kiyai ini memunculkan sebuah kepercayaan, dan dari kepercayaan melahirkan akses. Dari sinilah jalur-jalur komunikasi, baik dalam kerangka ekonomis, politis, maupun yang lainnya terbangun dengan sendirinya.[15] Persoalannya bagaimana mengemas kepercayaan yang telah menjadi aset itu dengan moralitas agama? Dalam konteks inilah Kiyai pondok pesantren diuji.

Ketiga, pada umumnya, seorang Kiyai, sebelum membangun sebuah pondok pesantren, telah mandiri secara ekonomi, misalnya sebagai petani, pedagang, dan sebagainya. Pada beberapa pondok

15 Abdurrahman Wahid, *Prolog dalam Marzuki Wahid, et al., Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), 15

pesantren para santri bahkan belajar bertani dan berdagang kepada sang kiyai. Kiai-ulama semacam ini sering menjadi tumpuan keuangan Ponpes.

Ini berarti sejak awal kiyai telah mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, tidak hanya dari aspek mental, tetapi juga sosial dan ekonomi. Jiwa dan semangat entrepreneurship inilah yang mendasari kemandirian perekonomian pondok pesantren. Apabila aset dan jiwa entrepreneurship ini dipadukan, maka hasilnya dapat dijadikan dasar membangun tatanan ekonomi pondok pesantren. Ketiga potensi ekonomi kiyai ini apabila diskemakan, dapat tergambar sebagai berikut:

Gambar Skema 2.1
Potensi Ekonomi Kiyai

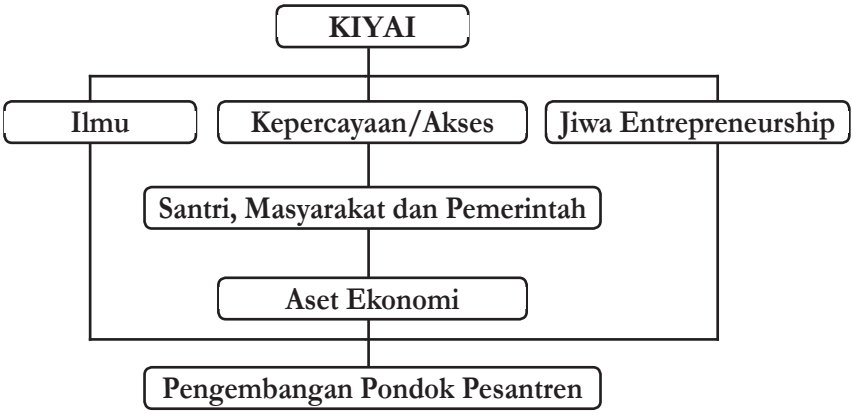

2. Potensi Santri di pondok pesantren

Potensi ekonomi kedua yang melekat pada Ponpes adalah santri, atau murid atau siswa.[16]20 Analisis potensi diri ini harus dipahami, bahwa para santri tersebut sering mempunyai potensi/bakat bawaan, seperti kemampuan membaca al-Qur'an, kaligrafi, pertukangan, dan sebagainya.

16 Istilah "santri" biasanya dipakai untuk seseorang yang hanya belajar atau mengaji di Ponpes, sedangkan murid atau siswa biasanya dipakai untuk seseorang yang belajar di sekolah formal. Adapun yang belajar di sekolah yang belajar di sekolah formal milik pesantren, meski bisa disebut sebagai murid atau siswa, tetapi sebutan umum yang lazim dipakai adalah santri.

Bakat bawaan ini sudah seharusnya selalu dipupuk dan dikembangkan. Karena itulah, ada baiknya bila dalam Ponpes diterapkan penelusuran potensi/bakat dan minat santri, kemudian dibina dan dilatih.

Dengan demikian, dalam Ponpes tersebut perlu juga dikembangkan Wadah Apresiasi Potensi Santri (waposi), wadah semacam ini, mungkin sudah ada di beberapa Ponpes, tinggal bagaimana mengaturnya supaya produktif. Perlu juga ditambahkan, penggalian potensi diri santri-murid ini merambah pada potensi-potensi, semisal politisi, advokasi, jurnalistik, dan seterusnya. Karenanya, untuk ke depan wajah Ponpes menjadi semakin kaya ragam dan warna seperti gambar berikut:

Gambar Skema.2.2
Potensi Diri Ekonomi Santri

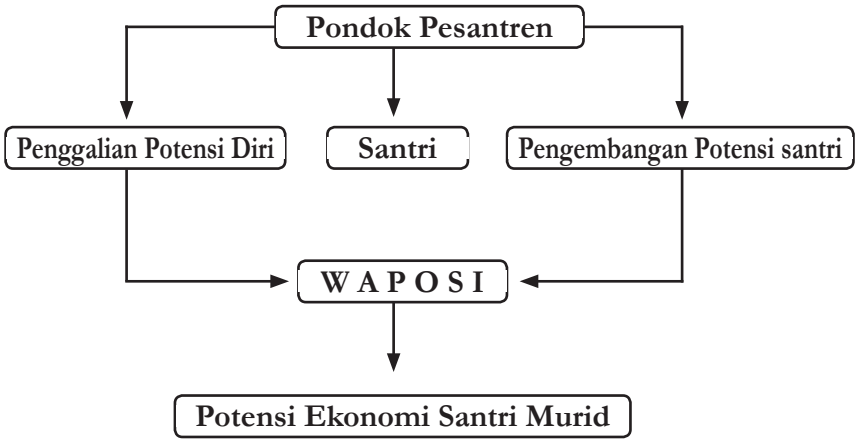

3. Potensi ekonomi Pendidikan Pondok Pesantren

Seperti telah disinggung di atas, salah satu keunikan Ponpes terletak pada sistem pendidikannya yang integral. Artinya, model pendidikan khas Ponpes, seperti sorogan.[17] Nonklasikal dipadukan

17 Sistem sorogan adalah sistem pendidikan Islam tradisional secara individual. Umpama seorang murid mendatangi seorang guru yang akan membacakan beberapa baris al-Qur'an atau kitab-kitab yang berbahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa. Lihat, Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 28-33.

dengan model pendidikan modern yang klasikal. Di samping itu, juga disiplin ilmu yang ditekuninya, tidak hanya ilmu agama, melainkan sekaligus pelajaran umum lainnya, seperti bahasa Inggris, matematika, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Untuk yang terakhir ini, biasanya dapat dijumpai pada Ponpes yang sekaligus mengelola lembaga pendidikan formal, baik dengan nama madrasah seperti MTs dan MA, maupun sekolah seperti SMP dan SMA. Pesantren-pesantren yang sudah menerapkan pendidikan seperti ini di antaranya Ponpes Gontor Ponorogo, Ponpes al-Falah Ciampea Bogor, Ponpes Darun Najah Jakarta, Ponpes al-Muthfawiyah Tapanuli Selatan, dan Ponpes lainnya.[18] Di sinilah letak keunikan pendidikan Ponpes.[19]

Bagaimana halnya dengan potensi ekonomi dari pendidikan pesantren ini? Sebagaimana lazimnya pendidikan, di dalamnya pasti ada murid-siswa, guru, sarana, dan prasarana. Dari sisi murid-siswa misalnya, sudah barang tentu dikenai kewajiban membayar syahriah.[20] Untuk kelancaran proses pembelajaran, diperlukan seperangkat buku, kitab, dan alat-alat tulis. Dari sini bisa dikembangkan salah satu unit usaha Ponpes yang menyediakan sarana belajar tersebut, semisal toko buku atau kitab, alat tulis, dan foto copy, belum lagi dari sisi kebutuhan sehari-hari seperti makan minum, air, telepon, asrama, pakaian, dan sebagainya.

Potensi ekonomi dari sektor pendidikan ini tentu menjadi semakin sempurna bila digabung dengan potensi diri santri-murid seperti telah dijelaskan dalam poin dua. Persoalannya tinggal bagaimana semua potensi ini dikelola secara profesional, tetapi tetap menampilkan karakteristik pesantren. Inilah salah satu tantangan pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang ada dalam pondok pesantren. Karena itulah diperlukan keberanian manajerial dari para pengasuh untuk mewarnai manajemen Ponpes secara lebih profesional dan modern, tetapi khas pesantren.

18 Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia*, 771.

19 A. Halim, "*Menggali,..* 229.

20 Syahriah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dari kata *syahr* yang berarti bulan. Di pondok pesantren syahriah berati kewajiban membayar uang SPP bagi santri-murid setiap bulan.

Dalam konteks ini, keharismatikan seorang Kiai-ulama, tidak hanya dilihat dari aspek agama, tetapi juga aspek yang lain, seperti wawasan dan manajerial Kiai-ulama. Apabila ketiga pilar utama ini terpenuhi, pondok pesantren telah memenuhi tiga fungsi utamanya, yaitu Pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). Kedua, sebagailembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). Ketiga, sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Sebagaimana gambar berikut:

Gambar Skema.3.3
Potensi Ekonomi Pendidikan Pondok Pesantren

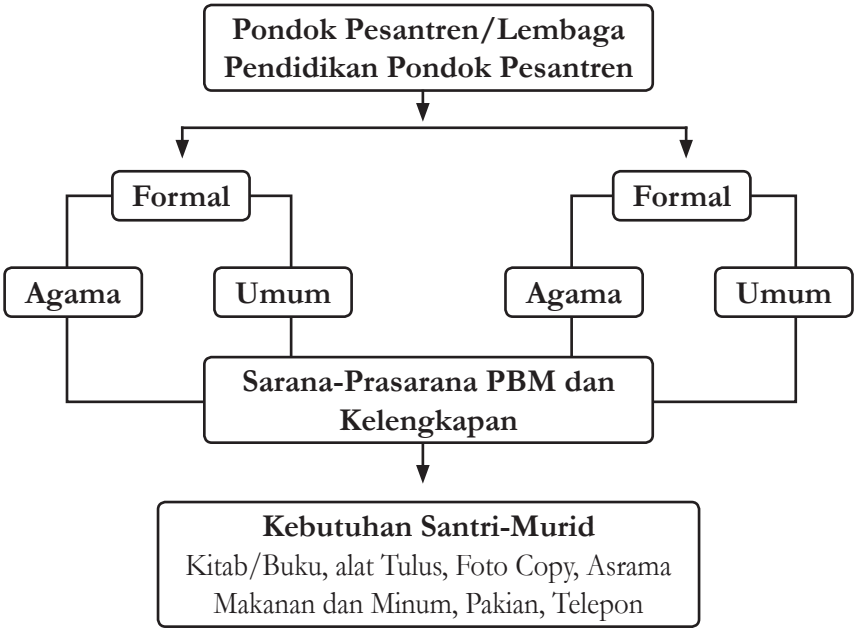

D. Doa dan Kekuatan Spiritual Ekonomi Pesantren

Pesantren adalah sebuah tempat pendidikan tradisional dimana para santri tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang guru atau yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan memiliki sebuah tempat tinggal yang biasa disebut dengan asrama. Keberadaan pesantren di Indonesia telah dimulai dari awal

masuknya agama islam ke Indonesia dan dikenal oleh masyarakat luas pada zaman walisongo.[21]

Dahulu, didalam pondok pesantren identik dengan hanya mempelajari ilmu agama (ilmu akhirat) saja, namun saat ini dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi pondok pesantren sudah mengalami perkembangan dimana pendidikan yang diberikan kepada santri tidak hanya terfokuskan pada ilmu agama saja namun ilmu umum lainnya juga sudah mulai diterapkan dalam pesantren, seperti aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Oleh karena itu,besar kiranya peluang bagi pesantren untuk ikut andil dalam agen pembangunan dalam memecahkan persoalan ekonomi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memasukkan tripusat pendidikan (keluarga, sekolah, masyarakat), dimana pesantren telah melahirkan alumni-alumni yang menjadi ulama', da'i, tokoh masyarakat, cendekiawan muslim, pemimpin organisasi, pemimpin partai politik, pejabat-pejabat dalam pemerintahan, wiraswasta dan sebagaimana yang berbakti untuk perjuangan agama dan Negara.

Dilihat dari bidang sosial kemasyarakatan pesantren sebagai lembaga pendidikan kemasyarakatan dimana kyai dan santrinya bukan hanya berpartisipasi dengan masyarakat, tetapi sudah berintegrasi dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat, Sedangkan dalam bidang ekonomi, orientasi pendidikan pesantren adalah mementingkan masa depan para santrinya, oleh karena itu pondok pesantren mendidik para santrinya agar memiliki jiwa kewirausahaan agar para santri menjadi lebih mandiri. Salah satunya adalah dengan membekali santri dengan berbagai keterampilan seperti tata boga, kursus menjahit, dan agrobisnis pun juga diajarkan dalam pesantren sehingga nantinya ketika santri akan terjun kedalam masyarakat mereka sudah memiliki keterampilan dan tidak menjadi beban dalam masyarakat.[22]

21 Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992), 771

22 Suismanto, *Menelusuri Jejak Pesantren,* (Yogyakarta: Alief Press,2004), 94.

1. Penguatan Karakter Spiritual Ekonomi Pesantren

Menurut Abraham maslow, spiritualitas memiliki arti pemahaman diri dimana seseorang diberikan berkah melalui kreativitas, intuisi, keceriaan atau suka cita, kasih sayang, perdamaian, serta seseorang tersebut memiliki tujuan hidup yang jelas.[23] Spiritual juga dapat diartikan sebagai kesadaran diri seorang manusia atas adanya hubungan keterkaitan antara manusia dengan sang penciptanya. Dalam buku *Spiritual Enterpreneurship*[24] menyebutkan bahwasannya spiritualitas memiliki tiga peran penting dalam kehidupan, yakni: *pertama* sebagai daya kreasi, *kedua,* sebagai fungsi kontrol, fungsi kontrol dalam spiritualitas berguna sebagai pengingat diri serta menghindarkan kita dari berbuat serakah,saat rezekinya berlimpah kita akan berfikir bahwa semua rezeki yang diterimanya tidak semata-mata berasal dariusahanya sendiri melainkan ada campur tangan tuhan juga. Bahwasannya semua rezeki yang didapatkannya kelak akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat oleh Allah sehingga ia akan berhati-hati dalam hal mendapatkannya dan membelanjakannya. *Ketiga,* sebagai stabilisator, dimana seseorang melibatkan tuhan dalam segala aktivitas usahanya dan menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga apapun hasil yang akan diterimanya kelak tidak lain karena campur tangan tuhan.

Abdul Jalil menyebutkan dalam bukunya yang berjudul spiritual entrepreneurship bahwasannya seorang pengusaha muslim harus memiliki 10 karakter spiritual berupa[25] :

1) Amanah, supaya tujuan perusahaan tercapai, seorang pengusaha harus memiliki sifat kejujuran dan kebijaksanaan dalam berbisnis. Ketika seorang pengusaha menjual sesuatu, pengusaha harus memberi tahu konsumen tentang informasi barang yang ia jual, pengusaha juga harus menjaga kualitas setiap barangnya yang ia jual.

23 Abraham Maslow, *Toward a Phsycologhy of Being*, (Princeton: Von Nostard,1968), iii-iv

24 Abdul Jalil, *Spiritual Enterpreneurship:Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2013), 40.

25 Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship: Transformasi Spiritualitas…,* 262.

2) Orientasi jangka panjang, mampu memanfaatkan peluang dalam berwirausaha serta memanfaatkan sebuah peluang,sumber daya, serta mengorganisasikan perusahaan dan membangun strategi untuk perusahaan kedepannya. Karena kesuksesan seorang enterpreneurship berasal dari dalam keinginannyauntuk percaya pada kekuatannya sendiri dalam menghadapi lingkungan usahanya.
3) Komparatif, mampu memproduksi barang lebih komparatif dan kompetitif dengan barang yang kualitasnya lebih baik dari barang produksi perusahaan lain dengan meminimalisir biaya usaha yang lebih sedikit dan waktu yang lebih efisien.
4) Sinergis, setiap bagian dalam perusahaan bersatudan bersinergi dalam menjalankan bisnisnya, tidak memiliki batas-batas internal sehingga setiap bagian dalam perusahaan saling bersinggungan baik secara internal maupun eksternal.
5) Empati, seorang pengusaha harus bisa memahami dan berbagi perasaan yang dimiliki oleh orang lain.
6) Kreatif, seorang pengusaha harus memiliki sifat kreatif untuk mengembangkan bisnisnya dan mengikuti perkembangan zaman. Seorang pengusaha yang kreatif akan melihat sesuatu yang dapat dikembangkan dengan cara pandang yang berbeda dengan orang lain dan mengembangkannya dengan cara yang berbeda dengan biasanya sehingga muncullah ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam prosesnya, sehingga dari hal ini kemudian menjadikan seorang pengusaha untuk bersikap kreatif dan inovatif.
7) Taktis, berfikir strategis merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Karena tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini sangat rumit sehingga tuntutan untuk menjadi pengusaha yang mampu berfikir dan bersikap secara taktis dan strategis diperlukan untuk menghadapi masalah yang tengah dihadapi perusahaan secara cepat dan tepat agar tidak mengakibatkan kerusakan dalam bisnis.
8) Mandiri, mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah serta

mengambil inisiatif dalam perusahaan tanpa bantuan secara penuh dari orang lain.

9) Selalu belajar dari kegagalan, sikap seorang pengusaha untuk belajar dari kegagalan juga penting. Jika seorang pengusaha tidak melihat kegagalan sebagai hambatan namun sebagai kesempatan untuk berkembang dan bekerja dengan lebih baik maka ia akan jauh lebih berhasil kedepannya.

10) Selalu berikhtiar dan bertawakkal kepada Allah, selain berusaha dalam mengembangkan bisnisnya seorang pengusaha juga harus tetap berikhtiar dan bertawakkal kepada allah, berikhtiar dan bertawakkal diartikan sebagai usaha yang dilakukan sesorang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat dalam bentuk berusaha dan berdo'a kepada allah.[26]

2. Motivasi Spiritual Santri dalam meningkaykan ekonomi pesantren

Wahjosumidjo dijelaskan dalam bukunya kepemimpinan dan motivasi, motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara kebutuhan, sikap, presepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Dan motivasi sebagai proses psikologis yang timbul diakibatkan oleh faktor didalam diri seorang itu sendiri yang disebut intrinsik atau faktor diluar diri yang disebut faktor ekstrinsik. Faktor di dalam diri seseorang dapat berupa sikap, kepribadian, penglaman dan pendidikan, atau berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau ke masa depan. Sedangkan faktor diluar diri, dapat ditimbulkan oleh berbagai sumber, bisa karena pengaruh pemimpin, kolega atau faktor-faktor lain yang sangat komplek.[27]

Sondang P. Siagian dalam bukunya Martin Handoko, motivasi adalah keinginan, tujuan, harapan, sasaran, kebutuhan, intensif dan dorongan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu motivasi adalah keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan, atau

26 Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship: Transformasi Spiritualitas…,* 262.

27 Wahjosumidjo, *Kepemiminan dan Motivasi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987). 174-175.

menggerakkan dan tindak-tanduk seseorang yang selalu dihubungkan dengan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi ataupun tujuan pribadi masing-masing anggota organisasi yang bersangkutan.[28] Motivasi merupakan proses psikologis yang mampu meningatkan dan mengarahkan prilaku untuk mencapai tujuan. Manusia membutuhankan goal portofolio tiga dimensi untuk mengukur dirinya sendiri dalam tiga lapisan, yaitu : materi, intelektual dan spiritual.[29]

Para ahli memiliki pengertian masing-masing dan titik tekan yang berbeda, namun pada garis besarnya memiliki makna yang sama. Dapat disimpulkan melalui beberapa landasan definisi yang telah dikemukakan beberapa ahli, bahwa motivasi merupakan suatu energi atau dorongan dimana kebutuhan (needs) menjadi alasan yang melatarbelakangi kekuatan tersebut dan menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan motif atau alasan yang diinginkan.

Kajian tentang spiritualitas merujuk pada filsafat spiritualisme, yakni aliran yang menyatakan bahwa pokok dari realitas (*foundation of reality*) adalah spirit, jiwa dunia yang meliputi alam semesta dalam segala tingkatan aktivitasnya, sebagai penyebab dari aktivitasnya, perintah dan bimbingan (petunjuk), dan bertindak sebagai penjelasan yang lengkap dan rasional.[30] Elkins menunjuk spiritualitas sebagai cara individu memahai keberadaan maupun pengalaman dirinya. Bagaimana individu memahami keberadaan maupun pengalamannya dimulai dari kesadarannya mengenai adanya realitas transenden (berupa kepercayaan kepada Tuhan, atau apapun yang dipersiapkan individu sebagai sosok transenden) dalam kehidupan, dan dicirikan oleh nilai-nilai yang dianutnya.

28 Martin Hanadoko, *Motivasi (Daya Penggerak Tingkah Laku),* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 51

29 Heri Pratikto, *Prilaku Konsumsi Berbasis Motivasi Spiritual Islam Guru-Guru Mata Pelajaran Ekonomi Pada SMA/MA*, (Malang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun 15 No. 1. Maret 2010), 73

30 Abdul Jalil, *Spiritual Enterpreneurship Tranformasi Spiritualitas Keweirausahaan*, (Yogyakarta: LKiS: 2013), 23.

Rizal Muttaqin, Hafiduddin menjelaskan bahwa spiritual lebih kepada pemaknaan manusia secara lebih mendalam terhadap esensi penciptaanya diatas dunia yang fana ini. Oleh karena itu, spiritual dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Bagi Islam bagaimana seorang hamba memahami esensi penciptaannya dan kemudian ia berusaha menjalankannya sebagai wujud menjalankan perintah yang menciptakannya. Dengan demikian spiritualitas adalah kesadaran manusia akan adanya realisasi manusia dengan Tuhan, atau sesuatu yang dipersiapkan sebagai sosok transenden. Spiritualitas mencakup inner life individu, idialisme, pemikiran, sikap, perasaan, dan pengharapannya kepada Yang Mutlak, serta bagaimana individu mengekpresikan hubungan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.[31]

Motivasi spititual adalah Dorongan-dorongan yang memotivasi tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani. Motivasi spiritual menyangkut kesadaran seseorang bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan Tuhan pencipta alam semesta. Unsur spiritual dalam diri manusia membuat kita bertanya mengapa kita mengerjakan sesuatu dan memubat kita mencari cara-cara yang secara fundamental lebih baik untuk melakukannya.[32] Burnadib mendefinisikan kemandirian dalam pondok pesantren sebagai salah satu keadaan ketika seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas tugasnya, dan bertangung jawab terhadap apa yang dilakukannya[33].

Perekonomian yang mandiri sebuah Pondok Pesantren bertujuan guna meningkatkan layanan pendidikan menjadi berkualitas, sehingga

31 Rizal Muttaqin, *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren*, 70

32 Heri Pratikno, *"Motivasi Spiritual Dan Budaya Sekolah Berpengaruh Terhadap Kineja Profesional Dan Prilaku Konsumsi Guru Ekonomi"*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 9 No. 1 April 2012, 126

33 Rizal Muttaqin, *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren*, 68

bangsa ini pun menjadi berkualitas. Salah satunya adalah dengan cara berwirausaha, yaitu menjalankan usaha ekonomi sendiri, menciptakan unit-unit usaha baru, dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang profit di lingkungan Pondok Pesantren. dan ini merupakan kewajiban dalam mengimplementasikan semangat menjadi manusia yang tidak merugi.[34]

***

34 Moh. Rifa'i, *Manajemen Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Kualitas Layanan Pendidikan*, Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan, 33

BAB III

MEMBACA PELUANG BISNIS PESANTREN

A. Jaringan Pesantren Bisnis

Pesantren sebagai sebuah institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren hanya memposisikan dirinya sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berusaha melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik.[1]

Pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan kepadanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diembannya, yaitu: (1) sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*centre of exellence*),

1 Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta, Paramadina, 1997), 3

(2) sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*), (3) sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Selain ketiga fungsi tersebut pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) di tengah perubahan yang terjadi.

Pada batas tertentu pesantren tergolong di antara lembaga pendidikan keagamaan swasta yang *leading*, dalam arti berhasil merintis dan menunjukkan keberdayaan baik dalam hal kemandirian penyelenggaraan maupun pendanaan (*self financing*). Tegasnya selain menjalankan tugas utamanya sebagai kegiatan pendidikan Islam yang bertujuan regenerasi ulama, pesantren telah menjadi pusat kegiatan pendidikan yang konsisten dan relatif berhasil menanamkan semangat kemandirian,kewiraswastaan, semangat berdikari yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Pengembangan ekonomi masyarakat pesantren mempunyai andil besar dalam menggalakkan wirausaha. Di lingkungan pesantren para santri dididik untuk menjadi manusia yang bersikap mandiri dan berjiwa wirausaha. Pesantren giat berusaha dan bekerja secara independen tanpa menggantungkan nasib pada orang lain atau lembaga pemerintah swasta. Secara kelembagaan pesantren telah memberikan tauladan, contoh riil (*bi al-haal*) dengan mengaktualisasikan semangat kemandirian melalui usaha-usaha yang konkret dengan didirikannya beberapa unit usaha ekonomi mandiri pesantren. Secara umum pengembangan berbagai usaha ekonomi di pesantren dimaksudkan untuk memperkuat pendanaan pesantren, latihan bagi para santri, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kalau kita lihat pondok pesantren tempo dulu hanya sebagai lembaga sosial di bidang pendidikan, dewasa ini ia bertransformasi secara dinamis mengikuti perkembangan zaman mengoptimalkan sumber daya santrinya untuk bergerak juga dalam bidang ekonomi.[2]

2 Muhammad Zaini, *"Strategi Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Usaha Kecil Masyarakat"* Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 4, No. 1 (2014), 176. Lihat juga Rudy Haryanto, "Menumbuhkan Semangat Wirausaha Menuju Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Pesantren (Studi Kasus di PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan)" Nuansa, Vol. 14, No. 1 (Januari – Juni, 2017), 188-189.

Di berbagai daerah, pesantren telah tumbuh tidak hanya secara kuantitas dan kualitasnya sebagai lembaga sosial di bidang pendidikan, tetapi juga dalam bidang ekonomi dengan perangkat bisnisnya seperti peternakan, pertanian, toko ritel, produksi air mineral kemasan, toko roti, minimarket yang dikordinir oleh Koperasi Pesantren (Kopontren) juga ikut tumbuh signifikan untuk menopang kebutuhan ekonomi pesantren.[3]

Sisa hasil usaha (SHU) dari perangkat bisnis tersebut menjadi pendapatan pesantren untuk menunjang kemandirian ekonomi pesantren. Beberapa pesantren yang memiliki perangkat bisnis tersebut murni dimiliki oleh keluarga pengasuh (ndalem) atau pesantren secara institusinya, artinya keuntungan bisnis mengkrucut untuk kesejahteraan keluarga ndalem atau pesantren semata. Namun beberapa pesantren membuka diri untuk para alumni juga masyarakat umum secara luas untuk berpartisipasi berinvestasi pada perangkat bisnis pesantren yang terkordinasi dalam Kopontren, sehingga keuntungan perangkat bisnis tersebut terbagi kepada sekian banyak orang yang terlibat menjadi investor atau anggota koperasi pesantren.[4] Dari aspek ajaran Islam dapat dinilai bahwa eksistensi Kopontren yang menjadi basis kemandirian ekonomi pesantren dengan tidak lagi berharap bantuan pemerintah maupun swasta adalah hal baik dan termasuk memenuhi apa yang telah diharapkan.

3 Di daerah Gresik ada PP. Mambaus Sholihin, di mana penulis adalah alumninya, mempunyai UMKM air kemasan "MBS water" yang banyak didistribusikan di daerah Gresik dan Lamongan, MBS Bakery (Toko Kue milik Pesantren), dan Kopontren (Toko Ritel semi-modern yang menyediakan kebutuhan rumah tangga). Di daerah Pasuruan, ada PP. Dalwa, mempunyai UMKM terpusat dalam Dalwa Center mulai dari air kemasan "Dalwa Water" yang banyak didistribusikan di daerah Pasuruan dan Malang, Dalwa Roti, Dalwa Tour & Travel, 3 minimarket (toko ritel modern) bernama "Dalwa Mart" berlokasi di Raci, Bagil dan Surabaya, serta Hotel Dalwa berbintang tiga adalah unit bisnis PP Dalwa. PP. Sidogiri juga memiliki UMKM air mineral Basmala yang menyebar luas di daerah Pasuruan dan kota terutama di Jawa Timur.

4 Sebagaimana yang terjadi dalam unit usaha yang dimiliki oleh pesantren Sidogiri yang modalnya tidak hanya dari pihak ndalem, namun juga melibatkan orang luar terutama para alumninya terlibat sebagai investor. Lihat Tim Redaksi, " Dari Modal Rp 13 Juta, BMT Sidogiri Kini Beraset Rp 494 Miliar" https://duta.co/dari-modal-rp-13-juta-bmt-sidogiri-kini-beraset-rp-494-miliar/; diakses 16 April 2019

1. Bisnis Ritel di pondok pesantren

Perdagangan adalah usaha fisik untuk mengembangkan harta dengan membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi baik barang tersebut adalah barang olahan semisal tepung, hasil pertanian, ternak dan tambang. Jumlah yang tumbuh akibat dari beli murah dan jual mahal itu disebut laba. Usaha untuk mendapatkan laba ini dapat berupa menimbun barang hingga pasar berkembang dari harga rendah ke harga tinggi, hal ini maka akan didapat untung besar. Dapat juga seseorang memindahkan barangnya dari daerahnya ke daerah yang permintaan akan barang tersebut banyak dibanding daerah asalnya.[5] Riteling barang dengan memerhatikan kuantitas dan kualitas produk dagangan yang dibutuhkan oleh konsumen di suatu daerah adalah keniscayaan. Peritel yang menjajakan produk dagangannya tanpa melihat kebutuhan akan produk yang senantiasa dibutuhkan oleh kelompok masyarakat daerah tersebut akan mengalami penumpukan produk dagangan, hal demikian akan memperburuk siklus barang, modal dan keuntungan. Dari sini, peritel membutuhkan survei lapangan sebelum membuka gerai atau menggelar dagangan.[6] Supply dan demand memengaruhi barang, semakin sedikit dan langka suatu barang yang dibutuhkan oleh orang-orang maka semakin tinggi harganya. Begitu sebaliknya, semakin banyak barang di masyarakat sedangkan orang-orang yang membutuhkan stagnan dan cenderung sedikit maka harga tersebut menjadi murah.

Ritel dari bahasa Inggris, retail yang berarti mengecer, memotong-motong kembali menjadi bagianbagian yang lebih kecil. Kata ritel juga disinyalir serapan dari bahasa Prancis, ritellier, yang berarti memotong atau memecah sesuatu.[7] Bisnis ritel atau perdagangan secara eceran dapat didefinisikan sebagai kegiatan menjual barang atau jasa pada

5 'Abd al-Ra□ mān b. Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* Vol. 2 (Damaskus: Maktabah al-Hidāyah, 2004), 83.

6 'Abd al-Ra□ mān b. Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* Vol. 2 (Damaskus: Maktabah al-Hidāyah, 2004), 86

7 Christina Whidya Utami, 4.

konsumen akhir. Perdagangan secara eceran adalah mata rantai terakhir penyaluran produk produsen kepada konsumen. Sedangkan pedagang eceran adalah orang atau toko yang melakukan aktifitas mengecer barang.[8]

2. Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren

Berangkat dari kesadaran bahwa tidak semua santri akan menjadi ulama, maka beberapa pesantren mencoba membekali santri dengan keterampilan dibidang pengembangan ekonomi. Artinya santri yang dihasilkan diharapkan mempunyai pengalaman dan syukur keahlian praktis tertentu yang nantinya dijadikan modal untuk mencari pendapatan hidup sekeluar dari pesantren. Kalau mencermati perilaku ekonomi di lingkungan pesantren pada umumnya, kita dapat menerka kemungkinan model apa yang sedang berjalan dalam usaha-usaha tersebut. Setidaknya ada empat macam pengembangan ekonomi di lingkungan pesantren yaitu:[9]

1. Pengembangan ekonomi yang berpusat pada kyai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren. Misalnya seorang kyai mempunyai perkebunan cengkih yang luas. Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kyai mmelibatkan santri-santrinya untuk mengerjakannya. Maka terjadilah hubungan mutualisme saling menguntungkan: kyai dapat memproduksikan perkebunannya, santri mempunyai pendapat tambahan, dan ujungnya dengan keuntungan yang dihasilkan dari perkebunan cengkeh maka kyai dapat menghidupi kebutuhan pengembangan pesantrennya.
2. Pengembangan ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Contohnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti menyewakan gedung pertemuan, rumah dsb. Dari keuntungan usaha-usaha produktif ini pesantren mampu

8 Sopiah dan Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), 7

9 Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori dan Praktek,* Yogyakarta: Graha Guru, 2004, hlm. 15-16.

membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini.

3. Pengembangan ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Pesantren membuat program pendidikan sedemikian rupa yang berkaitan dengan usaha ekonomi seperti pertanian dan peternakan. Tujuannya semata-mata untuk membekali santri agar mempunyai ketrampilan tambahan, dengan harapan menjadi bekal dan alat untuk mencari pendapatan hidup.
4. Pengembangan ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni, syukur bagai nanti keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren. Prioritas utama tetap untuk pemberdayaan para alumni santri. Contohnya Pesantren mendirikan usaha ekonomi berupa koperasi yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam, perdagangan dan lain-lain.[10]

Potensi ekonomi kedua yang melekat pada pesantren adalah para santri. Hal ini dipahami bahwa pada umumnya santri mempunyai potensi/bakat bawaan seperti kemampuan membaca al-Qur'an, kaligrafi, pertukangan, dan lain sebagainya. Bakat bawaan ini sudah seharusnya selalu dipupuk dan dikembangkan. Karena itulah, ada baiknya bila dalam Ponpes diterapkan penelusuran potensi/bakat dan minat santri, kemudian dibina dan dilatih. Dengan demikian, dalam Ponpes tersebut perlu juga dikembangkan Wadah Apresiasi Potensi Santri (WAPOSI), wadah semacam ini, mungkin sudah ada di beberapa Ponpes, tinggal bagaimana mengaturnya supaya produktif. Perlu juga ditambahkan, penggalian potensi diri santri-murid ini merambah pada potensi-potensi, semisal politisi, advokasi, jurnalistik, dan seterusnya.

10 Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori dan Praktek,* .....17.

Karenanya, untuk ke depan wajah Ponpes menjadi semakin kaya ragam dan warna.

B. Life skill di Pondok Pesantren

1. Pengertian Life Skill

Life skill adalah kegiatan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada santri tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan. Dengan demikian life skill harus dapat merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata dalam proses latihannya agar santri memperoleh kecakapan hidup tersebut sehingga siap untuk hidup ditengah-tengah masyarakat.[11]

Beberapa pendapat terkait life skill yang diungkapkan oleh para ahli antara lain, Menurut Anwar life skill adalah kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain atau masyarakat lingkungan dimana ia berada, antara lain keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres, ini merupakan bagian dari pendidikan.32 kemudian Simamora mengatakan bahwa pelatihan life skill merupakan serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Sementara Sastrodipoero menyatakan bahwa pelatihan life skill merupakan peningkatan keterampilan di luar sistem pengembangan sumber daya manusia, yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori.[12]

11 Zainal Abidin, *Implementasi Pendidikan Life Skill Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi.*Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam Volume VI No. 1: 162-173 (September 2014), 166.

12 Muhammad Abdul Nafi' "*Model Pengembangan Life Skill Di Pondok Pesantren AlMas'udiyyah*

Sedangkan keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keterampilan berarti keterampilan dapat dilatih sehingga mampu melakukan sesuatu, tanpa adanya latihan dan proses kreatifitas, dan pikiran. tidak bisa menghasilkan sebuah keterampilan yang khusus atau terampil karena keterampilan bukanlah bakat yang bisa saja didapat tanpa melaui sebuah proses.[13]

Pendidikan kecakapan hidup sangat dibutuhkan dalam pengembangan potensi dan kreatifitas peserta didik. Dalam mengartikan pendidikan *life skill* atau pendidikan kecakapan hidup terdapat perbedaan pendapat, namun esensinya tetap sama. Brolin mengartikan *life skill* atau kecakapan hidup adalah sebagai kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar menjadi independen dalam kehidupan.[14] Pendapat lain mengatakan bahwa *life skill* merupakan kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat bahagia dalam kehidupan.

Malik Fajar mengatakan bahwa *life skill* adalah kecakapan yang dibutuhkan untuk bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik. Sementara itu team *Broad Base Education* mendiknas mendefinisikan bahwa *life skill* adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang agar berani dan mau menghadapi segala permasalahan kehidupan dengan aktif dan proaktif sehingga dapat menyelesaikannya.[15]

Sedangkan Slamet PH mendefinisikan *life skill* adalah kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh

Jimbaran Bandungan Semarang" Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014, 13

13 Tidak bisa menghasilkan sebuah keterampilan yang khusus atau terampil karena keterampilan bukanlah bakat yang bisa saja didapat tanpa melaui sebuah proses.

14 Anwar. *Pendidkapan Hidup Konsep dan Aplikasi,* (Bandung: Alfabeta. 2004). *56*

15 Anwar. *Pendidkapan Hidup Konsep dan Aplikasi....* 32

seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Kecakapan tersebut mencakup segala aspek sikap perilaku manusia sebagai bekal untuk menjalankan kehidupannya. Jadi pendidikan *life skill* adalah pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan peserta didik. Dengan demikian pendidikan *life skill* harus dapat merefleksikan kehidupan nyata dalam proses pengajaran agar peserta didik memperoleh kecakapan hidup tersebut, sehingga peserta didik siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu komisi UNESCO mencanangkan serangkaian konsep dalam mempersiapkan pendidikan manusia abad ke 21, dimana perlunya peserta didik dilatih untuk bisa berpikir (*learning to think)*, bisa berbuat atau melakukan sesuatu (*learning to do*), dan bisa menghayati hidupnya menjadi seorang pribadi sebagaimana ia ingin menjadi (*learning to be*). Tidak kalah penting dari itu semua adalah belajar bagaimana belajar (*Learning how to learn*) baik secara mandiri maupun dalam kerja sama dengan orang lain (*learning to live together*).[16]

Jauh sebelum UNESCO mencanangkan hal tersebut, Islam sebagai agama yang tidak dapat diragukan kesempurnaanya, telah memiliki konsep bagaimana mengajarkan kesuksesan dalam dua kehidupan manusia yakni di dunia maupun di akhirat, yakni sebagaimana firman Allah; " *Wahai orang orang beriman,bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan" [17]* Hal ini diikuti dengan petunjuk operasional dari Allah swt "*Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan…* ".[18] Sehingga tugas dari setiap manusia yang telah bersyahadat

16 Sudarminto, *Transformasi Pendidikan Memasuki Milineum*, (Jogjakarta: Kanisius, 2000), 6-7

17 Depag RI , *Al-qur'an Terjemah* (Jakarta: Depag RI, 2002) Q.S. 59:18

18 Depag RI , *Al-qur'an Terjemah* (Jakarta: Depag RI, 2002) Q.S 2:208

adalah bagaimana memasukkan Islam yang ideal dalam wadah kepribadian kita, dalam hal ini dibutuhkan ketrampilan hidup agar dapat menjadi muslim (orang Islam) dalam batasan wadah kepribadian manusia yang unik.

Model manusia muslim adalah model manusia yang memiliki tingkat afiliasi yang tinggi terhadap Islam, berpartisipasi untuk menebarkan nilai Islam selanjutnya berkontribusi menegakkan Islam[19], dimana manusia memahami dengan baik mengapa memilih Islam sebagai agama yang akan melahirkan; komitmen *aqidah/ ideology* yaitu memahami satuan satuan ajaran Islam sebagai *system* dan tatanan hidup, komitmen *syariah*/metodologi yaitu paham bagaimana menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, serta komitmen akhlaq yaitu pribadi adalah sebagai penjelmaan dari apa yang dipahami. Ketiga komitmen ini membentuk manusia menjadi sholih secara pribadi. Pribadi yang *sholih* akan menjadi sempurna manakala dapat mendistribusikan kesholihannya sehingga menjadi *mushlih* dengan berpartipasi aktif dalam kehidupan dengan bekal pengetahuan sosial humaniora dan penguasaan medan lingkungan sosial budaya tempat manusia hidup, selanjutnya berkontribusi produktif dalam sejarah kehidupan manusia.

Sedangkan tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Selain itu pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya di masa datang. Kecakapan hidup mencakup kecakapan dasar dan kecakapan instrumental. Kecakapan dasar meliputi:

1) kecakapan belajar mandiri;
2) kecakapan membaca, menulis, dan menghitung;
3) kecakapan berkomunikasi;

19 Sudarminto, *Transformasi Pendidikan Memasuki Milineum*, 15

4) kecakapan berpikir ilmiah, kritis, nalar, rasional, lateral, sistem, kreatif, eksploratif, reasoning, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah;
5) kecakapan kalbu/personal;
6) kecakapan mengelola raga;
7) kecakapan merumuskan kepentingan dan upaya-upaya untuk mencapainya; dan
8) kecakapan berkeluarga dan sosial.

Kecakapan instrumental meliputi: (l) kecakapan memanfaatkan teknologi; (2) kecakapan mengelola sumber daya; (3) kecakapan bekerjasama dengan orang lain; (4) kecakapan memanfaatkan informasi; (5) kecakapan menggunakan sistem; (6) kecakapan berwirausaha; (7) kecakapan kejuruan; (8) kecakapan memilih, menyiapkan, dan mengembangkan karir; (9) kecakapan menjaga harmoni dengan lingkungan: dan (10) kecakapan menyatukan bangsa.

Kecakapan hidup (*life skill*) sebenernya bukan merupakan hal baru bagi pesantren, sebab sejak dahulu jenis pendidikan ini memang menjadi andalan bagi pesantren. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada masa sekarang ini, pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan secara tradisional dilingkungan Pesantren perlu mendapatkan pembelajaran lebih terkait dengan teknis maupun teoritis. Sehingga para alumni pesantren yang hidup dizaman serba moderen ini mampu bersaing dengan para alumni lembaga pendidikan lainnya dalam berebut lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin ketat.

Secara umum tujuan dari penyelenggaraan kecakapan hidup (*life skill*) di Pondok Pesantren adalah untuk membantu para santri mengembangkan kemapuan berfikir, menghilangkan pola pikir/ kebiasaan yang kurang tepat, dan mengembangkan potensi diri agar dapat memecahkan problem kehidupan secara tepat, inovatif dan kreatif sehingga dapat menghadapi realitas kehidupan dengan bahagia, baik secara lahiriah maupun batiniah., artinya

life skill merupakan hal yang harus disesuaikan dengan kondisi santri dan lingkungannya serta memenuhi prinsip-prinsip umum pendidikan yang ada.[20] Prinsip-prinsip kecakapan hidup (*life skill*) yang dimaksud adalah mecangkup hal-hal sebagai berikut:

a. Kecakapan hidup (life skill) hendaknya tidak mengubah sistem pendidikan yang telah berlaku.
b. Kecakapn hidup (life skill) tidak harus mengubah kurikulum, tetapi yang diperlukan adalah penyiasatan kurikulum untuk diorientasikan pada kecakapan hidup.
c. Etika sosio-religius bangsa tidak boleh dikorbankan dalam latihan kecakapan hidup (*life skill*), melainkan justru sependapat mungkin diintregasikan dalam proses kegiatan latihan life skill.
d. Pembelajaran kecakapan hidup (*life skill*) menggunakan prinsip *learning to know* (belajar untuk mengetahui sesuatu), *learning to do* (belajar untuk dapat mengerjakan sesuatu), *learning to be* (belajar untuk menjadi jati diri sendiri), dan learning to life together atau belajar untuk hidup bersama.
e. Pelaksanaan latihan kegiatan kecakapan hidup (life skill) di Pesantren hendaknya menerapkan manajemen berbasis pesantren.
f. Potensi daerah sekitar pesantren dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan latihan kegiatan kecakapan hidup (life skill) di Pesantren, sesuai dengan pendidikan kontekstual (*contextual teaching and learning*) dan pendidikan berbasis luas (*Broad Based Education*)
g. Paradigma learning for life (pendidikan untuk kehidupan) dan learning to work (belajar untuk belajar) dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan, sehingga terjadi peraturan antara ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata para santri.
h. Penyelenggaraan kecakapan hidup (*life skill*) diarahkan

20 Saputra Mundzier, Haedari Amin, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), 163

agar santri dapat menuju hidup yang sehat dan berkualitas, mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang luas, serta memiliki akses untuk memenuhi standar hidup secara layak.[21]

2. Tujuan Life Skill Pondok Pesantren

Latihan kegiatan kecakapan hidup (*life skill*) berusaha untuk lebih mendekatkan pendidikan dengan kehidupan sehari-hari para santri, dan mempersiapkannya menjadi orang dewasa yang dapat hidup dengan baik di manapun dia berada dan mampu hidup di masyarakat. Secara umum, tujuan dari latihan kegiatan kecakapan hidup (*life skill*) adalah untuk memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi para santri untuk menghadapi perannya di masa datang.[22]

3. Hakekat Life Skill Pondok Pesantren

Konsep life skill merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan latihan yang menekankan pada kecakapan hidup atau bekerja. Life skill memiliki makna yang lebih luas dari employability skill dan vocational skill. Keduannya merupakan bagian dari life skill. Borlin mengatakan bahwa *life skill constitute of knowledge and apatitude that are necessary for a person to function effectively and to avoid interupptions of employment experience* (kecakapan hidup merupakan pengetahuan dan bakat yang diperlukan seseorang untuk berfungsi secara efektif dan untuk menghindari interupsi pengalaman kerja).[23]

Dengan demikian life skill dapat dikatakan sebagai kecakapan

21 Saputra Mundzier, Haedari Amin, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), 164

22 Ulfa Hasanah, *Upaya Pondok Pesantren Dalam Mengembangkan Life Skill Santri Di Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo* Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019), 47

23 Anwar, Pendidikan Kecakapa Hidup, (Bandung: ALFABETA, 2015), 18

untuk hidup, istilah hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (*vocational job*), satori menjelaskan bahwa ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar ditempat kerja mempergunakan teknologi. Progran kegiatan berwawasan life skill adalah kegiatan pelatihan yang dapat memeberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, peluang usaha dan potensi ekonomi di masyarakat. Life skill memiliki cakupan yang luas seperti comunication skill, decision making skill, resource and time management skill, and planing skill (keterampilan komunikasi, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan manajemen sumber daya dan waktu, dan keterampilan perencanaan)[24]

Pada teori-teori yang penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa Fungsi manajemen Life Skill merupakan kegiatan latihan yang harus diperhatikan dalam segala hal demi tercapainya tujuan bersama, seperti pada Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Pondok Pesantren adalah merupakan bentuk pendidikan nonformal dan pengajaran agama islam dengan kurikulum diniyah, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Sebagai kelompok santri, dalam kegiatan bukan semata-semata mempelajari ilmu agama, tetapi juga ada kegiatan Pondok Pesantren yang berpotensi dibidang seni yaitu kegiatan yang berwawasan *life skill*. Kegiatan tersebut sebagai tempat belajar bagi para santri, yang pada akhirnya akan dijadikan ilmu santri apabila sudah kembali kemasyarakat dan diharapkan dapat mensosialisasikan kepada lingkungan masyarakat pada daerah asalnya, atau minimal sebagai bekal santri itu sendiri untuk menghadapi kehidupan yang mandiri serta mampu bermitra dengan masyarakat dan bisa menyesuakan kehidupan berdasarkan nila-nilai yang telah di terapkan oleh masyarakat.

24 Anwar, *Pendidikan Kecakapa Hidup*... 18

4. Paradigma Pendidikan *life skill*

Dalam rangka memajukan pendidikan nasional diperlukan suatu paradigma yang jelas melalui tatanan normatif dalam bentuk undang-undang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah yang akan memberikan arahan makro terhadap pendidikan nasional, dan selanjutnya peraturan daerah yang akan mengembangkan potensi keunggulan lokal yang dapat memperkaya potensi nasional. Bagi para praktisi pendidikan dalam upayanya memajukan pendidikan maka minimal ia harus berangkat dari dua paradigma:*(1) Paradigma normatif, dan (2) paradigma empiris.*[25]

Paradigma normatif adalah perangkat perundang-undangan dan peraturan di bidang pendidikan yang merupakan pedoman dalam pengelolaan pendidikan. Jika harus berangkat dari perundang-undang yang sedang berlaku, maka pijakannya hendaknya diawali dari UUD pasal 31 tentang pendidikan, kemudian UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan berbagai peraturan pemerintah sebagai turunannya, kemudian UU No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*, dengan berbagai peraturan daerah yang mengatur implementasinya di daerah. Ada kecenderungan lulusan suatu jenis/ jenjang pendidikan tidak memiliki keterampilan dasar sesuai dengan keterampilan yang seharusnya menjadi kewajiban jenis/ jenjang pendidikan untuk memberikannya. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka muncul kebijakan penerapan konsep *life skill* disemua satuan, jenis, dan jenjang pendidikan dengan harapan para tamatan pendidikan tersebut dapat menguasai keterampilan dasar minimal sesuai standar kewenangannya. [26]

Menurut penjelasan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas bahwa kecakapan hidup (*life skill*) diartikan sebagai kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema

25 Anwar. *Pendidkapan Kecakapan Hidup Konsep dan Aplikasi*. 32

26 Anwar. *Pendidkapan Kecakapan Hidup.....,* 41

kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya.[27]

Pengertian kecakapan hidup (*life skill*) lebih luas dari keterampilan vokasional atau keterampilan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja, misalnya ibu rumah tangga atau orang yang sudah pensiun, tetap memerlukan kecakapan hidup (*life skill*). Seperti halnya orang yang bekerja, mereka juga menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan. Orang yang sedang menempuh pendidikan pun memerlukan kecakapan hidup, karena mereka tentu juga memiliki permasalahannya sendiri. Terkait dengan hal tersebut direktorat pembinaan sekolah menengah atas mengungkapkan bahwakecakapan hidup dipilah menjadi dua jenis, yaitu:[28]

1) Kecakapan hidup yang bersifat generik (*generic life skill*), yang mencakup kecakapan personal (*personal skill*) dan kecakapan sosial (*social skill*). Kecakapan personal mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri (*self awareness*) dan kecakapan berpikir (*thinking skill*), sedangkan kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi (*communication skill*) dan kecakapan bekerja sama (*collaboration skill*).
2) Kecakapan hidup spesifik (*specific life skill*), yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, yang mencakup intelektual dan kecakapan vokasional (*vocational skill*). Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikitan, sehingga mencakup kecakapan mengidentifikasi variabel dan hubungan antara satu dengan lainnya (*identifying variables and describing relationship among them*), kecakapan merumuskan hipotesis (*constructing hypotheses*), dan kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian (*designing and implementing a research*). Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih

27 Direktorat Pendidikan, *Model Pendidikan Kecakapan Hidup,* Depdiknas, 2013, 55

28 Direktorat Pendidikan, *Model pendidikan Kecakapan Hidup,....* 58

memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional mencakup vokasional dasar (*basic vocational skill*) dan kecakapan vokasionalkhusus (*occupational skill*).

Life skill merupakan sub sistem dari konsep pendidikan berbasis masyarakat luas yang berorientasi pada kecakapan hidup.[29] Sedangkan pernyataan lain yang menyatakan bahwa program pendidikan *life skill* dimaksudkan sebagai pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat.

Berdasarkan konsep diatas, kecakapan hidup adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Pendidikan berorientasi kecakapan hidup bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Apabila hal ini dapat dicapai, maka ketergantungan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, yang berakibat pada meningkatkannya angka pengangguran, dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap. Begitu juga aktifitas pendidikan *life skill* ketika ditekankan sejak dini maka produktifitas yang di hasilkan di sekolah akan bisa menceta generasi yang madiri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki

5. Prinsip Pengembangan *Pendidikan life skill*

Pendidikan *life skill* adalah pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan peserta didik. Dengan demikian pendidikan life skill harus dapat merefleksikan kehidupan

29 Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2004) 32

nyata dalam proses pengajaran agar peserta didik memperoleh kecakapan hidup tersebut, sehingga peserta didik siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan pendidikan *life skill* adalah bervariasi, disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungannya, namun memiliki prinsip-prinsip umum yang sama. Berikut ini adalah prinsip umum pendidikan *life skill*, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia: [30]

1. Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku.
2. Tidak harus dengan mengubah kurikulum, tetapi yang diperlukan adalah penyiasatan kurikulum untuk diorientasikan dan diintegrasikan kepada pengembangan kecakapan hidup.
3. Etika-sosio-religius bangsa dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan.
4. Pembelajaran menggunakan prinsip *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*.
5. Pelaksanaan pendidikan *life skill* dengan menerapkan menejemen berbasis sekolah (MBS). Kurikulum berbasis sekolah memandang bahwa pengembangan kurikulum sekolah memperhatikan keunggulan lokal suatu daerah.[31]
6. Potensi wilayah sekitar sekolah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan prinsip pendidikan kontekstual dan pendidikan berbasis luas (*broad base education*).[32]
7. Paradigma *learning for life and school to work* dapat dijadikan dasar kegiatan pendidikan, sehingga terjadi pertautan antara pendidikan dengan kehidupan nyata peserta didik.
8. Penyelenggaraan pendidikan harus selalu diarahkan agar peserta didik menuju hidup yang sehat, dan berkualitas, mendapatkan

30 Direktorat Pendidikan, *Model pendidikan Kecakapan Hidup. 34*

31 Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokarsi ke lembaga Akademik.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 42

32 Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokarsi ke lembaga Akademik.* 49

pengetahuan dan wawasan yang luas serta memiliki akses untuk mampu memenuhi hidupnya secara layak.

Beberapa prinsip diatas membuktikan bahwa pengenalan kecakapan hidup terhadap peserta didik bukanlah untuk mengganti kurikulum, akan tetapi untuk melakukan reorientasi terhadap kurikulum yang ada sekarang agar benar-benar dapat merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata. Jadi pendidikan kecakapan hidup merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum dengan tuntutan kehidupan nyata, dan bukan untuk merombaknya.

Penyesuaian-penyesuaian kurikulum terhadap tuntutan kehidupan perlu dilakukan mengingat kurikulum memang dirancang permata pelajaran yang belum tentu sesuai dengan tuntutan kehidupan nyata yang umumnya bersifat utuh. Selain itu, kehidupan memilki karakteristik untuk berubah, sehingga sudah sewajarnya jika kurikulum perlu didekatkan dengan kehidupan nyata. Dalam pandangan ini, maka kurikulum merupakan sasaran yang bergerak dan bukan sasaran yang diam.

Dalam arti yang sesungguhnya pendidikan *life skill* memerlukan penyesuaian-penyesuaian dari pendekatan *supply-driven* menuju ke *demand driven*. Pada pendekatan *supply driven*, apa yang diajarkan cenderung menekankan pada *school based learning* yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai kehidupan nyata yang dihadapi oleh peserta didik. Pada pendekatan *demand driven*, apa yang diajarkan kepada peserta didik merupakan refleksi nilai-nilai kehidupan nyata yang dihadapinya sehingga lebih berorientasi kepada *life skill-based learning*.[33]

Dengan demikian, kerangkah pengembangan pendidikan berbasis kecakapan hidup idealnya ditempuh secara berurutan sebagai berikut: Pertama, diidentifikasi masukan dari hasil penelitian, pilihan-pilihan nilai dan dugaan para ahli tentang nilai-nilai kehidupan

33 Arifin, *Motivasi Kerja.* (Yogyakarta: Teras, 2009) 20

nyata yang berlaku. Kedua, masukan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi kecakapan hidup yang dimaksud harus menunjukkan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya dalam dunia yang syarat dengan perubahan. Ketiga, kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi kecakapan hidup yang telah dirumuskan. Artinya, apa yang harus, seharusnya, dan yang mungkin diajarkan kepada peserta didik disusun berdasarkan kompetensi yang telah dikembangkan. Keempat, penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup perlu dilaksanakan dengan jitu agar kurikulum berbasis kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara cermat. Hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan *life skill* atau kecakapan hidup seperti tenaga kependidikan (guru), pendekatan-strategi-metode pembelajaran, media pendidikan, fasilitas, tempat belajar dan durasi belajar, harus siap. Kelima, evaluasi pendidikan kecakapan perlu dibuat berdasarkan kompetensi kecakapan hidup yang telah dirumuskan pada langkah yang kedua. Karena evaluasi belajar disusun berdasarkan kompetensi, maka penilaian terhadap prestasi belajar peserta didik tidak hanya dengan pencil and paper test, melainkan juga dengan *performance test* dan bahkan dengan evaluasi otientik.[34]

C. Pesantren Kelautan/Maritim

Laut adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara maritim seperti Indonesia. Dengan komposisi wilayah yang hampir dua pertiganya merupakan laut, dan panjang garis pantai 95.181 km serta jumlah pulau yang lebih dari 13.000, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. agi umat Islam, penghuni mayoritas negeri maritim ini, laut tidaklah asing lagi. Beberapa ayat-ayat kauniyah di dalam kitab suci al-Quran dengan jelas mengandung penjelasan sains tentang laut

34 Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) 124

sebagaimana banyak diterangkan dalam Al qur'an [QS 24:40; 25:53; 52:6; 16:14; 17:66].

Al-Quran menunjukkan dengan jelas bahwa laut mengandung sumber daya berharga yang melimpah [QS 55: 22]. Lantas, mengapa kita sebagai umat yang telah diberi petunjuk dengan jelas tentang besarnya potensi bahari yang kita miliki belum dapat memanfaatkannya? Akankah kita dapat mengambil posisi terdepan dalam mengembalikan kejayaan bahari kita? Sebagaimana dalam nasehat baginda Rosulullah Muhammad SAW. bahwa''

"Ajarkan anak-anakmu berenang, memanah dan berkuda". Demikian nasehat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW yang hidup di gurun memberikan nasehat tersebut jika beliau tidak memahami potensi laut (perairan) sebagaimana wahyu yang diterimanya. Jika kita renungkan, nasehat ini merupakan satu petunjuk bagi kita untuk "turun" ke laut. Jadi, sudah seharusnya kita umat Islam berada di garda terdepan dalam menggali dan memanfaatkan potensi bahari yang kita miliki.

Setidaknya ada 4 bidang yang dapat dimasukkan dalam kurikulum kebaharian. *Pertama,* pandangan Islam – al-Quran tentang laut. Materi ini ditujukan untuk membawa kesadaran para santri bahwa ada ikatan yang kuat antara Islam dan ilmu kelautan. Al Quran memang bukan kitab teknologi, akan tetapi di dalam al-Quran terdapat petunjuk yang akan mengantarkan manusia memahami dan menguak apa yang tersimpan di dalam laut. Akan tertanam satu tekad dalam diri santri bahwa sebagai generasi muda Islam sudah sepatutnya lebih mampu mengenal dunia bahari karena hal itu telah tertuang dalam kitab suci yang menjadi pedoman hidupnya. *Kedua,* Bidang sejarah yang dapat dijadikan materi ajar adalah tentang sejarah maritim, khususnya sejarah maritim Indonesia. Materi dalam bidang ini merupakan bagian dari proses pembangunan karakter. Santri perlu diperkenalkan peradaban nenek moyang kita yang telah menjadikan laut sebagai urat nadi pembangunan. Peradaban bahari yang menjadi karakter bangsa ini harus ditanamkan kepada para santri agar tidak menjadikan sejarah kejayaan bahari hanya sebagai dongeng

pengantar tidur. Akan tetapi mampu menjadikan budaya bahari sebagai bangunan jati diri dan karakter bangsa ini.

Ketiga, bidang ilmu dan teknologi kelautan. Santri perlu mendapat pengetahuan dasar bagaimana petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam al-Quran sesungguhnya benar terjadi di lautan. Interaksi antara dua lautan yang memiliki salinitas berbeda sehingga menimbulkan batas antara dua laut, merupakan fenomena alam yang dengan terang dijelaskan di dalam Al Quran. Dari sini, santri diajak bagaimana melihat posisi Indonesia yang diapit oleh dua Samudera (Pasifik dan Hindia) yang berbeda salinitasnya sesungguhnya banyak mengandung mutiara dan marjan [QS 55:22]. Agar santri memiliki wawasan bagaimana menggali mutiara dan marjan yang ada di dalam lautan, maka materi teknologi kelautan merupakan satu keharusan.

Keempat, bidang ekonomi kelautan. Kita tidak ingin tentunya, penguasaan ilmu dan teknologi kelautan yang dimiliki tidak dapat memberikan manfaat yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Di sinilah, materi tentang ekonomi kelautan perlu diberikan agar santri dapat memahami besarnya potensi ekonomi laut kita dan bagaimana memanfaatkannya.

Kajian mengenai pengembangan budaya maritim ini belum banyak, apalagi dikaitkan dengan peran lembaga pendidikan pesantren. Terkait dengan pembangunan maritim yang juga terkait dengan partisipasi pendidikan salah satu yang bisa disebut misalnya Tide Aji Pratama menyebutkan bahwa isu-isu terkait keamanan maritim tidak melulu terkait dengan politik antar negara dalam artian state security, tetapi juga human security, khususnya terkait dengan ancaman asimetris, yaitu terorisme, imigran ilegal, penyeludupan narkotika, penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia. Sehingga tugas untuk menjaga ke-amanan laut kita membutuhkan kerja sama antar instansi di dalam negeri yang solid berdasarkan pemahaman akan perkembangan isu-isu keamanan maritim tersebut.[35]

35 Pratama, T. A. (2015) '*Kebijakan Poros Maritim Dunia Di Tengah Dinamika Asia Pasifik Saat Ini*', Paskas. Available at: https://www.academia.edu/10062323

Nainggolan menyebutkan dengan menghidupkan kembali budaya maritim, bangsa Indonesia diharapkan sudah harus meninggalkan budaya lama kontinental-nya yang berorientasi ke darat, agar dapat menjadi sebuah negara bahari, seperti dalam masa Majapahit dan Sriwijaya. Hanya dengan kehadiran kultur ini pula, Indonesia baru bisa menjadi sebuah kekuatan laut.[36] Sedangkan, dengan komponen ekonomi maritim, Indonesia dapat membangun basis ekonomi rakyatnya di sepanjang jalur pelayaran internasional, dengan kehadiran pelabuhan-pelabuhan bertaraf internasional dan keterhubungan mereka dengan pelabuhan-pelabuhan tradisional yang sudah ada sebelumnya di masa kolonialisme. Sebagai konsekuensinya, kebijakan Poros Maritim Dunia yang diimplementasikan Presiden Joko Widodo tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trisakti Presiden Sukarno, yakni kemandirian di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Anggraeni menyebutkan dengan mengembalikan kejayaan laut akan dapat menjadi negara ini berdaya saing serta memiliki produktivitas yang tinggi. Adapun strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh presiden Joko Widodo sesuai dengan visi- misinya, yaitu (1) Menerapkan paradigma baru yakni termasuk di dalamnya adalah ocean based development; (2) Memiliki strategi yang meliputi penguatan konektivitas dan peningkatan pertahanan keamanan laut Indonesia; (3) Kebijakan terkait pembangunan infrastruktur; (4) Kebijakan peningkatan keamanan laut terkait dengan *illegal fishing*.[37] Gagasan pengembangan pesantren dalam konteks budaya maritim merupakan konsekuensi paradigma *ocean based development*.

penulis mendapatkan daftar pesantren Maritim di Banten sebanyak 6 buah, dan nomor satu disebutkan pesantren Bisnis.com Istana Mulia yang berlokasi di dekat Pantai Anyer, dan masuk wilayah Serang. Segeralah penulis meluncur ke sana untuk mengkaji sejauh mana pengembangan

36 Nainggolan, P. P. (2015) '*Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo'*, Jurnal Politica Vol. 6 No. 2 Agustus 2015., 6 (2)

37 Anggraeni, P. S. (2016) '*Politik Luar Negeri Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia Di Era Pemerintahan Joko Widodo*', eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 4 (2).

budaya Maritim sudah diimplementasikan di pesantren tersebut. Penulis sebelumnya membayangkan bahwa pesantren ini karena dekat pantai, maka ada aktivitas pesantren yang berhubungan dengan laut. Namun bayangan itu ternyata jauh dari kenyataan. Dari sisi lokasi, adalah benar bahwa pesantren ini berlokasi tidak jauh dari laut, sekitar 1 kilometer dari bibir pantai. Berbeda dari bayangan sebelumnya, ternyata pesantren ini lebih dekat dengan suasana pesantren bercorak perkebunan. Pesantren ini lebih mengembangkan pesantren sebagai tempat wisata spiritual berbasis kebun. Tidak ada sedikitpun aktivitas yang berbau kelautan. Padahal sebenarnya pesantren ini potensial untuk mengembangkan pesantren model kelautan karena dari sisi geografis berdekatan dengan laut. Belum adanya konsep mengenai pesantren maritim menjadi sebab pesantren ini belum mengembangkan budaya maritim.[38]

D. Pesantren Agribisnis

Pesantren merupakan lembaga pendidikan non-profit dan sangat mengakar di masyarakat. Memiliki ciri utama yaitu kemandirian. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan para santri, ustadz, maupun para pegawai. Sebagai lembaga yang telah mengakar dan telah menjadi bagian sosiokultural masyarakat, pesantren memiliki peluang sebagai salah satu penggerak ekonomi pedesaan. Sebagian besar pesantren berada di daerah pedesaan sehingga potensi pertanian menjadi salah satu alternative kegiatan pemberdayaan ekonomi pesantren. Konsep pengembangan pertanian yang dilakukan di pesantren sudah seharusnya menggunakan pendekatan agribisnis. Sebagai suatu system, agribisnis akan memberikan nilai tambah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya.[39]

Pesantren bukan sekedar pusat pendalaman agama, tafaqquh fiddin. Pesantren juga memiliki potensi pengembangan ekonomi

38 Muhamad Murtadlo, *Gagasan Pengembangan Pendidikan Pesantren Berbasis Maritim Di Banten,* EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 18(1), 2020, 19-35

39 Widodo, Slamet. *Pengembangan Potensi Agribisnis dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Pesantren; Kajian Ekonomi dan Sosiokultural.* Embryo. Volume 7. Nomor 2, 2010.

karena pesantren merupakan komunitas yang terjalin dalam ikatan saling percaya yang sangat kuat. Adanya kegiatan ekonomi pesantren memberikan nilai strategis bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan. Hal tersebut bisa menjadi peluang bagi para santri dalam peningkatan skill, keterampilan, dan wawasan. Saat ini, peran dunia pesantren dalam pengembangan ekonomi bukan sekedar wacana. Seiring kian parahnya kondisi ekonomi bangsa, terpaan krisis ekonomi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta banyaknya siswa putus sekolah telah menginspirasi sejumlah pesantren untuk memberi perhatian lebih pada aspek ekonomi.[40]

Salah satu usaha yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber pendapatan bagi pesantren dalam melaksanakan programnya agribisnis pesantren. Agribisnis pesantren merupakan agribisnis yang pengelolannya oleh institusi pesantren. Apabila usaha ini benar-benar dapat dilaksanakan oleh pesantren, maka hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan warga pesantren, begitu pula masyarakat sekitar pesantren tersebut. Selain itu, pembangunan agribinis pesantren akan menjadi sarana pendidikan bagi para santri untuk mengenal dunia agribisnis sehinga mereka dapat mengetahui dan memahami pentingnya agribisnis dan cara mengelola agribisnis secara lestari serta memanfaatkan hasil alam dengan baik.[41]

1. Pemberdayaan wisausaha Agribisnis

Pemberdayaan kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu pemberdayaan dan kewirausahaan. Terdapat banyak definisi pemberdayaan ekonomi ummat di banyak literatur yang dikemukakan oleh para ahli. Para ahli menggunakan kata "masyarakat" untuk menunjuk makna "ummat". Dari segi kebahasaan, pemberdayaan merupakan terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut *Oxford English Dictionary*,

40 Kiki Ahmad Zakiyudin. *Model Pengelolaan Hutan Pesantren*, Institut Pertanian Bogor. Bogor, 1, 2012.

41 Kiki Ahmad Zakiyudin. *Model Pengelolaan Hutan Pesantren,*.....2

kata empower memiliki dua arti, yaitu: (1) to give power atau *autority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Sedangkan dari segi terminologi, banyak ahli menawarkan definisi pemberdayaan. Variasi definisi mengenai pemberdayaan bisa dijumpai dibanyak literatur. Misalnya Zubaedi, mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang demikian dan berupaya untuk mengembangkan potensi ini menjadi tindakan daya.[42] Jadi berdasarkan pengertian di atas, pemberdayaan adalah upaya atau penyadaran tentang kelemahan atau potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan untuk memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri, singkatnya keluar dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, pemberdayaan adalah upaya atau penyadaran tentang kelemahan atau potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan untuk memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri, singkatnya keluar dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya. Menurut Wirakusuma istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan Enterpreneurship, yang dapat diartikan sebagai *the backbone of economy*, yaitu saraf pusat perekonomian atau sebagai *Tail bone of economy*, yaitu pengendali perekonomian suatu bangsa.[43] Sementara menurut Suryana kewiraushaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sedangkan menurut Drucker kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, sementara menurut

42 Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif,* (Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007), 41-42

43 Suryana*, Kewirausahaan,* (PT Salemba Emban Patria, Jakarta, 2003), 10

Zimmerer kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).[44]

Berdasarkan definisi kewirausahaan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, kewirausahaan merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengembangkaan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian.

Sementara menurut Hutomo, pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.[45]

2. Sistem Agribisnis di pondok pesantren

Pesantren merupakan lembaga sosial yang di dalamnya terdapat lingkup masyarakat kecil. Sejak berdiri pada abad ke 14 Masehi, perkembangan pesantren mengalami penambahan fungsi yang tidak hanya sebagai lembaga dakwah, pendidikan agama, semata. Pada tahun 1980-an pesantren memperoleh fungsi tambahan sebagai pusat permberdayaan masyarakat. Selanjutnya, fungsi pesantren pada tahun 2000-an bertambah menjadi pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Secara garis besar, peran strategis pondok pesantren dalam ekonomi syariah ada dua; *Pertama*, peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. *Kedua* adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi.[46]

44 Kasmir*, Kewirausahaan,*..... 20

45 Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,* (BPFE, Yogyakarta, 2000), 263-264

46 Ilham Bustomi dan Khotibul Umam, *Strategi Pemberdayaan*…, 83-84.

Perkembangan fungsi tersebut mengakibatkan muncul berbagai pesantren dengan ciri khasnya dalam membangun perekonomian pesantren. Misalnya, Pesantren Sidogiri Pasuruan berbasis ekonomi koperasi pesantren (Kopontren), Baitul Mal Wattamwil, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan sektor riil. Pesantren Al-Amin Sumenep usaha berbasis kelautan. Darussalam Gontor berbasis sektor riil, pertanian dan perkebunan. Pesantren Arrisalah Ciamis mengembangkan ekonomi berbasis perikanan. Agribisnis menjadi pilihan yang paling sering dijalankan oleh masyarakat pesantren. Sebab, kebanyakan pesantren di Indonesia mempunyai banyak lahan kosong yang berupa perkebunan maupun pertanian, mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara agraris. Agribisnis itu sendiri berasasal dari kata Agribusiness, dimana Agri sama dengan Agriculture artinya pertanian dan Business berarti usaha atau kegiatan yang berorientasi profit. Sederhananya agribisnis (*agribusiness*) adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian berorientasi profit. Istilah "agribusiness" untuk pertama kali dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1955, ketika John H. Davis menggunakan istilah tersebut dalam makalahnya yang disampakan pada "*Boston Conference on Disiribution*" Agribisnis merupakan suatu kegiatan yang utuh dan tidak dapat terpisah antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya, mulai dari proses produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Sehingga agribisnis sendiri didefinisikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan. Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.[47]

Secara konsepsional sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktifitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi (*input*) sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh

47 Soekartawi, *Analisis Usahatani*, (Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), 2

usaha tani serta agriindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu:

(1) Sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*), yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian, seperti industri perbenihan/pembibitan, tanaman, ternak, ikan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat, vaksin ternak./ikan), industri alat dan mesin pertanian (agro-automotive); (2) Sub-sistem pertanian primer (*on-farm agribusiness*), yaitu kegiatan budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian primer (usaha tani tanaman pangan, usahatani hortikultura, usahatani tanaman obat-obatan (biofarmaka), usaha perkebunan, usaha peternakan, usaha perikanan, dan usaha kehutanan); (3) Sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*), yaitu industri-industri yang mengolah komoditi pertanian primer menjadi olahan seperti industri makanan./minuman, industri pakan, industri barang-barang serat alam, industri farmasi, industri bio-energi dll; dan (4) Sub-sistem penyedia jasa agribisnis (*services for agribusiness*) seperti perkreditan, transportasi dan pergudangan, Litbang, Pendidikan SDM, dan kebijakan ekonomi.[48]

E. Pesantren Design and Build

Ada tiga lembaga pendidikan yang dikenal di Indonesia yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah. Sebelum diadakan pembaruan sistem pendidikan, baik oleh kolonial Belanda maupun kaum modernis, dikenal ada beberapa lembaga pendidikan tradisional Islam di Nusantara. Di Jawa mengenal sistem pendidikan pesantren, Minangkabau ada Surau, dan Meunasah di Aceh. Di antara beberapa lembaga pendidikan tradisional itu, hanya pesantrenlah yang paling mampu bertahan sampai sekarang.

48 Bungaran Saragih, *Pembangunan Sistem Agribisnis di Indonesia dan Peranan Public Relation*, Seminar *Peranan Public Relation dalam Pembangunan Pertanian*, Bogor 19 April 2001, Program Pascasarjana PS. KMP-IPB, IPB Bogor.

Steenbrink[49] menyatakan, ketika diperkenalkan lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern, lembaga pendidikan tradisional, surau misalnya, ternyata tidak begitu laku dan banyak ditinggalkan siswanya. Bahkan menurut Azra[50] Surau sekarang hampir punah, dan ketika didirikan lembaga pendidikan Islam di sana, kebanyakan tidak lagi menggunakan nama Surau tetapi menamakannya pesantren. Bertahannya institusi pesantren tradisional ketika berhadapan dengan lembaga pendidikan modern telah menarik beberapa pengamat untuk mengkaji. Azyumardi Azra.[51] menilai ketahanan pendidikan pesantren salaf disebabkan oleh kultur Jawa yang involutif dan menekankan harmoni, sehingga mampu menyerap kebudayaan luar tanpa kehilangan identitasnya. Hasan Langgulung[52] menduga bahwa ketahanan pesantren disebabkan oleh figur kiai yang menonjol dengan ilmu dan visinya. Abdurrahman Wahid[53] menyebut ketahanan pesantren disebabkan pola kehidupannya yang unik sebagai sub kultur. Ali Anwar menilai ketahanan pesantren dikarenakan lembaga ini telah berhasil mengantarkan santrinya untuk menguasai kitab kuning sebagai ilmunya ulama salaf yang dipercayai kebenarannya. Martin Van Bruinessen[54] menyebut budaya pesantren sebagai "*great tradition*" dalam pengajaran agama, yaitu mentransmisikan Islam tradisional dalam kitab kuning. Selain itu, nilai utama kekuatan pesantren adalah kepatuhan santri terhadap kiai. Nilai-nilai inilah yang menjadi salah satu

49 Karel Steenbrink,. P*esantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern,* terjemahan dari Recente Ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderricht, (Jakarta: LP3ES, 1986), 63

50 Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 2003) 149

51 Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos. 2002),147

52 Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21,* (Jakarta: Pustaka al-Husna. 1988)

53 Abdurrahman Wahid, *Pesantren sebagai Subkultur*, dalam M. Dawam Rahardjo (Ed), *Pesantren dan Pembaruan*, (Jakarta: LP3ES,1995), 43

54 Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1994), 17

faktor ketahanan pesantren hingga kini. Kedepan pondok pesantren menjadi sangat beragam dengan banyaknya potensi santri yang harus dikembangkan seperti pondok arsitektur dan pembangunan yang bisa menjadi penguat keterampilan atau skill santri di pondok pesantren.

F. Pesantren Entrepreneur

Pesantrenpreneur merupakan Lembaga pendidikan yang sudah berkembang dengan adanya perpaduan antara pendidikan agama dan entrepreneurship. Di Indonesia khususnya, telah banyak ponpes yang membekali santrinya dengan pendidikan kewirausahaan, di antaranya pesantren El-Bayan yang berada di Cilacap, pesantren Al-Qurthuby di wilayah Bondowoso, Jawa Timur dan pesantren al-Nadhlah yang berada di Depok Jawa Barat, Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur.[55]

Hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk dikembangkan model pendidikan pesantrenpreneur termasuk pondok Pesantren Ummul Ayman Aceh bagi para santrinya. Perpaduan tersebut merupakan langkah awal mencetak generasi berjiwa wirausaha dengan mengedepankan moral dan etika berbisnis sehingga sikap tersebut terintegrasi dalam kegiatan bisnisnya dengan berpedoman pada nilai-nilai yang tertuang dalam ekonomi Islam.[56]

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ponpes yang menggabungkan pendidikan agama dengan entrepeneur memberi pengaruh yang signifikan terhadap aktifitas kewirausahaan. Dikuatkan dengan penelitian Galbraith & Galbraith, Noble, Galbrath, & Sigh[57] serta Carswell& Rolland[58] menyatakan bahwa tolok ukur aktifitas

55 Hermansyah Karir. (2020, September). Mendidik Santri Bermental Wirausaha. Medan Bisnis Daily. Retrieved from http://www.medanbisnisdaily. com/news/read/2018/09/12/358997/mendidik_santri_bermental_ wirausaha/

56 Husnurrosyidah. (2019). E-Marketplace UMKM Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Islam. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 224–239.

57 Galbraith, C. S., & Galbraith, D. M. (2007). An empirical note on entrepreneurial activity, intrinsic religiosity and economic growth. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1(2), 188–201.

58 Carswell, Peter, & Rolland, D. (2007). Religion and entrepreneurship in New Zealand.

bisnis tergambar dari agama yang dianut oleh pelaku bisnis tersebut. Pernyataan yang sama juga di kemukakan Arief,[59] Audretsch, Boente, & Tamvada,[60] Iannaccone,[61]; Valliere,[62] Inisiatif adanya pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren disinyalir oleh potensi pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun yang terus menunjukkan peningkatan baik dari sisi unit maupun tenaga kerja. Hal ini dibuktikan sebagaimana data yang dilansir oleh Kementerian Koperasi, untuk pertumbuhan unit UMKM sebesar 2,02%, atau sebanyak 1.271.440 unit. Sedangkan untuk peningkatan tenaga kerja penambahan sebesar 0,47% atau sebesar 547,407 orang dalam Kemekop dan UMKM.

Data tersebut menyatakan walaupun pertumbuhan UMKM tidak signifikan tetapi menunjukkan trend positif. Melihat peluang kewirausahaan yang besar di Indonesia, pendidikan kewirausahaan mulai digalakkan sejak siswa duduk di bangku sekolah dasar, menengah maupun lanjutan. Pendidikan kewirausahaan yang dilakukan sejak dini secara tidak langsung dapat membentuk persepsi positif terhadap perkembangan pola pikir[63] yang berimplikasi pada kesuksesan dan pengembangan usaha.[64] Kesuksesan bisnis juga dipengaruhi oleh kemampuan serta strategi dalam mengelola perusahaan.[65]

Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1(2), 164–174.

59 Arief, M. (2013). A Theoretical Review of Entrepreneurship: The Effect of Religiosity to the Performance. In International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM) (pp. 337–345). Sanur, Bali.

60 Audretsch, D. B., Boente, W., & Tamvada, J. P. (2007). Religion and entrepreneurship. Jena Economic Research Papers. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/jrp/jrpwrp/2007-075.html

61 Iannaccone, L. R. (1998). Introduction to the Economics of Religion. Journal of Economic Literature, 36(3), 1465–1495

62 Valliere, D. (2008). Exploring Buddhist influence on the entrepreneurial decision. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14(3), 172– 191.

63 Azis, *Pendidikan Islam dan Entrepreneurship.* (AL Murabbi, 3, 2016), 6–35.

64 Wibowo, M. *Pembelajaran Kewirausahaan Dan Minat Wirausaha Lulusan SMK.* Jurnal Ekplanasi. Volume 6. Nomor 2. Edisi September 2011

65 John Lay Thompson. *A strategic perspective of entrepreneurship.* International Journal of

Jumlah lembaga pendidikan pesantren setiap tahunnya terus bertambah. Bahkan dalam satu dekade terakhir, jumlah pesantren mengalami kenaikan yang sangat signifikan di berbagai lokasi, baik yang berada di lokasi pedesaan, pinggiran kota maupun perkotaan. Berdasarkan data yang disajikan di Kementerian Agama menyebutkan bahwa berkisar 4.195 pesantren di tahun 1977 dengan jumlah santri berkisar 677.394 orang. Namun berselang puluhan tahun kemudian yaitu tahun 2001 menunjukkan jumlah pesantren pada tahun tersebut mencapai 11.312 buah dengan jumlah santrinya sebanyak 2.737.805 orang. Kemudian pada tahun 2016, jumlah pesantren mencapai 28.961 dengan jumlah santri sebesar 4.028.660 orang.[66]

Pondok Pesantren Enterpreneur, erat kaitannya dengan prinsip keberlanjutan atau sustainable development. Keberlanjutan dari segi kehidupan sosial masyarakat, keberlanjutan ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan alam, merupakan tiga aspek yang perlu dipertahankan sebagai prinsip dasar sustainable development atau disebut sebagai tiga dimensi sustainable development. Tujuan utama Pondok Pesantren Enterpreneur pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menghasilkan masyarakat berpendidikan dan bermoral, dalam hal ini menunjang keberlanjutan dalam aspek sosial. Di samping itu, kegiatan pendidikan kewirausahaan dalam pondok pesantren ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, yang dalam hal ini menunjang aspek ekonomi. Sedangkan dari segi lingkungan ditunjang dengan desain perancangan Pondok Pesantren Enterprenenur yang ramah lingkungan dan meminimalisir eksploitasi alam, di samping keberadaannya yang mengharuskan untuk tetap melestarikan lingkungan dalam segala aspek. Maka perancangan pondok pesantren berbasis wirausaha atau pondok pesantren enterpreneur menjadi menarik untuk dibahas, sebagai solusi atas isu sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini.

Entrepreneurial Behavior & Research, 5(6), 1999, 279–285.

66 Suwendi. (2019, March). Penguatan Peran Pesantren. Nadhiatul Ulama. Retrieved from https://www.nu.or.id/post/read/76057/penguatan-peranpesantren

1. Kewirausahaan sebagai pilihan pondok Pesantren

Wirausaha adalah terjemahan dari kata entrepreneur. Wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan bisnis baru dan orang yang langsung berhadapan dengan risiko serta mampu mengidentifikasikan dalam mencapai keberhasilan. Wirausaha mampu mengidentifikasikan berbagai kesepakatan dan mencurahkan seluruh sumber daya yang ia miliki untuk mengubah kesempatan itu menjadi suatu yang menguntungkan. Wirausahawan adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola dan mengukur risiko suatu usaha.

Menurut Meredith dalam Suryana dan Bayu "wirausaha adalah orang orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan usaha mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan".[67] MC Clelland dalam Alma mengemukakan bahwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) ditentukan oleh motif berprestasi (*achievement*), optimisme (optimism), sikap-sikap nilai (*value attitudes*) dan status kewirausahaan (*enterpreneural status*) atau keberhasilan.

Minat (*interest*) adalah rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Pada dasarnya minat merupakan penerimaan akan suatu hubugan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Apabila seseorang telah melaksanakan kesungguhannya kepada suatu obyek maka minat akan menuntun seseorang untuk memperhatikan lebih rinci dan mempunyai keinginan untuk ikut atau memiliki obyek tersebut.

Selain itu minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang mendorong untuk memperoleh sesuatu atau untuk mencapai suatu tujuan sehingga minat mengandung unsur keinginan untuk mengetahui dan mempelajari dari sesuatu yang diinginkan sebagai kebutuhannya. Minat merupakan suatu keinginan yang cenderung menetap pada diri seseorang untuk mengarahkan pada suatu pilihan

67 Suryana. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. (3rd ed.). (Jakarta: Salemba Empa, 2006).

tertentu sebagai kebutuhannya, kemudian dilanjutkan untuk diwujudkan dalam tindakan nyata dengan adanya perhatian pada obyek yang diinginkannya itu untuk mencari informasi sebagai wawasan bagi dirinya. Sedangkan minat berwirausaha menurut Fuadi adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk berusaha secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa merasa takut dengan resiko yang akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan. Dalam penelitian Mahesa tentang minat dan wirausaha, disebutkan bahwa minat berwirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subyek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Menurut Fatrika,[68] minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir tetapi berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.[69]

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha meliputi karakteristik (jenis kelamin dan usia), lingkungan (lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat), kepribadian (ektraversi, kesepahaman/agreebleeness, berani mengambil resiko, kebutuhan berprestasi dan independen, evaluasi diri serta *overcon dence*/ kepercayaan diri yang lebih) dan motif berwirausaha (bekerja dan penyaluran ide kreatif). Berdasarkan penjelasan tersebut maka seseorang akan mempunyai suatu dorongan yang kuat untuk berwirausaha apabila seseorang mempunyai minat berwirausaha yang lebih besar. Dengan demikian, minat akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal yang didalamnya terkandung motivasi penyebab melakukan suatu hal atau aktivitas sesuai dengan tujuan. Maka dengan adanya dorongan yang kuat, sesuatu cita-cita atau keinginan untuk berwirausaha bisa terwujud sehingga apabila keinginan tersebut sudah

68 Fatrika. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wirausaha Mahasiswa Dengan Teknik SEM*. Jurnal Matematika UNAND Vol. 1 No. 2 Hal. 5-12. ISSN 2303.2910

69 Fatrika, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wirausaha Mahasiswa Dengan Teknik SEM*. Jurnal Matematika UNAND Vol. 1 No. 2, 5-12. ISSN 2303.2910

terpenuhi akan timbul suatu kepuasan dimana kepuasan itu sendiri sifatnya menyenangkan.[70]

2. Penguatan Jiwa Wirausaha Santri

Seorang entrepreneur atau wirausahawan dalam menjalankan sesuatu selalu dengan pertimbangan yang matang dan tidak asal-asalan, itulah yang membedakan entrepreneur sejati dengan entrepreneur asal jadi. Sehingga dapat diketahui ciri-ciri seorang entrepreneur sejati ialah ia memiliki jiwa wirausaha. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Percaya Diri Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Dalam praktik, sikap dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimis, individualitas, dan ketidaktergantungan. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan.[71]
2. Berorientasi pada tugas dan hasil Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil, adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai. Untuk memulai diperlukan niat dan tekad yang kuat, serta karsa yang besar. Sekali sukses atau berprestasi, maka sukses berikutnya akan menyusul, sehingga usahanya semakin maju dan semakin berkembang
3. Keberanian mengambil resiko Kemauan dan kemampuan untuk

70 Rahmadi, A. N., & Heryanto, B. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri.* Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 1(2).

71 Adrianto, *Modul Mental Wirausaha Santri Mukim APW Angkatan 12, Disampaikan pada kegiatan santri* APW angkatan 12 di Aula Daarul Hidayah, Bandung, Jawa Barat.

mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai atau berinisiatif.10 Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan. Dengan demikian, keberanian untuk menanggung resiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan resiko yang penuh dengan perhitungan dan realistik. Kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara realistik. Artinya, wirausaha menyukai tantangan yang sukar namun dapat dicapai. Wirausaha menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko yang tinggi karena ingin berhasil.

4. Kepemimpinan Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda lebih dulu dan lebih menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan keinovasian, ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya dengan lebih cepat, lebih dulu dan segera berada di pasar.
5. Berorientasi ke masa depan Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena ia memiliki pandangan yang jauh ke masa depan, maka selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada sekarang. Meskipun dengan resiko yang mungkin terjadi, ia tetap tabah untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaharuan masa depan. Pandangan yang jauh ke depan, membuat wirausaha tidak cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada sekarang. Oleh sebab itu, ia selalu mempersiapkannya dengan mencari suatu peluang.
6. Kreatif inovatif Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru (*thinking new things*) dan keinovasian adalah melakukan sesuatu yang baru (*doing new things*). Kreatifitas diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru

dalam memecahkan persoalan dan mencari peluang.53 Keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kreatifitas dalam rangka memecahkan persoalan- persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu kewirausahaan adalah *"thinking and doing new things or old thinks in new ways"* Kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak dengan sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru.

G. Pesantren Innovative

Lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia adalah pesantren. Fakta menegaskan bahwa pesantren telah berkontribusi nyata dalam mencetak generasi intelektual yang siap mengaktualisasikan ilmunya di dalam pemberdayaan sumberdaya manusia yang berkarakter. Nurcholish Madjid telah memprediksikan pesantren sebagai sesuatu yang dapat dijadikan alternatif terhadap sistem yang ada.[72] Dalam mewarnai sejarah panjang perjalanan bangsa ini, sebagai lembaga pendidikan tertua, pesantren berkontrbusi tidak hanya dalam aspek pendidikan saja melainkan juga bidang lain dalam skala yang luas.[73]

Hal yang unik dari pondok pesantren adalah memiliki kedaulatan leadership sepenuhnya di bawah kharisma kiai yang sifatnya independent dalam segala hal,[74] dan hingga saat ini masih bertahan. Dalam perkembangan sekarang, lembaga pendidikan Islam tertua ini,[75] dalam perkembangan era sekarang memiliki tanggung jawab

72 Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholis Madjid terhadap pendidikan islam tradisional*, (Jakarta: Quantim Teaching, 2005), 59.

73 Moh. Ahyadi, "*Pesantren, Kiai, dan Tarekat: Studi tentang Peran Kiai di Pesantren dan Tarekat",* dalam Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2001), 133

74 Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 90-91.

75 Muhaimin mengelompokkan pendidikan Islam ditinjau dari aspek program dan praktik penyelenggaraannya menjadi lima jenis, yaitu (1) pendidikan pondok pesantren dan madrasah diniyah; (2) pendidikan madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama; (3) pendidikan umum yang bernafaskan Islam seperti SD Islam, SMP Islam dsb.; (4) pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di sekolah sebagai mata pelajaran;

lebih berat dalam hal mengangkat arus perubahan sosial sebagai dampak dari era gobalisasi. Problema dekadensi moral, kemiskinan, melesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan langkah konkrit pesantren sebagai untuk merespon situasi dan kondisi tersebut dengan membuka diri dalam merespon perubahan dengan melakukan inovasi kelembagaan. Inovasi yang dilakukan tentunya tanpa mengurangi nilai-nilai keikhlasan, kharismatik, dan kewibawaaan. Di sinilah pondok pesantren harus bersikap adaptif dan adoptif terhadap sistem baru seperti madrasah atau sekolah, menyempurnakan kurikulum yang digunakan sesuai tuntutan zaman, serta menyesuaikan pola kepemimpinan pesantren dari patternalistik menuju demokratis.

Strategi inilah yang harus ditempuh pondok pesantren jika mau bertahan. Selain itu ada hal-hal lain yang harus dipertahankan oleh pondok pesantren, seperti: dalam hal penanaman nilai, pesantren mempertahankan akulturasi budaya jawa sebagaimana pernyataan Azra yang menyatakan bahwa pesantren mempertahan kultur Jawa yang mampu menyerap kebudayaan luar melalui suatu proses internalisasi tanpa kehilangan identitasnya merupakan cara pesantren mempertahankan eksistensi diri.[76]

Demikian pula dengan jiwa kewirausahaan juga merupakan strategi pesantren dalam mempertahankan diri sebagaimana pendapat Aya Sofia yang menyatakan bahwa selama ini ketahanan pondok pesantren itu disebabkan oleh jiwa dan semangat entrepreneur yang tinggi.[77] Sementara disisi lain Langgulung berpendapat bahwa kedayatahanan pesantren itu pada hakekatnya sebagai akibat dari pribadi leader dalam hal ini kiai yang kompeten dengan ilmu dan visinya.[78] Ketahanan yang

---

dan (5) pendidikan Islam dalam keluarga atau majlis-majlis ta'lim. Lihat Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 9-10

76 Azyumardi Azra, *Surau di Tengah Krisis: Pesantren dan Perspektif Masyarakat*, dalam Rahardjo ed. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 173

77 Aya Sofia, *Pedoman Penyelenggaraan Pusat Informasi Pesantren* (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren di Jakarta 1985/1986), 41

78 Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke*-21, (Jakarta: Pustaka Al- Husna, 1988), 75

disebabkan oleh dominannya faktor internal ini, mampu memberikan konstribusi terhadap ketahanan pesantren.

Ditambah polarisasi perubahan pesantren yang menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, dengan melakukan berbagai inovasi dalam manajemen, yaitu inovasi lembaga dengan didirikannya madrasah atau sekolah umum di pesantren. Berdirinya madrasah atau sekolah umum di pesantren merupakan implementasi integrasi keilmuan yang melahirkan generasi handal berbekal ilmu pengetahuan, iman dan takwa serta mampu menjadi pemimpin yang amanah. Hal ini sebagaimana pernyataan Mukti Ali yang menyatakan bahwa: Tidak sedikit pemimpin-pemimpin negeri ini, baik pemimpin yang duduk dalam pemerintahan atau bukan, besar ataupun kecil, yang dilahirkan oleh pondok pesantren.[79] Manakala pesantren tidak segera berbenah dan melakukan inovasi baik dalam keilmuan maupun manajemen maka tidak diragukan lagi pesantren akan tergerus oleh arus zaman.

1. Konsep inovasi kelembagaan pondok pesantren

Istilah inovasi identik dengan *change*. *Change* itu sendiri terpilah menjadi dua: perubahan alamiah dan perubahan non alamiah (disengaja). Perubahan yang pertama bersifat natural, sedangkan perubahan kedua salah satunya melalui pendidikan. Hakekat perubahan dapat dimaknai sebagai *the before condition*, yaitu beralihnya keadaan sebelumnya menjadi *the after condition* keadaan sesudahnya.[80] Dalam literatur lain, perubahan diterangkan dengan kata transitions, walaupun menurut William mengandung arti berbeda. Perbedaannya adalah transisi lebih mengarah pada perubahan secara fundamental dan mendasar, sedangkan perubahan atau change lebih mengarah pada perubahan secara umum.[81]

Perubahan, hakekatnya adalah proses transformasi dari situasi

79 Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi*.. 75

80 Winardi, Manajemen Perubahan, (Jakarta: Kencana, 2005), 1

81 William Bridges, *Managing Transitions: Making the Most of Change*, (Cambridge: Perseus Publishing Services, 2003), 3

sekarang menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan dating.[82] dalam konteks kajian ini, perubahan ang dimaksud adalah perubahan yang diharapkan membawa kemajuan dan kemaslahatan hidup. James L. Price mencoba membuat distingsi "*Innovation is a less general term than social change, that is, any modification of the social structure and / or culture of a social system. All innovation is social change, but not all social change is innovation*".[83] (Pembaruan adalah istilah yang kurang lazim dalam perubahan sosial, yakni suatu modifikasi dari sebuah struktur sosial dan atau budaya dari sistem sosial. Seluruh pembaruan adalah perubahan social, tetapi tidak semua perubahan sosial adalah suatu pembaruan).

Sementara itu Nursyam berpendapat perubahan merupakan suatu inovasi. Inovasi bisa datang dari intern maupun ekstern, adanya skenario akseleratif untuk berubah/melakukan perubahan, dan adanya motivasi kuat untuk berubah.[84] Inovasi mencakup perubahan dari arah negatif menuju positif, dari inefectif change menuju efectif change, dan dari partial change menuju global change. Jadi istilah inovasi selalu mengarah kepada pembaharuan,[85]

sedangkan pembaharuan belum tentu didalamnya ada inovasi. Dalam kajian ini inovasi dipilih karena penulis lebih fokus pada transformasi nilai yang diaktualisasikan pengasuh dalam habitus sebagai pijakan pembaharuan pondok pesantren. Ada beberapa teori inovasi yang berhasil penulis lacak, dimana ada penggunaan term yang berbeda dari masing-masing tokoh. Ada yang menggunakan istilah inovasi dengan term movement, changing yang berarti perubahan, namun ada pula yang berpendapat bahwa changing dengan inovasi itu berbeda. Istilah changing digunakan oleh Kreitner dan Kinicki serta Greenberg dan Baron, sedangkan movement digunakan

82 Wibowo, *Manajemen Perubahan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), .1

83 James L. Price, *Handbook of Organizational Measurement*, (London: DC. Health and Company, 1972), 118

84 Nursyam, *Indikator dan Pengukuran Pengembangan SDM di Pesantren*, dalam A. Halim et. al., Manajemen Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 62

85 Inovasi mengacu kepada pembaharuan suatu produk, proses dan jasa baru. Lihat Lena Ellitan dan Lina Anatan, *Manajemen Inovasi: Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 3

oleh Robbins[86], sedangkan Schein menggunakan terminologi unfreezing, cognitive restructuring, dan refreezing.[87] Ketiga hal tersebut merupakan proses cognitive restructuring dalam suatu inovasi kelembagaan.

Terminologi yang digunakan Schein senada dengan Lewin yang mengembangkan tiga tahap model perubahan, mulai dari proses inisiatif, pengelolaan, dan proses stabilisasi perubahan itu sendiri. Dalam kajian ini penulis cenderung ke teori Lewin yang memerinci proses inovasi menjadi tiga tahapan sebagai berikut: 1) *Unfreezing*, adalah tahapan yang menekankan pada proses membangun motivasi untuk berubah. Unfreezing merupakan kondisi pencairan dari status quo. 2) *Cognitive Structuring (Changing),* adalah proses movement atau *cognitive restructuring,* dimana semua pelaku lembaga atau organisasi diberi informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Proses changing ini membangun kesadaran pelaku organisasi dan dilakukan secara kontinyu. 3) *Refreezing* (pembekuan kembali), adalah proses distabilisasi melalui pembekuan guna membantu pelaku organisasi mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah kedalam keadaan yang normal dan menjadi norma-norma baru yang diakui kebenarannya. Proses ini merupakan siklus tiada henti namun dilakukan secara terus-menerus. Penjelasan mengenai tahapan tersebut diatas dapat dikemukakan dengan gambar sebagai berikut:

Gambar: 3.1
Model Perubahan Kurt Lewin

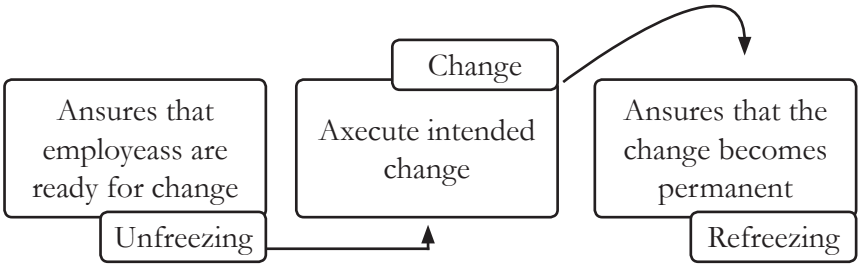

86 Robbins, *Teori Organisasi Behaviour,* (New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1991), 421.

87 Edgar H. Schein, *Organizational Culture and Leadership*, (San Fransisco: Jossey-Bass, 1997), 298

2. Strategi Inovasi Pondok peantren

Strategi dalam inovasi tidak dapat dipisahkan dengan pelaku inovasi itu sendiri. Kaitannya dengan pendidikan yang ada di pesantren, maka yang menentukan arah inovasi yakni pimpinan, pendidik, dan pengurus pesantren. Secara teoritis konseptual, para pemikir pendidikan Islam hendaknya selalu melakukan kajian mendalam dan telaah kritis terhadap konsep pendidikan Islam.

Strategi Inovasi pendidikan Islam secara teoritis-konseptual diantaranya ialah 1) Para pemikir pendidikan Islam hendaknya selalu melakukan kajian mendalam dan telaah kritis terhadap konsep pendidikan Islam 2) Para pemikir pendidikan Islam hendaknya mampu dan berani mengajukan gagasan, konsep, dan teori alternatif sebagai pengembangan pendidikan Islam 3) Para pemikir pendidikan Islam hendaknya menggunakan pendekatan epistemologis dan metodologis dalam membangun kerangka konseptual pendidikan Islam yang sedang digagas 4) Para pemikir pendidikan Islam hendaknya memiliki target yang harus direalisasikan dalam membangun konsep dan teori pendidikan Islam.[88]

Strategi Inovasi Pendidikan Islam secara aplikatif-institusional diantaranya adalah 1) Semua pihak harus membangkitkan kesadaran untuk mewujudkan mutu pendidikan Islam, 2) Pemerintah harus senantiasa berusaha meningkatkan perhatian, pendanaan, dan fasilitas pada lembaga pendidikan Islam terutama yang berstatus swasta 3) Para manajer (pimpinan) lembaga pendidikan Islam seharusnya berusaha memperbaiki manajemen pendidikannya. 4) Para guru seharusnya senantiasa melakukan pembaruan terhadap strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran maupun metode pembelajaran. Sehingga mampu membangun kesadaran siswa untuk belajar secara maksimal, tulus, bergairah dalam mengembangkannya. 5) Para siswa seharusnya berorientasi pada pemberdayaan diri dengan berpegang pada pepatah Arab "*man jadda wa jada*" (barang siapa yang bersungguh-sungguh,

88 Qamar, *Menggagas Pendidikan Islam*, 188

maka dia akan meraih hasilnya). Hasilnya yakni unggul keimanannya, intelektualnya, keterampilannya, anggun akhlaknya, dan bagus amalnya. 6) Para pakar pendidikan Islam, para pimpinan, para guru pendidikan Islam, dan pihak terkait seharusnya berkumpul untuk membedah kurikulum pendidikan Islam kemudian merumuskan kembali kurikulum yang benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.[89]

Inovasi pesantren dapat dilakukan sebagaimana dalam inovasi pendidikan. Komponen inovasi dalam bidang pendidikan yakni: kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan keuangan, strategi pembelajaran, pengelolaan siswa, tenaga guru, hubungan masyarakat.[90] Inovasi yang dapat dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan pesantren, meliputi:

1. Kurikulum Kebutuhan santri dan masyarakat dapat dipenuhi melalui pembaharuan kurikulum. Perubahan tersebut terletak pada tiga aspek yaitu: perencanaan, pelaksaan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum pesantren harus didahului dengan kegiatan kajian kebutuhan secara akurat agar pendidikan pesantren fungsional. Kajian yang ada perlu dikaitkan dengan tuntutan era global, utamanya pendidikan yang berbasis kecakapan hidup (*life skill*) yang akrab di lingkungan kehidupan santri. Pelaksanaan kurikulum menggunakan pendekatann kecerdasan majemuk. Sedangkan evaluasinya menerapkan penilaian menyeluruh terhadap semua kompetensi santri. Aspek manajemen kurikulum pesantren meliputi; perencanaan, pelaksaaan, dan evaluasi. Pesantren sejak awal harus menentukan rancangannya. Rancangan yang dimaksud meliputi; kurikulum agama saja atau kurikulum agama yang diadopsi dengan kurikulum umum, sehingga santri dapat mengembangkan keilmuan yang lebih luas. Perencanaaan kurikulum biasanya memperhatikan visi, misi dan tujuan pesantren. Penyusun kurikulum adalah kiai beserta pengurus

89 Qamar, *Menggagas Pendidikan Islam*, 189-190

90 Asep Saifuddin Chalim, *Urgensi Kepemimpinan Inovatif (Menyiapkan Sekolah Bernuansa Islam Tetap Eksis di Era Globalisasi)* (Surabaya: Ponpes Jagad 'Alimussirry, 2012), 45.

pesantren. Tim penyusun kurikulum terdiri dari pengasuh, sesepuh, guru senior, serta pengurus pesantren. Kurikulum akan dirubah atau dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan zaman.[91]

2. Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan. Sarana berarti segala sesuatu yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan. Sarana dalam konteks pendidikan adalah peralatan, bahan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar. Adapun contoh sarana pendidikan seperti; gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan seperti asrama, halaman, kebun, taman pesantren, jalan menuju pesantren. Prasarana tersebut apabila dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti halaman pesantren sebagai lapangan olah raga, maka disebut sarana pendidikan. Sehingga, manajemen sarana dan prasarana pesantren adalah pengaturan semua komponen yang secara langsung dan secara tidak langsung yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan pesantren. Sarana dan prasarana sering pula disebut dengan fasilitas. Sarana dan prasaran merupakan hal yang urgent dalam pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut mempengaruhi dan menentukan inovasi yang akan diterapkan.[92]
3. Membangun Jaringan Kerjasama Kerjasama sering disebut dengan partnership (kemitraan). Adapun yang dimaksud dengan kemitraan adalah hubungan strategis yang secara sengaja dirancang

91 Syamsul Ma'arif, dkk, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

92 Rusdiana, *Konsep Inovasi*, 55

atau dibangun antara perusahaan- perusahaan untuk mencapai tujuan dengan kebergantungan yang tinggi. Ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan adalah: 1) Timbul karena adanya keinginan mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak yang bersangkutan) 2) Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya 3) Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya.[93] Kaitannya dengan ciri kerjasama di atas, jaringan kerjasama dapat dilakukan antara pesantren dengan pesantren maupun dengan lembaga lain yang terkait. Misalnya jaringan kerjasama untuk mengembangkan life skill di lingkungan pesantren dengan sekolah menengah kejuruan atau politeknik, pengembangan koperasi pesantren bekerjasama dengan dunia industri dan sebagainya.[94]

***

93 Imelda Merry Melyanti, *Pola Kemitraan Pemerintah dan Swastadalam Program Bank Sapah di Pasar Baru Kota Proolinggo*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Punlik ISSN 2303 – 341X.

94 Masyhud, Manajemen Pondok Pesantren, 72; M. Sulthon dan M. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspekti Global* (Yogyakarta: LaksBangPRESSindo, 2006), 142-143.

BAB IV

PESANTREN SEBAGAI MINIATUR EKONOMI SYARIAH

A. Masyarakat ekonomi Syariah dan keterlibatan pesantren Historisitas Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah

Salah satu komunitas atau perkumpulan yang memiliki konsentrasi terhadap terwujudnya praktik ekonomi Syariah adalah Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). MES merupakan perkumpulan yang sudah menjadi organisasi resmi. Ia merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan melakukan percepatan dalam penerapan sistem ekonomi syaraha dan terciptanya lembaga keuangan syariah yang terpercaya, baik di Indonesia maupun di dunia. MES diharapkan dapat menjadi wadah yang terbuka dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dengan cara melakukan sinergi antar stakeholder.[1]

1 Masyarakat Ekonomi Syariah, https://www.ekonomisyariah.org/ terakhir di akses 12 September 2021

Secara praktik, MES merupakan komunitas masyarakat yang senantiasa mendasarkan praktik transaksinya (Mu'amalah) pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Secara konseptual, Ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. kendatipun demikian, secara formal organisasi, MES didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan pada tanggal 26 Maret 2001 M. Di deklarasikan pada hari Selasa, tanggal 2 Muharram 1422 H di Jakarta.

Sebagai organisasi nirlaba, MES bersifat independen, dan tidak berafiliasi terhadap partai politik atau Ormas tertentu. Hubungan MES dengan Ormas dan partai politik dilakukan dalam bingkai kerjasama untuk mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat ekonomi Syariah itu sendiri. Dalam konteks ini maka MES harus melakukan sinergi dan kolaborasi yang intens dengan berbagai stake holder. Kolaborasi ini juga merupakan misi dari MES yang tertuang dalam anggaran dasar Masyarakat Ekonomi Syariah.[2] Selain sebagai amanat regulasi, secara sosial, penerapan sistem dan pola ekonomi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat yang harus dibangun dan didorong dengan penuh kesungguhan.

Dalam pola hubungannya dengan syariah Islam, MES merupakan representasi struktural, sistematis dan berkelanjutan dari prinsip dan tujuan ekonomi Syariah. Mengingat, MES berupaya menghadirkan paradigma baru, tatanan baru dan praktik muamalah masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi Islam secara utuh. Komitmen ini kemudian didukung dan diikuti dengan pembentukan pengurus MES di beberapa daerah di Indonesia. Dengan harapan, gerakan ini dapat dilakukan secara massif dan menjadi gerakan nasional, baik institusi, individu dan kelompok. Hingga saat ini MES telah tersebar di 23 Provinsi, 35 Kabupaten/

2 Anggaran Dasar Masyarakat Ekonomi Syariah

Kota dan 4 wilayah kh usus di luar negeri yaitu Arab Saudi, United Kingdom, Malaysia dan Jerman. Kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah tentunya.

1. Peran Strategis MES

Secara prinsip, sistem ekonomi syariah merupakan sebuah tatanan yang memegang teguh nilai-nilai moderasi ekonomi dan sustainable. Tujuan terbaiknya ialah menggiring sistem ekonomi nasional menuju titik tumbuhnya ekonomi secara terus menerus. Selain itu, hal ini juga akan menambah kokoh bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi dunia. Dengan pola yang inklusif, MES menyuguhkan praktik-praktik yang ekonomi yang senantiasa membuka akses pada kerjasama berbagai pihak. Dalam rangka meraih capaian tersebut maka bidikan utama penerapakan praktik ekonomi syarah ialah pada sektor riil, khususnya aspek potensial yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Aspek yang paling mudah untuk dilakukan akselerasi adapah sektor product dan service. Khususnya produk yang telah memiliki kekhasan dan keunggulan dan keunikan.

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah ini sejatinya merupakan sebuah keniscayaan. Global Islamic Economy Report 2018-2019, menjelaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah populasi Muslim yang mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa. Namun demikian, Indonesia hanya mampu masuk 10 besar sebagai konsumen dari beragam sektor industri hala dunia. Di antaranya adalah:[3]

1. Nominasi Ke I pada top *muslim food expenditure*.
2. Nominasi ke 5 pada kategori *top muslim travel expenditure*.

3 BAPPENAS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2018-2024*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,2018), 06

3. Nominasi Ke 3 pada *top muslim apparel expenditure*
4. Nominasi Ke 5 pada *top muslim media expenditure.*
5. Nominasi ke 6 pada *top muslim pharmaceuticals expenditure.*

Namun demikian, pada kelima industri tersebut, Indonesia hanya mampu menempati posisi 10 besar pada kategori pariwisata halal dan fesyen Muslim. Dengan ini maka potensi dari beragam sektor industri halal yang lain masih belum dapat digarap dengan baik. Bahkan enehnya, Indonesia tidak pernah masuk peringkat 10 besar dalam sektor makanan halal, media dan rekreasi yang ramah. Lebih tragis lagi, pada sektor ini di tahun 2018, Indonesia mengalami penurunan. Pada sektor lain, yaitu keuangan Islam, Indonesia masuk peringkat 10 kendatipun prestasi ini cukup stagnan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.[4]

Data di atas menggambarkan bahwa kapasitas produksi nasional sektor industri halal ini tidak berbanding lurus dengan tingginya konsumsi masyarakat terhadap sektor tersebut. Selain itu, stimulus keuangan syariah masih cenderung bersifat local project, belum dilakukan secara massif, terukur dan berkelanjutan. Dengan ini, maka disparitas ini dapat menjadi ruang kosong bagi MES untuk melakukan optimasi secara massif. Karena hal ini selaras dengan visi MES dalam keikutsertaannya untuk berkonstribusi secara signifikan terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah secara nasional.

Dalam garis-garis besar kebijakan organisasi (GBKO) masyarakat ekonomi syariah dijelaskan bahwa MES memiliki target capaian fundamental, yaitu: [1] Peningkatan kesejahteraan, dengan indikator peningkatan index pembangunan sumber daya manusia, [2] Peningkatan Usaha Syariah, dengan indikator bertambahnya jumlah dan kualitas usaha syariah di Indonesia, dan [3] Peningkatan Daya Saing Global, dengan indikator meningkatannya daya saing usaha syariah secara global.

4 BAPPENAS, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2018-2024, h. 06

Gambar: 4.1
Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi MES

Sumber: GBKO MES

Berdasarkan garis-garis besar kebijakan organisais Masyarakat Ekonomi Syariah ini dapat digambarkan dengan lebih kongkrit bahwa MES memiliki peranan strategis dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Khususnya pada aspek pengembangan sumber daya manusia, pelembagaan dan penguatan internal organisasi, penguatan ekonomi digital dan jejaring rigional dan internasional. Melalui jaringan struktural dari pusat hingga daerah, jelas bahwa MES merupakan sebuah basis kuat yang dapat mendorong tumbuh kembangnya ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan beberapa program inovatif yang menjadi concern utamanya, MES dapat menjadi lokomotif berdayanya ekonomi syariah. Dengan kekuatan sinergitas dan komitmen bersama yang tulus, Masyarakat Ekonomi Syariah berdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui tujuh tujuan strategis organisasi yang diwujudkan dalam bentuk program kerja efektif dan berkesinambungan.

Secara lebih terarah, MES memiliki Tujuan-tujuan strategis. Tujuan MES ini merupakan perwujudan dan manifestasi dari kesungguhan para pemangku kepentingan penggerak ekonomi syariah meluputi:[5]

1. Berkontribusi aktif dalam pemberdayaan Ekonomi umat melalui pengembangan Bank Wakaf Mikro dengan platform LKM Syariah berbasis pesantren dan klaster UMKM dengan peningkatan sinergi antara LKM Syariah, perbankan syariah, dan Bank Wakaf Mikro;
2. Pada Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi demi tercapainya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman ekonomi syariah melalui kegiatan seminar, simposium, workshop, pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan kurikulum;
3. Peningkatan peran MES dalam pengembangan ekonomi syariah

5 PP. Masyarakat Ekonomi Syariah, (Annual Report tahun 2019 Memperkuat Sinergi Bersama Menebar Kemaslahatan). 32

melalui sumbangsih pemikiran berupa kajian produk, advokasi, FGD, dan semacamnya kepada pemangku kepentingan ekonomi syariah;

4. Pembangunan dan penguatan institusi yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi syariah;
5. Penyediaan dan pengembangan teknologi informasi yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi syariah baik sektor keuangan maupun sektor riil;
6. Pengembangan dan penyempurnaan organisasi MES, baik pusat maupun daerah, baik dari sisi kelembagaan maupun jaringan melalui pembukaan wilayah baru MES, program fundraising, dan revitalisasi pengurus wilayah dan daerah MES;
7. Peningkatan hubungan kelembagaan dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah baik dalam konteks nasional maupun global melalui kerjasama, audiensi, dan rapat koordinasi.

Sebagai salah satu bukti dan komitmen dari upaya MES dalam mengembangan sumber daya insani, MES mendirikan lembaga otonom, yaitu yayasan Bhakti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES Foundation). Lembaga ini merupakan salah satu badan otonom Pengurus Pusat MES yang memiliki visi untuk berkontribusi nyata pada pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia melalui capacity Building dan kualitas sumber daya manusia di dunia pendidikan. Selain itu, MES juga berupaya untuk melindungi segenap masyarakat dengan mendirikan BAMES, yaitu Merupakan badan yang berfungsi memberikan layanan penyelesaian perselisihan berbagai sengketa di bidang ekonomi syariah berupa konsultasi dengan memberikan pendapat mengikat dan/atau memediasi untuk membantu memperoleh kesimpulan penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian. Selain itu, BAMES juga melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional tentang alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, dan profesi mediator. Deretan terobosan baru dan inovasi program

MES merupakan upayanya untuk dapat berperan secara aktif dan mempercepat laju ekonomi syariah di Indonesia. Berikut ini adalah daftar lembaga otonom dan Semi-otonom MES sebagai wujud komitmen terhadap tercapainya cita-cita ekonomi Islam.[6]

Tabel: 4.1
Lembaga Otonom MES

NAMA LEMBAGA	*FOKUS KINERJA*
Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSP-KS)	Sertifikasi untuk profesi di sektor keuangan dan perbankan syariah
Yayasan Beasiswa Ekonomi Syariah (MES Foundation)	1. Mengembangkan dan melaksanakan programprogram beasiswa; 2. Membangun kapasitas dan memberdayakan penerima manfaat beasiswa 3. Memfasilitasi komunikasi antara penyedia dan penerima manfaat beasiswa; 4. Membangun organisasi filantropi kelas internasional yang akuntabel, profesional, dipercaya berbagai mitra, dan secara berkelanjutan mampu mengembangkan berbagai keunggulan.
Badan Pengelola E-Learning Ekonomi Syariah (Elsya)	Kurikulum yang tersedia di Elsya mencakup enam bidang, yaitu: 1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2. Konsep Dasar Ekonomi Islam 3. Fiqh Muamalah 4. Akuntansi Keuangan Syariah 5. Perbankan Syariah 6. Asuransi Syariah
Badan Mediasi Ekonomi Syariah (BAMES)	Layanan penyelesaian perselisihan berbagai sengketa di bidang ekonomi syariah baik berupa konsultasi dengan memberikan pendapat mengikat maupun mediasi untuk membantu perolehan kesimpulan penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian.
Aplikasi Keuangan Mikro Masyarakat Ekonomi Syariah (AKSIOMA)	Bentuk program MES yang bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang industri keuangan mikro yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk utama AKSIOMA adalah perangkat lunak (software) bersifat open source yang diperuntukkan gratis untuk membantu lembaga keuangan mikro syariah dalam mengelola dana simpanan, dana pembiayaan, dan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Mitra Kerja	Fokus utama dari lembaga ini adalah melakukan kerjasama eksternal dengan berbagai stake holder baik di dalam negri maupun luar negri.
Komunitas Binaan	Saat ini setidaknya ada tiga komunitas yang dibina, antara lain: 1. Komunitas Investor Syariah 2. Islamic Financing Community 3. Islamic Insurance Community
Media Sosial	Pengelolaan Media Sosial MES untuk kepentingan edukasi, informasi dan mendekatkan MES pada masyarakat melalui media sosial.

Sumber: Annual Report tahun 2019

6 PP. Masyarakat Ekonomi Syariah, Annual Report tahun 2019, 29

Ragam program inovatif dan berbasis riset serta up to date senantiasa di suguhkan oleh MES dalam gerakan sosio-ekonominya. Mulai dari program penguatan kelembagaan, SDM hingga penguatan jaringan kerjasama. Terkait dengan ini, dalam sambutan Annual Report 2019, Wakil Presiden Indonesia, Prof. Dr (HC). KH. Ma'ruf Amin menjelaskan sangat mengapresiasi MES yang hingga saat ini berhasil menjadi payung bersama untuk membangun kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi ekonomi syariah lain, organisasi industri, organisasi profesi, dan lain sebagainya dalam mengembangkan program percepatan pengembangan ekonomi syariah. Sinergi ini perlu ditingkatkan, terutama di berbagai jenjang kepengurusan MES baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun perwakilan di luar negeri.

2. Peran Strategis Kiai Pesantren dalam sosio-ekonomi

Dalam dunia bisnis, kiai dapat diposisikan dan difungsikan sebagai juru bicara ekonomi sekaligus duta pengembangan ekonomi. Sementara itu, dalam dunia spiritual marketing, kiai bisa ditempatkan pada posisi sebagai sosok yang bermain pada aspek heart-share. Aspek ini mendorong para konsumen untuk dapat membeli dan mengkonsumsi para yang didapatnya dengan menggunakan kejernihan hati supaya dapat diliputi oleh atmosfer yang positif. Pola ini sekaligus dapat menjadi filter bagi para konsumen supaya tidak terkontaminasi oleh arus utama positivistik-materialis. Tugas ini akan dapat berhasil manakala diemban dan dijalankan oleh para kiai yang memang memiliki kejernihan hati serta dapat mengawal nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari. Peranan kiai dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai penyangga moralitas dan spiritualitas masyarakat.

Masih dalam sosok yang sama, Selain sebagai cultural broker dan marketer, para kiai juga dapat sebagai acuan atau reference masyarakat. Ulama diposisikan sebagai figur panutan dan menjadi rujukan bagi suatu komunitas dalam menentukan sikap dan perilaku mereka. Tidak sedikit keputusan suatu komunitas yang menunggu dan menggunakan sikap

ulama sebagai konsideran. Dalam posisinya sebagai kelompok acuan inilah, ulama dapat memengaruhi komunitasnya untuk melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu. Dengan digunakannya sebagai sandaran komunitas, secara kultural ulama mempunyai kekuatan dan peran dalam menentukan dinamika suatu kelompok.

Secara praktis, Reference group merupakan setiap individu atau kelompok yang dianggap sebagai perbandingan, figur dan acuan bagi seseorang dalam membentuk tata nilai-nilai umum atau khusus dalam bersikap dan berperilaku. Dalam perspektif pemasaran, reference group dapat difahami sebagai kelompok yang dianggap sebagai dasar dan referensi bagi seseorang dalam menentukan keputusan pembelian atau konsumsi mereka. Dilihat dari keberpengaruhan ulama dalam kapasitasnya sebagai reference group, maka *playing field* tentang daya tarik dan pengaruh tersebut dapat masuk melalui tiga jalur pengaruh, yaitu pengaruh normatif, pengaruh ekspresi nilai, dan pengaruh informasi.

Terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar dan argumentasi mengapa para kiai dapat berperan penting dan menjadi acuan dalam sebuah komunitas. Pertama, Pengetahuan dan pengalaman. Para kiai merupakan sososk yang di anggap dan diperhingkan oleh masyarakat sebagai sosok yang memiliki pengetahuan lebih dalam beragam aspek. Termasuk dalam hal ini adalah pengetahuan tentang keuangan syariah. Dunia ekonomi, khususnya ekonomi syariah merupakan salah satu simblo interaksi sosial masyarakat yang banyak diatur dalam agama. Dan sosok yang paling di anggap berkompeten untuk dijadikan sebagai rujukan adalah para kiai. Kedua, Kredibilitas dan daya tarik. Kiai merupakan magnet yang mampu menarik dan mengalihkan perhatian komunitasnya. Para kiai juga diposisikan sebagai individu yang kredibel untuk dijadikan sebagai rujukan karena dianggap memiliki tinggal spiritualitas. Dengan demikian, sangat logis jika kemudian para kiai dijadikan sebagai acuan dan mampu memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.

Terkait dengan hal ini, Handi Irawan menjelaskan bahwa para konsumen Indoenesia dalam memilih dan menentukan sebuah

pilihan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di antara faktor eskternal tersebut ialah dalam hal group reference. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat yang notabenenya masyarakat Eropa dan Amerika, dimana perilakunya banyak berasal pada alasan logis masing-masing invidu. Sehingga tidak heran jika dalam konteks ini, peran dan pengaruh para opinion leader masing sangat besar. Suku Jawa Misalnya, banyak sekali pilihannya antas beragam produk masih bergentung pada kecenderungan besar para figur, termausk kiai. Hal ini terjadi juga pada suku Madura atau Sunda. Para kiai dan ulama masih sangat memiliki peran besar bagi masyarakat untuk menentukan beragam pilihan mereka dalam menentukan dan memilih produk-produk tertentu. Sosok tersebut menjadi panutan bagi masyarakat untuk menyerap dan memfilter informasi.

Tidak cukup disitu, beberapa Saran dan keteladanan dari mereka masih menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam membuat evaluasi atas pembelian sebuah produk tertentu. Demikian pula, untuk beberapa suku yang lain, dimana tradisi dan adatnya masih memegang teguh budaya tersebut dengan kuat seperti suku Bali, dimana para pemimpin adat tersebut juga yang menjadi *opinion leader*. Mudah dipahami apabila kemudian banyak perusahaan telekomunikasi, perbankan, makanan dan minuman yang kemudian mendukung kegiatan dari para kiai ini. Besarnya pengaruh tersebut juga, para kiai kerap kali dijadikan sebagai endorsment sebuah produk tertentu. Maksud dan tujuannya ialah untuk merebut simpati secara tidak langsung. Dengan demikian, jika para kiai tersebut menyarankan untuk membeli merek X, maka sekitar 40% hingga 60% dari pengikutnya, akan dengan segera memilih merek dan brand dari produk yang sama.

3. Relasi MES dan Pesantren

Di antara Salah satu program pembangunan berbasis ekonomi syariah yang saat ini perlu untuk terus didukung adalah program pemberdayaan masyarakat melalui pesantren. Jika gagasan ini dapat diimplementasikan secara baik dan berkelanjutan, maka ke depannya

ekonomi nasional dapat ditopang melalui kekuatan ekonomi umat. Dengan potensi kuantitas umat yang sangat banyak, maka gerakan ini akan menjadi sebuah gerakan massif. Berdasarkan ini pula, maka Pesantren tidak lagi hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat pengembangan dan perubahan sosial berbasis ekonomi syariah.

Ekonomi syariah, baik sebagai sistem ekonomi maupun sebagai ilmu ekonomi (*economics*) lahir dari rahim para intelektual Muslim. Ekonomi syariah yang lahir dan berkembang dengan berbagai latar belakang dan kepentingan pada dasarnya bertujuan untuk melengketkan umat terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan ini umat akan semakin dekat terhadap derajat sebagai Muslim yang sempurna (*kaffah*). Upaya "mensyariahkan" umat (tidak terkecuali mensyariahkan di bidang ekonomi) menjadi tugas setiap komponen masyarakat dan institusi-institusi keislaman lainnya.

Dalam peranannya sebagai lembaga sosial dan sosial, pesantren mempunyai peran sebagai agen perubahan sosial. Di era ini pesantren harus memperluas aspek dakwahnya pada sektor ekonomi. Upaya ini juga tidak kemudian menjauhkan pesantren dari akar historis dakwahnya, mengingat sedari awal pesantren sangat dekat dengan pola pengembangan ekonomi. Terkait dengan peran pesantren dan mensyariahkan ekonomi umat, maka dapat diuraikan deskripsi berikut ini.

1. Agen Perubahan Sosial di Bidang Ekonomi Syariah

Selain sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem pondok pesantren, kiai merupakan salah satu sentral dalam komunitas masyarakat pesantren. hal ini karena, kiai merupakan sosok yang sangat kompleks, diwaktu yang bersamaan, ia bisa sebagai pengelola pondok, sebagai bapak, pemiliki pesantren, pengajar bahkan sebagai pemimpin. Peran-peran ini senantiasa dapat dimainkan oleh kiai secara baik ditengah-tengah masyarakat. Kendatipun pesantren di anggap tertutup dan eksklusif, kiai berhasil membangun sub-kulturnya sendiri di masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga keagamaan dan sosial.

Dalam perjalanan waktu, asumsi karakter eksklusif pesantren tersebut tersebut membentuk sebuah gumpalan pemahaman di masyarakat kemudian terjadi kristalisasi persepsi yang kemudian membenturkan pesantren dengan pendidikan umum. Dengan itu tidaklah mengherankan bila benturan itu menjadi penyebab bergesernya eksistensi pondok pesantren bahkan terkontaminasi. Seiring dengan ini juga, posisi kiai, bergeser dari titik sentral. Penuh Kharisma dan otoritatif, menjadi pudar oleh perkembangan rasionalitas masyarakat yang semakin luar biasa.[7]

Bergulirnya arus globalisasi di seluruh aspek dan dimensi kehidupan manusia, himpitan dan tekanan ekonomi menjadi salah satu akar penyebab terjadinya perubahan arah atau disorientasi umat Islam. Lingkungan yang semakin kapitalistik, materialistik dan hedonis ini seolah memberikan legitimitasi dan dalil untuk dapat bersikap permisif terhadap segala sesuatu kendatipun pada saatnya termasuk mendistorsi ajaran agama. Tatanan lama dan Pranata sosial seolah tercerabut dan terhempas oleh kepentingan-kepentingan dan paradigma baru ekonomi yang jangka pendek.

Besarnya tuntutan ekonomi ini menjadikan manusia modern seakan kehilangan arah, hingga membuatnya terterkan dan kehilangan pedoman untuk dijadikan sebagai referensi. Praktik sosial-ekonomi masyarakat yang pada mulanya sebagai instrumen untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup justru berbalik dan begeser pada upaya dan obsesi untuk memenuhi dan memuastkan hasrat duniawi saja. Pada akhirnya, manusia model ini tidak akan pernah berhasil bahkan terjebak pada lingkaran hawa nafsu yang tidka mengenal ujung dan batas. Obsensi ini kemudia menjelma menjadi sebuah petaka yang terus membelenggunya.

Berpijak pada fenomenan ini, gerakan ekonomi syariah berbasis pesantren perlu didorong untuk melakukan perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Mengalihkan arah dan paradigma ekonomi

7 Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren,* (Jakarta: Pustaka LP3S, 1999)

masyarakat yang sedari awal sebatas memuaskan hawa nafsu menjadi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dengan standar kepatutan dan ketercukupan. Berfusi dari pola hidup yang konsumtif menjadi gaya hidup yang produktif dan moderat. Mengisi dan mewarnai pola hodup masyarakat modern dengan nilai-nilai yang berdimensi ibadah. Selain itu, masyarakat ekonomi syariah ini juga dimaksudkan untuk Mengubah arah masyarakat yang hanya orientasi profit-oriented dan utility, menjadi berorientasi *maximizing* dan berdimensi maslahah

Di antara instrumen yang dapat digunakan oleh masyarakat pesantren untuk melakukan perubahan sosial tersebut adalah pengetahuan dan wawasan ilmu ekonomi syariah, karena ekonomi syariah ini pada dasarnya disusun supaya manusia Muslim semakin mendekati derajat ketaqwaan, khususnya di muamalah (bidang ekonomi). Pesantren memang mempunyai banyak referensi, benteng moral dan pilihan dalam menghalau efek negatif gelombang modernitas. Namun untuk penyakit *social-disorder* yang berakar dan bersumber dari persoalan ekonomi, maka ekonomi syariah dapat menjadi pilihan referensi yang tepat bagi kalangan pesantren.

Keberadaan kiai dalam dunia pesantren hinggga saat ini memiliki peranan yang sangat besar pada umat Islam Indonesia. Kendatipun arus informasi, teknologi dan modernisasi kerap kali mendera dan menghiasi dinamikan kalangan Muslim Indonesia. Namun para kiai dan pesantren masih senantiasi eksis dan berjuang dalam membentengi masyarakat dari arus dan gelombang budaya barat. Posisi strategis kiai ini dapat menjadi potensi di bidang sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi syariah yang dimotori oleh kalangan pesantren. upaya pengembangan ekonomi syariah ini merupakan bagian dari rekayasa sosial demi terciptanya masyarakat yang ideal menurut Islam yang selama ini diupayakan oleh pesantren.

2. Laboratorium Bisnis Ekonomi Syariah

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keagamaan, pesantren merupakan laboratorium untuk praktik riil dari teori ekonomi syariah.

Posisi ini sangat strategis mengingat masyarakat merupakan salah satu teladan dan contoh bagi praktik sosial-keagamaan sehari-hari, termasuk urusan ekonomi. Jika pesantren berhasil dalam menerapkan ekonomi syariah dan diikuti oleh masyarakat luas, maka hal ini akan menjadi gelombang besar gerakan ekonomi syariah. Namun jika pesantren apatis dan pasif maka masyarakat kehilangan opsi lain. Sehingga wajar jika masyarakat lebih lengket terhadap praktik ekonomi konvensional.

Dalam pemenuhan kebutuhan internalnya, pesantren juga dapat berperan sebagai lembaga yang secara langsung melakukan produksi untuk kopentingan konsumsi. Sebagai lembaga produksi, pesantren secara langsung terlibat dalam perluasan kawasan dan lahan tanah, memiliki SDM produksi dan sarana teknologi yang diperlukan untuk produksi barang dan jasa. Dengan ini maka, pesantren merupakan produsen yang menyuplay kebutuhan masyarakat sekitar. Pola ini akan semakin memiliki daya jangkau produksi yang luas jika dilakukan dengan bentuk simbiosis mutualisme antar produsen pesantren dan produsen yang berasal dari lingkungan masyarakat. Misalnya, pesantren sebagai produksi peternakan, masyarakat sebagai produsen dan penyuplay kebutuhan pertanian.

Sebagai sebuah "negara kecil" dengan kiai sebagai "presidennya" dan para santri sebagai "rakyatnya," maka sangat memungkinkan bagi pesantren untuk mengimplementasikan bisnis syariah karena adanya otoritas yang dimiliki oleh pimpinan pesantren. Jumlah dan kuantitas santri yang banyak di dalam pesantren pada aspek yang lain merupakan pasar tersendiri yang sangat potensial. Dengan potensi ini pesantren sangat memungkinkan untuk membuka bisnis. Keberadaan dua otoritas dan pasar inilah maka pesantren sangat mungkin menjadi laboratorium praktik bisnis syariah, meskipun pada skala yang kecil. Dalam pengertian lain, pesantren mempunyai sumber daya yang sangat potensial untuk mempraktikkan bisnis syariah.

Pada sisi yang lain, pesantren di tuntut untuk memiliki kemandirian ekonomi dan finansial. Karena ketergantungan pesantren secara finansial kepada pihak luar, baik berupa kekuatan politik, birokrasi

maupun kekuatan ain akan menggerus kemandirian pesantren. Pesantren akan lebih mudah terkooptasi dan diperalat oleh kepentingan tertentu jika menggantungkan kemampuan finansialnya kepada pihak lain. Oleh sebab itu, menjadi penting bagi pesantren untuk mempunyai unit usaha (diberbagai Bidang) dan bisnis yang dapat menjadi sumber pemasukan rutin bagi pesantren. Pada posisi ini, tentu unit bisnis syariah yang terbebas dari MAHGRIB (*maysir, gharar, riba, risywah* dan *bathil*) harus menjadi pilihan utama kalangan pesantren.

3. Pesantren sebagai Pusat Belajar Ekonomi Syariah

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa kalangan pemikir dan intelektual Muslim lahir dari rahim pesantren. Pesantren senantiasa melahirkan para pemikir dan ilmuan Muslim terkemuka di Indoensia. Dengan spesialisasi dan kekhasan yang dimilikinya, pesantren tidak pernah kehabisan cara untuk melahirkan para pemikir dan ilmuan yang memiliki kapasitas yang teruji di masyarakat. Utamanya, ketika ditelusuri genenologi para ilmuan kampus yang berada diluar pesantren, pada umumnya mereka memiliki titik temu dengan khazanah pesantren.

Secara teoritis, diskursus ekonomi syariah mengharuskan para peminatnya untuk memiliki kapasitas keilmuanyang mendalam, terutama dalam bindang fikih muamalah, kaidah fikih, usul fikih, dan disiplin ilmu yang sejenis. Bekal ini dibutuhkan supaya para ekonomi syariah terhindar dari kesalahfahaman dalam fikih, apalagi sampai terjebak pada distrosi keilmuan. Anehnya, akhir-akhir ini, keilmuan ekonomi syariah ini bahkan diinisiasi dan dikembangkan oleh kalangan yang belum memiliki pemahaman fikih dan tidak kenal dengan istilah-istilah yang identik dengan fikih muamalah. Padahal, problem ini beresiko untuk meruntuhkan dan pengkaburan dalam pemahan fundamental ekonomi syariah. Sebagaimana telah lazim bahwa dalam kapasitasnya ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi maupun sebagai ilmu ekonomi, tidak akan bisa dilepaskan dari khazanah keilmuan Islam yang telah diletakkan sebelumnya oleh para cendekiawan muslim.

Salah satu aspek potensial yang menjadi modal pesantren untuk menjadi bagian dari agenda besar pengembangan ekonomi syaraiah adalah kepercayaan masyarakat tenag posisi pesantren. dimana, hingga saat ini pesantren masih dipercaya sebagai lembaga yang sukses memproduksi ahli agama dan dai. Kepercayaan ini dapat dimanfaatkan pesantren untuk menjadi penggeraka ekonomi syariah. Selain berperan pada aspek penentu kebihakan, seperti bagian pengawas dan mendirikan lembaga keuangan syariah. Pasalnya masyarakat memiliki keyakinan bahwa orisinalitas agama dan ajaran Islam ini hanya mampu dikendalikan melalui pesantren. termasuk dalam urusan ekonomi syariah yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah. Maka menjadi sebuah keharus bagi pemerintah untuk dapat menggandeng pesantren sebagai bagian dari gerakan ini. Potensi lain adalah SDM pesantren yang ahli dalam fikih muamalah lah yang dapat menjadi penopang dan support sistem dalam pengambilan kebijakan.

Dari aspek lain, lembaga posantren sangat membutuhakn support teknologi dari pihak lain yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Selain itu, ia membutuhkan tenaga terampil yang mampu melakukan akselerasi dalam membuat gerakan ini. Upaya ini juga dalam jangka panjang perlu dimasukan dalam sistem dan desain kurikulum pembelajaran yang secara langsung bersetuhan dengan proses belajar santri. Tidak bisa dipungkiri bahwa santri merupakan ujung tombak keilmuan pesantren di masa depan yang harus dibekali dengan pengetahuan dan wawasan ekonomi modern.[8]

B. Potensi pengembangan UMKM di Pesantren Konsep Wirausaha Pesantren

Secara sederhana, Wirausaha dapat difahami sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Pemahaman ini juga dapat disempurnakan dengan sebuah definisi yang mengatakan bahwa wirausaha merupakan

8 Ahmad Syakur, *Optimalisasi Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, dalam jurnal IQTISHODUNA, Vol. 5, No. 3, 2009, 03

proses mencipatkan atau mengekstraksi nilai. Berdasarkan pengertian ini, wirausaha tidak hanya difahami sebagai proses menghasilkan sesuatu secara materi dan bernilai ekonomis, melainkan juga mencakup nilai-nilai lain yang di *create* untuk kepentingan tertentu, [Anderson: 2011,7]. Kendatipun demikian, pemaknaan atas wirausaha dalam konteks ini berhubungan aktifitas ekonomi yang dilakukan secara mandiri dalam rangka memperoleh keuntungan.

Berdasarkan pemahaman secara etimologi di atas, maka secara termenologi, wirausaha pondok pesantren merupakan sebuah aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh pengelola pesantren secara mandiri untuk menghasilkan keuntungan dan pengembangan finansial demi menstimulus berjalannya kegiatan pondok pesantren. wirausaha pondok pesantren ini bisa dilakukan dalam skala besar berbentuk perusahaan atau dalam bentuk koperasi. Dengan wirausaha, pondok pesantren akan memiliki penopang untuk menjalankan misi utama, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberdayakan umat dan mengawal moralitas. Kemandirian finansial pondok pesantren juga dapat menjadi suksesi dalam peranannya sebagai penggerak sosial untuk mewujudkan perusahan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pandangan Islam, nilai-nilai kewirausahaan sendiri bisa dilihat dari beberapa ayat dan sunnah Nabi Muhammad saw. Ausaf Ahmad [Ausaf: 1992.19] mengatakan bahwa doktrin kemandirian dan *sense of creating* di dalam diri manusia sudah dianugerahkan tuhan. Oleh karenanya, proses hadirnya jiwa kewirausahaan harus berawal dari kesadaran setiap individu. Ada beberapa ayat dan hadits yang menjelaskan itu. Misalnya, seruan Allah kepada seluruh umatnya untuk menggali dunia setelah dia menunaikan shalat (fa antasiru fil ardhi). Menurutnya, ayat ini meneguhkan bahwa setiap manusia harus memiliki keseimbangan antara kehidupan akhirat dan duniawi. Salah satu caranya adalah dengan berdagang atau berbisnis. Selain berlandaskan pada ayat, dia juga meneguhkan pendapatnya berdasar hadits nabi Muhammad. Seperti sejarah pribadi Muhammad saw, yang sempat menjadi pembantu Siti Khadidjah.

Dalam kaitan ini, Aflazul Rahman memberikan keywords penting untuk mengenal bagaimana rasulullah menjalankan roda bisnisnya. Menurutnya, Rasulullah selalu mendahulukan pelayanan yang unggul, jujur, amanah, dan sangat transparan. Selain menjelaskan tauladan nabi, dia juga menganjurkan agar proses-proses dan strategi Nabi Muhammad berbisnis bisa dijadikan etika bisnis Islam. Di sisi lain, ada banyak juga serjana muslim lainnya, yang sebenarnya mengapresiasi kekuatan sejarah dan tauladan Nabi Muhammad dalam berbisnis yang pada intinya ingin menegaskan bahwa berwirausaha adalah wujud pengamalan kehidupan dunia yang sesungguhnya. Dan, pastinya, harus diimbuhi dengan nilai-nilai dan ketauladanan Islam.[9]

1. Urgensi Wirausaha Pesantren

Sebagai lembaga atau organisasi, pondok pesantren akan memerlukan instrumen pembiayaan sebagai stimulus untuk menjalankan fungsinya sebagai bagian dari kontruksi besar masyarakat. Fungsi dan peranan pondok pesantren dalam konteks ini dijelaskan oleh Halim bahwa terdapat tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu: *Pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (human resource). *Ketiga*, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Pondok pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) di tengah perubahan yang terjadi. Dalam rangka melakukan fungsi ini, maka pilar-pilar utama perjuangan pondok sudah harus tertata dengan baik, termasuk pilar ekonominya.[10]

Fungsi pondok pesantren dalam hal ini juga diamanatkan oleh UU No 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren, dijelaskan bahwa

9 Afzalul Rahman, *Muhammad Is Trader* (Bandung; Pustaka Iqra', 2010), h. 03

10 Halim, Rr.Suhartini, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta; Pustaka Pesantren Kelompok Penerbit LKiS, 2005), 35

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Termasuk dalam peranan ini, pesantren tidak hanya berfokus pada kemandirian ekonomi internal, tetapi juga turut serta membangun dan menumbuhkan keterampilan ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren. Kendatipun keberedaan pesantren di tengah masyarakat sejatinya telah banyak menciptakan peluang usaha baru dan geliat ekonomi di arus bawah.

Upaya-upaya eksternal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dimaksudkan untuk:

1. Menumbuh-kembangkan jiwa wirausaha dikalangan santri dan masyarakat
2. Menumbuh-kembangkan sentra dan unit usaha yang berdaya saing tinggi.
3. Membentuk Lembaga Ekonomi Mikro berbasis nilai Islam; dan
4. Mengembangkan jaringan ekonomi dan pendanaan di pesantren baik horisontal maupun vertikal.

Salah satu prinsip dalam pemberdayaan adalah penguasaan terhadap kemampuan ekonomi yaitu, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukangan dan jasa. Kemampuan dalam konteks ini menyangkut kinerja individu yang merupakan wujud kompetensi individu tersebut dapat meningkat melalui proses pembelajaran maupun terlibat langsung di lapangan, seperti kompetensi mengelola ekonomi. Kemampuan (pengetahuan dan keterampilan pengelola ekonomi) yang perlu ditingkatkan mencakup pengelolaan organisasi, manajemen produksi, marketing dan distribusi, jiwa dan mental bisnis serta keterampilan teknis wirausaha lainnya, termasuk bisnis virtual.

Pentingnya kemandirian ekonomi pesantren ini juga dikemukakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam sebuah acara

Indonesia Shari'a Economic Festival pada tahun 2018. Beliau menyampaikan bawah terdapat 3 (tiga) program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia. *Pertama*, pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerjasama antar pesantren. *Kedua*, mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan virtual market produk usaha pesantren sekaligus business matching. *Ketiga*, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren.

Ketiga program tersebut merupakan wujud dari pilar pertama dari 3 (tiga) strategi utama *Blueprint* Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional yaitu pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*). Ekosistem ini mengembangkan sektor usaha syariah melalui pemberdayaan pelaku usaha baik besar, UMKM, serta lembaga pesantren, termasuk pengembangan aspek kelembagaan dan infrastruktur pendukungnya seperti pemberdayaan usaha pesantren dan pengembangan sektor usaha potensial seperti makanan, fashion dan pariwisata, serta virtual market.

Uraian di atas semakin memperjelaskan urgensi posisi wirausaha bagi eksistensi pondok pesantre. Selain untuk kepentingan finansial internal, wirausaha pondok pesantren juga dapat menjadi penggerak pengembangan dan pemberdayaan ekonomi sekitar. Dengan ini dapat dipaparkan beberapa faktor yang mendorong eksistensi wirausaha pondok pesantren:

1. Stimulus finansial kegiatan dan pengembangan pondok pesantren.
2. Penggerak ekonomi pemberdayaan masyarakat sebagai wujud implementasi fungsi pondok pesantren.
3. Dapat menjadi laboraturium usaha kerakyatan syariah
4. Memacu kemampuan dan jiwa enterpreneurship santri.
5. Mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi mikro dan menengah.

6. Menciptakan kemandirian lembaga dan mengurangi ketergantungan finansial pada pemerintah.

Kemandirian pesantren ini didasarkan pada power pesantren dalam kapasitasnya sebagai bagian dari arus utama ekonomi umat. Dimana pesantren dikenal sangat memiliki kedekatan emosional dengan komunitas masyarakatnya, yaitu santri. Hal ini akan mudah berdampak pada besarnya permintaan masyarakat atas produksi pesantren. hal ini pula akan menjadi implikasi positif jika dikombinasikan dengan skill yang dimiliki untuk berbisnis. Sekaligus memasukkan nilai-nilai ibdah dalam berbisnis. Dalam konteks ini, diperlukan komunikasi yang efektif antar pesantren dalam kerangka bisnis untuk memacu tercapainya kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan gagasan program mengenai kemandirian pesantren ini, maka upaya ini tidak bisa dijalankan sendirian, melainkan harus dilakukan secara sistematis, dengan bingkai halal value chain, sinergi dengan UMKM, KOPONTREN dan penguatan kelembagaan pesantren dalam sektor bisnis supaya dapat berperan langsung pada kemajuan ekonomi.

2. Prinsip Wirausaha Pesantren

Bahwa wirausaha yang relevan dengan kondisi dan cita-cita besar adalah koperasi. Dalam mengembangkan koperasi ini pondok pesantren harus memperhatikan beberapa prinsip koperasi berikut ini. Salah satunya dikemukakan oleh Munkner, dimana beliau menjelaskan terdapat 12 prinsip koperasi yang diturunkan dari 7 variabel gagasan umum:

1. Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan (*Self-help based on solidarty*). Gagasan umum ini melahirkan beberapa prinsip dalam menjalankan koperasi yaitu [1] Keanggoataan bersifat sukarela (*Voluntarily Membership*), [2] Keanggotaan Terbuka (*Open Membership*), [3] Pengembangan Anggota (*Member Promotion*)dan [4] Identitas sebagai pemilik dan pelanggan (*Identity Of co-owner and costumers*).

2. Demokrasi (*Democraty,* gagasan ini kemudian melahirkan prinsip bahwa manajemen dan pengawasan koperasi harus dilakukan secara demokrasi (*Democratic management and control*), karena koperasi melibatkan banyak orang yang menuntut penerapan sistem musyawarah.
3. Kekuatan modal tidak diutamakan (*Neutralised Capital*), bahwa koperasi harus memperhatikan bahwa di dalamnya terdapat banyak personel yang terlibat. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, terdapat dua prinsip utama, yaitu [1] Koperasi sebagai kumpulan orang-orang (*personal Corporation*) dan [2] Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak butuh di bagi (*Indivisible social capital*).
4. Ekonomi (*Economic*), bahwa efisiensi ekonomi dari usaha koperasi harus senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan (*Economic Effisiensy of the corporative enterprise*)
5. Kebebasan (*Liberty*) bahwa koperasi adalah [1] Perkumpulan sukarela, (*Voluntarity Association*) dan [2] Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (*outonomy in goal setting and decision making*)
6. Keadilan (*Equety*), hal ini melahirkan prinsip bahwa koperasi harus melakukan pendistribusian secara adil dan merata tentang hasil-hasil ekonomi (*Fair and just distribution of economic result*).
7. Memajukan kehidupan sosial melalui pendidikan (Social advencement through education), dengan ini melahirkan prinsip bahwa dalam mengelola koperasi harus dilekukan pendidikan anggota (*Member education*).

Selain prinsip yang secara spesifik memberikan pedoman pada koperasi, implementasi Good Corporate Governance juga cukup relevan jika pakai dalam mengelola koperasi pondok pesantren. Tata Kelola perusahaan yang baik, merupakan sistem yang memuat tentang beberapa prinsip, prosedur, mekanisme dalam menjalankan sebuah perusahaan sesuai dengan aturan dan moralitas bisnis. Prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut: [Permen BUMN-01 Tahun 2011]

1. *Transparency* /Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2. *Accountability* /Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris.

3. *Responsibility* / Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari prinsip pertanggungjawaban adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak., dan sebagainya. Merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* /Kemandirian

Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari kemandirian adalah dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pendapat yang independen pada setiap pengambilan keputusan, tetapi masih bisa mendapat masukan dari konsultan atau sumber daya manusia lainnya yang berguna untuk menunjang kemajuan perusahaan.

5. *Fairness and Equality* / Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang

timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang - undang. Contoh dari *fairness* adalah perlakuan yang setara kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan. Karyawan juga diperhatikan dengan baik hak serta kewajibannya secara adil dan wajar.

Sementara itu, menurut UU nomer 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa prinsip koperasi dibagi menjadi dua ketegori, yaitu prinsip pelasanaan secara umum dan prinsip pengembangan. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: [1] Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; [2] Pengelolaan dilakukan secara demokratis; [3] Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; [4] Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan [5] Kemandirian. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut: [1] Pendidikan perkoperasian, dan [2] Kerja sama antarkoperasi.

3. Pengembangan Usaha Pondok Pesantren (KOPONTREN)

Minimnya suplay pendanaan dari pemerintah, mengharuskan pondok pesantren untuk memiliki kemandirian ekonomi. Kondisi ini dapat menjadi peluang besar bagi pondok pesantren untuk memilih dan mengembangan aspek ekonomi pondok sesuai dengan arah, nilai dan kepentingan yang relevan dengan pondok pesantren, termasuk dalam melakukan penataan kelembagaannya. Namun demikian tetap dapat mengadopsi tata kelola organisasi yang dapat menunjang pengembagan usaha. Penataan wirausaha (Kopontren) ini meliputi unsur-unsur berikut ini:

1. Sumber Modal Usaha

Koperasi pondok pesantren dapat dikelola oleh pondok pesantren atau melibatkan pihak lain. Koperasi yang dikelola langsung oleh pondok pesantren maka modal usahanya sepenuhnya bersumber dari pondok. Dengan demikian maka seluruh hasil usaha dapat dikuasai

oleh pondok pesantren. Tetapi jika melibatkan pihak lain, seperti dewan guru dan satuan pendidikan di dalamnya, maka dapat melakukan sharing capital/berbagi modal. Sehingga hasilnya juga dapat dibagi dengan seluruh stakeholder yang turut menyuplay modalnya.

Gambar, 4.2
Sumber Modal Usaha Koperasi

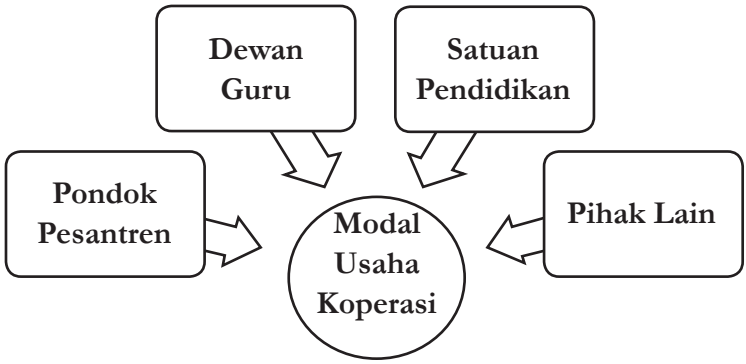

2. Potensi dan Jenis-jenis Produk

Dengan populasi santri dan masyarakat lingkungan pesantren yang banyak, maka usaha pondok koperasi pondok pesantren dapat menyisir pemenuhan kebutuhan pokok santri dan masyarakat sekitar. Namun juga dapat melakukan pelebaran pada aspek yang lebih luas dan berskala ekonomi besar. seperti aspek pertanian, perumahan, peternakan, dan lainnya hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi pesantren terkait.

Jenis usaha koperasi pondok pesantren dapat dilakukan dengan melakukan produkasi mandiri terhadap kebutuhan harian santri. Namun juga dapat dilakukan dalam bentuk sharing produk antar pondok pesantren, baik skala luas maupun dengan pondok terdekat. Di antara jenis-jenis produk dan wirausaha yang memungkinkan dilakukan oleh koperasi meliputi: [1] Kebutuhan Harian santri, Seperti Kebutuhan Pokok pangan, (Sembako), Konveksi (Seragam dan baju umum, Krudung, dan aksesoris lainnya), Kantin santri dan umum,

(Nasi dan jajanan ringan santri), Produksi Sandal, sabun cuci, pasta gigi, sikat gigi, kosmetik dan lainnya, Buku, kitab, alat tulis dan ATK lainnya, Percetakan dan Foto copy, Warnet dan digital printing. [2] Usaha Skala Besar, Seperti Peternakan, perkebunan, toko bangunan, perumahan, travel haji dan Umroh, Perbengkelan dan jenis lain yang potensial.

3. Pemasaran Usaha

Pemasaran merupakan salah satu aspek penting yang harus senantiasa difikirkan dengan matang oleh pelaku ekonomi. Segmen pasar utama koperasi pondok pesantren adalah santri dan masyarakat sekitar. Sementara strategi pemasaran bisa dilakukan dengan dua modal, yaitu offline dan online. Offline mencakup barang-barang ritel pokok harian. Pasar online meliputi barang produksi pesantren yang marketable. Melalui jaringan alumni dan simpatisan, pondok pesantren dapat memiliki pangsa pasar yang luas.

4. Sharing Profit

Sebagaimana telah maklum, bahwa koperasi pondok pesantren dapat disuplay dengan modal urunan oleh anggota atau kelompok lembaga satuan lainnya di lingkungan pondok pesantren, maka sharing keuntungan juga dapat disesuaikan dengan sumber modal yang terlibat dalam wirausaha koperasi. Standar tentang ini dapat disesuaikan dengan kontrak yang terjadi di antara pihak yang terlibat.

5. Pertanggung Jawaban

Pengelola koperasi pesantren memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggung jawaban pengelaan terhadap para anggota pemodal atau otoritas yang menaunginya. Aspek ini penting dilakukan untuk kepentingan menjaga dan merawat kepercayaan pihak terlibat. Selain itu, pertanggung jawaban juga dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan serta problem yang di alami oleh pengelola. Pelaksanaannya, dapat dilakukan per-semester atau laporan tahuan pengelolaan.

Unsur atau komponen yang telah diuraikan di atas, kemudian dikelola atau di manaj sesuai dengan standar manajemen masing-masing unsur terkait. Seperti manajemen marketing, manajemen keuangan, manajemen produksi dan lainnya. Namun demikian, secara umum, tahapan manajemen KOPONTREN dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menentukan Ruang Lingkup Kopontren, adalah tahap dimana pondok pesantren menetapkan aspek jangkauan koperasi, skala dan segmen pasar utama.
2. Identifikasi Jenis barang, proses dimana pesantren menentukan jenis, kategori dan komponen barang dan jasa yang hendak diperjual belikan.
3. Kebutuhan SDM, tahap dimana pesantren menentukan kebutuhan sumber daya pengelola, dengan kriteria, kualifikasi dan jumlah personel yang dipaling urgen dan segera dipenuhi.
4. Sumber Modal, tahapan sebelumnya disusun untuk mengetahui kebutuhan modal pendirian dan pengelolaan awal. Dengan diketahuinya kebutuhan modal tersebut, maka tahap selanjutnya adalah menentukan jumlah dan sumber modal yang memungkinkan untuk di injek.
5. Sistem Kontrol dan kendali, dalam pelaksanaannya, mengelola sebuah usaha tetap memerlukan sistem pengawasan, kontrol dan pengendalian dari otoritas. Kontrol atasan ini dapat dilakukan secara periodik, baik berkaitan dengan kepentingan suplay barang, pemasaran dan problem lain yang membutuhkan menanganan segera.
6. Pelaporan dan perbaikan, tahap terakhir adalah memberikan laporan usaha pada pemberi kewenangan. Format dan strandar laporan ini dapat mengacu pada format umum laporan koperasi. Namun demikian, tahap ini penting untuk dilakukan demi melakukan perbaikan ditahap selanjutnya.

Gambar, 4.3
Siklus Manajemen Kopontren

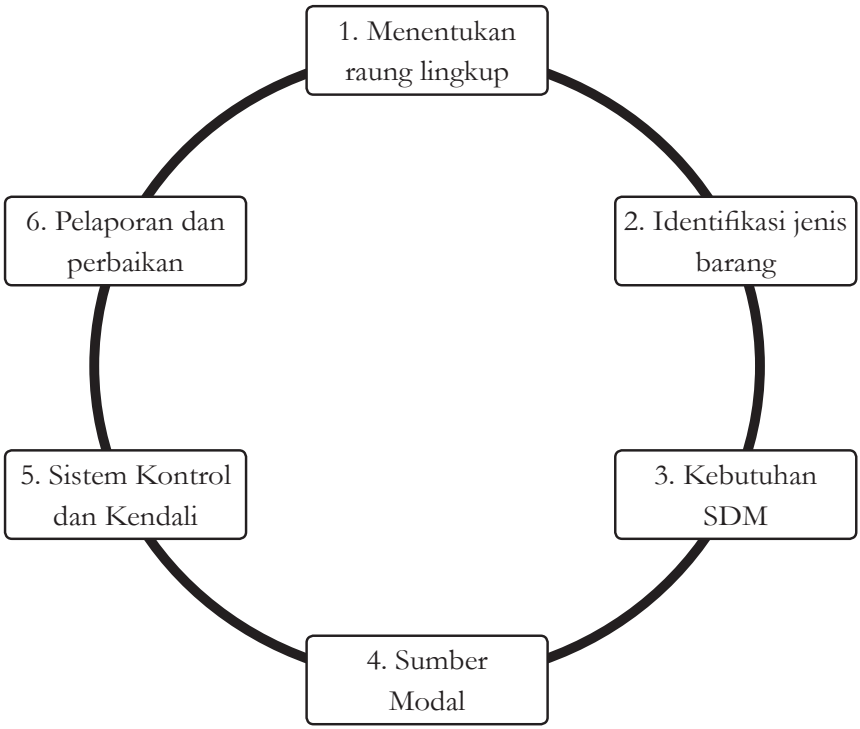

Berdasarkan siklus bisnis dipondok pesantren ini, maka daya jangkau usaha pesantren sangat luas. Dari ruang lingkupnya, bisnis yang dijalankan oleh pesantren dapat mengembangkan sayapnya pada skala yang lebih luas, mulai dari lifestyle, energi, digital hingga pariwisata. Dengan sumber daya manusia dan mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi, pondok pesantren sangat memungkinkan untuk mengarusutamakan proses bisnisnya pada peluang-palung bisnis yang sedang berkembang pesat saat ini.

C. Halal Value Chain dan Ekonomi Pesantren Konsepsi Ekosistem Halal Value Chain

Value chain atau biasa dikenal dengan rantai nilai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk

atau jasa. Dalam perkembangannya Halal Value Chain kemudian diimplementasikan secara langsung dalam proses bisnis. Proses ini kemudian dikenala dengan istilah manajemen rantai halal. manajemen rantai hala ini kemudian dapat difahami sebagai penanganan produk halal mulai bahan mentah dari supplier sampai dengan produk jadi ke tangan konsumen yang seluruh proses berlandaskan Hukum Syariat sehingga produk terjamin halal.[11]

Perubahan sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh paparan pengetahuan dan wawasan yang diterima oleh seseorang sehari-hari dalam lingkungan ekosistemnya. Ekosistem menunjukkan bagaimana interaksi anggota didalamnya. Dalam interaksi tersebut, akan mewujud menjadi sebuah budaya yang akan ditiru dan diikuti oleh semua komponen ekosistem sebagai sebuah gaya hidup atau *lifestyle*. Maka dari itu, nilai-nilai halal value chain yang dimasukkan dalam setiap interaksi di lingkungan pondok pesantren sebagai sebuah ekosistem dapat menjadi budaya yang diikuti oleh seluruh masyarakat pesantren.[12]

Pondok pesantren memiliki koperasi pondok pesantren (kopontren) sebagai usaha untuk mewujudkan kemandirian ekonomi mereka. Sebagai sebuah motor penggerak, kopontren memiliki kewajiban untuk menjalankan proses produksi, distribusi sekaligus memenuhi barang konsumsi yang diperlukan masyarakat pesantren. Setiap yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi kopontren, dapat menunjukkan sejauh apa komitmen kopontren dalam memegang nilai-nilai ekonomi Islam. Hal itu sekaligus menjadi pintu masuk proses edukasi terhadap rantai nilai halal (halal value chain) bagi ekosistem yang tergabung dalam masyarakat pesantren sehingga akan menjadi gaya hidup yang dapat dijadikan keteladanan atau prototype bagi kelompok masyarakat lainnya.

11 Bernadhetta Vivi Kristiana, *Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM,* Performa: Media Ilmiah Teknik Industri (2020) Vol. 19, No.2: 113-120

12 Arna Asna Annisa, *Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, tahun 2019, 1-8.

1. Komponen Optimalisasi Industri Halal

   a. Kebijakan Halal

   Kebijakan halal (*halal policy*) menjadi landasan dasar dalam penerapan halal. Komitmen top management dalam melaksanakan halal menentukan sukses atau tidak penerapan halal yang dilakukan UMKM halal tersebut. Top management yang memiliki komitmen yang kuat akan mendorong organisasi di dalam UMKM tersebut untuk menerapkan kebijakan halal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penerapan kebijakan halal akan memberikan standar yang jelas bagi UMKM mulai dari bahan mentah hingga produk jadi.

   Kontrol Logistik (Logistics Control)

   Standar yang ada dalam kebijakan halal menjadikan rantai pasok untuk UMKM menjadi jelas. Pemisahan bahan baku halal dan non-halal menjadi penting untuk diperhatikan, jika tidak dipisahkan akan menyebabkan kontaminasi bahan baku halal . Hubungan kerja antara UMKM halal dan supplier merupakan hubungan yang saling bergantung dan saling menguntungkan sehingga hubungan yang baik akan meningkatkan kemampuan UMKM halal dan supplier dalam menghasilkan produk halal yang berkualitas dan bernilai. Selain itu, kontunuitas dalam pemenuhan bahan baku dapat berjalan dengan lancar. Hubungan kerja yang baik dengan pemasok bahan baku dapat menjadi strategi untuk pemenuhan bahan baku secara kontinu. Hal tersebut akan berdampak pada waktu proses untuk distribusi dan pemesanan bahan baku lebih efisien.

   Supply Chain Resources

   Manusia menjadi faktor penting dalam melaksanakan kebijakan halal. Maka dari itu pelatihan terhadap karyawan mengenai penerapan kebijakan dan prosedur halal harus dilakukan. Selain menjaga komitmen UMKM halal dalam menerapkan kebijakan

halal, pelatihan dapat meningkatkan keahlian karyawan. Karyawan yang terlatih akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih baik daripada karyawan yang tidak menerima pelatihan. Pelatihan juga dapat mengurangi biaya proses yang timbul karena karyawan melakukan kesalahan sehingga terjadi ketidaksesuaian produk ataupun pengulangan proses produksi.

Supply Chain Business Processes (Proses Bisnis SC)

UMKM halal tidak mengalami peningkatan profit setelah melakukan sertifikasi karena pencatatan keuangan yang kurang jelas dan Standar Operational Procedure (SOP) yang tidak jelas. Padahal dalam suatu proses bisnis pencatatan keuangan serta SOP menjadi hal yang penting. Namun pada praktiknya, masih banyak UMKM yang tidak melakukan pencatatan keuangan dan tidak memiliki SOP. Pencatatan keuangan akan memberikan informasi yang jelas mengenai alur keuangan UMKM halal sehingga kecil kemungkinan terjadi salah perhitungan. SOP akan membantu UMKM halal melakukan proses bisnis. SOP dapat mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi dan mengefisiensikan waktu proses. UMKM halal dapat menggunakan platform bisnis untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis UMKM halal. Platform bisnis tersebut terdiri dari sistem perencanaan sumberdaya perusahaan, ecommerce, serta data analisis dan virtualisasi merupakan implemantasi proses bisnis secara fungsional.

Struktur Jaringan Supply Chain

Struktur jaringan untuk stakeholder seperti pemasok, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen juga harus menjadi perhatian UMKM halal. Struktur jaringan yang baik dapat mengoptimalkan proses yang terjadi sehingga akan berdampak pada peningkatan profit yang didapat. Membangun struktur jaringan yang baik dapat membantu UMKM halal memasarkan produk. Melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti supplier,

manufaktur, distributor, dan retail dengan strategi rantai pasok yang handal akan membantu UMKM halal dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen akan berdampak pada peningkatan penjualan. Penjualan yang meningkat tentu akan berbanding lurus dengan profit yang akan didapat.

Performance Measurement

Penerapan halal supply chain model tersebut tentu akan berdampak pada performansi UMKM halal. menunjukkan beberapa manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam mengintegrasikan strategi rantai pasok, yaitu: [1] Kepuasan pelanggan [2] Meningkatkan pendapatan [3] Menurunkan biaya [4] Pemanfaatan aset semakin tinggi dan [5] Usaha bisa semakin besar.[13]

2. Ruang Lingkup Industri Halal
   a. Makanan dan minuman halal

      Peran BPJPH dalam Penguatan Regulasi

      Jalan keluar yang dapat ditempuh untuk melakukan pengembangan bisnis food dan drink yang halal adalah mengupayakan terpenuhinya kebutuhan akan regulasi. Mengingat, proses bisnis harus didukung oleh penguatan regulasi dan menjalankan fungsi koordinasi. Mulai dari regulasi pekerja, proses bisnis hingga suplay bahan dasarnya. Dalam menjamin kehalalan sebuah produk, maka terbentuknya BPJPH merupakan sesuatu yang niscaya. Lembaga ini harus mendorong peningkatan sertifikasi terhadap produk-produk yang bisa memberikan dampak besar pada produksi makanan halal. Operasionalnya BPJPH merupakan angin segar yang sangat ditunggu oleh pelaku usaha.

      Bagian terbawah dari siklus hala ini adalah berdirinya halal Center yang memiliki konsentrasi dalam percepatan sertifikasi

13 Bernadhetta Vivi Kristiana, *Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM,* Performa: Media Ilmiah Teknik Industri Vol. 19, No. 2, 2020, h. 117

produk. Pendirian LPH dan halal center ini telah banyak melibatkan stake holder guna sama-sama terlibat dalam pengembangan industri halal, khususnya makanan halal. Pendirian LPH ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki yayasan keagamaan, laboratorium, dan tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Namun demikian, jika dalam hal-hal teknis tidak dapat memenuhi persyaratan maka dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kelengkapan sarana.

b. Sistem informasi halal

Di antara problem mendasar tentang bisnis halal ini adalah banyaknya barang-barang Indonesia yang belum tersertifikasi. Hal ini sekaligus menjadi alasa lembatnya Indonesia untuk dapat menguasai menjadi negara dengan pusat industri hala terbesar di dunia. Sugguh sangat disayangkan, sebagai populasi Muslim terbesar nomer 4 dunia, Industri ini tidak dapat digarap dengan baik. Sebagai salah satu penyebabnya adalah minimnya informasi yang berhubungan dengan sertifikasi halal. Dengan ini, maka pemerintah perlu mendekatkan fasilitas tersebut kepada para pelaku usaha.

Fasilitas dan layanan ini sekaligus dapat menjadi media interaksi antara pemangku kebijakan dengan para pelaku usaha di Indonesia. Di antara fungsi media dalam konteks ini adalah: Pertama, sistem kontrol bagi para pengusaha. Kedua, Mendekatkan Pelayana kepada Masyarakat, dan Ketiga, Instrumen sosialisasi kebijakan pemerintah tentang ekonomi umat. Optimasi langkah ini akan sangat membantu para pelaku usaha dalam mengakses informasi yang harus diperoleh.

c. Trend Bisnis Halal

Hingga saat ini, peningkatan jumlah penduduk muslim di unia mencapai 24 persen. Ini setara dengan 1.8 Miliar populasi

pendidikan dunia. Layaknya gayung bersambut, trend globar yang saat ini mengarah pada upaya gaya hidup halal seakan menjadi titik temu potensi dan peluang untuk gerakan besar ini. Gaya hidup halal ini, mulai dari soal makanan hingga fashion, tidak hanya menjadi bagian dari pola hidup umat Islam tetapi telah masuk di negara yang mayoritas penduduknya bukan Islam. Dalam wawancara dengan Rachmat Hidaya, Tim KNEKS Insight memperoleh informasi bagwa industri halal ini telah banyak membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Pakar dan pengamat logistik tersebut menjelaskan bahwa ke depan, gaya hidup halal ini akan menjadi arus besar yang terus menjadi sistem bisa yang mendunia.[14]

Menurutnya, peningkatan trend industri halal dunia sudah ditangkap oleh sektor industri logistik dunia. Dimana Indonesia sendiri berkontribusi sekitar 10% dari total USD2,1 triliun nilai ekonomi halal dunia (GIER 2018/2019) . Dalam laporan KNEKS disebutkan bahwa hingga saat ini sudah ada delapan usaha dan industri yang menerpakan prinsip dan standar hala sesuai dengan syariah Islam. Menurut Rachmat bahwa teori supply chain management sektor logistik terdiri dari tiga komponen pentin, yaitu transportasi, gudang, dan distribusi. Adapun yang menjadi titik pembeda antara transportasi dengan distribusi adalah pada posisinya sebagai alat dan proses. Distrubusi merupakan proses bisnis bagian hilir sementara transportasi berhubungan dengan alat distribusi. Itulah sebabnya distribusi sangat erat dengan pemasaran. Dalam konteks pengembangan sektor ini, maka Indonesia perlu mengadopsi ini untuk kemudian dikonversi menjadi bisnis logistik halal dengan kekuatan utamanya pada mempercepat proses sertifikasi. Baik dari sisi transportasi, pergudangan hingga pemasaran.[15] Upaya inilah yang memerlukan kerjasama yang intens antara pihak swasta dengan pemerintah.

14 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Potensi Indonesia Menjadi pusat logistik Halal Dunia,* INSIGHT I Edisi Kesepuluh I Maret 2020, 11

15 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 11

Perlu ditekankan bahwa Kunci utama dari logistik halal terletak pada sertifikasi. Semua proses harus memiliki sertifikat halal. Mulai dari transportasi, pergudangan, hingga distribusinya. Salah satu contoha kasunya adalah, terdapat dua jenis makanan kemasan, yang satu memiliki sertifikasi halal yang satunya lagi tidak memiliki sertifikasi halal. Maka alam bawah sadar dan alam rasionalitas konsumen akan segara memilih produk dengan sertifikasi hala tersebut. Ini adalah contoh konkritnya.

BPJPH adalah lembaga yang secara legal diberikan tugas oleh negara untuk mengurusi dan berwenang untuk memerankan tugas ini, melalui UU tentang penyelegaraan Jaminan Halal. Di antara tugas dari BPJPH adalah mendirikan dan membentuk lembaga penjamin halal (LPH) yang secara teknis bertugas dilapangan untuk melakukan dan menyeleksi produk barang dan jasa yang memerlukan sertifikasi. Layanan ini akan semakin bagus jika semakin banyak LPH yang berdiri diseluruh Indonesia. Bahkan langkah ini akan mampu melakukan percepatan dan jemput bola untuk meningkatkan produktifitas UMKM yang sebagian besar tidak memiliki akses terhadap layanan ini.

Pada tataran implementasi, sistem ini tidak jauh beda dengan logistik konvensional. Hanya saja, distribusi logistik halal tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan atau material non-halal. Contoh kongkrit pada aspek transportasi adalah daging babi tidak boleh dicampur dengan daging ayam dalam proses pengirimannya. Begitu juga pada saat melakukan penyimpanan dan peralatan yang digunakan saat melakukan penyembelihan.

Dalam praktik di lapangan, pihak LPH dapat bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendekatkan layanan ini kepada para pelaku usaha. Misalnya terdapat dua jenis roti, yang satu memiliki bahan dasar babi yang satu berbahan dasar daging sapi. Sebagai konsumen, maka hal ini hanya dapat dibedakan berdasarkan label sertifikasi halal yang tertera dalam prpduk tersebut. Kendatipun bisnis ini memerlukan biaya tambahan dalam proses

produksinya tetapi jaminan halal yang diberikan kepada masyarakat layak untuk mendapatkan kompensasi dengan harga yang setimpal. Namun jika hal ini dilakukan dan disponsori oleh pemerintah maka akan lebih mudah menekan biaya bagi pelaku usaha. Maka langkah praktisnya adalah, dekatkan layanan sertifikasi halal dan BPOM maka UMKM dan industri hala akan meningkat pesat.

Upaya menjamin keseluruhan proses bisnis ini supaya berada dalam ekosistem halal, selaras dengan konsep halal supply chain yang dikemukakan oleh Marco Tiemen. Menurutnya, harus ada sistem yang dapat mengkonfirmasi dari hulu ke hilir bahwa prosesnya dalam bingkai halal. Dengan demikian harus ada sertifikasi pabrik halal, sertifikat halal proses produksi,sertifikat halak untuk pengakutan, begitu juga pada proses distribusi dan pergudangan. semuanya, harus ada konfirmasi, secara sistem.[16]

Hingga saat ini, potensi ini masih belum tergarap dengan baik. Sehingga masih perlu dilakukan percepatan. Namun demikian mengingat politcal wiil dari pemerintah yang masih setengah hati, akan lebih membantu jika kekuatan swasta perlu mengendalikan proses bisnis ini. Misalnya, swasta sebagai penyedia jasa transportasi halal, pesantren sebagai penyelenggara halal di bidang SDM penyelia halal, dan pemerintah di bidang pengembangan dan dukungan regulasi dan kelembagaan. Lembaga pendidikan tinggi memegang kendali dalam penyediaan laboratorium pada seluruh produk yang hendak dilakukan sertifikasi. Bahkan tenaga ahli yang memerlukan pengetahuan ilmiah, seperti ahli kimia, biologi dan molekuler, perlu disuplay dari perguruan tinggi.

d. Pengembangan Industri Halal

Dalam upaya mempercepat dan pengembangan industri logistik halal ini maka terdapat beberap sektor yang perlu dilibatkan. Yaitu:

16 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Potensi Indonesia Menjadi pusat logistik Halal Dunia, 12

1. Asosiasi Logistik Halal, komunitas ini berperan dalam melakukan kampanye tentang pentingnya dan perlunya kesadaran masyarakat dalam mengembangan logistik halal ini.
2. Pemerintah, dalam hal ini sebagai pemegang kendali dalam mengeluarkan regulasi. Mendesain logistik halal, mulai dari kebijakan tentang infrastruktur, peraturan, regulasi proses produksi hingga distribusi. Termasuk dalam konteks ini perlu diatur adalah penyedia bahan dasar dan para investornya.
3. Perguruan tinggi, dalam hal ini dapat diperankan sebagai pusat penelitian atau riset tentang logistik halal. Selain itu diperlukan juga tenaga terampil. Sehingga dapat mendongkrak pasar nasional dan internasional.
4. Instrumen teknologi, sebagai penyedia dlam konteks ini maka perlu kolabotasi tenaga IT swasta dengan dukungan pemerintah untuk mendukung dari sisi media informasi dan teknologi.
5. Penyedia Logistik halal, yaitu sekelompok orang dan atau masyarakat yang mengelola logistik halal dari sisi jasa. Dalam hal ini perlu peran pihak ke tiga.
6. Produsen, yaitu pihak yang senantiasa melakukan produksi dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan terutama dari sisi kehalalan produksinya.
7. Konsumen adalah pengguna yang memakai produk yang dihasilkan. Peran serta konsumen untuk memberikan masukan dan mendukung peningkatan daya beli dan konsumsi sangat diperlukan. Menjadi juru bicara produk-produk halal sebagai bentuk peduli terhadap produk dalam negeri yang berkualitas.

Proses pengembangan ini akan sangat membuka peluang bisnis yang luas bagi sektor lain. Mulai dari Jasa Logistik, pengembangan teknologi dan destinasi logistik halal. Selain itu, pada saatnya akan memerlukan tenaga konsultan, tempat pengelolaan dan pemeliharaan, pengadaan meterial, bahkan tenaga kasar yang berkerja disektor produksi dan distribusi akan

terus meningkat.[17] Diharapakn tidak ada kendala yang serius jika seluruh pemangku kepentingan yang telah disebutkan di atas dapat bekerjasama dengan baik. Mengingat, upaya ini harus dilakukan secara kolektif.

Selain itu, industri logistik hala ini tidak hanya berhubungan dengan sertifikasi belaka, tetapi meliptu transformasi sistem bisnis yang akan berdampak sistemik. Mulai dari menarik kembali barang yang tidak tersertifikasi halal, penutupan produksi yang tidak memenuhi standar dan penyadaran kepada masyarakat untuk dapat membantu gerakan ini demi terciptanya sebuah pola bisnis yang halal. Hal inilah diperlukan daya kendali kelangan pesantren untuk dapat mengambil bagian dari pola bisnis logistik ini. Dengan membentuk dan mempraktikkan pada kapasitas produksi yang berskala kecil dilingkungannya. Kemudia dapat melakukan ekspansi pada sektor lain secara luas dan menyeluruh.

1. Pariwisata Halal

Aspek potensial yang diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan adalah sektor pariwisata. laporan Global Muslim Travel Index menjelaskan bahwa segmen pasar para pelancong dari kalangan Muslim akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, spanding dari wisatawan muslim mencapai USD 220 Miliar, bahkan diprediksi akna mengalami peningkatan sebesar USD 80 Miliar pada tahun 2026. Dalam hitungan jiwa, pada tahun 2017 wisatawan Muslim yang melakukan kunjungan wisatanya sebanyak 131 juta, yang meningkat 20 juta jiwa dari tahun 2016 sebesar 121 juta. Bahkan seandainya tidak mengalami pandemi, pada tahun 2020, diperkirakan sampai 156 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 10 persen dari total sektor wisatawa secara keseluruhan.

a. Daya Dorong Pariwisata Halal Indonesia

Faktor internal

Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Muslim di

17 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Potensi Indonesia Menjadi pusat logistik Halal Dunia, 18

Indonesia mencapai 207.176.162 juta jiwa, hal ini setara dengan 87 persen penduduk Indonesia. Dengan sumber daya alam dan SDM tersebut maka sangat layak, Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata halal terbesar di dunia. Untuk menggarap sektor ini maka diperlukan daya dorong pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk menjadikan negeri ini sebagai negara yang ramah dan harmoni.

Di antara faktor internal lainnya adalah faktor geografis. Bentuk Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulai di Indonesia lebih dari 17.508 pulau (Kementerian Perdagangan, 2018). Pada wilayah pinggiran pantai, atau Wilayah pesisir, baik di bagian utara maupun di bagian selatan, Indonesia dikenal sebagai wilayah yang sangat eksotis. Dengan beragam kebudayaan dan potensi lainnya, maka optimisme untuk menjadi destinasi wisata halal akan mudah menjadi kenyataan. Namun demikian, diperlukan upaya ekstra untuk dapat mempertahankan dan membentengi budaya serta tradisi bangsa yang rentan tergerus oleh akulturasi budaya baru.

Faktor eksternal

Menurut laporan dari GMTI pada tahun 2018, dijelaskan bahwa Indoensia dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi dan tujuan untuk berwisata karena beberapa faktor:[18]

1. Pengakuan dari Global Muslim Travel Index (GMTI) yang menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dari sepuluh negara OIC dengan kategori destinasi wisata paling ramah di dunia.
2. Pengakuan dari World Halal Tourism Awards pada tahun 2016 yang menempatkan Indonesia pada nominasi negara sebagai inisiator pariwisata hala di dunia yang diukur dari 16 kategori. Dalam konteks ini, Indonesia mengantongi 12 kategori yang dipersyaratkan.
3. Jumlah kunjungan wisatawan yang selama kurang lebih 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat positif. Hal ini kemudian yang membuat sektor wisata ini senantiasa menjadi sumber devisa bagi negara.

18 BAPPENAS, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2018-2024, 74

2. Fesyen Muslim

Halal merupakan istilah yang secara khusus digunakan dalam ajaran Islam yang artinya diizinkan atau sah. Saat ini konsep tentang halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman semata, akan tetapi menjadi sesuatu yang sifatnya luas seperti aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara memperoleh rezeki dan sebagainya serta menyatu pada berbagai lini kehidupan manusia khususnya umat muslim. Pemerintah melalui lembaga sertifikasi halal membantu masyarakat untuk dapat memperoleh produk-produk halal yang juga dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait jaminan produk halal.

Pada dasarnya gaya hidup halal berjalan sesuai dengan syariah menyangkut semua aspek kehidupan. Meningkatnya populasi Muslim global telah meninggalkan pengaruh kebutuhan dan tuntutan halal. Gaya hidup halal dapat dilakukan dengan mengamalkan konsep 3 HM, yaitu halal memperoleh, halal mengkonsumsi dan halal memanfaatkan.[19] Dengan kata lain, gaya hidup halal bisa dilakukan oleh setiap individu dengan memastikan kehalalannya mulai dari bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi barang. penjualan retail, hingga produk siap dikonsumsi.

Dengan meningkatnya jumlah permintaan Produk halal oleh komunitas Muslim di seluruh dunia akan berdampak signifikan padaindustri halal Pelanggan bersedia membayar lebih untuk mendapatkan produk halal karena memang demikian percaya diri dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan produk yang bersih, aman dan berkualitas. Selain itu,memperjuangkan halal juga secara tidak langsung akan menjaga enam nilai dasar dalam Islam yaitu hidup, kehormatandan martabat, kecerdasan, garis keturunan dan properti. Beberapa tahun belakangan ini halal *liifestyle* menjadi suatu ”trend” pula di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat akan produk halal. Salah satu faktor yang mendukung

19 Arna Asna Annisa, Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, tahun 2019, 1-8.

adalah mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim serta munculnya beberapa *influncer* muda yang menerapkan *halal lifestyle* dalam kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan generasi milenial di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan gaya hidup halal.

3. Media dan Rekreasi halal

Dalam laporan *State of the Global Islamic Economy Report tahun* 2018/19 disebutkan bahwa terdapat sejumlah uang yang sangat banyak untuk digunakan dalam rang menopang proses publikasi dan dokumentasi di sektor media. Angka tersebut mencapai USD 209 miliar pada tahun 2017. Di tahun 2023 Muslim diperkirakan akan spanding hingga angka USD 288 Miliar pada sektor yang sama. Dalam laporannya juga disebutkan bahwa uang sebanyak itu sebagian besar berasal dari umat Islam yang berasal dari negara-negara maju, seperti Amerika, Jember, Mesir, Iran, Turki dan Prancis.

Masih dalam laporan yang sama, sebagai Negara dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia tidak berada pada peringkat ke sepuluh yang dari lima belas negara yang menyediakan jasa bisnis halal dunia. Namun demikian, Indonesia hanya berada pada peringkat ke 6 dalam membiayai konsumsi pada sektor media. Angka ini diperkirakan setaa dengan USD 8.8 Triliun rupiah.

Dalam konteks menurunkan angka pengangguran, pada sektor industri digital, salah satu yang memberikan konstribusi besar dalam menyumbang angka ini adalah penyedia apolkasi digital. Munculnya beberapa aplikasi start up semakian mendongkrak sektor digital ini ke dalam pertumbuhan ekonomi yang masif di seluruh Indonesia. Mengingat, berkembangnya sektor ini banyak menarik minat para investor untuk melakukan pembiayaan yang sangat besar. kondisi ini juga tidak bisa dipisahkan dari semakin tingginya angka masyarakat dalam menggunakan smartphone sebagai media game. Dalam laporan super daya dijelaskan bahwa masyarakat kita bermain game rata-rata 3 kali dalam sehati. Dimana, hampir setiap para pengguna aplikasi game menggunakan handphone nya untuk bermain sekitar 10 menit per

akun. Pertumbuhan ini juga didukung oleh sektor lain yang memberikan konstribusi besar adalah pada sektor penerbitan, percetakan baik pada media koran mapun majalah. Data dari BPS dan badan ekonomi kreatif menjelaskan bahwa sektor ini memberikan nilai tambah pada keterserapan tenaga kerja dan bisnis internasional. Sektor penerbitan ini memberikan kontribusi besar terhadap PDB dengan angka yang diperkirakan sebesar Rp. 53 triliun pada tahun 2015.

Media serta rekresi halal berkontribusi besar terhadap total ekonomi yang jika dilihat dari saluran distribusi dalam zona media serta traveling. Pengaruh langsung berkaitan dengan kegiatan industri film yang berkaitan dengan penciptaan media serta sarana tamasya. Pengaruh secara tidak langsung terhadap zona lain berkaitan erat dengan proses pembuatan ataupun penciptaan industri media serta kenaikan infrastruktur tamasya. Pengaruh pemasukan ataupun pemasukan industri media serta tamasya, baik langsung serta tidak langsung, hendak pengaruhi induksi yang berkaitan erat dengan zona lain, misal: food dan fashion.

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis media dan traveling ini masih belum dapat memengaruhi segmen pasar media halal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kecilnya angka para penonton filem yang bernuansa keagamaan. Para penonton keagamaan ini berada pada angka 3.5 juta. Hal ini berbanding terbalik dengan para penonton film seperti Warkop DKI, Susana yang berada di angka 6.8 juta penonton.[20]

Harus diakui bahwa bisnis media dan jasa traveling ini senantiasa mengalami peningkatan dan trend yang positif. Namun demikian, orientasi wisata ini perlu didorong dengan penguatan literasi halal. Mengingat, ini akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana besar Indonesia dalam membenahi sektor wisata. Kedepan, masyarakat akan lebih memilih model dan jenis rekreasi halal. Pada industri perfilman misalnya, 4.7 juta orang menonton film laskar pelangi, 4,5 juta orang menonton film Habibi dan Ainun, 3,5 juta orang gandrung Ayat-ayat Cinta, dan 2,1 orang menonton Ketika cinta bertasbih. Data ini sangat berbading terbalik dengan mayoritas

20 BAPPENAS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2018-2024,* 106

penduduk Indonesia adalah umat Islam. Program tv kurang menunjang pertumbuhan media serta tamasya halal. Banyak program serta kegiatan tv yang jauh dari nilai Islam. Dari sisi supplier, rumah pembuatan film mulai berlomba- lomba meningkatkan produktivitasnya dan menggarap film bernuansa Islami yang bermutu dari segi cerita yang inspiratif..[21]

Sebaliknya penyedia aplikasi serta permainan mempertontonkan konten-konten yang mempermudah orang menekuni nilai Islam semacam Quranic yang menunjukkan ayat- ayat Alquran serta terjemahannya yang diintegrasikan dengan industri musik dan memakai bahasa isyarat. Bermunculan pula dakwah lewat media sosial semacam Youtube, Facebook, Instagram serta Twitter. Sebaliknya dari sisi demand, warga mulai hirau buat membetulkan diri serta banyak yang belajar nilai- nilai Islam lewat media serta tamasya halal ini.

Besarnya potensi media dan rekreasi halal ini akan menjadi bagian dari jenis usaha dan pergerakan ekonomi pesantren. Dalam konteks ini, maka besar kemungkinan jika pesantren memiliki konsentrasi pada potensi ini akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi masayrakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gambar: 4.4
Daya Pengaruh Media halal pad Ekonomi

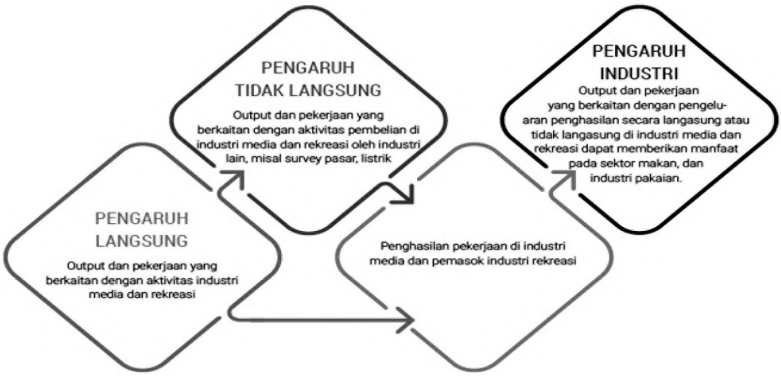

Sumber: Oxfordeconomic, 2015

21 BAPPENAS, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2018-2024, 107

Dari aspek dakwah, maka terjunnya pesantren dalam domain ini akan mempersempit ruang gerak industri media yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain sebagai instrumen ekonomi syariah, basis industri media akan menciptakan kompetisi dalam menyuguhkan pilihan media yang berimbang terhadap masyarakat. Langkah ini sebagai manefestasi riil bahwa pesantren tidak apatis terhadap perkembangan zaman dan dakwa mellinial melalui media.

4. Farmasi dan kosmetik halal

Potensi Industri Farmasi dan Kosmetik

Farmasi dan kosmetik telah masuk pada daftar sektor industri andalan Kementerian Perindustrian. Dari tahun 2013 sampai 2017 pangsa pasar produk farmasi di Indonesia mengalami kenaikan. Namun, performa penjualannya menurun.

Laporan dari *Euromonitor Consumer Health* in Indonesia Country Report pada tahun 2017 menunjuukan bahwa segmen pasar obat dan farmasi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp. 55, 874, 9 Miliar. Terutama pada jenis vitamin, anagesik dan produk suplemen. Tidak ketinggalan juga terjadi pada produk herbal. Vitamin hampir memberikan kontribusi lebih dari separuh produk kesehatan dalam kurun waktu dari 2017. Besarnya konsumsi ini disebabkan pada tiga hal: yaitu kondisi cuaca yang kadang tidak menentu, hal ini disebabkan oleh dampak pemanasan global. Selain itu, peningkatan konsumsi suplemen ini juga disebabkan oleh intensitas kerja para buruh dan karyawan yang seringkali bekerja lember. Dengan ini, mereka membutuhkan daya tahan tubuh yang bisa disuplay melalui vitamin dan suplemen.[22]

Hingga saat ini, bisnis farmasi dan kosmetik ini termasuk bagian dari indusri yang masih menjadi andalan pemerintah, khususnya kemeneterian perindustrian. Bahkan, industri ini telah masuk dalam rencana induk pembangunan industri Nasional. Data dari GMP platform menunjukkan bahwa pasar farmasi dan kosmetik di

22 BAPPENAS, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2018-2024, 129

Indonesia ini tumbuh di angka 20.6 persen dalam setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam data CAGR pada tahun 2011-2916. Hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap aspek kesehatan.

Gambar: 4.5

Ekosistem Peluang dan Tantangan Industri Farmasi dan Kosmetik

Aspek	*Peluang*	*Tantangan*
Permintaan dan pasar	1. Pertumbuhan jumlah umat Muslim Indonesia dan dunia 2. Target pasar di Indonesia sangat besar, dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah 7-8% per tahun sehingga daya beli pun meningkat 3. Meningkatnya tren konsumsi produk kecantikan	1. Produk mulitinasional yang mulai menggarap sektor kosmetik halal 2. Akses ke pasar internasional masih kecil 3. Kurangnya riset mengenai pergerakan pasar, segmentasi dan selera pasar 4. Kosmetik palsu yang beredar di pasaran 5. Tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor
Teknologi dan informasi	1. Perkembangan teknologi yang pesat 2. Bekembangnya e-commerce dan media	1. Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah
Regulasi	1. Dukungan pemerintah terhadap industri halal secara umum melalui UU no 33 tahun 2014 2. Terdapat strategi dan kebijakan pemerintah terkait dengan farmasi dan kosmetik halal yang diusung kementerian dan lembaga terkait	1. Kebijakan antar kementerian dan lembaga pemerintah masih belum selaras. 2. belum adanya panduan dan ketentuan untuk infrastruktur yang dapat menunjang produksi farmai halal.
Kerjasama dengan sektor lain	1. Peluang co-branding dengan sektor pariwisata halal 2. Peluang co-marketing dengan sektor media dan rekreasi	1. Asymmetric information antar sektor 2. Birokrasi kerja sama antarsektor
Pembiayaan	1. Semakin banyak platform alternatif pembiayaan 2. Peluang kolaborasi dengan lembaga perbankan dan keuangan syariah 3. Semakin banyaknya skema pembiayaan yang ramah IKM (KUR, LPEI, Ventura)	1. Lembaga pembiayaan masih membutuhkan jaminan yang tangible, seperti: ijazah, sertifikat, dan terutama business plan, yang kebanyakan belum bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha
R&D	1. Kerja sama riset dengan badan penelitian, universitas dan perusahaan	1. Kurangnya riset serta tindak lanjut mengenai uji bahan kosmetik dan farmasi halal 2. Ketersediaan database industri farmasi dan kosmetik halal terbatas

Halal Value Chain merupakan proses produksi yang mengharuskan kepada produsen untuk memberikan nilai tambah pad produk yang dihasilkan. Namun demikian konsep ini juga menekankan pada

adanya nilai tambah pada sisi proses produksinya. Melalui Halal Value Chain ini, semua sistem bisnis harus memberikan garansi atas proses produksnya mulai dari hulu hingga hilir bahwa telah menjalankan proses secara benar dan halal. Tolok ukur utamanya adalah harus mampu menselaraskan diri dengan hal-hal yang telah diatur oleh syariah Islam, baik yang dilarang maupun yang dianjurkan. Seperti kesucian barang, tidak mengandung zat berbahaya dan seterusnya.

Gambar: 4.6
Halal Value Chain Industri Farmasi dan Kosmetik

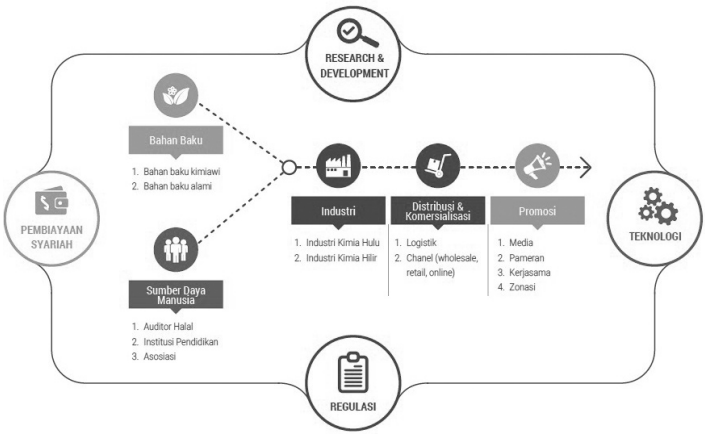

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah

5. Energi Terbarukan

   a. Menuju Swasembada Energi Terbarukan

      Dalam rangka keluar dari dominasi energi fosil, maka diperlukan dukungan masyarakat, termasuk pesantren untuk mensukseskan upaya pemerintah dalam mengembangkan energi yang ramah lingkungan. Termasuk dalam konteks ini adalah kesadaran masyarakat untuk senantiasa terlibat aktif dalam mengurangi penggunaan energi fosil. Mengingat, kurang lebih 94 persen masyarakat kita masuk memiliki kebergantungan terhadap energi fosil. Bahkan pemerintah telah banyak mengeluarkan subsidi untuk kebutuhan konsumsi domestik fosil. Namun demikian tidak

kalah pentingnya adalah keinginan kuat dari pemerintah untuk segera mengurangi energi yang merusak lingkungan tersebut.

Di antara yang memungkinkan untuk dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan kampanye anergi terbarukan. Serta menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaat dan kegunaan energi terbarukan. Dengan ini maka kedepan, generasi kita yang saat ini masih berada pada generasi muda, akan memiliki pemahaman yang cukup untuk menerima kehadiran energi terbarukan. Selain itu, kesukses dalam mengembangkan dan menggunakan energi terbarukan ini akan membuat negara menjadi memiliki ketahanan energi.

Direktorat Jenderal Energi baru dan terbarukan yang berada di bawah nanungan kementerian ESDM telah banyak dan sering melakukan sosialisasi terhadap penggunaan dan konservasi energi terbarukan. Melalui motto "Potong 10 persen" kementerian ESDM memulai gerakan ini di salah satu sekolah dasar di Bali pada tahun 2015 silam. Karena audiens dari acara ini adalah anak-anak yang berada di sekolah dasar, maka acaranya dikemas dalam bentuk lomba dan hiburan dengan mengusung tema konservasi energi. Sosialisasi terhadap anak sangat penting mengingat, mereka adalah generasi penerus yang kelak akan mewarnai dan memakai energi terbarukan. Dalam skala yang lebih besar, kampanye ini harus terus dilakukan diberbagai sektor dan kalangan.

b. Akses Pembiayaan untuk Energi Terbarukan

Besarnya dominasi energi klasik ini juga berdampak pada sektor pembiayaan dan investasi. Tidak banyak dari kalangan investor yang bisa mensupport mengembangan energi ini, terutama dalam pemebangunan proyek-proyek dalam skala besar. Namun demikian, kondisi Indonesia yang memiliki sumber daya yang melimpah ini dapat menjadi nilai tawar bagi terwujudnya mega project pada sektor ini. Rendahnya minat para investor terhadap sektor ini disebabkan oleh dua hal,

pertama adalah persepsi masyarakat terhadap energi terbarukan masih dianggap sebagai bisnis yang kurang menjanjikan. Kedua, besarnya investasi para investor pada energi fosil masih belum dapat mengembalikan sebagian besar modal produksnya. Dengan demikian maka diperlukan kerjasama antara pemegang kebijakan dan otoritas masyarakat diberbagai lapisan untuk dapat mendorong upaya ini secara masif.

Selain dalam konteks membangun kesadaran dan *membentuk polical will*, maka diperlukan sinergi pembiayaan dengan lembaga keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah ini dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk kepentingan umat. Mulai dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dari sektor perbankan syariah misalnya, ada BMT, BSI hingga pasar modal syariah. Hal ini juga sangat relevan jika dihubungkan dengan upaya pemerintah dalam mendorong *National Halal Fund*. Yaitu sektor pembiayaan halal nasional. Namun tugas dari pemerintah adalah membuat regulasi dan skema pembiayaan yang saling menguntungkan bai kedua belah pihak.

c. Riset dan Publikasi Energi Terbarukan

Riset serta inovasi sangat dibutuhkan dalam sektor energi terbarukan. Sumber energi dapat berasal dari berbagai macam. Sebagai contoh sudah ada pembangkit listrik yang berasal dari sampah dan kotoran hewan di Amerika Serikat. Hal ini sangatlah bermanfaat di satu sisi untuk mengurangi sampah dan kotoran dan menggunakanya sebagai sumber energi.

Di Indonesia juga sudah ada beberapa penelitian mengenai sumber energi terbarukan dari cangkang kakao. Selain dari penelitian mengenai energi terbarukan itu sendiri, dibutuhkan juga riset mengenai potensi kolaborasi antara sektor energi terbarukan dengan sektor lain. Sebagai contoh, berbagai negara Eropa seperti di Jerman dan Inggris telah mengintegrasikan sektor energi terbarukan yang lebih dikenal sebagai green tourism. Jerman melalui program Energiewende (meski ada yang keberatan dengan program tersebut) dan Inggris

melalui Gladwinsfarm nya, menambahkan fungsi dari sumber energi terbarukan tersebut sehingga meningkatkan kontribusi ekonomi.

Sebagai pilot projectnya, maka sangat mungkin untuk membuat skema realisasi dengan cara mensupport pembiayaan pada sektor energi terbarukan dari sumber keuangan syariah. Dengan kompensasi utama adalah pada pemanfaatan sumber energi pda sektor industri halal. Dengan ini maka akan menjadi klaster halal yang sangat praktis. Kendatipun tidak menutut kemungkinan untuk dapat bekerjasama dengan sektor lain yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Menggarap energi terbarukan ini sejatinya dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Dengan itu maka kerja terdekat yang memungkinkan adalah menyiapkan sumber daya manusia, penguatan regulasi, inovasi teknologi dan jaringan kerjasama antar negara dan stake holder lain dari kalangan masyarakt dan swasta.

Gambar 4.7
Value Chain Energi Terbarukan

Value Chain	*Produk*	*Pendukung*
Input (Pendanaan/ funding)	1. Dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito berjangka) 2. Pembiayaan yang diterima	1. Nasabah perorangan 2. Nasabah UMKM 3. Nasabah lembaga keuangan lainnya 4. Nasabah komersial dan korporasi 5. APBN 6. BI, OJK, Kemenkeu, LPS, DSN-MUI, Kemenag, Bapepam LK
Proses	1. Instrumen likuiditas 2. Interbank call money market 3. Hedging 4. Otomasi proses 5. SDI 6. IT system dan Digital banking	1. BI 2. OJK 3. LPS 4. Ekonomi digital
Pembiayaan/ financing)	1. Akad jual beli: murabahah, salam, dan istisna 2. Bagi hasil: mudharabah dan musyarakah 3. Sewa: ijarah dan ijarah muntahiya bi tamlik	1. Nasabah perorangan 2. Nasabah UMKM 3. Nasabah lembaga keuangan lainnya 4. Nasabah komersial dan korporasi 5. APBN 6. BI, OJK, Kemenkeu, LPS, DSN-MUI, Kemenag, Bapepam LK

d. Desain Ekosistem Halal di Pesantren

Dengan keseluruhan sumber daya, potensi dan peluang yang dimiliki oleh pondok pesantren, maka sebuah keniscayaan bagi pesantren untuk dapat melakukan akselerasi dalam pengembangan dan ekstensi kawasan ekonominya pada sektor-sektor industri. Baik yang berhubungan dengan manufaktur, lifestyle, foods, energi, pariwisata dan bisnis jasa lainnya. Namun demikian, upaya ini juga harus didukung oleh beberapa instrumen atau subsistem berikut ini:

e. Daya Dukung External

Bahwa setiap proses dan upaya pengembangan bisnis tidak mungkin dapat dijalankan tanpa keterlibatan pihak lain. Termasuk yang berhubungan dengan pemerintah, korporasi dan individu-individu yang berkompeten lainnya. Maka dalam konteks ini, diperlukan daya dukung dari luar pesantren yang dapat mempercepat proses pengembangan ekonomi tersebut. Daya dukung tersebut berupa: [1] Regulsasi percepat ekonomi pesantren, [2] Akses Pembiayaan dari pihak ketiga, [3] Support tekonologi modern, dan [4] Akses pasar.

f. Daya Dukung Internal

Sementara itu pada internal pondok pesantren, harus disiapkan sumber daya manusia yang kompetensi, maka dalam konteks ini harus dilakukan capacity building, tata kelola kelembagaan, penataan administrasi, saran prasana bisnis dan leadership. Komponen ini harus mampun dioptimalisasi dengan cara memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pengelola proses bisnis dengan baik dan terukur.

g. Bisnis Proses

Proses bisnis strandar yang harus menjadi pola utama dalam ekosistem bisnis pesantren untuk dapat menggarap berbagai

sektor usaha adalah: [1] Input, hal ini meliptui bahan dasar, baik berhubungan dengan produksi barang ataupun jasa, [2] Proses, hal ini berkaitan dengan model produksi, kapasitas produksi, SDM dan standar operasional prosedur, dan [3] Akses Pemasaran, hal ini meliputi pendekatan, strategi dan media marketing yang harus dijalankan. Keseluruhan proses binis dari ekonistem ini dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 4.8
Ekosistem Halal di Pondok Pesantren

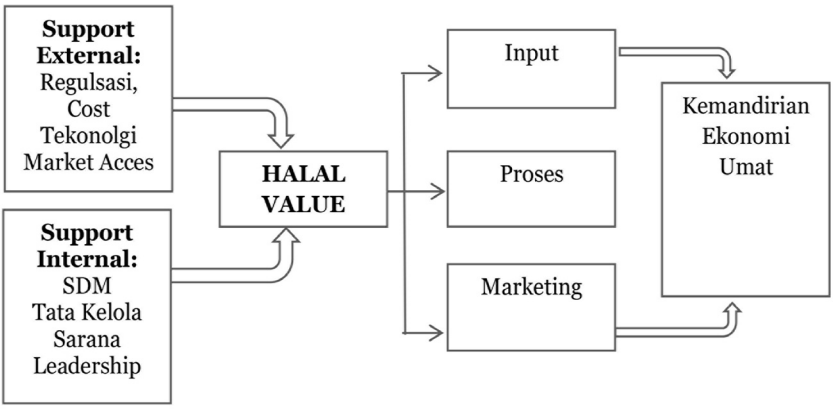

BAB V

OPTIMASI KELEMBAGAAN EKONOMI PESANTREN

A. Peningkatan tata kelola organisasi dan tata laksana usaha Pesantren

Konsep Tata Kelola usaha Pesantren

Ketatausahaan merupakan sub sistem sebuah organisasi, dalam hal ini termasuk organisasi seperti pesantren. Kegiatan utamanya adalah mengurus segala bentuk administrasi, mulai dari surat mennyurat sampai dengan investasi barang. Bila dilihat dari pengertian di atas, maka tata usaha tidak hanya menyangkut kegiatan surat-menyurat saja tetapi juga menyangkut semua bahan keterangan dan informasi yang berwujud warkat.

Ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah sub sistem yang lain seperti bagian kesiswaan, administrasi personel, dan bisnis pesantren lainnya. Dalam hal ini ada istilah yang

disebut dengan mekanisme bantu artinya kegiatan ketatausahaan pesantren dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan (kiai) dalam mengambil keputusan, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses administrasi, dengan data yang diperlukan. Apabila manajemen ketatausahaan berjalan dengan baik maka kegiatan yang menyangkut pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik pula.Dari situlah, diperlukan staf tata usaha yang profesional dan kompeten di bidangnya.

Manajemen ketatausahaan yang teratur dan tertib merupakan alat informasi dan referensi dasar yang sistematik yang metodenya dapat membantu pesantren untuk memperlancar kegiatan.Namun, sampai sekarang masih banyak orang yang menganggap remeh pekerjaan bidang ketatausahaan yang merupakan pekerjaan sambilan dan sebagainya, sehingga merugikan lembaga itu sendiri.

Definisi Manajemen Ketatausahaan

Ketatausahaan pesantren adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan organisasi kerja yang dilakukan oleh lembaga pesantren secara sistematis dan teratur untuk mencapai suatu tujuan kelembagaan. Artinya, menejeman ketatausah mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dengan adanya tata usaha dalam pesantren, dapat memberikan kemudahan untuk mengetahui efektifitas pelayanan di pesantren tersebut, karena semua aktivitas pesantren di petakan ke dalam buku, seperti: buku induk, buku presensi, buku agendan, buku tamu, buku keuangan dan buku-buku yang lain berkaitan dengan administrasi pesantren.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa tata usaha adalah sebuah rangkaian kegiatan pengelolaan organisasi kerja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tugas melayani, membantu, dan memenuhi atau menyediakan segala kebutuhan dalam sekolah secara sistematis dan teratur untuk mencapai suatu tujuan kelembagaan.

Tugas dan Fungsi Tata Usaha di Pesantren

Pembukuan termasuk salah satu jenis pekerjaan tata usaha yang sangat penting.Banyak sekali pembukuan-pembukuan yang harus dilakukan di pesantren yang melibatkan ustadz atau ustadzah.Baik ustadz dan ustadzah diharapkan mampu melakukan ini tersebut dengan baik, mengingat hal yang harus dibukukan berkaitan dengan administrasi dari pesarta didik (santri). Terdapat beberapa peran dan tugas tata usaha dalam pesantren, antara lain:

1. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari pesantren.
2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat.
3. Membantu kelancaran perkembangan pesantren sebagai suatu keseluruhan.[1]

Selaras dengan penjelasan di atas, Ary Gunawan juga menjelaskan bahwa fungsi tata usaha yang dapat dijalankan oleh pesantren dalam menjalankan fungsu tata kelola adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan-kegiatan yang strategis.
2. Mengusahakan pelaksanaannya secara sungguh sungguh dengan cara-cara yang terarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang disertai pembinaan demi peningkatan pendidikan.
3. Memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar-mengajar.[2]

Langkah-langkah Tata Usaha Pesantren

Dalam ketatausahaan pesantren sangat memerlukan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan tata usaha pesantren dalam pesantren tersebut.Hal tersebut harus dilakukan oleh pengelola tata usaha yang dijalankan tersebut berjalan dengan teratur.

1 Ma'mur Asmani Jamal, *Administrasi Pendidikan* (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hlm. 59.

2 Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah, Administrasi PendidikanMikro* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 3.

Selain itu, pelakasanaan tata usaha harus mempertimbangkan hal-hal yang telah direncanakan, mencakup kegiatan-kegiatan yang secara khusus difokuskan kepada pengelolaan tata usaha pesantren tersebut. terdapatbeberapa langkah dalam menerapkan tata usaha dalam pesantren, antara lain:

1. Perencanaan tata usaha

Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks ketatausahaan, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan, penggunaan media, penggunaan pendekatan atau metode. Pada dasarnya bila suatu kegiatan direncanakan terlebih dahulu maka dari kegiatan tersebut akan lebih terarah dan lebih berhasil. Itulah sebaiknya seorang tenaga ketatausahaan harus memiliki kemampuan dalam merencanakan program dan membuat persiapan yang hendak diberikan.

Begitu pula dalam dunia pesantren, pengelolaan tatausaha hendaknya direncanakan secara matang.Perencanaan tatausaha di pesantren dapat dilakukan dengan meidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pendidikan, membuat program yang menunjang tercapainya pendidikan yang efektif dan efisien dan lain sebagainya.Hal itu penting dilakukan agar sistem administrasi yang ada di pesantren berjalan efektif.

2. Pelaksanaan tata usaha

Pelaksanaan tatausaha merupakan proses berlangsungnya kegiatan pelayanan, membantu dan memenuhi atau menyediakan segala kebutuhan penunjang di sekolah. Jadi pengelolaan ke-tata usahaan adalah proses interaksi antara petugas ketatausahaan dengan pelanggan pendidikan, yaitu murid/siswa dalam rangka memberikan pelayanan kepada siswa demi tercapainya tujuan.

Dalam fungsi ini memuat kegiatan pengorganisasian dan kepemimpinan tata usaha yang melibatkan penentuan berbagai

kegiatan, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang harus dilakukan setiap petugas administratif sekolah dalam proses pelayanan jasa kepada pelanggan pendidikan.

3. Evaluasi tata usaha

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dirasakan oleh siswa dari hal-hal yang telah diberikan oleh petugas ketatausahaan.[3] Evaluasi penting dilakukan agar mendapatkan tolak uukur pencapaian petugas tata usaha dan sebagai umpan balik pula baginya agar hal-hal apa saja yang perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik bagi semua masyarakat pesantren.

Untuk dapat menentukan tercapai dan tidaknya tujuan pelayanan pendidikan perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil pelayanan.Penilaian hasil pelayanan bertujuan untuk melihat kemajuan pelayanan dalam hal meningkatkan mutu pelayanan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Karakteristik Pelayanan Tata Usaha Pesantren

Ketatausahaan pesantren seperti yang disebutkan sebelumnya sebagai *paper work,* mengingat kegiatan ketatausahaan yang identik dengan kertas, baik dari pembeukuan, surat menyurat dan pengaturan arsip yang dilaksanakan secara terus-menerus. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan dalam pesantren dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, dalam kegiatan ketatausahaan memerlukan ketelitian, kecermatan dan ketelatenan agar mencapai efektifas dalam tugas tersebut dengan karakteristik dalampendidikan pesantren. Adapun karakteristik pelayanan yang efektif yang diberikan oleh bagian tata usaha di pesantren, diantaranya:[4]

1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan

3 Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) hlm. 156.

4 Normann, *Service Management* (England: Wiley & Son, 1991), hlm. 31.

sifatnya dengan barang jadi.

2. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.
3. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar pemberian pelayanan terbaik. Pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Tujuan pemberian pelayanan tidak lain adalah untuk mempermudah jalannya sistem yang berjalan di pesantren karena memang itulah tujuan dari tata usaha. Oleh karena itu, palayanan hendaknya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan dalan hal ini santri dan guru-guru, jangan sampai dengan adanya tata usaha dalam lembaga justru dapat mempersulit dan mengkekang ruang gerak santri dan para guru.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Bisnis Pesantren

Pesantren memang dipandang perlu memiliki suatu usaha atau bisnis.Usaha atau bisnis yang dimiliki tidak hanya bertujuan untuk eksistensi pesantren itu sendiri namun juga dalam rangaka aktualisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.Tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat akar rumput.oleh sebab itu, pesantren memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu perekonomian masyarakat yang salah satunya melalui pembentukan usaha/bisnis pesantren.

Sebagai lembaga yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pondok pesantren perlu melakukan adaptasi dan akselerasi terlebih dalam menghadapi digitalisasi yang tidak dapat dihindari. Dalam membentuk suatua usaha, pesantren harus memiliki perencanaan yang cukup matang agar tuajuan pemberdayaa ekonomi yang menjadi goal dapat tercapai. Saat ini, ada 31.385 pondok pesantren

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah santri 4,29 juta orang dan dari jumlah tersebut 44, 6 persennya memiliki potensi ekonomi.[5]

Manajemen usaha pesanten harus dikelola dengan baik sehingga tercipta *Good Pesantren Governance*. Menurut Budisetyowati, *Governance* dapat berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. *Governance* juga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, seperti: *corporate governance, international governance, national governance dan local governance*.[6]Dan penerapan *governance* usaha pesantren termasu dalam kategori *local governance*.Adapun prinsip yang terkandung dalam *good governance* yaitu prinsip tranparansi (transparancy), prinsip akuntabilitas (accountability), prinsip responsilitas (responsibility), prinsip indedepensi (independency) dan prinsip keadilan (fairness).[7]

1. *Transparancy*. Prinsip yang terkait keterbukaan, yaitu yang menyangkut informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan pesantren. Hal yang ingin dikaji adalah bagaimana pesantren dapat menjalankan prinsip keterbukaan melalui indikator informasi dan indikator kebijakan.
2. *Accountability*. Pada prinsip akuntabilitas digunakan dua indikator, yaitu struktur pesantren dan sistem pesantren. Dengan diterapkannya proses akuntabilitas maka usaha pesantren yang dikelola dapat berjalan secara benar, terukur dan tetap dapat mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder maupun kepentingan pondok pesantren sendiri.
3. *Responsibility*. Prinsip responsibilitas yang digunakan sebagai indikator ada dua, yaitu indikator tanggungjawab pesantren terhadap masyarakat dan lingkungannya atau yang biasa disebut

5 https://bisnis.tempo.co/

6 Budisetyowati, D. A. (2017).Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. SOCIAL JUSTITIA, I(1), 161–168.

7 Budisetyowati, D. A. (2017). Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik, h. 162

dengan istilah corporate social responbility (CSR) dan kepatuhan terhadap peraturan (*compliance*) yang berlaku.

4. *Independency*. Prinsip independensi yang diterapkan oleh pesantren dapat tercermin dari masing-masing organ dalam organisasi usaha pesantren tidak saling mendominasi maupun tidak terdapat intervensi dari pihak luar. Hal ini dimaksudkan supaya manajemen usaha pesantren bebas dari pengaruh baik dari pihak internal maupun eksternal.
5. *Fairness*. Menurut prinsip ini pondok pesantren ketika melaksanakan aktifitasnya harus memperhatikan kepentingan seluruh komponan yang terlibat/steakholders baik pimpinan, karyawan, santri, dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Good Corporate Gevernance biasanya hanya dikaitkan dengan manajemen perusahaan saja, namun pada prinsipnya *Good Governance* dapat diterapkan dalam bebagai organisasi baik komersial mupun nirlaba termasuk organisasi bisnis pesantren karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Gevernance* dapat membawa sebuah organisasi untuk bersinergi mencapai tujuannya. Dengan penerapan *Good Gevernance*, bisnis pesantren diharapkan mampu meningkatkan trust steakholder bisnis pesantren serta masyarakat.

Sebelum menerapkan *Good Governance* pada organisasi bisnis pesantren, syarat pertama yang harus terpenuhi dalam pembentukan struktur organisasi usaha pesantren adalah penataan entitas organisasi usaha pesantren harus terpisah dari entitas keluarga pesantren. Artinya, aset usaha pesantren harus dibedakan dari aset yang dimiliki oleh keluarga pesantren.Pemisahan tersebut untuk kepentingan pertanggung jawaban (pelaporan).

Dengan tata kelola organisasi usaha pesantren yang baik dapat menjadi langkah pertama dalam mengembangkan ekonomi pesantren sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab, pesantren sebagai institusi pendidkan agama idealnya juga menerapkan sistem ekonomi islam dalam kegiatan usahanya. Pesantren

menjadi salah satu entitas penting dalam membangun system ekonomi islam melalui edukasi maupun aplikasi langsung dalam usaha pesantren. Peran pesantren dalam pengembangan ekonomi islam di Indonseia sangat besar oleh sebab itu perlu strategi yang tepat dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Dalam konteks dan skala yang lebih teknis, maka terdapat beberapa nilai-nilai tata kelola usaha yang harus dikembangkan, yaitu:

1. Kemitraan berbasis kepercayaan (Partnership With Trust), di antara aset bisnis yang harus senantiasa di lestarikan dan dikembangkan adalah kepercayaan. Jika sudah memiliki kepercayaan, kerjasama tidak hanya tentang materi dan untung rugi semata, melainkan tentang personality dan trust.
2. Integritas tim kerja (Integrity and Teamwork), Moralitas memang cenderung abstrak, tetapi pengaruhnya terhadap kualitas pekerjaan akan sangat nampak. Oleh sebab itulah, maka tata kelola organisasi bisnis yang baik harus dapat berorientasi pada kemampuan membangun kerjasama dengan penuh kepercayaan dan integritas.
3. Keahlian berinovasi (Skilled and Innovative) , ini bagian dari kepekaan, atau hard skill. Inovasi tidak hanya berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu secara praktis, tetapi berhubungan dengan kepekaan dalam memanfaatkan setiap momen untuk dapat dimanfaatkan secara baik.
4. Kualitas untuk kepuasan pelanggan (Quality for Customer Satisfaction), orientasi terbesar dalam bisnis adalah kepuasan pelanggan. Maka tata kelola organisasi bisnis yang baik harus mampu menjembatani terciptanya pola komunikasi yang baik antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, maka kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kualitas produk dan kualitas layanan.
5. Percepatan untuk membangun (Accelerate to Build), dalam struktur perusahaan, seringkali dijumpai bidang riset dan pengembangan. Posisi ini dibuat dalam rangka untuk melakukan kajian mendalam

tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam menentukan kebijakan. Mulai dari percepatan peningkatan kapasitas SDM, produksi hingga soal kecepatan dalam memanfaatkan moment untuk membangun jaringan dan kerjasama.

B. Peningkatan kapasitas SDM dan Produktivitas

Konsep Pengembangan Kapasitas SDM

Sebagai bagian dari komponen utama dalam mengelola sebuah unit usaha, SDM keberhasilan mengoptimalisasi sumber daya manusia dapat mendorong untuk membangun keunggulan kompotitif. Dengan itu, ujung dalam sebuah proses ini harus ditujukan untuk meningkatkan produktifitas, peningkatan kompetensi, membangun loyalitas dan moralitas kerja. Dengan demikian maka pengembangan SDM tidak hanya berhubungan dengan aktivitas yang bersifat rutin. Adapun tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah mempersiapkan kompetensi yang diperlukan bagi perubahan posisi atau jabatan dalam jangka panjang sebagai antisipasi dari kemungkinan perubahan dalam masyarakat atau lingkungan darilembaga yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif merupakan faktor yang menentukan karena program tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan organisasi akan pegawai yang mempunyai kompetensi yang tinggi.

Menurut Tilaar, bahwa keberadaan SDM masa depan itu berhubungan cara dia melihat sebuah peluang untuk memenangkan sebuah persaingan. Dengan itu yang dituntut dalam masyarakat abad 21 ialah sumber daya manusia yang unggul yang terus menerus dapat bertahan di dalam sebuah persaingan atau masyarakat yang kompetitif dan menuntut kualitas kehidupan baik dalam produk maupun pelayanan di dalam kehidupan bersama.[8]

Pengembangan sumber daya manusia dalam istilah lain disebut

8 Tilaar H.A.R. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Indonesia. (Magelang : Teras, . 1999) , h. 4

pengembangan personel (personnel development). Ahli manajemen lain, Flippo menyebutnya dengan istilah staff development. Pengembangan sumber daya manusia pada prosesnya tidak terlepas dari implementasi berbagai fungsi administrasi personel, di mana pengembangan sumber daya manusia didasarkan pada kebutuhan dan tujuan organisasi yang berkaitan dengan efektivitas jabatan, transisi jabatan, pengembangan profesional, pengembangan pribadi, pengembangan dan pengembangan kamanan dalam pekerjaan, improvisasi unit, serta improvisasi sistem.[9]

Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan performansi organisasi. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk kepentingan pekerjaan seseorang di masa yang akan datang. Adapun keberhasilan dari pendidikan dan pelatihan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap misi dan tujuan dari pengembangan sumber daya manusia mengingat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang produktif pada organisasi diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya.Selain kemampuan profesionalnya, diperlukan pula sikap dan perilaku sebagai cerminan dari moral sumber daya manusia. Oleh sebab itu diperlukan suatu media yang menghubungkannya yakni melalui pendidikan dan pelatihan

Pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja individu, kelompok, dan keseluruhan organisasi.Hal ini sangat penting sebab manusia, teknologi, pekerjaan, dan organisasi selalu berubah sehingga para pegawai perlu mendapatkan pelatihan dan terus dikembangkan. Langkah ini dilakukan untuk menjadikan mereka sebagai personel yang menguasai teknologi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Pelatihan dan pengembangan ini harus dilakukan sejak

9 lippo, Edwin B. Personnel Management, Sixth Edition. Singapore: Mc.Graw. Hill Book, Company, (1984, h. 23

para pegawai mulai memasuki suatu pekerjaan dan berlanjut sebagai pengembangan karirnya.

Teori Produktivitas Kerja

Untuk dapat melaksanakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, organisasi memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga produktivitas kerja pegawai menjadi tinggi.Pada berbagai literatur, produktivitas ditemukan dalam berbagai rumusan.Menurut sebagian ahli, produktivitas berarti lebih banyak hasil dengan mempertahankan biaya yang tetap, mengerjakan sesuatu yang benar, bekerja lebih cerdik dan lebih keras, atau pengoperasian secara otomatis untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat.[10]

Untuk mengembangkan sumber daya manusia, manajemen organisasi harus melakukan berbagai perubahan fundamental terhadap kebijakan-kebijakan dan praktekpraktek konvensional. Menurut Handoko "Bahwa manajemen perlu mempunyai horison jangka panjang, manajemen mengembangkan filosofi, menetapkan sasaran dan merumuskan strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Keunggulan kompetitif merupakan posisi unik yang dikembangkan organisasi dalam menghadapi para pesaiang dan mungkin hal ini diterapkan pada suatu pendidikan tinggi.Penekanannya bahwa keunggulan hanya dapat dicapai dengan pengembangan deferensiasi yang jelas dan favorable dari para pesaing. Adapun kondisi yang paling penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif (surtainability) adalah bahwa para pesaing yang ada dan potensial tidak akan mengambil tindakan untuk menutup pengembangan organisasi tadi. Dengan demikian dapat dikemukakan empat kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu sumber daya dapat disebut sebagai sumber keunggulan kompetitif. 1) Merupakan sumber daya organisasional yang sangat berharga (valuable) 2) Relatif untuk dikembangkan dan sehingga menjadi langka di lingkungan kompetitif 3) Sangat sulit ditiru

10 Putti, Joseph P. Understandig Productivity. (Singapore : Federal Publication, 1993), h. 51

atau diimitasi 4) Tidak dapat dengan mudah digantikan (substitute) yang secara strategis signifikan.

Menurut Usmara ada beberapa cara peningkatan keterampilan dan kemampuan suatu organisasi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yaitu: 1) Mengidentifikasi skill dan kualitas sumber daya manusia yang serasi dengan tuntutan lingkungan 2) Memilih sumber daya manusia yang memiliki kinerja tinggi dan potensia.[11]

Berusaha memenuhi kebutuhan organisasi dan individu 4) Menilai kinerja dan keahlian sumber daya manusia 5) Memberi konvensasi yang memadai kepada tenaga yang terampil dan memiliki keahlian 6) Membangun lingkungan kerja yang baik 7) Meningkatkan motivasi untuk perbaikan kinerja.

Tujuan Peningkatan Kapasitas SDM

Bahwa dalam konteks pengembangan SDM pesantren dalam bidang ekonomi, memiliki sisi perbedaan dengan pengembangan SDM bidang pendidikan.Hal ini terletak pada tujuan yang hendak di capai.Jika pengembangan SDM bidang pendidikan ditujukan untuk kemampuan dan skill mengajar, maka dalam bidang ekonomi berhubungan dengan peningkatan produktifias dalam menghasilkan sebuah produk. Selian itu, upaya pengembangan SDM tersebut dimaksudkan untuk efesiensi sebuah proses. Secara umum, tujuan pengembangan SDM pesantren ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan program peningkatan kualitas manajemen bisnis pesantren seiring dengan dilakukannya peningkatan kapasitas ekonomi pesantren dalam mengoptimalkan aset pesantren.
2. Membantu meningkatkan terwujudnya good governance dengan kultur dan budaya khas di lingkungan pesantren.
3. Melakukan peningkatan kualitas SDM pengelola bisnis di lingkungan pesantren melalui berbagai program peningkatan kapasitas seperti training, seminar, sertifikasi maupun program

11 Usmara. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Amata Books 2002), h. 105

reverse linkage.

4. Membantu terwujudnya peningkatan SDM Islami berkualitas tinggi yang berperan dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berekonomi dan bermasyarakat.
5. Menggali potensi bisnis pesantren serta mengatur manajemen rantai pasok untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang terintegrasi satu sama lain.

Pendekatan pengembangan SDM bisnis pesantren ini harus dilakukan dalam rangka memacu dan mendorong percepatan pada dua sektor, yaitu sektor kelembagaan dan produksi.Kelembagaan bisnis pesantren ini berhubungan dengan tata kelola, mulai dari strategi usaha hingga tata kelola keuangan.Sementara sektor produksi berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk dan penyelarasan sistem produksi dengan kepentingan dan nilai-nilai pesantren.

Kompetensi dan Keahlian dalam Pengembangan Kapasitas SDM

1. Ahli Ilmu Agama dan Menguasai Kemampuan Bahasa, bidang kompetensi ini menjadi core dalam keahlian santri sebagai sumber daya utama dalam di pesantren. Instrumen bahasa merupakan kunci komunikasi dengan para stake holder.
2. Bidang ketrampilan khusus, bidang ini berhubungan dengan bekal dan kesiap sediaan santri dan SDM pesantren dalam ikut meramainkan pada industri usaha yang menuntut kemampuan teknis. Seperti, ahli perencanaan, ahli desain grafis, ahli digital marketing, ahli agrosbisnis dan lainnya.
3. Ahli manajemen, merupakan kemampuan yang berhubungan dengan menata sumber daya manusia dalam sebuah organisai. Kemampuan memanfaatkan potensi organisasi.
4. Kompetensi kepemimpinan, hal ini berhubungan dengan kemampuan santri dan SDM pesantren lainnya dalam memengaruhi orang lain untuk dapat mempergunaan potensi yang dimilikinya secara optimal. Kompetensi leadership ini tidak hanya untuk

kepentingan pekerjaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi melaikan untuk peran-peran sosial di tengah-tengah masyarakat.

Kemampuan seseorang untuk bekerja berawal dari pendidikan dan pelatihan yang diikuti.Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya merupakan sarana bagi penambahan pengetahuan dan keterampilan manusia serta memberikan perubahan sikap dan dorongan untuk berprestasi. Pendidikan dan pelatihan yang intensif akan menambah kecakapan seseorang sehingga pekerja yang dihasilkan akan semakin bermutu dan cepat diselesaikan. Dengan kata lain, pendidikan dan pelatihan adalah kesempatan yang terbuka bagi seseorang untuk berbuat yang lebih baik. Kesempatan dalam hal ini sekaligus mencakup:[12]

1. Kesempatan bekerja, bahwa peluang untuk dapat memainkan peranan sosio-ekonomi di masyarakat dapat di akses melalui kesempatan bekerja yang tersedia diberbagai sektor. Kendatipun tidak harus mengarahkan arus pendidikan pesantren pada sektor pekerjaan, tetapi para santri harus dapat mengisinya untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja praktis di masyarakat.
2. Pekerjaan sesuai dengan pendidikan, keterampilan serta minatnya, diskursus ini sudah dikembangkan melalui sekolah vokasi dan peminatan. SMK sebagai garda terdepan dalam pendidikan vokasi dan peminatan juga telah banyak masuk ke berbagai pesantren. Dalam rangka memacu kemampuan SDM santri dan menyiapkan kompetensinya, maka SMK yang berada di pondok pesantren harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini juga di maksudkan agar tidak terjadi pengarus utamaan ke berbagai daerah. Sehingga corak pengembangan sumber daya manusia pesantren di arahkan pada pengembangan SDM lokal.
3. Kesempatan untuk berprestasi dan mengembangkan diri. Sudah menjadi maklum, bahwa beragam kalangan telah memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengambangkan dirinya sesuai dengan kecenderungan yang dimilikinya.

12 Tita Meirina Djuwita, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja Pegawai,* Manajerial VOL. 10, NO. 19, JULI 2011 : 15 - 21

Produktivitas kerja merupakan hasil interaksi antara kemampuan kerja (ability) dan motivasi (motivation).Adapun kemampuan dibentuk dan dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan. Faktor-faktor yang menentukan pengetahuan antara lain pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan keinginan. Adapun keterampilan dipengaruhi oleh bakat, kecerdasan, dan kepribadian.Motivasi kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik, kodisi sosial lingkungan kerja, serta terpengaruhinya kebutuhan dasar pegawai. Produktivitas dapat diartikan antara lain dari aspek penampilan individu. Dengan demikian, pegawai yang mempunyai kemampuan dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya akan dapat mendukung organisasi dengan menjadi seorang pegawai yang produktif yang ditandai dengan memenuhi kualifikasi pekerjaan, orientasi pekerjaan positif, dewasa, bermotivasi tinggi, dan dapat bergaul secara efektif.

Pengembangan sumber daya manusia dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan individu.Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dengan tujuan supaya dapat beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi. 2. Produktivitas kerja mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. 3. Pengembangan sumber daya manusia yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan output yang bermutu, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan dapat mempersiapkan pegawai yang efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaannya.

Selain itu, Konsep pengembangan sumber daya manusia dalam unit usaha di pondok pesantren sebagai ujung tombak tata kelola bisnis pesantren memiliki empat perspektif pengembangan.

1. Perspektif personel: Pondok Pesantren merekrut dan menggaji orang tetapi tidak berfokus untuk mengambil yang terbaik atau mengembangkan guru yang luar biasa.
2. Perspektif kompensasi: Pondok Pesantren menggunakan bonus, insentif gaji, dan pembedaan gaji guna menghargai guru yang berkinerja tinggi.

3. Perspektif keselarasan: Para manajer senior memandang guru sebagai aset strategis, namun tidak berupaya untuk memeriksa dengan saksama kapabilitas-kapabilitas SDM.
4. Perspektif kinerja-tinggi: Para eksekutif SDM dan yang lain memandang SDM sebagai sistem yang melekat di dalam sistem yang lebih besar, yakni implementasi strategi Pondok Pesantren.

Selain berhubungan dengan kompetensi, para SDM yang terlibat dalam bisnis untuk kepentingan produktifitas juga harus memiliki nilai-nilai Etika Usaha dan Tata Perilaku yang dijunjung tinggi. Dalam upaya ini berikut ini adalah aspek etika kinerj yang harus dilakukan dalam menunjang produktifitas;

1. Manajer wajib membuat suatu Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang memuat nilai-nilai etika dan perilaku kerja dalam menjalankan usaha Perseroan.
2. Nilai-nilai etika usaha yang dianut oleh Perseroan harus mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi Perseroan, serta harus diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan Perseroan, dan untuk selanjutnya meresap ke dalam seluruh jajaran Perusahaan.
3. Setiap Insan yang adal dalam unit usaha wajib menjunjung tinggi nilai-nilai tata perilaku yang dibangun dalam Perseroan.
4. Tata perilaku dibangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan Perseroan, serta Pemangku Kepentingan.
5. Tata perilaku dikembangkan untuk meningkatkan motivasi kerja.
6. Seluruh SDM harus menerapkan tata perilaku dan sikap mental dasar Perseroan secara konsisten, dan melakukan evaluasi secara periodik.

Model Pendirian centre of excellence

Peningkatan kualitas unit usaha dapat dilengkapi dengan pendirian pusat pelatihan bisnis pesantren.Pendirian pusat pelatihan bisnis pesantren bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas unit usaha pesantren. Pendirian centre of excellence pesantren dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Perjanjian Kerjasama
2. Pendirian pusat informasi dan kajian strategis
3. Penyusunan platform
4. Diseminasi

Model Pendirian centre of excellence

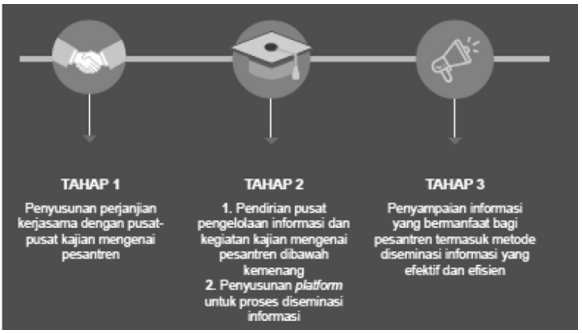

Sumber:Dukomen Bank Indonesia

Implementasi pendirian pusat pelatihan bisnis pesantren diwujudkan melalui penyusunan repository knowledge untuk model bisnis pesantren pengolahan air minum dan pengolahan daur ulang sampah yang diluncurkan pada 2019. Pada 2020 akan dirilis buku model bisnis energi terbarukan (renewable energy) dan pertanian terintegrasi (integrated farming).

Strategi Peningkatan Produktivitas Usaha Pesantren

Setiap unit usaha atau industri apapun yang akan dikembangkan senantiasa memerlukan sebuah strategi dan cara-cara yang efektif serta produktifitas yang tinggi. Dalam konteks peningkatan produktifitas usaha pesantren, terdapat empat strategi yang harus ditempuh:

1. Mendorong Peningkatan Skill, salah satu yang menjadi problem dasar dari melambatnya pertumbuhan ekonomi pesantren adalah rendahnya kreatifitas pengelola untuk mengembangkan bisnis secara profesional. Maka sebuah keharusan bagi pemimpin

unit usaha untuk dapat menempatkan orang yang tepat dan berkompeten pada posisi yang semestinya.

2. Manajemen Kelembagaan, sebagian besar dari usaha pondok pesantren adalah menjadi garapan bersama. Tidak memiliki standarisasi pengelolaa, SOP, lemahnya manajemen keuangan kurang tertata. Legalisasi sebuah perusahaan atau unit usaha sejatinya memberikan peluang kepada para pelaku usaha untuk bisa mengelola bisnisnya secara baik, baik melalui program fasilitasi maupun legalisasi kelembagaan.
3. Inovasi dan Net-working, pesantren ini memiliki karakter dasar yang terkesan tertutup. Besar kemungkinan lambatnya informasi yang masuk membuat pesantren terlihat diam ditempat. Dengan ini pula maka akses jaringan, pasar, pembiayaan dan informasi lainnya tidak dapat diserap dengan baik.
4. Berbasis Potensi Lokal, dengan ragam lokasi yang tersebar diseluruh daerah di Indoesia, pesantren selalu dikelilingi oleh sebuah lingkungan yang kaya dengan potensi sumber daya alam dan SDM. Potensi ini tidak mampu di wadahi oleh pesantren sebagai sebuah asset yang petut untuk dimanfaatkan. Termasuk sumber daya lokal yang bisa berdampak pada sosil ekonomi masyarakat.
5. Berorientasi Pemberdayaan, keberadaan pesantren yang sebagian besar berada dipinggiran kota, membuat pesantren senantiasa bersinggungan dengan masyarakat lemah. Baik secara ekonomi maupun dari sisi pendidikan. Kondisi ini mengharuskan pesantren untuk terlibat aktif turun untuk langsung memberdayaan masyarakat. Menjadi bagai dari majunya sebuah peradaban.

Model pengembangan produktifitas ini menjadi satu kesantuan sistem yang harus di garap secara beriringan. Untuk melakukan akselerasi, maka tidak perlu untuk menunggu tuntasnya elemen lain. Peranan SDM sebagai sumber daya memiliki fungsi yang sama dengan sumber daya material. Pengembangan unit usaha pesantren sebagaimana uraian pada model ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar Peningkatan Produktifitas

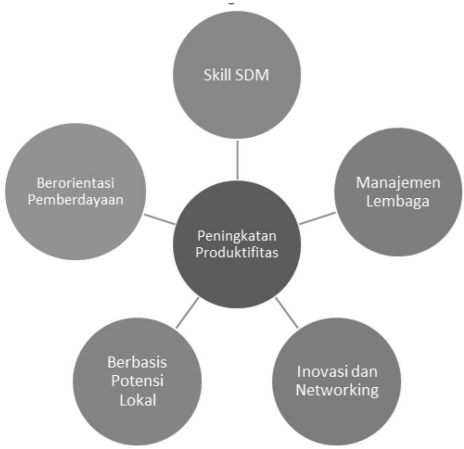

C. Penguatan Jaringan kerjasama dan kemitraan usaha pesantren

Urgensi Jaringan kerjasama dan Kemitraan

Secara teoritis, kemitraan dapat difahami sebagai sebuah upaya membangun kerjasama bisnis, baik pada sektor produksi, pemasaran maupun dalam pengembangan sumber daya manusia untuk sama-sama memperoleh keuntungan.Pehamanan ini memberikan gambaran bahwa kemitraan dapat menjadi salah satu strategi dalam mengatasi keterbatasan perusahaan.

Dalam menjalankan sebuah bisnis atau wirausaha, baik usaha pribadi maupun perusahaan, maka membangun kerjasama atau kemitraan sudah menjadi sebuah keharusan. Menurut Hafsah, setidaknya kemitraan dimaksudkan untuk beberapa tujuan berikut:[13]

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, dalam konteks kapasitas produksi yang disebabkan oleh keterbatasan SDM, produksi, dan pemasaran, maka dengan sistem kemitraan proses bisnis UKM di pondok pesantren akan lebih memiliki kapasitas yang lebih besar.
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah, dengan adanya sharing yang dilakukan oleh dua perusahaan yang sama-sama melakukan kerjasama

13 Hafsah, Pemberdayaan Masyarakat. (Yogyakarta: Ansi Offset, 2010), h. 13

maka besar kemungkinan akan meningkatkan nilai tambah, baik dalam pengembangan teknologi, suplay modal dan lainnya.

3. Meningkatkan peranan dan pemberdayaan masyarakat, bahwa melakukan pemberdayaan tidak bisa dilakukan seorang diri, melainkan dibutuhkan keterlibatan pihak lain. Dalam konteks ini maka kerjasama dapat menjadi solusi untuk melakukan kerjasama.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional, kerjasama antara sektor usaha yang di kota dengan desa akan menambah geliat ekonomi diberbagai sektor semakin meningkat. Akan terjadi pemerataan ekonomi yang seimbang.
5. Memperluas kesempatan kerja, kerjasama akan menambah perluasan kawasan bisnis semakin lebar, dengan ini akan berdampak pada serapan tenaga kerja.
6. Mempertahankan ketahanan ekonomi nasional, bahwa salah satu tanggung jawab sebagai warga negara adalah saling mengokohkan antar Individu. Langkah kerjasama dapat menjadi upaya riil untuk terlibat dalam membangun ketahanan ekonomi.
7. Membangun tata dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha yang tangguh dan saling mendukung melalui ikatan kerjasama.

Melibat beberapa uraian ini maka kerjasama atau kemitraan tersebut dapat menyentuh berbagai aspek dalam tata sosial dan ekonomi masyarakat.Bahkan dapat menyentuh aspek kebudayaa, tekonologi dan manajemen.

Selain dimaksudkan untuk kepentingan di atas, secara praktik, kerjasama perusahaan atau unit usaha kecil di lakukan untuk meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Membuat kerjasama yang terbuka, berimbang dan saling menguntungkan (win-win solution) dengan tidak melanggar pedoman, prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku

2. Saling menghormati dan membangun komunikasi yang intensif dengan mitra kerja untuk memperoleh kesepahaman yang lebih baik guna memperoleh solusi terbaik dalam rangka pencapaian hasil yang optimal.
3. Menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) guna menjaga berlangsungnya kerjasama yang hubungan baik yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip GCG.

Proses Membangun Kerjasama

Bahwa kerjasama dan kemitraan memiliki peranan penting dalam mengakselerasi usaha.Pengembangan ekonomi pesantren tidak bisa dipisahkan dengan upaya ini.Mengingat, keterbatasan pesantren dalam berbagai sektor dapat menjadikan kerjasama dengan solusi yang dapat menguntungkannya. Dalam penelasannya, Jafar Menerangkan rangkaian urutan proses kerjasama bisnis sebagai berikut:[14]

1. Memulai membangun hubungan dengan calon mitra. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengenal pihak atau orang yang akan dijadikan calon mitra dengan baik dan tepat.
2. Mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra atau bekerja sama. Apabila calon mitra kita adalah orang yang telah punya pengalaman berbisnis, maka kita harus mengetahui bagaimana kemampuan manajemennya, teknologinya, sumber daya manusia dan sumber daya fiansialnya. Sedangkan, apabila calon mitra kita adalah orang yang tidak atau belum memiliki pengalaman usaha, maka kita pun patut untuk mengetahui keahlian atau keterampilan serta modal apa yang dimilikinya, sehingga kita layak mempertimbangkannya sebagai calon mitra usaha kita.
3. Mengembangkan strategi dan mengenal detail bisnis. Bila telah ditetapkan calon mitra, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan strategi usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan caramembagi tugas dengan pihak yang bermitra sesuai dengan

14 Erbin Chandra, Peranan Kerjasama Bisnis Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Toko Media Print Pematangsiantar, Jurnal Sultanist, ISSN: 2338-4328 vol. 2, no. 2, Desember 2014

informasi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Dengan strategi dan mengenal detail bisnis yang tepat, maka kita akan dapat mengembangkan usaha dengan tepat pula, sehingga akan mendatangkan keuntungan kedua pihak (win-win solution)

4. Mengembangkan program Pengembangan program merupakan langkah yang dilakukan setelah mengembangkan strategi bisnis dan merupakan rencana taktis yang akan dilaksanakan. Hal ini kemudian perlu diinformasikan kepada semua pihak yang akan terlibat dalam kerjasama tersebut, sehingga semua pihak siap untuk melaksanakannya.
5. Memulai pelaksanaan Setelah semua siap, barulah usaha dalam bentuk kerjasama atau kemitraan tersebut dilaksanakan. Dalam awal pelaksanaan perlu dicek kesiapan- kesiapan serta memprediksi kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi.
6. Memonitoring dan mengevaluasi perkembangan. Selama proses pelaksanaan perlu ada monitoring, sehingga dapat dievaluasi kekurangan-kekurangan atau hambatanhambatan yang dihadapi.

Peran Stake Holder Pengembangan Ekonomi Pesantren

Dalam pengembangan ekonomi pesantren secara nasional, maka gerakan yang dilakukan harus dalam skala besar dan massif.Upaya ini kemudian dapat memancing seluruh stake holder untuk dapat terlibat dalam gerakan ekonomi pesantren.baik dari lembaga pemerintahan, kementerian dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa stake holder pengembangan ekonomi pesantren dengan beberapa rekomendasi perannya: [1] Kementerian Koperasi dan UKM [2] Kementerian Perindustrian [3] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [4] Kementerian Ketenagakerjaan [5] Kementerian Agama [6] Kemenko Perekonomian dan [7]Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Peran-peran ini secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut:[15]

15 Bank Indonesia, Presentasi dalam upaya membentuk Holding Ekonomi Pesantren, Kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya.

Kementerian Koperasi: Dalam peranannya sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi pesantren, maka berikut ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan:

1. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMK di pesantren-pesantren, dengan cara diintegrasikan dengan program Kementerian Koperasi
2. *Capacity building* di masing-masing pesantren
3. Pendirian dan pengaktifan kembali kelembagaan kopontren
4. Penguatan permodalan koperasi dan kopontren menjadi program Kemenkop dan UMKM

Kementerian Perindustrian: Dalam peranannya sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi pesantren, maka berikut ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan:

1. Perizinan produk-produk hasil pondok pesantren
2. Standarisasi produksi
3. Bantuan alat industri, pendampingan, dan *capacity building* produksi
4. Sertifikasi produk standar nasional

Kementerian Desa PDTT: Dalam peranannya sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi pesantren, maka berikut ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan:

1. Mensinergikan dana desa dengan penguatan ekonomi pesantren dalam rangka penguatan holding bisnis pesantren

Kementerian Ketenagakerjaan: Dalam peranannya sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi pesantren, maka berikut ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan:

1. Pemanfaatan balai latihan kerja (BLK) dalam rangka peningkatan *skill* SDM yang berkaitan dengan produksi badan usaha yang dimiliki oleh pesantren
2. Pendirian BLK kerjasama dengan pesantren khususnya anggota holding bisnis pesantren

Kementerian Agama: Dalam peranannya sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi pesantren, maka berikut ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan:

1. Pembentukan kelembagaan holding pesantren yang bersifat semi-otonom sebagai implementasi dari Undang-undang Pondok Pesantren
2. Mengordinasi pesantren-pesantren untuk membangun ekosistem
3. kewirausahaan untuk mendukung holding pesantren
4. Sertifikasi / standarisasi produk halal
5. Pembentukan komite yang berperan mengkoordinir dan menggerakkan holdin
6. bisnis pesantren

Kemenko Perekonomian: Dalam peranannya sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi pesantren, maka berikut ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan:

1. Holding pesantren menjadi bagian dari program Kemenko Perekonomian dalam rangka pembangunan dan penguatan kemandirian ekonomi umat serta perekonomian nasional

Kemenko PMK: Dalam peranannya sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi pesantren, maka berikut ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka penguatan pengelolaan ekonomi pesantren
2. Pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren dan ekonomi pondok
3. pesantren dalam rangka penguatan ekonomi dan holding pesantren

Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat Profesional: Dalam peranannya sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi pesantren, maka berikut ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan:

1. Sementara itu perguruan tinggi dapat berperan dalam memberikan Pendampingan dan penguatan *capacity building* bisnis pesantren anggota holding melalui KKN-Tematik dan Pengabdian Masyarakat

D. Akses Permodalan pada lembaga keuangan Syariah

Konsep pembiayaan Syariah

Termenologi pembiayaan ini tidak memiliki perbedaan subtantif dengan kredit, hutangan atau permodalan. Secara praktis, pembiayaan dapat difahami sebagai transaksi keuangan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan antara kedua belah pihak, baik melalui model kredit maupun bagi hasil. Praktik ini pada umumnya dilakukan dalam rangka merintis sebuah bisnis atau mengembangan sebuah usaha. Sementara itu, istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai.Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiyaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.[16]

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, pedagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[17]

Jenis-jenis pembiayaan di lembaga keuangan syariah

Sistem pembiayaan modern yang banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah melalui dua cara, yaitu sumber pembiayaan yang

16 Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015 , h. 1

17 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

basis utamanya adalah perbankan dan non perbankan. Pendanaan perbankan memiliki basis transaksi keuangan yang mengharuskan adanya bagi diveden, sementara jika dilakukan melalui dana sosial keagamaan, seperti, zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR maka yang harus dilakukan adalah menghasilkan manfaat bagi penerimanya.

Per-bankan

Salah satu yang menjadi acuan pembiayaan pada perbankan adalah UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah.Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa sistem pembiayaan pada lembaga perbankan syariah adalah harus berpijak pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam akad-akad dalam muamalah, baik melalui mudharabah, syirkah, murabahah, maupun Ijarah. Sementara itu, Dalam praktik pembiayaan syariah, Pembiayaan jika dilihat dari tujuannya sendiri dapat dikategirikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Sementara itu, jika pembiayaan di lihat dari jangka waktunya, maka dapat dikategorikan menjadi 3 macama:

1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan watu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, terdapat akses pembiayaan yang dapat dijadikan sebagai solusi oleh pesantren dalam mengembangan keuangan bisnisnya, yaitu permodalan aktiva produktif.jenis ini meliputi:[18]

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan

18 Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 23

dengan prinsip bagi hasil ini meliputi: Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal yang menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Bagi hasil dengan model ini dapat dilakukan secara mutlak, yaitu pengelola dana memiliki kebebasan untuk menggunakan modalnya pada sektor apapun yang dapat menghasilkan keuntungan dan dapat dibenarkan secara syara' dan tradisi. Namun demikian, kerjasama pengelolaan ini juga dalam bentuk yang terikat, baik dalam waktu tertentu, jenis usaha tertentu maupun tempat tertentu.

2. Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masingmasing.
3. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual
4. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya, sewa sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada sewa objek transaksinya adalah jasa.

Non Per-bankan

Skema pembiayaan yang dapat digunakan oleh pondok pesantren adalah melalui dana sosial keagamaan. Melalui dana zakat, infak, sedekah, dan CSR atau hibah pemerintah. Selain itu, dapat dilakukan juga kerjasama antar lembaga dan perusahaan, permodalan individu dan lainnya.Pola pemberdayaan dan pengembangan ekonomi pesantren melalui zakat dapat dilaksanakan dengan beberapa pola pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan komunitas serta para partisipan. Sekurang-kurangnya ada tiga pola pendekatan yang dapat dipakai untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan komunitas melalui pendayagunaan zakat, di antaranya:[19]

1. Pola Klaster

Pola ini merupakan suatu pengembangan investasi bagi kelompok *mustahiq* berbasis klaster komoditas atau industri yang mengoptimalkan hubungan antar pengusaha dalam perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumber daya lokal, dan pemasaran.Klaster sendiri dapat dipahami sebagai sekumpulan perusahaan dan lembaga-lembaga terkait di bidang tertentu yang berdekatan secara geografis dan saling terkait karena kebersamaan. Dengan berbasis pada komoditas atau industri, maka program pendayagunaan zakat perlu memahami ciri mendasar klaster industri yang biasanya memiliki hal-hal sebagai berikut;

pertama, kebersamaan *(community),* artinya bisnis yang dilakukan beroperasi dalam bidang serupa atau terkait satu dengan yang lainnya dengan fokus pasar bersama. *Kedua*, konsentrasi *(concentration)*, ciri ini memuat pengelompokan bisnis yang dapat melakukan interaksi sehingga terjalin suatu kerjasama yang intensif dan industri tertentu. *Ketiga,* konektivitas *(connectivity)*, artinya organisasi yang saling terkait dengan beragam jenis hubungan yang berbeda.

Inti dari pola klaster ini adalah adanya kerjasama dan keterkaitan antara pelaku industri, sehingga terjalin suatu rasa saling mendukung satu

19 Kementerian Agama RI, Zakat Community Development; Model Peng*embangan Zakat,* (Jakarta Pusat: C.V. Sinergy Multisarana, 2013), hal.111-115.

sama lain baik dalam proses produksi maupun pemasarannya. Hal tersebut tentu saja bukan hanya mempermudah pelaksanaan industri, melainkan juga memiliki rasa tanggung jawab atas nasib masa depan industri yang dijalankan. Dalam konteks ZCD *(Zakat Community Development),* maka pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan cara membuat program-program kerjasama dengan berbagai pengusaha yang memiliki konsentrasi yang sama. Sehingga keterjalinan antara komunitas pendayagunaan zakat dengan pengusaha saling memberi manfaat dan keuntungan bersama.

2. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma adalah sebuah kemitraan usaha besar sebagai inti dengan usaha kecil menengah yang menjadi plasma.Paradigma yang dipakai dalam kemitraan inti plasma adalah kesetaraan dan saling membutuhkan. Dengan demikian, tidak ada pola pikir untuk mengambil keuntungan secara sepihak dan merugikan orang lain. Jika merujuk pada program pendayagunaan zakat, maka BAZNAS bersama-sama *muzakki* diposisikan sebagai inti untuk mengembangkan usaha kecil *mustahiq* yang menjadi plasma.

Peran dan posisi kemitraan BAZNAS serta *muzakki* sebagai inti dengan kelompok *mustahiq* sebagai plasma meliputi; penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.Kemitraan model ini biasanya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana basis inti dan plasma itu berada.Contohnya adalah kemitraan yang berbasis pada perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Di Indonesia pendayagunaan zakat untuk pengembangan komunitas selayaknya dapat dilakukan secara variatif mengingat keadaan demografis kependudukan dan geografis kewilayahan serta basis usaha masyarakat.

3. Infak Terikat

Pada dasarnya pola bapak angkat adalah refleksi kesediaan *muzakki* untuk membantu *mustahiq* yang memang memerlukan pembinaan,

yang pada hakikatnya merupakan cermin atau wujud rasa kepedulian pihak yang besar terhadap yang kecil.Pola ini biasanya lebih bersifat bantuan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.Salah satu contohnya adalah BUMN yang sudah memperoleh keuntungan yang besar dengan memberikan modal tanpa bunga kepada peternak di daerah yang miskin.

Konsep kemitraan pola ini adalah adaptasi Indonesia dari infak terikat industri yang telah berhasil diterapkan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.Sistem bapak angkat industri itu sendiri merupakan inovasi oleh negara tersebut terhadap sistem kapitalisme modern yang mereka terapkan.Sistem bapak angkat ataupun kemitraan memiliki prasyarat; *pertama,* harus ada kesadaran sosial yang tinggi di kalangan pengusaha untuk maju secara bersama-sama.*Kedua,* pihak yang terkait masing-masing harus memiliki etos kerja dan kepercayaan terhadap satu sama lain yang menjamin terjadinya kerja sama yang menguntungkan.

Dengan pondasi keimanan, ilmu pengetahuan dan amal sholeh, pesantren berdiri kokoh. Tercatat keluarga pesantren berperan penting dalam pembangunan Indonesia.

La Nyala Mattaliti
Ketua DPD RI 2019-2024

BAB VI

PESANTRENPRENUER MENUJU KEMANDIRIAN PESANTREN

A. Pendidikan Kemandirian di Pesantren

1. Historisitas Kemandirian Pesantren

Di antara lembaga pendidikan tradisional yang lahir dan tumbuh dari rahim Indonesia adalah pesantren. lahir dan munculnya Pesantren disinyalir berbarengan dengan datangnya Islam ke tanah Jawa. Berdasarkan ini, maka pesantren merupakan salah satu pendidikan paling tua di nusantara ini. Selain, itu, pesantren juga dapat dianggap sebagai lembaga pendidikan yang asli produk dari Indonesia. Sedari awal kehadirannya pesantren telah banyak tampil membuktikan eksistensi dan peranannya untuk dapat turut serta dalam kehidupan masyarakat dan tidak terkooptasi dengan kehidupan luar pesantren. survivenya pesantren tersebut tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang di anut dan ditanamkannya pada

semua masyarakat pesantren, mulai dari santri, dewan guru dan lingkungan sekitar. Di antara nilai tersebut adalah kemandirian pesantren secara kelembagaan dan para lulusannya.[1]

Secara konseptual, kemandirian ialah sebuah karakter untuk senantiasa mampu melakukan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara mandiri. Tanpa terus bergantung dalam bantuan dan pertolongan orang lain. Dengan prinsip dan nilai ini, maka pesantren akan dapat tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa keterikatan dengan pihak lain. Kemandirian pesantren ini bukan berarti hendak menciptakan jarak antara pesantren dengan pihak lain, melaikan menekankan pada upaya membendung kooptasi pihak lain yang bisa berpotensi mengganggu jalannya lembaga pendidikan pesantren.

Jika dilihat dari sisi sejarah, bahkan pesantren kerap kali melakukan perlawanan terhadp pemerintah belanda dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Sehingga pesantren seakan menjadi ancama bagi belanda. Kendatipun Belanda menganggap pesantren sebagai ancaman, pesantren tetap eksis dan survive hingga saat ini. Hal ini dikarenakan pesantren tumbuh dan berkembang berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, ditambah dukungan dan support dari masyarakat. Nilai kemandirian ini senantiasa ditunjukkan pada era berikutnya. Mulai dari kolonialisasi Jepang, terus hingga kemerdekaan bahkan hingga saat ini.[2]

Kekuatan terbesar pesantren yang tidak bisa lepas adalah posisinya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Support masyarakat yang besar, baik berupa tenaga, fikiran, finansial barang dan jaringan membuatnya menjadi bagian integral dari masyarakat yang harus selalu eksis. Kekuatan inilah yang tidak dimiliki

1 Manfred Ziemik, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial* ter. Butche B Soendjoyo (Jakarta: P3M Cet. I. 1986), 100. dan Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 57. Periksa juga Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan.* (Jakarta: Paramadina 1997), 3

2 Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi, Essei Pesantren*, ed. Hairus Salim, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 140-141.

oleh instansi pendidikan di luar pesantren. Wujud riil perhatian masyarakat terhadap pesantren ini berupa banyaknya tanah-tanah wakaf masyarakat yang diperuntukkan untuk pesantren, masyarakat rela mengabdikan hidupnya untuk pesantren. Militansi ini bukan hal mudah untuk didapatkan jika tidak diselipi dengan ikatan emosional.

Namun demikian, pada masa sekarang sejalan dengan derasnya arus modernisasi di semua aspek kehidupan masyarakat yang mengendurkan nilai-nilai/ pandangan hidup di atas, dukungan dan sokongan penuh masyarakat kepada pesantren mengalami berbagai pergeseran. Arus modernisasi telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap nilai/pandangan hidup masyarakat, dari kebersamaan (guyub), gotong royong, dan nilai-nilai spiritualitas ke arah pandangan hidup modern seperti sekularisme, materialisme, konsumerisme, hedonime. Pandangan hidup modern di atas mengendurkan anemo, dan sokongan masyarakat pada umumnya kepada pesantren.

2. Urgensi Kemandirian Santri

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang hingga saat ini eksis di Indonesia adalah pondok pesanten. Dengan sistem yang khas pesantren menjadi bagian dari pendidikan paling tua di Indonesia. Sejak Abad ke tiga belas, pesantren hingga sekarang terus mengembangkan dirinya menjadi lembaga yang senantiasa bisa merespon kebutuhan zaman. Kendatipun tergolong sederhana, pesantren telah terbukti melahirkan genesari penerus yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin di Indonesia. Selama pessantren sebatas lembaga pendidikan diniyah, saat ini pesantren telah berhasil menjadi pendidikan yang bergengsi di Indonesia. Bahkan kehadirannya telah menjai sub-kultur yang terus diperhitungkan di masyarakat Indonesia secara umum.

Menurut Mastuhu, bahwa pendidikan tradisional Islam ini mampu memahami dan menghayati bahkan mengelaborasi

sisi kebangsaan dan keagamaan secara berbarengan. Dengan menekankan pada aspek moralitas dan semangat nasionalisme di tengah-tengah beragam etnis dan suku. Dengan kepemimpinan kiai yang juga memiliki kebijakanaan dan kharismatik, pesantren tidak dengan serta merta menekan komunitas lain yang berbeda budaya. Ia lebih menekankan pada proses akulturasi budaya dengan lingkungan sekitar. Mengisi nilai-nilai keagamaan dengan pada tradisi yang tumbuh dan berkembang dilungkungan masyarakat sekitar.[3] Abudin Nata berpendapat bahwa pesantren harus lebih menekankan pada fungsinya sebagai wahana dan instrumen dakwah melalui proses internalisasi ajaran Islam yang rahmatan lil Alamin.[4]

Masuknya pesantren dalam tatanan sistem pendidikan nasinal, bahkan lahirnya undang-undang pesantren bukan semata-mata karena pesantren telah lama tumbuh dan lajir di Indonesia. Tetapi karena peran dan sumbangsihnya yang sangat besar bagi terciptanya produk SDM yang baik bagi bangsa Indonesia. Secara historis, kolaborasi masyarakat dan pesantren memang tidak pernah ditemukan adanya kontraproduktif, bahkan support masyarakatlah yang membuat beberapa pesantren di Indonesia semakin hari semakin seksis. Termasuk support dari para akademisi, pesantren seringkali menjadi bagian dari pusat studi kasus atau best practice.

Secara umum, pesantren memang bisa diketahui merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai kultur spesial dan tidak sama dengan budaya sekitarnya. Beberapa peneliti menyebut menjadi sebuah subkultur yg bersifat idiosyncratic. Cara pengajarannya unik. Sang kiai yg umumnya merupakan pendiri sekaligus pemilik pondok pesantren, membacakan manuskrip-manuskrip keagamaan klasik berbahasa Arab, dan intensnya para santri mendengarkan sembari menciptakan catatan dalam buku yang sedang dibaca. Metode ini

3 Djamaludin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 99

4 Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 35

dikenal menggunakan kata sorogan. Kegiatan pembelajaran pada atas berlangsung tanpa penjenjangan kelas serta kurikulum yang ketat. Dalam pelaksanaan pendidikan pada umumnya pesantren menggunakan memisahkan jenis kelamin (gender) santri. Perkembangan awal pondok pesantren inilah yang menjadi cikal bakal sekaligus menjadi tipologi unik bagi pesantren.

Sebagai lemabaga pendidikan yang menfokuskan diri pada pengembangan studi keislaman, pondok pesantren menjadi tumpuan utama dari masyarakat yang hendak memperdalam keilmuan agamanya dan mengawal moralitas generasi melalui agama. Dalam kapasitas ini kemudia pesantren juga dapar menjadi miniatur dalam bersikap dan berperilaku sebagaimana ajaran Islam. Itulah sebabnya tidak perlu heran jika espektasi masyarakat terhadap lulusan pesantren semakin tinggi, terutama dalam persoalan moralitas dan ibadah.

Terus bergulirnya arus perubahan dunia, pesantren terus tidak bisa melepaskan diri dari aspek kulturalnya yang fundamental. Termasuk dalam ciri ini adalah konsistensi pesantren dalam tafaqquh fiddin, yaitu kedalaman ilmu agama, sebagai kontrol sosial dan lembaga pendidikan yang mampu melakukan rekayasa sosial.

Fungsi pesanstren dalam dunia pendidikan dan ekonomi serta sosial dapat dilihat pada rumusan berikut:

1. Kurikulum pesantren yang khas dengan kombinasi keagamaan dan keilmuan modern.
2. Bekal life skill yang senantiasa dikembangkan, mulai dari kompetensi sehari-hari dilingkungan masyarakat, hingga teknologi modern. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kalangan santri yang senantisa bisa menembus kampus-kampus ternama di Indonesia.
3. Kepemimpinan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya santri yang menjadi tokoh masyarakat walaupun dalam skala yang sangat kecil, mulai dilingkungan terdekat desa hingga nasional.

4. Bisnis, yaitu kemampuan para santri untuk menjadi bagian dari upaya meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. Hal ini bahkan banyak dicontohkan oleh para kiai secara langsung.
5. Keseimbangan antara tawakkal dan ikhtiyar, ini menjadi salah satu ciri spiritualitas dan moralitas para santri dan kiai di pondok pesantren.

Munculnya kemandirian pada diri santri ini bukan semata-mata dorongan personalnya melainkan sudah menjadi budaya dalam komunitas kesantrian. Sehubungan dengan ini maka para kiai memberikan wasiat-wasiat pemberdayaan bahwa santri harus terlibat aktif dalam ekonomi masyarakat, dakwah Islam dan bergerak dibidang pendidikan dan politik. Dengan wasiat inilah maka banyak para santri yang masuk dan terjun ke dalam politik praktis. Kendatipun masih belum maksimal dan mayoritas, peranan santri pada sektor ini telah banyak memberikan sumbangsih yang cukup baik pada perpolitikan Indonesia. Wujud riil dari perjuangan kalangan santri dalam pengambilan kebijakan adalah diresmikannya tanggal 10 oktober sebagai hari santri Nasional dan lahirnya undang-udang tentang pesantren.

Hal ini juga selaras dengan gagasan besar kementerian agama dalam membangun kemandirian pesantren. Menurutnya, Setidaknya ada tiga alasan pentingnya memandirikan lembaga pendidikan yang juga menjadi akar tradisi Islam di Nusantara ini.

1. Pesantren sudah teruji sebagai pusat pendidikan yang bisa bertahan bertahun-tahun, dan pesantren juga memiliki SDM yang melimpah yang berpotensi menjadi SDM yang unggul,"
2. Pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki sumber daya ekonomi yang bila dikelola dengan baik bisa menjadi potensi ekonomi yang berkelanjutan.
3. Pesantren harus dimandirikan adalah karena lembaga ini juga memiliki jejaring antar pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan itu terbentuk baik dari relasi guru-murid

(alumni), maupun dari sanad keilmuan. Jejaring ini menjadi foktor potensial bagi pengembangan ekonomi umat. Sinergi ekonomi antar pesantren bisa menjadi kekuatan yang dapat menopang perekonomian bangsa,

Upaya memandirikan pesantren ini menemukan momentum yang tepat karena ada tiga ekosistem pendukung. [1] Ekosistem digital. "Pandemi Covid 19 memaksa disrupsi digital terjadi lebih cepat di Indonesia, semua aktivitas ekonomi sebagian besar kini mulai beralih platform digital," ujarnya. [2] Ekosistem UMKM. Dunia usaha masyarakat sekitar pesantren sebagian besar adalah dari kalangan UMKM, dan bila terjadi kolaborasi pesantren dan UMKM disekitarnya maka akselerasi pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat akan bisa terjadi lebih cepat. [3] Ekosistem Halal. Dalam kurun 10 tahun terakhir ini ada peningkatan trend industri halal yang cukup tinggi. Dengan ini maka BPJPH perlu di dorong untuk berkerjasama dengan pesantren dalam memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Dengan tiga ekosistem tersebut, optimis kalau dilakukan dengan baik dan benar, kebijakan kemandirian pesantren akan berjalan dengan sukses dan dampaknya bisa dirasakan oleh pesantren dan masyarakat sekitarnya,

3. Tiga Elemen Kemandirian Pesantren

Dalam bacaan teknis, pondok pesantren hanya berisi santri, kiai dan masjid. Konsep ini kerap kali menghiasi narasi keilmuan tentang pesantren. walaupun terkesan melakukan simplifikasi terhadap dunia pesantren, tetapi peran dan fungsi tiga elemen tersebut mampu melahirkan banyak peran dimasyarakat. Bahkan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, perpaduan tiga elemen tersebut mampu mengoptimasi banyak sektor yang tidak mampu dilakukan oleh pendidikan di luar pesantren. kiai sebagai sub kontrol orang tua, masjid, asrama dan mushalla sebagai tempat melokalisir aktifitas santri diluar sekolah dan santri

sebagai kelompok masyarakat terdidik, baik secara keilmuan dan secara moral. Bahkan dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa sistem sorogan yang menjadi ciri khas belajar santri ini mampu mengoptimasi proses belajar yang tidak maksimal dilakukan di dalam kelas. Dengan kemasan modern, proses belajar sorogan ini kemudian dikenal dengan gaya belajar private class.[5]

Gambar 6.1
Elemen Utama Pesantren

Sumber: Dokumen BI

Menurut Gusdur, terdapat tiga elemen dasar yang mampu membentuk pondok pesantren sebagai bagian dari sebuah subkultur yangdikembangkan di masyarakat. *Pertama,* sistem dan nilai kepemimpinan pesantren yang tidak terkooptasi dan terkungkung oleh negara. *Kedua,* Sumber rujukan kitab-kitab rujukan umum yang senantiasa digunakan dari berbagai abad, dan *ketiga,* sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas. Dengan modal elemen tersebut, siapa pun akan menerima dan pasrah jika dikatakan kepadanya bahwa pondok pesantren memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Adalah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pondok pesantren

5 Abdurrahman Wahid, *Pesantren Masa Depan* dalam Marzuki Wahid (ed), *Pesantren Masa Depan,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 13

merupakan pilar utama dari bangsa ini. Terutama dalam peranannya mempertahankan keutuhan negara. Bahkan dalam skala yang besar, pesantren telag membuktikan dirinya untuk terlibat dalam kemerdekaan Indonesia di masa silam. Fakta sejarah ini tidak boleh didistorsi oleh upaya-upaya segelintir orang yang tidak menyukai akan kekuatan besar pondok pesantren.

Tiga elemen dasar dan pokok pondok pesantren ini saling terkait satu sama lain. Bahkan sudah tidak mungkin bisa dipisahkan. Akan tetapi, dalam bentuk dan tantangan internal pondok pesantren adalah melakukan konsolidasi terhadap masyarakat dan negara supaya dapat membangun sinergi dalam menjaga sub kultur dan kebudayaan asli nusantara ini. Sistem nilai yang secara khusus didasarkan pada nilai-nilai barakah, telah terbukti dalam melipat gandakan peran para santri di negara ini. Peran ini harus senatiasa dirawat dan dipertahankan guna memastikan bahwa pondok pesantren merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dari Indonesia.

Pertanyaannya, apakah eksistensi pesantren dengan tiga elemen dasarnya hingga saat ini masih diperhitungkan secara riil ?. Mengingat sosok otoritatif kiai dipondok pesantren saat ini sering dikerdilkan oleh beragam kalangan. Namun demikian, menurut hemat penulis, terdapat tiga alasa mengampa pondok pesantren tetap harus menopang bangsa ini. Pertama, hubungan batin dan emosional para kiai, santri dan masyarakat pesantren terhadap bangsa ini sangat besar. Kedua, Kontrol sosial masyarakat Indonesia yang notabenenya masing dilingkupi oleh pesantren masih berada pada figur kiai. Ketiga, Faktor historis kebangsaan masyarakat pesantren. Dalam konteks ini, diskursus kebangsaan Indoesia sedari awal terus berkelindan dengan pesantren, mulai soal perjuangan kemerdekaan, politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Bahkan motto dakwah masyarakat pesantren adalah apa yang bisa diberikan terhadap bangsa ini, bukan apa yang didapat dari bangsa ini.

Dalam perspektif pendidikan Nasional, pondok pesantren merupakan salah satu subsistem pendidikan yang memiliki karakteristik khusus. Dari aspek legalitas, keberadaan dan eksistensi pondok pesantren telah diakui oleh semangat Undang Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai salah satu ciri khas pesantren yang hingga saat ini relevan adalah tentang kemandirinnnya. Dan semangat kemandirian tersebut selaras dengan tujuan sistem pendidikan nasional.[6]

Urian tersebut di atas, semakin mematangkan alasan dan argumentasi kita bahwa semangat pesantren untuk terus menjadi bagian dari bangsa ini tidak pernah putus. Hal ini berbanding lurus dengan atensi pemerintah dalam bebrikan ruang dan angin segar kepada pesantren, khususnya dalam konteks regulasi. Kendatipun masih banya memiliki kekurangan, hubungan pesantren dengan pemerintah terus terbangun dengan baik. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, kementerian agama telah banyak memberikan program dan atensi serius terhadap pendidikan pesantren. baik dalam bentuk penyediaan sarana, tenaga kependidikan suplay finansial hingga dukungan regulasi yag diinisiasi oleh kementerian agama.

4. Kemandirian Sebagai Watak

Watak dan karakter dasar santri yang diyakini dan diketahui banyak kalangan adalah tentang cara pandang, cara berfikir, beriskpa dan berperilaku yang senantiasa memiliki pijakan dasar agama.[7] Hal ini disebabkan oleh kekuatan dorongan yang dimiliki oleh para santri untuk menselaraskan kepentingan pribadi dan masyarakat. Dominasi cara berifikir ini kemudian membuat

6 UU Sisdiknas No 20 Tahun 20003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.

7 Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Bahan Pelatihan:Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa),* (Jakarta: Kemendiknas, 2010), hlm. 2

para santri selalu survive untuk hidup dalam kondisi apapun dan dimanapun. Itulah sebabnya di pondok pesantren sering ditemukan sistem pendidikan yang mewajibkan santrinya untuk ditugaskan mengajar dan mengabdi kepada masyarakat di daerah terpencil. Tujuan dan maksudnya tiada lain, kecuali untuk melatih kemandirian danperjuangan.

Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial,budaya masyarakat, dan budaya bangsa.

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Maka menjadi sebuah keniscayaan bagi lembaga pendidikan baik pesantren maupun di luar pesantreen untuk terus mengembangakan kebudayaan serta nilai-nilai yang baik di masyarakat. Membentuk kepribadian dan martabat bangsa untuk lebih dapat memberikan peran dan contoh bagi genarasi. Selain itu, supaya pendidikan tidak hanya berputar pada dimensi intelektualitas saja.

Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada

zaman kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural. Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tercermin dari kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat

Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaatan berlalu lintas. Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua itu menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada: 1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; 2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; 3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; 5) ancaman disintegrasi bangsa; dan 6) melemahnya kemandirian bangsa.

5. Karakter Mandiri Santri

Munculnya konsep pendidikan karakter bangsa yang diinisiasi oleh pemerintahan SBY pada tahun 2004 silam merupakan konstribusi riil dalam dunia pendidikan, khususnya untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai dan karakter peserta didik. Oleh sebab itu, gerakan tentang pentingnya pendidikan karakter menjadi agenda besar pendidikan di masa depan. Namun perlu di imbangi dengan kemampuan dan skill yang bisa berguna untuk masyarakat di masa depan. Berikut ini adalah nilai-nilai Pendidikan karakter bangsa:[8]

1. Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi: Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras: Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis: Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya

8 Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa,* 9-10

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air: Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif; Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar Membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Intervensi Bank Indonesia dalam Kemandirian Pesantren

Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi pesantren sebagai bagian dari ekosistem rantai nilai halal, pada 2016 Bank Indonesia telah menyusun Roadmap Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Program pengembangan tersebut dirancang untuk mendukung unit usaha pesantren, sehingga dapat ikut berkontribusi dalam rantai nilai halal serta memiliki biaya dan harga yang efisien sebagai bagian dari program pengendalian inflasi nasional.

Gambar 6.2
Road Map Kemandirian Pesantren

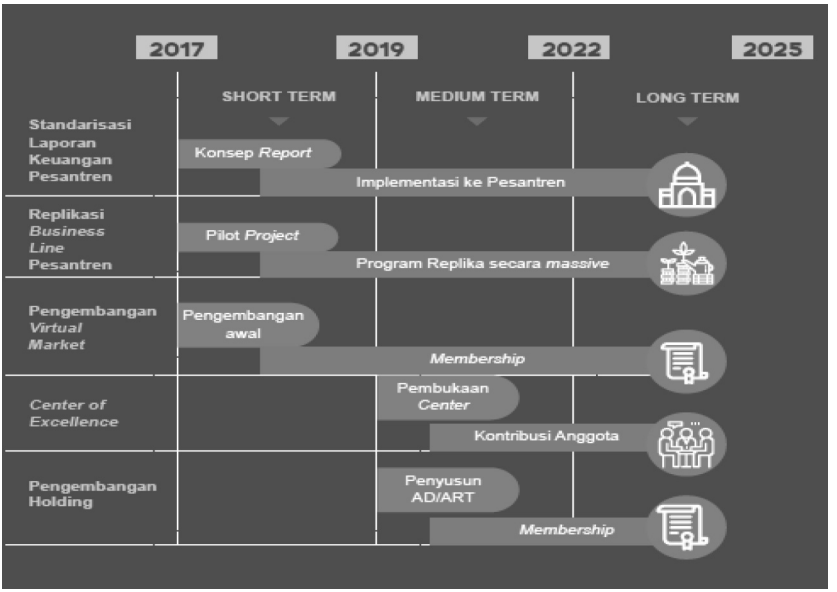

Sumber: Dokumen Bank Indonesia

Dalam konteks ini pula diperlukan adanya model yang sistematis dan melembaga dalam pengembangan ekonomi pesantren. Ada tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia. Pertama, pengembangan berbagai unit usaha. Kedua, mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antar pesantren melalui

penyediaan virtual market produk usaha pesantren sekaligus business matching. Ketiga, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren.

Program kemandirian pesantren yang ditempuh didasari oleh kekuatan pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia yaitu: [1] SDM pesantren yang memiliki jumlah dan ikatan komunitas yang kuat sehingga memiliki potensi sebagai sumber permintaan dan produksi berbagai kegiatan ekonomi. [2] Daya juang pesantren yang tinggi berpotensi besar apabila dikombinasikan dengan kemampuan kewirausahaan, dan konsep pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai bagian dari ibadah. Pesantren mandiri setidaknya memiliki usaha yang profesional guna mendukung operasional pesantren dan unit pendidikan belajar mengajar yang terarah dan sistematis. Sehingga dampak kehadiran pesantren secara lebih luas mampu menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran untuk menyejahterakan masyarakat. Melalui program pengembangan kemandirian pesantren diharapkan dapat mendorong pesantren sebagai penggerak utama dalam ekosistem halal value chain, selain sinergi dan linkage dengan UMKM dan korporasi yang juga perlu terus dilakukan untuk semakin memperkuat peran pesantren dalam pengembangan ekosistem halal value chain. Potensi ekonomi di pondok pesantren, dinilai cukup besar. Bila potensi ini dioptimalkan, maka bakal mampu mewujudkan kemandirian usaha di ponpes sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan wilayah sekitarnya. Ketiga program tersebut merupakan wujud dari pilar pertama dari 3 (tiga) strategi utama Blueprint Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional yaitu pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain). Ekosistem ini mengembangkan sektor usaha syariah melalui pemberdayaan pelaku usaha baik besar, UMKM, serta lembaga pesantren, termasuk pengembangan aspek kelembagaan

dan infrastruktur pendukungnya seperti pemberdayaan usaha pesantren dan pengembangan sektor usaha potensial seperti makanan, fashion dan pariwisata, serta virtual market.

B. Peningkatan Skill Santriprenuer dan Sosioprenuer

Salah satu unsur penting dalam pengembangan pesantrenprenuer adalah sumber daya manusia.[9] Keberadannya menjadi penentu *operating system* lainnya. Keberhasilan dan suksesi usaha sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.[10] Inti dari kualitas sumber daya manusia tersebut berhubungan dengan: [1] Soft Skill, yaitu sebuah kemampuan dan daya pikat pribadi, mulai dari komitmen, motivasi dan nilai-nilai yang dianutnya. [2] Hard Skill, yaitu kemampuan dalam melakukan dan menginisiasi sebuah pekerjaan dan tugas yang dibebankan, seperti kemampuan manajerial dan kemampuan teknis.[11]

Sumber daya manusia pesantrenprenuer sendiri merupakan individu atau sekelompok orang yang terlibat dalam pengelolaan usaha pondok pesantren, mulai dari manajer/direktur hingga tenaga terampil lainnya yang membidangi produksi dan pemasaran. Mulai dari pimpinan hingga karyawan terbawah sekalipun. Semua SDM tersebut merupakan sebuah aset dari usaha yang sedang dijalankan. Khusus dalam konteks pengembangan SDM pesantrenprenuer, terdapat tiga komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Create Value

Nilai merupakan daya dorong atau dasar yang abstrak bagi sebuah perilaku dan tindakan seseorang. Keberadaannya menjadi penuntun atau guiden bagi setiap individu, kelompok maupun institusi. Pondok

9 Aldo Redho Syam and Syamsul Arifin, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam Pendidikan Islam Di Era Globalisasi,* JAL-ASASIYYA: Journal Basic Of Education 02, no. 01, 2017, 1-12

10 Supriyadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2015), 03

11 M. Untung Manara, *Hard Skills dan Soft Skills pada Bagian Sumber Daya Manusia di Organisasi Industri,* Jurnal Psikologi Tabularasa Volume 9, NO.1, April 2014, 37-47

pesantren merupakan salah satu institusi yang kaya akan tata nilai. Kendatipun tidak tertulis, keberadaannya nampak nyata dan tercermin dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks perilaku bisnis masyarakat pesantren.

Tata nilai yang mengilhami perilaku masyarakat pesantren meliputi: [1] Kekeluargaan, yaitu menjadikan semua SDM yang terlibat sebagai sebuah keluarga besar yang saling mensupport, sharing skill dan berkompetisi secara sehat. [2] Gotong royong, yaitu perilaku positif komunitas usaha yang senantiasa melakukan kerjasama yang konstruktif. [3] Kemandirian, yaitu semangat atau optimisme proporsional yang senantiasa menganggap bahwa dirinya mampu dalam menjalankan tugas dan amanah. Mendahulukan prinsip melayani dari pada meminta dilayani.

Tiga nilai-nilai usaha yang menjadi pijakan perilaku dan pengambilan keputusan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari SDM pesantrenprenuer. Proses internalisasinya dilakukan melalui pendekatan personal, yaitu sebuah cara menanamkan nilai dengan melihat bahwa setiap manusia memiliki potensinya masing-masing dalam mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu, maka tugas pimpinan adalah menstimulus SDM nya untuk memperoleh produktifitas kerja yang optimal.

Gambar 6.2 :
Pesantrenprenuer Values

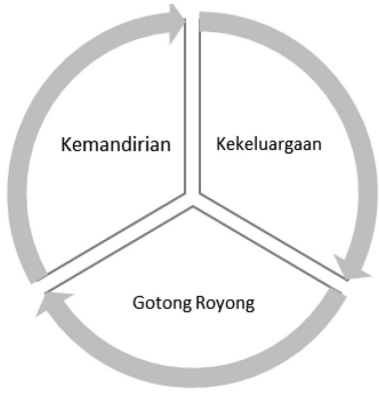

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

2. Proses Pengembangan SDM Pesantrenprenuer

Produktifitas bisnis sebagian besar dipacu oleh SDM yang terampil, kreatif dan berkomitmen. Penempatan setiap SDM harus disesuiakan dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki. Itulah sebabnya Milkovich mengatakan bahwa SDM organisasi, khususnya bisnis harus memiliki tiga kompetensi utama, yaitu:[12] [1] *Personal Characteristics*, yaitu kemampuan diri secara personal yang mendorong terciptanya sebuah produktifitas, seperti komitmen, loyalitas, kejujuran, ulet dna bertanggung jawab. [2] *Visionary*, yaitu kemampun dalam memproyeksi peluang masa depan, bekerja dengan target dan misi-misi khusus dalam organisasi. dan [3] *Organization Specific*, yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan arah dan kepentingan besar organisasi dan bisnis yang sedang dijalankan.

Kompetensi tersebut harus mampu dideteksi sebagai basis data dalam peroses pengembangan sumber daya manusia.[13] Dalam kontkes ini maka pengembangan sumber daya manusia pesantrenprenuer dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. *Screening*, yaitu sebuah cara dalam melakukan rekrutmen dan seleksi SDM yang akan terlibat dalam proses usaha pesantren. Langkah ini merupakan cara yang maklum dan familiar dilakukan di kalangan pondok pesantren. Namun demikian, proses ini dilakukan dengan tetap mempertimbangan kompetensi dan asas kebutuhan bagi bagi unit usaha.
2. *Staffing*, yaitu proses menempatkan sumber daya manusia yang telah disepakati melalui konsensus anggota yayasan. Proses ini awali dengan *penunjukan*, persetujuan personal dan pengangkatan secara resmi.
3. *Capacity Building*, yaitu langkah dalam upaya meningkatkan *kemampuan* dan proses penyesuaian lanjutan atas tugas-tugas yang

12 Benjamin Bukit, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogayakarta: ZAHR Publishing, 2017), 23

13 Kristiana Sri Utami, *Human Resources Competence and Performance Analisys of Batik Crafters at Pendowoharjo Batik Center*, Jurnal EBBANK, Vol.9 , No.2, Desember Tahun 2018, .1-10

telah dijalankan. Peningkatan kapasitas bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan kompetensi, pemberian tambahan tanggung jawab dan perluasan kewenangan.

4. *Evaluasi,* yaitu proses atau analisa kinerja untuk perbaikan. Langkah ini sekaligus menjadi instrumen kontrol dan pengendalian bagi berjalannya sebuah usaha dan bisnis, khususnya di pondok pesantren.

Tahapan dan proses pengembangan sumber daya manusian pesantrenprenuer ini bisa dilakukan oleh para manajer secara personal atau secara kelembagaan. Secara personal, maka manajer dapat melakukan sebagian atau keseluruhan dari langkah ini yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis. Secara kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan oleh bidang khusus secara internal yang bertugas untuk pengembangan sumber daya manusia. Namun dapat juga dilakukan oleh lembaga eksternal yang dipercaya untuk melakukan proses tersebut. Langkah dan proses pengembangan sumber daya manusia pesantrenprenuer ini dapat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.3:
HRD Pesantrenprenuer

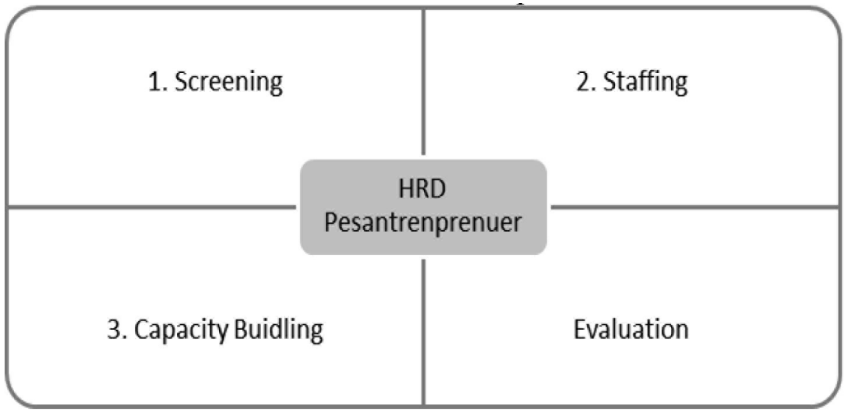

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

3. Support System

Sumber daya organisasi yang memiliki peranan strategis adalah money. Sebuah kebutuhan pembiayaan produksi dan operasional bisnis. Kendatipun bukan merupakan penentu eksistensi bisnis, tetapi pembiayaan berperan kuat dalam memutar siklus usaha menjadi lebih cepat dan optimal. Selain itu, support yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari tenaga ahli sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Kegagalan beberapa lembaga pondok pesantren dalam mengembangan usaha adalah kurangnya teanapa profesional dan pendamping yang kompeten. Sementara itu, keberhasilan pesantrenprenuer didukung oleh kompleksitas sistem yang mensupportnya secara intensif. Daya dukung finansial yang standart menjadi salah satu indikator capaian yang bagus dari proses pengembangan usaha pondok pesantren. Dengan demikian pesantrenprenuer dapat menjadi salah satu miniatur keberhasilan sistem dan desain pengembangan ekonomi pondok pesantren yang dikelola secara profesional.

Kebutuhan akan daya dukung tersebut secara sederhana meliputi: [1] Daya dukung Finansial, hal ini mencakup gaji standar dari reward kinerja dan capaian target. [2] Support Team Expert, yaitu daya dukung dari tenaga ahli, baik ahli perencanaan, analisa pasar, keuangan dan pengendalian. Support System SDM pesantrenprenuer ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.4 :
Support System Pesantrenprenuer

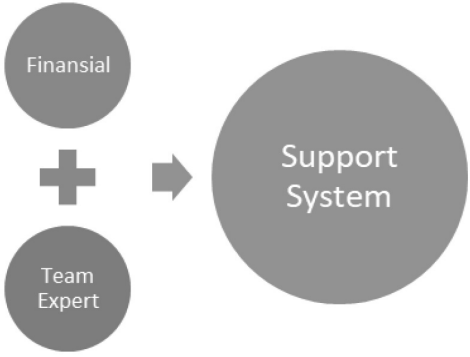

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

Human Resourcs Develepment atau pengembangan sumber daya manusia pesantrenprenuer merupakan bagian pertama dalam ekosistem pesantrenprenuer. Ia berfungsi sebagai pilar terdepan dalam menjalankan sistem bisnis dipondok pesantren. Selain menekankan pada desain sistem yang digunakan, HRD pesantrenprenuer ini menjadikan SDM lokal sebagai individu yang harus dilibatkan dan diberdayakan dalam proses bisnis. Sub-sistem yang menjadi bagian dari HRD pesantrenprenuer adalah [1] Nilai Local (Local Value), [2] Proses Pengembangan SDM , dan [3] Support System. Sistem HRD Pesantren dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.5:

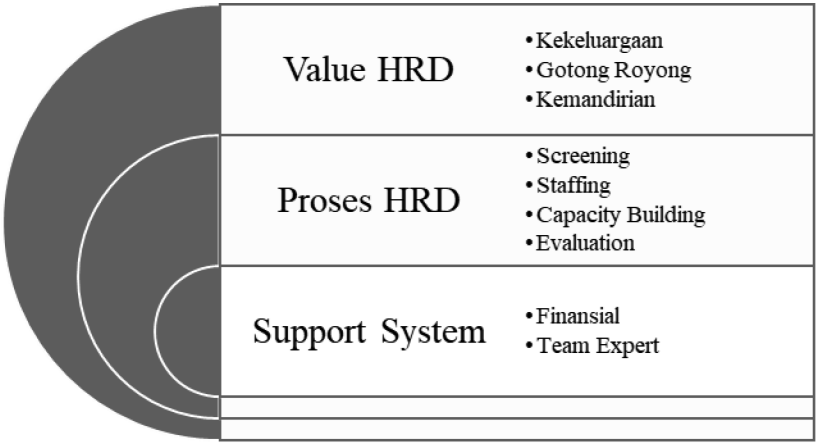

Desain HRD Pesantrenpreneur

C. Inovasi Teknologi Produksi Pesantrenprenuer

Produksi merupakan sebuah proses mencipatakan barang dan jasa untuk memeroleh benefit dan profit (nilai ekonomis).[14] Dalam prosesnya, produksi tidak hanya berkaitan dengan pembuatan atau konstruksi nilai suatu barang, tetapi berhubungan rangkaian awal produksi hingga pengembangan dan pengendaliannya. Membuat

14 Sickles, R., & Zelenyuk, *Measurement of Productivity and Efficiency: Theory and Practice.* Cambridge: Cambridge University Press, 2019, V

atau memproduksi merupakan salah satu dari rangkaian dari proses produksi. Karena produksi tidak hanya menekankan pada terwujdunya sebuah barang dan jasa, tetapi harus menjamin *feasibility*, *sustainability* dan kebermanfaatannya.[15] Berdasar pada konsep ini, maka desain proses produksi pesantrenprenuer memiliki rangkaian atau siklus produksi sebagai berikut:

1. Analisa Potensi

Melakoni dan menjalankan sebuah bisnis atau unit usaha memerlukan tingkat akurasi tertentu di dalam kemungkinan usaha tersebut bisa eksis atau gagal. Bisnis merupakan sains yang mempersyaratkan sebuah analisa yang terukur dan sistematis. Bisnis canvas, analisis SWOT, value chain dan teknik analisis lainnya merupakan perwujudan dari pemahaman bahwa bisnis harus ilmiah.

Salah satu faktor penting yang harus dianalisis sebuah menjalankan dan memulai produksi adalah: [1] Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi (*Need Assesment*). [2] Daya jangkau terhadap bahan dasar produksi, mulai keterjangkauan lokasi, biaya dan kapasitanya. [3] Ketersediaan SDM yang akan menjalankan dan mengendalikan usaha. [4] Peluang bisnis yang mungkin didapat dan resiko bisnis yang mungkin dihadapi, dan [5] Analisis kompetitor, hal ini guna untuk memastikan posisi produk barang dan jasa yang akan diproduksi.

Beberapa hal ini kerap kali luput dari jangkauan analisis para pebisnis pemula, terutama unit usaha yang dikembangkan oleh sebagian pondok pesantren yang gagal dalam mengembangkan usahanya. Pesantrenprenuer merupakan provokator bisnis berbasis pondok pesantren yang mengelola bisnis dengan pendekatan dan strategi bisnis yang profesional dan berkarakter. Profesional dicirikan dengan keterlibatan para tenaga kompeten dan proses pengembangan SDM yang intens, sementara berkarakter dicirikan

15 J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003), 161

dengan adanya pendekatan dan cara-cara *feasible* dan relevan dengan lingkungan usaha. Proses analisa usaha pesanstrenprenuer ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.6:
Analisa Pesantrenprenuer

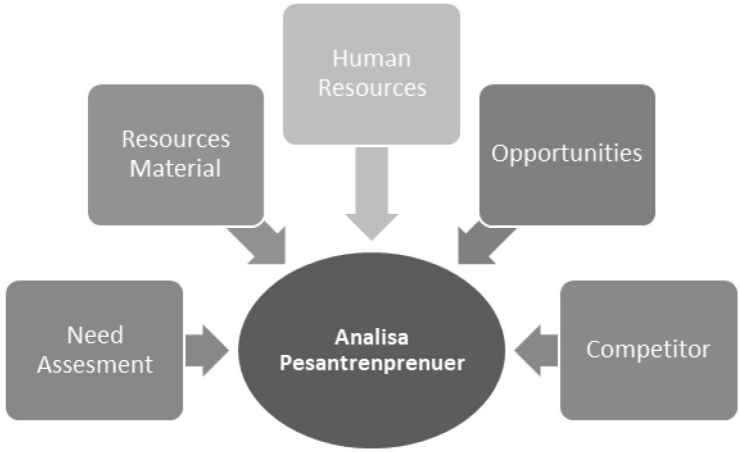

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

2. Supplier

Di antara unsur yang menjadi bagian dari proses produksi adalah supplay kebutuhan dasar. Suplay berhubungan penyedia dan ketersediaan bahan baku dari barang dan jasa yang akan diproduksi. Unsur ini merupakan bagian hulu dari produksi. Ikut serta dalam menentukan bertahan tidaknya sebuah produksi. Dalam proses ini yang harus dipastikan adalah kuantitas dan kapasitas bahan, harga bahan dan nilai tambah lainnya yang dapat mengurangi biaya produksi.

Idealnya, bahan baku produksi harus bersumber dari sumber daya lokal yang melimpah. Keuntungan dari kategori bahan baku lokal ini adalah [1] Pemanfaatan sumber daya lokal, [2] Mengurangi *cost transportation*. Dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang melimpah, maka akan memantik sektor produktif baru dan memunculkan kerjasama bisnis yang memberdayakan. Pada point

inilah pesantrenprenuer berbasis pengembangan potensi lokal menjadi relevan. Dimana, pesantrenprenuer menjunjung tinggi aspek pemberdayaan kepada masyarakat lokal

Berdasarkan motivasi tersebut, maka hubungan suplier dengan produsen bukan semata-mata *pure bussines* yang trasaksional, tetapi lebih pada mitra kerjasama yang saling membutuhkan. Basis ini sekaligus membuka peluang bagi produsen untuk memberikan fasilitas edukasi pada supplier dalam meningkatkan kapasitas diri. Langkah dan pola pesantrenprenuer dalam melakukan edukasi kemitraan ini semakian mempertegas keberpihakan pola pengembangan ekonomi pondok pesantren. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.7:
Relasi Suplier Vs Produsen Pesantrenprenuer

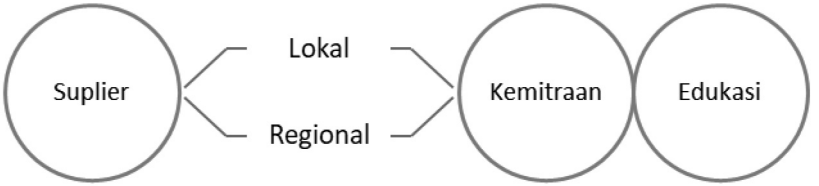

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

3. Produksi

Bagian terpenting dalam rantai produksi adalah proses pembuatan dan menciptakan sebuah produk. Idealnya, proses produksi dilakukan berpijak pada mewujudkan kualitas produk dan faktor pembeda antara produk satu dengan produk lainnya.[16] Faktor pembeda ini sekaligus akan menjadi kekhasan dan branding bagi produk yang dihasilkan.

Pola produksi pesantrenprenuer dapat dilakukan dalam dua bentuk: [1] Produsen, yaitu melakukan produksi sampai produk layak jual. [2] Psedo Produsen, yaitu melakukan produksi dari barang

16 Philip Kotler, Amtrong, *Strategi Marketing*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2005), 230

setengah jadi yang dihasilkan oleh produsen. Pola produksi kedua ini bisa dilakukan dalam bentuk rebranding dan repacking untuk dipasarkan. Model kedua ini harus juga diawali dengan langkah kerjasama, demi menjamin keberlangsungan bisnis yang dilakukan. Kedua pola ini masih menjadi bagian dari wilayah produksi yang harus sama-sama menciptakan kualitas produk yang berkarakter.

Keberadaan pondok pesantren yang tersebar diberbagai daerah sekaligus menjadi keuntungan tersendiri dalam menghasilkan produk yang berkarakter. Pasalnya setiap daerah memiliki sumber daya dan potensi bisnis yang juga berbeda. Proses produksi pesantrenprenuer ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 6.8:
Nilai Produksi Pesantrenprenuer

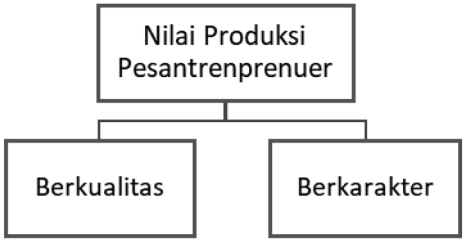

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

4. Inovasi dan pengembangan

Inovasi dan pengembangan merupakan upaya mencari nilai-nilai baru dalam sebuah produk.[17] Bisnis merupakan proses pertukaran atau transaksi dalam pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa. Perbedaan kebutuhan masing-masing individu kemudian meniscayakan terjadinya proses transaksi. Sementara standar kebutuhan setiap orang senantiasa mengalami perubahan. Barang dan jasa yang hari ini merupakan sebuah kebutuhan belum tentu di masa depan masih menjadi kebutuhan. Dalam kerangka perubahan dan perkembangan

17 Nanang Fattah, *Manajemen Stratejik Berbasis Nilai* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 18

standar kebutuhan dan hajat hidup inilah diperlukan sebuah inovasi dan pengembangan atas proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan.

Kehadiran teknologi menjadi salah satu alasan bagi terciptanya inovasi-inovasi baru dalam proses bisnis, baik berhubungan dengan infrastruktur, kualitas produk, standar kinerja, sistem pengendalian hingga arah besar organisasi. Dalam konteks ini, pesantrenpreneur memanfaatkan memontum perubahan yang terjadi diperbagai sektor untuk melakukan beragam inovasi dan pengembangan produk. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar dan selera umum masyarakat.

Bentuk inovasi dan pengembangan produk yang menjadi langkah dan strategi dipesantrenpreneur meliputi: [1] Inovasi kemasan, [2] Inovasi varian produk, [3] Inovasi infrastruktur, dan [4] Inovasi Standar layanan. Inovasi dan pengembangan produk ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.9
Inovasi dan Pengembangan Produk

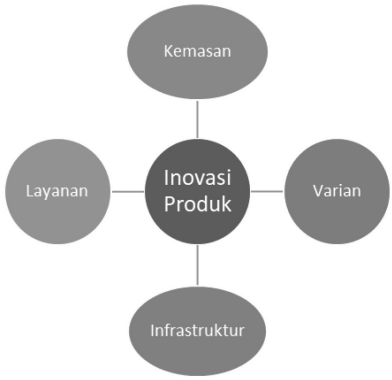

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

5. Pengendalian

Pengendalian dalam proses ini merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses yang direncanakan telah sesuai dengan standar yang berlaku.[18] Istilah pengendalian dalam diskursus

18 Fred R. David dan Forest R. David, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017),89

manajemen klasik lebih dikenal dengan evalusasi atau kontroling. Perbedaan penggunaan termenologi ini disebabkan oleh adanya sebuah asumsi bahwa fungsi kontroling ada memonitor dan menilai kinerja atau kualitas produk. Sementara pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang senantiasa terlibat dalam proses produksi dan aktifitas organisasi. Ia berfungsi dalam peningkatan kinerja sekaligus menekan laju organisasi.

Instrumen pesantrenpreneur dalam mengendaliakan aktifitas produksi dilakukan dalam bentuk aktif dan pasif. Dalam bentuk aktif, berarti membutuhkan keterlibatan SDM secara langsung dalam sistem kendali. Sementara pengendalian pasif bisa dilakukan dalam bentuk implementasi dan pengetatan pada standar operasional prosedur. SOP dikenal sebagai sistem kendali formal yang harus dijalankan oleh seluruh SDM dalam unit usaha. Termasuk dalam hal ini adalah SOP pengambilan keputusan yang berlaku di wilayah manajerial.

Dua bentuk pengendalian produksi, baik yang aktif maupun yang pasing merupakan satu kesatuan sistem yang harus menjadi pedoman. Selain sebagai persyaratan administratif pendirian unit usaha, SOP juga menjadi bagian dari standar mutu produk yang dihasilkan. Dua sistem kendali produksi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 6.10:
Bentuk pengendlian Pesantrenpreneur

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

Desain Proses produksi pesantrenpreneur merupakan cara dan pendekatan yang memadukan antara *pure bussines* dan *social enterpreneurship*. Menggabungkan antara kepentingan transaksional dengan kepentingan pemberdayaan sosial. Melalui imporovisasi pada berbagai sektor, seperti, pemberdayaan pada suplier, inovasi teknologi, sistem kendali dan pengembangan produk. Model proses produksi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.11:
Proses Produksi Pesantrenprenuer

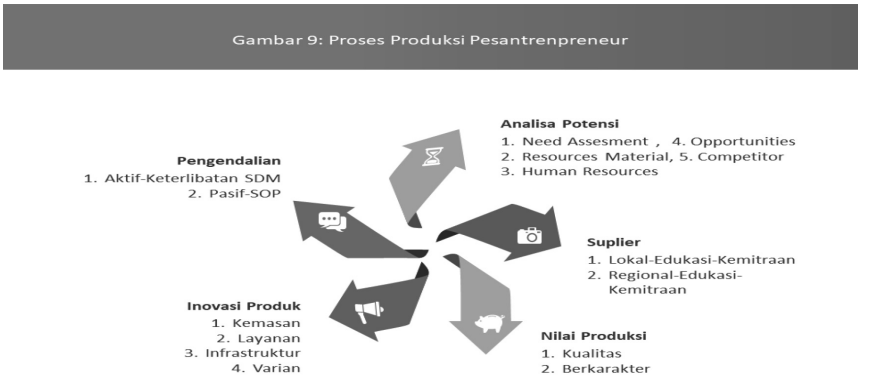

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

D. Ekspansi dan digitalisasi pasar

Pendekatan dan strategi pemasaran bagi sebuah produk sangat bergantung pada: [1] Jenis produk yang akan diperjual belikan, [2] Segmentasi konsumen, dan [3] Kanal pemasaran yang tersedia. Itulah sebabnya, secara teorites, pendekatan dan strategi pemasaran sangat beragam. Sehingga tidak ada strategi yang lebih baik dari pada yang lain untuk dipergunakan karena yang ada hanyalah strategi mana yang lebih tetap.[19] Namun demikian, desain strategi pemasaran yang

19 Muhammad Iffan, *Marketing Approach on Competitive Advantage of Online-Based Public Transportation,* Advances in Economics, Business and Management Research, volume 112, Tahun 2020, 87

relevan untuk dipergunakan dalam konteks usaha pondok pesantren (pesantrenpreneur) adalah sebagai berikut:

1. Open System Marketing

Sebuah strategi marketing yang memungkinkan pada produsen untuk menjual dan pemasarakan produksinya secara lansung atau melalui unit distribusi yang dimilikinya. Dalam konteks ini, terdapat beberapa langkah atau strategi marketing yang secara praktis dapat dilakukan, yaitu:

1. Segementasi, yaitu melakukan pemetaan atas sasaran penjualan yang akan dituju. Terutama market atau pasar lokal potensial dan berkelanjutan. Dalam usaha skala kecil, segmentasi pasar ini cukup dilakukan berdasarkan: [1] Kuantitas kebutuhannya atas produk, [2] Lokasi atau wilayah antar, dan [3] Kompetitor.
2. Even, yaitu sebuah strategi dalam mengenalkan dan mempromosikan barang. Target utama dari sebuah even memang pada popularitas produk, bukan pada selling atau penjualanya. Selian itu, strategi ini juga menargetkan terciptanya jaringan kerjasama antar pengusaha.
3. Media Sosial, yaitu sebuah strategi pemanfaatan kanal media sosial untuk melakukan promosi sekaligus penjualan langsung. Mengingat, aktifitas terbesar masyarakat modern adalah pada media sosial yang digunakan. Seperti, WA Bussines, Fanspags, IG dan FB.
4. Personal, yaitu sebuah strategi pemasaran yang secara langsung berhadapan dengan pembeli. Cara ini memang cenderung klasik, namun hingga saat ini masih relevan untuk dilakukan walaupun tidak disemua kondisi dan segmen.

Startegi marketing tidak hanya bertujuan untuk terciptanya transaksi jual beli secara langsung. Ada beberapa strategi yang berfungsi untuk sekedar mengenalkan produk dan menempatkan keterjualan produk sebagai tujuan yang kedua. Dalam posisi ini, hingga saat ini media sosial lebih pada fungsi promosi, bukan kepentingan transaksi. Namun demikian desain strategi pemasaran pesantrenpreneur ini telah

terbukti mampu meningkatkan volume transaksi yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan berkembang pesatnya pondok pesantren yang menerapkan sistem ini.

2. Closed System Marketing

Strategi pemasaran dengan sistem tertutup adalah pola pemasaran yang menyasar sigmen tertentu dengan sistem member atau kontrak mitra. Salah satu keuntungan dari model ini adapat stabilitas permintaan. Strategi pemasaran tertutup yang menjadi salah satu model dari pemasaran pesantrenpreneur adalah:

1. Multi Level Marketing, yaitu model pemasaran dengan mempersyaratkan keanggotaan. Selain itu, model ini juga ditandai dengan adanya reward dari penjualan yang dihasilkan. Walaupun status hukum dari model dan strategi ini masih menjadi perdebatan namun MLM masih menjadi salah satu alternatif yang efektif. Dengan catatan ada konsistensi kualitas dari produk yang diperjual belikan.
2. Sistem Mitra, yaitu model pemasaran dengan cara menciptakan keterikatan antara penjual dan pembeli untuk membeli produk dan jasa yang dihasilkan. Strategi ini banyak diterapkan oleh UKM dan koperasi pondok pesantren. Dalam istilah praktis, sistem mitra ini dikenal dengan langganan, hanya sanya, langganan tidak sampai memiliki keterikan tertulis, ia hanya memiliki keterikatan emosi. Dengan model ini, maka penjual akan lebih memperioritaskan penjualan produk pada mitra-mitra atau langganan tersebut.

Model atau strategi pemasaran pesantrenpreneur, baik yang sistem terbuka dan tertutup sama-sama memiliki akurasi nilai penjualan yang baik. Bagi wirausahawan yang memilih untuk mencari keuntungan yang fluktuatif, maka open system marekting merupakan solusinya yang lebih tepat. Tetapi bagi yang menghendaki terwujudnya profit yang stabil, maka closed system marketing akan lebih relevan. Gambarkan secara ringkas tentang desan strategi marketing pesantrenpreneur ini dapat dilihat melalui skema berikut:

Skema 6.11:
Strategi Marketing Pesantrenpreneur

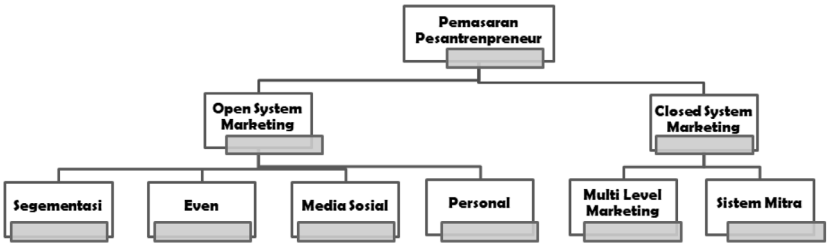

Sumber: Elaborasi Teoritis Peneliti

3. Platform Pasar Virtual

Pengembangan virtual market bertujuan agar unit usaha dari seluruh pondok pesantren dapat diintegrasikan ke dalam suatu ekosistem pasar yang efisien dengan empat prinsip, sebagaimana gambar di bawah :

Gambar 6.12:
Model Virtual Market

Sumber:Dukomen Bank Indonesia

Integrasi pasar ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jangkauan pasar, kesiapan pembayaran digital, peningkatan kompetisi, serta peningkatan produk unit usaha pesantren. Tahap awal pengembangan virtual market pesantren adalah penyediaan marketplace sebagai media pertukaran dan jual beli antar pesantren. Pengembangan aplikasi diawali market research kepada unit usaha di

pesantren untuk menilai kelayakan pengembangan aplikasi sekaligus mengidentifikasi jenis layanan yang dibutuhkan. Kedepan, virtual market pesantren diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh unit usaha pesantren dengan ketiga sektor utama rantai nilai halal yakni makanan dan fesyen, pertanian, serta pariwisata. Kegiatan ini menjadi bagian dari digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

***

Membangun ekonomi pesantren itu penting seiring dengan tantangan zamannya. Meski demikian tetap menjadi hal prinsip untuk selalu tetap kokoh keimanan dan ketulusan

Pratikno
Mensesneg 2014-2019
dan 2019-2024

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid, *Prolog dalam Marzuki Wahid, Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.

Abdurrahman Wahid, *Pesantren sebagai Subkultur*, dalam M. Dawam Rahardjo (Ed), *Pesantren dan Pembaruan*, Jakarta: LP3ES,1995.

Abdurrahman Wahid, *"Pesantren Masa Depan*" dalam Marzuki Wahid (ed), *Pesantren Masa Depan,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi, Essei Pesantren*, ed. Hairus Salim, Yogyakarta: LKIS, 2007.

A. Halim, *Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren*, dalam A. Halim et al., Manajemen Pesantren Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Abraham Maslow, *Toward a Phsycologhy of Being*, Princeton: Von Nostard,1968.

Abdul Jalil, *Spiritual Enterpreneurship:Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2013.

Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga – Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001

Abdul Munir Mulkan dkk*, Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

A.Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejara*, Bandung: Salamadani, 2009.

Abdul Mun'im DZ, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta: Setjen PBNU NU-Online, 2011.

Ali Hasan Siswanto, *Dialektika Tradisi NU di tengah arus modernisasi*, Surabaya : IQ Media Surabaya, 2014.

Ade Fajrul Muttaqin, *Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathan, Nahdlatut Tujjar: Tiga lembaga pendahulu lahirnya Nahdltul Ulama 1914-1929,* Jakarta: UI, 2008.

Arina Wulandari, *KH. Abdul Wahab Chasbullah: Pemikiran dan Peranannya dalam Taswirul Afkar (1914-1926 m)*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Abd al-Ra□ mān b. Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* Vol. 2 Damaskus: Maktabah al-Hidāyah, 2004.

Anwar, *Pendidikan Kecakapa Hidup*, Bandung: ALFABETA, 2015

Anwar. *Pendidkapan Hidup Konsep dan Aplikasi,* (Bandung: Alfabeta. 2004). *56*

Anggraeni, P. S. (2016) '*Politik Luar Negeri Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia Di Era Pemerintahan Joko Widodo*', eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 4(2).

Adrianto, *Modul Mental Wirausaha Santri Mukim APW Angkatan 12, Disampaikan pada kegiatan santri* APW angkatan 12 di Aula Daarul Hidayah, Bandung, Jawa Barat.

Aya Sofia, *Pedoman Penyelenggaraan Pusat Informasi Pesantren* Jakarta: Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren di Jakarta 1985/1986.

Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholis Madjid terhadap pendidikan islam tradisional*, Jakarta: Quantim Teaching , 2005.

Asep Saifuddin Chalim, *Urgensi Kepemimpinan Inovatif (Menyiapkan Sekolah Bernuansa Islam Tetap Eksis di Era Globalisasi)* Surabaya: Ponpes Jagad 'Alimussirry, 2012Moh. Ahyadi, "*Pesantren, Kiai, dan Tarekat: Studi tentang Peran Kiai di Pesantren dan Tarekat",* dalam Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2001.

Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 2003.

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos. 2002.

Arief, M. *A Theoretical Review of Entrepreneurship: The Effect of Religiosity to the Performance. In International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM)* (pp. 337–345). Sanur, Bali, 2013.

Audretsch, D. B., Boente, W., & Tamvada, J. P. (2007). *Religion and entrepreneurship. Jena Economic Research Papers.* Retrieved from https:// ideas.repec.org/p/jrp/jrpwrp/2007-075.htm

Ahmad Syakur, *Optimalisasi Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*,, dalam jurnal Iqtishoduna, Vol. 5, No. 3, Thn. 2009, 03

Afzalul Rahman, Muhammad Is Trader Bandung; Pustaka Iqra', 2010.

Arna Asna Annisa, *Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, tahun 2019

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Aldo Redho Syam and Syamsul Arifin, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam Pendidikan Islam Di Era Globalisasi,* JAL-ASASIYYA: Journal Basic Of Education 02, no. 01, 2017, 1-12

Anggi Septian Andika Putra, *Khofifah Sampaikan Ekonomi Digital dan NahdlatutTujjar*: Hari Santri Nasional Tulungagung, JawaPos 7 Juli 2019.

Azis, *Pendidikan Islam dan Entrepreneurship.* aL Murabbi,2016.

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1994.

Bungaran Saragih, *Pembangunan Sistem Agribisnis di Indonesia dan Peranan Public Relation*, Seminar *Peranan Public Relation dalam Pembangunan Pertanian*, Bogor 19 April 2001, Program Pascasarjana PS. KMP-IPB, IPB Bogor.

Bernadhetta Vivi Kristiana, *Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM,* Performa: Media Ilmiah Teknik Industri (2020) Vol. 19, No.2: 113-120

Bernadhetta Vivi Kristiana, *Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM,* Performa: Media Ilmiah Teknik Industri Vol. 19, No. 2, 2020.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Bahan Pelatihan:Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa),* Jakarta: Kemendiknas, 2010.

Benjamin Bukit, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogayakarta: ZAHR Publishing, 2017.

BAPPENAS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2018-2024*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,2018.

Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama.*

Carswell, Peter, & Rolland, D. *Religion and entrepreneurship in New Zealand. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 1(2), 164–174.2007.

Djamaludin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 1998

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam: di Indonesia 1900-1942,* Jakarta: LP3ES, Anggota IKAPI, 1990.

Depag RI , *Al-qur'an Terjemah*, Jakarta: Depag RI, 2002.

Direktorat Pendidikan, *Model pendidikan Kecakapan Hidup,* Depdiknas, 2013.

Edgar H. Schein, *Organizational Culture and Leadership*, San Fransisco: Jossey-Bass, 1997.

Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Galbraith, C. S., & Galbraith, D. M. *An empirical note on entrepreneurial activity, intrinsic religiosity and economic growth.* Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1(2).2007.

Iannaccone, L. R. (1998). Introduction to the Economics of Religion. Journal of Economic Literature, 36(3), 1465–1495.

Fachroeddin Alkhahiri, *Kunci Tarikh Islam, dalam: Risalah Politik A. Hassan*, *Tiar Anwar Bachtiar (ed)*, Jakarta: Pembela Islam Media, 2013.

Fatrika, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wirausaha Mahasiswa Dengan Teknik SEM*. Jurnal Matematika UNAND Vol. 1 No. 2 Hal. 5-12. ISSN 2303.2910

Fred R. David dan Forest R. David, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Greag Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta,1997.

Husain, S. B. *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Hidayat, T*Peran Pesantren dalam Mengusir Segala Bentuk Penjajahan*. Diambil 23 Mei 2019, dari Republika Online website: https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/10/17/of6exr396-peran-pesantren-dalam-mengusir-segala-bentuk-penjajahan.2016, Oktober 17).

Haedani, H. Amin dkk, *Panorama, Pesantren Dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka, 2004.

Heri Pratikto, *Prilaku Konsumsi Berbasis Motivasi Spiritual Islam Guru-Guru Mata Pelajaran Ekonomi Pada SMA/MA*, Malang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun 15 No. 1. Maret 2010.

Heri Pratikno, *"Motivasi Spiritual Dan Budaya Sekolah Berpengaruh Terhadap Kineja Profesional Dan Prilaku Konsumsi Guru Ekonomi"*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 9 No. 1 April 2012, 126

Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, dkk*, KH. Abdul Wahab Hasbullah: Perintis, Pendiri, dan Penggerak NU*, Jakarta: Panitia Penulisan Buku sejarah, 1999.

Hamzah Sahal, www.nu.or.id/post/read/76152/nu-ekonomi-dan-politik-kemaslahatan dikutip pada tanggal 16 Juni 2020.

Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21,* Jakarta: Pustaka al-Husna. 1988.

Hermansyah Karir. (2020, September). Mendidik Santri Bermental Wirausaha. Medan Bisnis Daily. Retrieved from http://www.medanbisnisdaily. com/news/read/2018/09/12/358997/mendidik_santri_bermental_ wirausaha/

Husnurrosyidah. *E-Marketplace UMKM Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Islam*. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 7 (2), 224–239.2019.

Halim, Rr.Suhartini, dkk, *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta; Pustaka Pesantren Kelompok Penerbit LKiS, 2005.

Imelda Merry Melyanti, Pola Kemitraan Pemerintah dan Swastadalam Program Bank Sapah di Pasar Baru Kota Proolinggo, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Punlik ISSN 2303 – 341X.

Jarkom Fatwa, *Sekilas Nahdlatut Tujjar,* Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004.

Jamal Ma□ mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan spirit Tashwirul afkar, Nahdlatul wathan, dan Nahdlatut Tujjar*.

John L Esposito, *Ensiklopedia Oxford dunia Islam modern jilid 2*, Mizan, Bandung, 2001

John Lay Thompson. *A strategic perspective of entrepreneurship*. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 5(6), 1999.

James L. Price, *Handbook of Organizational Measurement*, London: DC. Health and Company, 1972.

J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003.

Kiki Ahmad Zakiyudin. *Model Pengelolaan Hutan Pesantren*. Institut Pertanian Bogor. Bogor, 2012.

Karel Steenbrink,. P*esantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern,* terjemahan dari Recente Ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderricht, Jakarta: LP3ES, 1986.

Kasmir*, Kewirausahaan,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Potensi Indonesia Menjadi pusat logistik Halal Dunia, INSIGHT I Edisi Kesepuluh I Maret 2020, h. 11

Kristiana Sri Utami, *Human Resources Competence and Performance Analisys of Batik Crafters at Pendowoharjo Batik Center*, Jurnal EBBANK , Vol.9 , No.2, Desember Tahun 2018.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1990

Lena Ellitan dan Lina Anatan, *Manajemen Inovasi: Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Lugina, U. *Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat*. Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 2017, 4(1), 53–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.1227465.

Muhammad Yafiz, *Argumen Integrasi Islam & Ekonomi,* Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.

Muttaqin, R. *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)*. JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2011.

Mahpuddin Noor, *Potret Dunia Pesantren*. Bandung: Humaniora, 2006.

Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Muslimin, *Menguatkan kembali Semangat Nahdlatut Tujjar*, http://www.nu.or.id/post/read/92301/menguatkan-kembali-semangat-nahdlatut-tujjar, 30 Juni 2020

Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Marzuki Wahid, et al., *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001

Martin Hanadoko, *Motivasi (Daya Penggerak Tingkah Laku),* Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Muhammad Zaini*, Strategi Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Usaha Kecil Masyarakat"* Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 4, No. 1 2014.

Moh. Rifa'i*, Manajemen Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Kualitas Layanan Pendidikan*, Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan.

Muhammad Abdul Nafi' *Model Pengembangan Life Skill Di Pondok Pesantren AlMas'udiyyah Jimbaran Bandungan Semarang*" Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014.

Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya: 2004.

Muhamad Murtadlo, *Gagasan Pengembangan Pendidikan Pesantren Berbasis Maritim Di Banten,* EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 18(1), 2020.

M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Moedjanto*, Indonesia abad ke 20 dari kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,* BPFE, Yogyakarta, 2000.

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Masyarakat Ekonomi Syariah, https://www.ekonomisyariah.org/, terakhir di akses 12 September 2021

Manfred Ziemik, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial* ter. Butche B Soendjoyo Jakarta: P3M Cet. I. 1986.

Muhammad Iffan, *Marketing Approach on Competitive Advantage of Online-Based Public Transportation,* Advances in Economics, Business and Management Research, volume 112, Tahun 2020.

M. Untung Manara, *Hard Skills dan Soft Skills pada Bagian Sumber Daya Manusia di Organisasi Industri,* Jurnal Psikologi Tabularasa Volume 9, NO.1, April 2014, 37-47

Nanang Fattah, *Manajemen Stratejik Berbasis Nilai* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Nainggolan, P. P. (2015) '*Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo'*, Jurnal Politica Vol. 6 No. 2 Agustus 2015., 6(2)

Nursyam, *Indikator dan Pengukuran Pengembangan SDM di Pesantren*, dalam A. Halim et. al., *Manajemen Pesantren,* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Nur Syam, *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren* dalam A. Halim, *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Nadzir, M. *Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren*. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 2015.

Nurcholish Madjid. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: P3M, 1985.

Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

PP Al-Fatah, *Pesantren Dalam Sistem Pendidikan,* blogspot.com/2011/02/pesantren-dalam-sistem pendidikan, (Diakses pada tanggal, 13 Oktober 2020)

PP. Masyarakat Ekonomi Syariah, (Annual Report tahun 2019 Memperkuat Sinergi Bersama Menebar Kemaslahatan)

PP. Masyarakat Ekonomi Syariah, Annual Report tahun 2019.

Pratama, T. A. (2015) '*Kebijakan Poros Maritim Dunia Di Tengah Dinamika Asia Pasifik Saat Ini'*, Paskas. Available at: https://www.academia.edu/10062323

Philip Kotler, Amtrong, *Strategi Marketing*, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2005.

Suwendi, *Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pesantren: Beberapa Catatan*, dalam Marzuki Wahid, Suwendi dan Saefuddin Zuhri (peny.), Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia; Suatu Pengantar,* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Syed M. Naquib Al-Attas, Islam: *The Concept of Religion and The Foundation of Ethics and Morality*, IBFIM, Kuala Lumpur, 2013.

Suismanto, *Menelusuri Jejak Pesantren,* Yogyakarta: Alief Press,2004.

Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994

Sopiah dan Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.

Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori dan Praktek,* Yogyakarta: Graha Guru, 2004.

Suryana*, Kewirausahaan,* PT Salemba Emban Patria, Jakarta, 2003.

Soekartawi, *Analisis Usahatani*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Suwendi. *Penguatan Peran Pesantren. Nadhatul Ulama*. Retrieved from https://www.nu.or.id/post/read/76057/penguatan-peranpesantren.2019.

Suryana. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empa, 2006.

Saputra Mundzier, Haedari Amin, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2005.

Sudarminto, *Transformasi Pendidikan Memasuki Milineum*, Jogjakarta: Kanisius, 2000Saputra Mundzier, Haedari Amin, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2005.

Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokarsi ke lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sickles, R., & Zelenyuk, Measurement of Productivity and Efficiency: Theory

Ronald Duska, *Contemporary Reflections on Business Etchics*, Springer, Dordrecht, 2007.

Syamsul Ma'arif, dkk, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren,* Jakarta: Pustaka LP3S, 1999.

Supriyadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2015.

Sulthon dan M. Khusnuridlo, Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspekti Global, Yogyakarta: LaksBangPRESSindo, 2006.

Rr. Suhartini, *Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren*, dalam A. Halim et al., *Manajeman Pondok Pesantren* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Rizal Muttaqin, *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren*,

Rudy Haryanto, "Menumbuhkan Semangat Wirausaha Menuju Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Pesantren (Studi Kasus di PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan)" Nuansa, Vol. 14, No. 1 (Januari – Juni, 2017), 188-189.

Rahmadi, A. N., & Heryanto, B. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri.* Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 1(2), 2016.

Robbins, *Teori Organisasi Behaviour,* (New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1991.

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan,1992.

Tim Redaksi, " Dari Modal Rp 13 Juta, BMT Sidogiri Kini Beraset Rp 494 Miliar" https://duta.co/dari-modal-rp-13-juta-bmt-sidogiri-kini-beraset-rp-494-miliar/; diakses 16 April 2019

Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Valliere, D. (2008). *Exploring Buddhist influence on the entrepreneurial decision. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 14(3), 172– 191.

Umi Masfiah*, Pemikiran Pembaharuan K.H. Abdul Wahab Hasbullah terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama (NU)",* Jurnal Ihya „Ulum Al-din vol. 18 No 12 2016.

Ulfa Hasanah, *Upaya Pondok Pesantren Dalam Mengembangkan Life Skill Santri Di Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo*" Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019.

UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem pendidikan Nasional.*

Wahjosumidjo, *Kepemiminan dan Motivasi,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Winardi, Manajemen Perubahan, Jakarta: Kencana, 2005.

William Bridges, *Managing Transitions: Making the Most of Change*, Cambridge: Perseus Publishing Services, 2003.

Wibowo, *Manajemen Perubahan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Wasid Mansyur, *Biografi Kiai Ahmad Dahlan : Aktifis Pergerakan dan Pembela Ajaran Aswaja*, Surabaya : Pustaka Idea, 2015.

Widodo, Slamet. 2010. *Pengembangan Potensi Agribisnis dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Pesantren; Kajian Ekonomi dan Sosiokultural.* Embryo. Volume 7. Nomor 2.

W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.

Wibowo, M. *Pembelajaran Kewirausahaan Dan Minat Wirausaha Lulusan SMK.* Jurnal Ekplanasi. Volume 6 . Nomor 2 . Edisi September 2011.

Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif,* Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren studi tentang Pandangan Hidup Kiai* Jakarta: LP3ES, 1994.

Zainal Abidin,"Implementasi Pendidikan Life Skill Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi".Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam Volume VI No. 1: 162-173 (September 2014)

Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

PROFIL PENULIS

H. M Arif Rahman adalah seorang intelektual dan aktifis organisasi dan berjuang di Gerakan 98. Dalam pengalaman organisasinya pernah menjadi ketua umu PC PMII jakarta Barat, KNPI di Jakarta dan menjabat sebagai sekretaris majelis pimpinan nasional ormas pemuda Pancasila. Selain sebagai pengusaha, sejak Juli 2020 lalu diangkat sebagai staff khusus wakil presiden Republik Indonesia. Pengalamannya sebagai aktifis Gerakan tidak diragukan lagi, bahkan mantan mahasiswa Universitas Tarumanegara ini rela pagi sore siang dan malam membersamai kawan dan sahabat Gerakan di era reformasi 97, 98 hingga 99. Sebagai seorang yang besar dan lahir dari dunia pesantren, dirinya terpanggil untuk turut serta membersamai dan memikirkan pesantren. Menurutnya Gerakan pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan ekonomi pesantren, adalah bagian dari fokus utama, apalagi

pasca pandemik covid 19 ini. Penulis juga sangat bersyukur dengan terbitnya regulasi dalam bentuk perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, menjadi semangat baru dan merupakan bukti kongkrit pembelaan dan kepedulian presiden dan wakil presiden.

RMI NU

LPNU

LEMBAGA PEREKONOMIAN
NAHDLOTUL 'ULAMA

HPN

HIMPUNAN PENGUSAHA NAHDLIYIN

imtiyaz